



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

### BAB I

#### PENDAHULUAN

##### 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023 menyajikan informasi yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), di mana laporan tersebut merupakan konsolidasi dari seluruh Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 khususnya Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru disusun untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dari *stakeholders* yang relevan antara lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Laporan keuangan berisikan posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru selama Tahun Anggaran 2023 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan pada laporan keuangan antara lain mengenai Pendapatan-LRA, Pendapatan-LO, Belanja, Beban, Transfer, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas, dan Arus Kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memahami tentang:

- a. Kemampuan penerimaan dari pendapatan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya terhadap anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan Pemerintah Kota Pekanbaru serta hasil yang telah dicapai;
- d. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mendanai berbagai kegiatan yang telah dianggarkan;



## **PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

---

- e. Posisi keuangan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan berupa pajak daerah , retribusi daerah dan penerimaan lainnya serta kondisi Pemerintah Kota Pekanbaru akibat dari pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2023; dan
- f. Informasi tentang perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilaksanakan selama periode pelaporan.

#### **1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Keuangan Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan



## **PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

---

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);



## **PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

---

- s. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- t. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem informasi Pemerintah Daerah;
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1781);
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 972);
- cc. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tanggal 05 Oktober 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- dd. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- ee. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
- ff. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023;
- gg. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2023);
- hh. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023;



## **PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

---

- ii. Peraturan Walikota No 112 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023;
- jj. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan;
- kk. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2022;
- ll. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 382 Tahun 2023 tentang Standarisasi Harga Barang /Jasa Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
- mm. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 112 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023;
- nn. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023;
- oo. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 105 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kota Pekanbaru;
- pp. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru No 105 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru;
- qq. Peraturan Walikota No 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023;
- rr. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 101 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023;

### **1.3. SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru disajikan dengan urutan sebagai berikut:

#### **Bab I PENDAHULUAN**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

#### **Bab II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

### **Bab III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru
- 3.2. Pencapaian Kinerja Program
- 3.3. Mandatory Spending Tahun Anggaran 2023
- 3.4. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pencapaian Target Pendapatan Tahun Anggaran 2023
- 3.5. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pencapaian Kinerja Program Tahun Anggaran 2023

### **Bab IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
- 4.2. Basis Akuntansi
- 4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual

### **Bab V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

- 5.1. Penjelasan Masing-Masing Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Penjelasan Masing-masing Pos Neraca
- 5.4. Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Operasional
- 5.5. Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Arus Kas
- 5.6. Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Perubahan Ekuitas

### **Bab VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**

- 6.1. Keputusan Mahkamah Agung atas Banding Walikota Pekanbaru Terhadap Gugatan Koleman, dkk.
- 6.2. Status Tanah dan Bangunan berupa Konstruksi dalam Pengerjaan Pasar Cik Puan Jalan Tuanku Tambusai Kecamatan Sukajadi Pekanbaru
- 6.3. Informasi Penyertaan Modal
- 6.4. Gugatan Perdata Oleh PT. Multi Inti Guna
- 6.5. Dampak Pasca Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Pendapatan Yang Bersumber dari Kerjasama BGS Peremajaan Beberapa Pasar
- 6.6. Penjelasan Tentang Pengelolaan Tanah Dengan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Milik Pemerintah Kota Pekanbaru

### **Bab VII PENUTUP**



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

### BAB II

#### EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

##### 2.1. EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro merupakan cerminan kinerja perekonomian yang merupakan bagian dari proses pembangunan secara umum, khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Kondisi ekonomi makro Kota Pekanbaru Tahun 2018 – 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

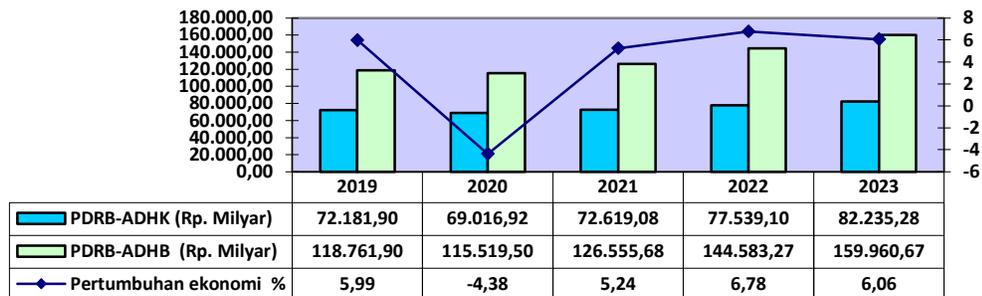
##### 2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan ekonomi Kota Pekanbaru dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari tren kenaikan PDRB Kota Pekanbaru dari tahun-tahun sebelumnya. PDRB Kota Pekanbaru pada Tahun 2023 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai 159,96 miliar rupiah apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 144,58 miliar rupiah. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 82.235,28 Miliar Rupiah. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Pekanbaru seri 2010 pada tahun 2023 sebesar 6,06%.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru mencatat pertumbuhan ekonomi 2023 mencapai 6,06%, lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang mengalami kontraksi 0,72%. Di Kota Pekanbaru, perekonomian wilayah ini utamanya ditopang oleh Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Industri Pengolahan. Dari seluruh sektor, sektor Konstruksi mengalami laju pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 16,66%, sedangkan pertumbuhan paling lambat terjadi pada sektor pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar minus 5,59%.

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2019 – 2023 maupun Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2019 - 2023 serta Perkembangan Perekonomian (2019 – 2023) tertuang pada grafik berikut:

Grafik 2.1. Pertumbuhan PDRB Kota Pekanbaru Tahun 2019 – 2023



Sumber : BPS Kota Pekanbaru. 2024. Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2024.  
Catatan : PDRB dalam miliar rupiah, pertumbuhan dalam %



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dapat tercermin dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebagai hasil dari bekerjanya seluruh sektor lapangan usaha akibat dari adanya intervensi program maupun kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah.

Meskipun sumbangan pengeluaran pemerintah dalam produk domestic bruto regional (PDRB) Kota Pekanbaru relative kecil yakni 6,79 persen pada Tahun 2023 namun diharapkan peran pemerintah dalam pelaksanaan program prioritas dan penetapan kebijakan dalam berbagai sektor mampu mendorong dan memberikan dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Pekanbaru.

Pada Tahun 2023, Pemerintah Kota Pekanbaru dalam rencana kerjanya telah menetapkan target-target indikator makro sebagai berikut :

**Tabel 2.1. Target Indikator Makro Kota Pekanbaru Tahun 2023**

No	Indikator Makro	Target	Realisasi
1.	Pertumbuhan Ekonomi	4,73 – 5,51 %	6,06 %
2.	Tingkat Kemiskinan	2,33 – 2,63 %	3,16 %
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,17 – 8,20 %	6,20 %
4.	Indeks Pembangunan Manusia	82,24 – 82,40	82,38

Sumber : RKPD Kota Pekanbaru dan BPS Kota Pekanbaru Tahun 2023

### Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru pada Tahun 2023 mengalami perlambatan dibandingkan dengan Tahun 2022 yakni dari 6,78 persen menjadi 6,06 persen. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru selama lima tahun terakhir cukup fluktuatif dimana trend positif ditunjukkan selama 2 tahun yakni tahun 2021 dan tahun 2022 pemulihan dari pandemi Covid-19 tahun 2020 seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekanbaru Tahun 2019 – 2023**



Sumber : BPS, Kota Pekanbaru Dalam Angka 2024



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

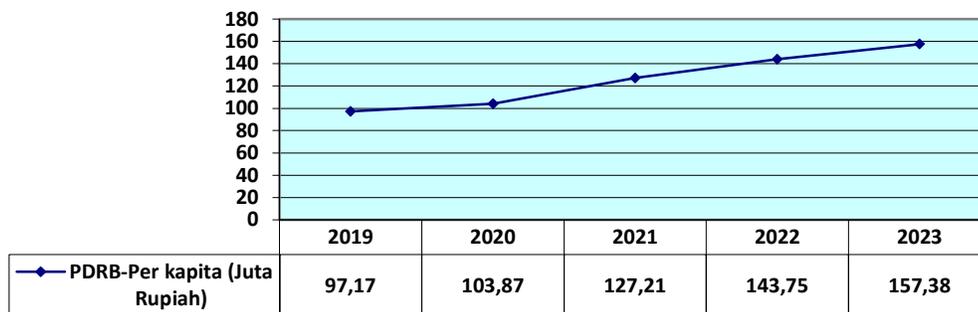
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

### 2.1.2. PDRB Per Kapita Kota Pekanbaru

PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka wilayah tersebut semakin makmur.

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita ADHB menunjukkan nilai PDRB per kepala atau satu orang penduduk. Pada Tahun 2023, PDRB per kapita Kota Pekanbaru sebesar 157,38 juta rupiah.

Grafik 2.2. PDRB per Kapita Kota Pekanbaru Tahun 2019 – 2023



Sumber: BPS Kota Pekanbaru. 2024. Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2023.

Tabel 2.2 Data Ekonomi Makro Tahun 2021 s.d. 2023

No	Jenis	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Angka Pengangguran	8,56%	8,29%	6,40%	6,20%
2	Gini Rasio	0,35%	0,39%	0,40%	0,39%
3	I P M	81,32%	81,58%	82,06%	82,38%
4	Angka Kemiskinan	2,62%	2,83%	3,06%	3,16%

Sumber : BPS Kota Pekanbaru. 2024. Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2023.

#### 2.1.2.1 Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dan penduduk yang berusaha mendapatkan pekerjaan, dimana ketersediaan lapangan pekerjaan lebih kecil dari pencari kerja sehingga tidak mampu menampung pencari kerja. TPT didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan, atau yang sedang mempersiapkan usaha, atau yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, atau mereka yang



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pekanbaru periode 2021 – 2023 mengalami penurunan setelah pada pada tahun 2020 mengalami peningkatan disebabkan terjadinya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi aktivitas perekonomian maupun kehidupan sosial masyarakat secara global tidak terkecuali di Kota Pekanbaru. Seiring dengan menurunnya trend pandemi Covid-19 yang memungkinkan denyut perekonomian dan aktivitas sosial masyarakat berangsur pulih maka memberikan dampak positif dalam penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pekanbaru seperti pada tabel berikut :

**Tabel 2.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pekanbaru Tahun 2019 – 2023**

Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Pekanbaru	7,74	8,56	8,29	6,4	6,2

Sumber : BPS Kota Pekanbaru Tahun 2023

Fenomena pengangguran berpendidikan merupakan masalah yang dihadapi Indonesia. Banyak penduduk yang sudah menamatkan pendidikan tingkat SMA/Sederajat mencari lowongan pekerjaan. Tingkat pendidikan sarjana turut berkontribusi dalam persaingan dunia kerja. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus menghasilkan profil pengangguran berdasarkan pendidikan yang ditamatkan. Tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023 menunjukkan bahwa urutan pertama didominasi oleh penduduk berpendidikan Diploma I/II/III. Kemudian urutan kedua dan ketiga adalah pendidikan SMA Umum dan Universitas.

Pada tahun 2023, angka TPT Diploma I/II/III di Kota Pekanbaru adalah sebesar 9,71 persen, kemudian diikuti oleh pendidikan SMA Umum sebesar 6,86 persen dan pendidikan Universitas sebesar 6,85 persen. Tingginya TPT penduduk dengan tamatan SMA, Diploma dan Sarjana ini menjadi catatan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk dapat meningkatkan serta membuka lapangan kerja bagi kelompok tersebut. Harapannya lapangan kerja baru bagi mereka di daerahnya sendiri dapat menurunkan angka urbanisasi dan turut serta dalam pembangunan di daerahnya.

### 2.1.2.2 GINI RASIO

Indeks Gini (*Gini Ratio*) yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Dengan klasifikasi Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti kesetaraan sempurna, dengan deskripsi dimana setiap orang memiliki pendapatan yang sama persis, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketidaksetaraan sempurna atau ketimpangan benar-benar sempurna terjadi, dengan deskripsi dimana satu orang memiliki semua pendapatan, sementara orang lain memiliki nol pendapatan. Di



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tahun 2023 Gini Rasio Kota Pekanbaru berada diangka 0,392% lebih kecil dibandingkan dengan Gini Rasio tahun 2022 sebesar 0,397%, berarti pada tahun 2023 terjadi peningkatan kesetaraan pendapatan penduduk Kota Pekanbaru dibandingkan tahun 2022.

### 2.1.2.3 IPM ( Indeks Pembangunan Manusia )

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendidikan, kesehatan dan pendapatan. IPM dibentuk dari tiga dimensi yaitu (1) Pendidikan yang diukur dari Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah, (2) Kesehatan diukur dari Usia Harapan Hidup dan (3) Standar Hidup Layak diukur dari pengeluaran per kapita.

Nilai IPM Kota Pekanbaru tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022 yaitu semula 82,06 menjadi 82,38. Nilai IPM Kota Pekanbaru merupakan nilai IPM tertinggi dibandingkan nilai kabupaten/kota lain di Riau bahkan tingkat Provinsi Riau dan Nasional seperti terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.4. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2019 – 2023**

Wilayah	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Pekanbaru	81,35	81,32	81,58	82,06	82,38
Provinsi Riau	73,00	72,71	72,94	73,52	74,04
Nasional	71,92	71,94	72,29	73,77	74,39

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2023

Selama periode 2019 – 2023, trend nilai IPM Kota Pekanbaru menunjukkan hal positif setiap tahunnya kecuali tahun 2020 dikarenakan terjadinya pandemi Covid-19. Peningkatan nilai IPM tersebut merupakan hasil dari peningkatan setiap komponen pembentuk nilai IPM yakni Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup dan Pengeluaran per kapita setiap tahunnya.

### Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu komponen untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di sektor pendidikan. Rata – rata lama sekolah yang digunakan dalam penghitungan IPM diukur dari penduduk berusia 25 tahun ke atas, karena pada usia tersebut proses belajar pada pendidikan formal diasumsikan telah berakhir.

Secara umum, RLS penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2023 sebesar 11,94 tahun. Artinya, rata-rata penduduk Kota Pekanbaru berumur 25 tahun ke atas mampu



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

menempuh pendidikan sampai dengan kelas 3 SMA atau tidak tamat SMA. Jika dilihat perkembangan selama tahun 2019 – 2023, rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan. Meningkatnya rata-rata lama sekolah dari tahun ke tahun tak lepas dari upaya pemerintah maupun masyarakat yang menginginkan kualitas pendidikan semakin baik.

**Gambar 2.2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)**



Sumber : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Pekanbaru, 2023

### **Penduduk Kota Pekanbaru (Tahun) Tahun 2019 – 2023**

Indikator pendidikan lainnya adalah Angka HLS. Indikator ini mengukur peluang pendidikan yang dapat diperoleh untuk anak usia sekolah (7 tahun ke atas). Angka HLS Kota Pekanbaru pada tahun 2023 sebesar 15,58 tahun, artinya anak usia 7 tahun ke atas akan mempunyai peluang bersekolah sampai 16 tahun atau lulus S1 jika kondisinya minimal sama seperti sekarang.

Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia terutama untuk peningkatan akses sarana pendidikan dan Harapan Lama Sekolah, Pemerintah Kota Pekanbaru pada Tahun 2023 telah membangun 2 Unit Sekolah Baru (USB) setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yakni SMPN 50 dan SMPN 51 Kota Pekanbaru melalui dana APBD Tahun Anggaran 2023. Selain itu untuk meningkatkan daya tampung sekolah, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru di Tahun 2023 menambah Ruang Kelas Baru (RKB) untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) sebanyak 4 ruang di SDN 190 Kota Pekanbaru dan 5 ruang di lima SMPN yang ada di Kota Pekanbaru.

### **Umur Harapan Hidup (UHH)**

Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Umur Harapan Hidup merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

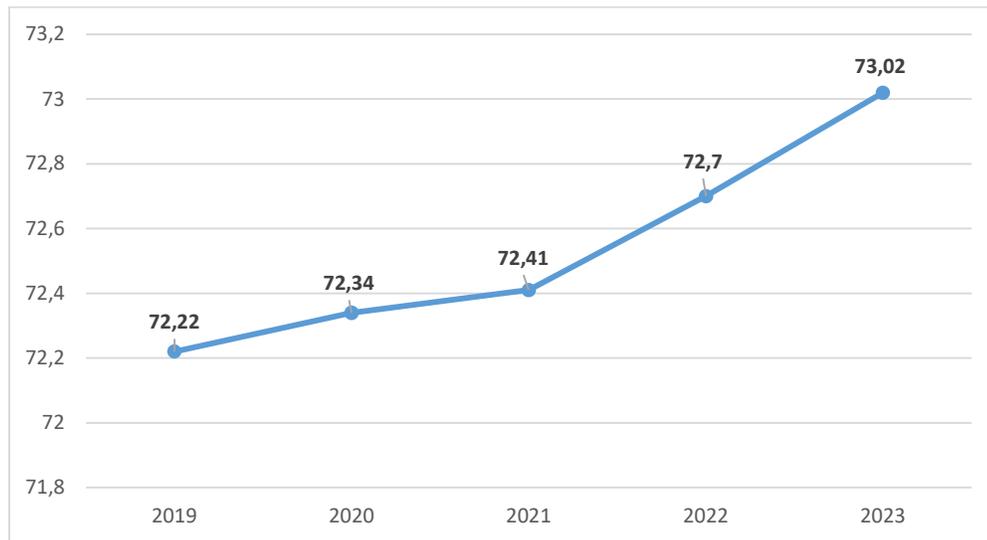


## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, Umur Harapan Hidup masyarakat Kota Pekanbaru tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut :

**Gambar 2.3 Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir di Kota Pekanbaru (Tahun) Tahun 2019 – 2023**



Sumber : BPS, Indikator Pembangunan Manusia Kota Pekanbaru, 2023

Umur Harapan Hidup di Kota Pekanbaru selama periode 2019 – 2023 meningkat setiap tahun. Pada tahun 2023, UHH Kota Pekanbaru berada pada angka 73,02 tahun yang berarti bayi yang baru lahir diharapkan akan mampu hidup selama 73 – 74 tahun. Umur Harapan Hidup Kota Pekanbaru lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota Riau bahkan Provinsi Riau. Hal ini menunjukkan bahwa semakin membaiknya fasilitas kesehatan masyarakat di Kota Pekanbaru dan perlu lebih ditingkatkan kembali untuk masa yang akan datang.

### **Pengeluaran Per Kapita**

Tingkat kesejahteraan penduduk dapat dilihat dari pola konsumsi dan pengeluaran per kapita. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain, penduduk cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang makanan pada umumnya tinggi.

Selama periode 2019 – 2023, secara umum rata-rata pengeluaran per kapita mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kota Pekanbaru sebesar Rp 1.665.622 per bulan. Pada tahun 2023, rata-rata pengeluaran penduduk menjadi Rp 2.063.759 per kapita per orang.

### 2.1.2.4 ANGKA KEMISKINAN

Pada Tahun 2023, Tingkat Kemiskinan Kota Pekanbaru mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2022 yakni sebesar 3,16 persen dari semula 3,06 persen dengan trend sebagai berikut :

Gambar 2.4. Trend Kemiskinan di Kota Pekanbaru Tahun 2019 – 2023



Sumber : BPS, Pekanbaru Dalam Angka, 2024

Sejalan dengan hal tersebut, Indeks Kedalaman Kemiskinan juga meningkat 0,05 poin dibandingkan tahun 2022 dan Indeks Keparahan Kemiskinan meningkat 0,02 poin dibandingkan tahun 2022. Fenomena peningkatan tingkat kemiskinan diiringi dengan peningkatan Garis Kemiskinan dari semula Rp. 655.389,- pada Tahun 2022 menjadi Rp. 712.000,- pada Tahun 2023.

Sebagai ibukota Provinsi Riau, Kota Pekanbaru menjadi daya tarik bagi penduduk wilayah sekitarnya untuk melanjutkan pendidikan maupun mencari mata pencaharian sehingga tingkat urbanisasi di Kota Pekanbaru terbilang cukup tinggi. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, pada Tahun 2023 tercatat sebanyak 12.819 jiwa penduduk datang dari kabupaten/kota di Provinsi Riau dan sebanyak 18.787 jiwa dari luar Provinsi Riau yang pindah ke Kota Pekanbaru. Minimnya keahlian dan daya saing sumber daya manusia serta kenaikan harga sejumlah bahan kebutuhan makanan dan non makanan menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat sehingga tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan kondisi



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

tersebut maka jumlah penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapitanya dibawah garis kemiskinan atau dikategorikan miskin di Kota Pekanbaru juga meningkat.

Dalam upaya penurunan Tingkat Kemiskinan, Pemerintah Kota Pekanbaru pada Tahun 2023 telah melakukan verifikasi dan validasi penduduk miskin dimana penetapan status penduduk miskin ekstrem dilakukan melalui Musyawarah Kelurahan. Verifikasi dan validasi penduduk yang dilaksanakan dengan kerjasama antara Dinas Sosial, Kecamatan, Disdukcapil dan Bappeda Kota Pekanbaru tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data penduduk miskin di Kota Pekanbaru yang valid dan akurat.

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi penduduk miskin Tahun 2023, diperoleh data penduduk miskin sebanyak 3.926 orang dari 708 Kepala Keluarga yang selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 443 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pemutakhiran Data Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem By Name By Address Kota Pekanbaru sebagai data sasaran penanganan penurunan kemiskinan sehingga diharapkan intervensi program penurunan kemiskinan dimasa yang akan datang akan tepat sasaran dan efektif.

Selain itu dalam rangka meringankan beban penduduk miskin, Pemerintah Kota Pekanbaru pada Tahun 2023 telah menjalankan salah satu Program Prioritas Santunan Kematian bagi masyarakat miskin dalam bentuk pemberian bantuan dana social kematian senilai Rp. 1 juta bagi penduduk yang terdata dalam Program Keluarga Harapan (PKH) atau tercatat sebagai penduduk miskin di Rukun Tetangga setempat.

### 2.1.3. Inflasi

Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dan dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga barang dan Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga barang dan jasa berupa inflasi/ deflasi di tingkat konsumen di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga di suatu daerah tertentu.

Inflasi yang disajikan pada publikasi ini meliputi inflasi bulanan, inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun (*Year on Year*). Inflasi bulanan merupakan gambaran perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan bersangkutan dengan bulan sebelumnya, sedangkan inflasi tahun kalender merupakan perubahan IHK bulan bersangkutan dibanding dengan IHK bulan Desember tahun sebelumnya atau dikenal juga inflasi kumulatif dari bulan Januari sampai dengan bulan berjalan, dan inflasi tahun ke tahun (*Year on Year*) merupakan perubahan inflasi bulan berjalan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kota Pekanbaru pada pasar tradisional dan pasar modern di Kota Pekanbaru, pada Desember 2023 terjadi inflasi yoy sebesar 2,50



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) 114,03 pada Desember 2022 menjadi 116,88 pada Desember 2023. Tingkat inflasi mtm sebesar 0,21 persen dan tingkat inflasi ytd sebesar 2,50 persen.

Inflasi yoy Tahun 2023 yang terjadi di Kota Pekanbaru karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,32 persen; kelompok transportasi sebesar 2,53 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,59 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,36 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,15 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,03 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,99 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,47 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,34 persen; serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,19 persen. Di sisi lain ada satu kelompok yang mengalami deflasi yaitu kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,14 persen.

Tabel 2.5 Indeks Harga Konsumen Kota Pekanbaru dan Perubahannya per Desember 2023

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2023	Tingkat Inflasi Desember 2023	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2023	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun
		(%)	(%)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>UMUM</b>	<b>116,88</b>	<b>0,21</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>
<b>1 MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU</b>	<b>124,89</b>	<b>0,30</b>	<b>5,32</b>	<b>5,32</b>
1.1 Makanan	124,55	0,36	5,59	5,59
1.2 Minuman Yang Tidak Beralkohol	113,46	0,15	0,84	0,84
1.4 Rokok Dan Tembakau	132,88	0,00	5,99	5,99
<b>2 PAKAIAN DAN ALAS KAKI</b>	<b>110,69</b>	<b>0,06</b>	<b>0,47</b>	<b>0,47</b>
2.1 Pakaian	112,16	0,08	0,50	0,50
2.2 Alas Kaki	104,28	0,00	0,34	0,34
<b>3 PERUMAHAN, AIR, LISTRIK DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA</b>	<b>106,38</b>	<b>-0,01</b>	<b>1,15</b>	<b>1,15</b>
3.1 Sewa Dan Kontrak Rumah	107,60	0,00	2,26	2,26
3.2 Pemeliharaan, Perbaikan, Dan Keamanan Tempat Tinggal/Perumahan	110,87	0,00	-0,92	-0,92
3.3 Penyediaan Air Dan Layanan Perumahan Lainnya	100,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Listrik Dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102,28	-0,01	-0,12	-0,12
<b>4 PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA</b>	<b>114,67</b>	<b>0,02</b>	<b>-0,14</b>	<b>-0,14</b>
4.1 Furnitur, Perlengkapan Dan Karpet	105,54	0,00	0,49	0,49
4.2 Tekstil Rumah Tangga	108,48	1,20	1,20	1,20
4.3 Peralatan Rumah Tangga	107,19	0,03	-0,17	-0,17
4.4 Barang Pecah Belah Dan Peralatan Makan Minum	110,09	0,00	0,42	0,42
4.5 Peralatan Dan Perlengkapan Perumahan Dan Kebun	113,03	0,00	3,50	3,50
4.6 Barang Dan Layanan Untuk Pemeliharaan Rumah Tangga Rutin	121,82	-0,11	-0,81	-0,81
<b>5 KESEHATAN</b>	<b>116,92</b>	<b>0,04</b>	<b>1,03</b>	<b>1,03</b>
5.1 Obat-Obatan Dan Produk Kesehatan	126,65	0,13	1,78	1,78
5.2 Jasa Rawat Jalan	112,55	0,00	1,00	1,00
5.3 Jasa Rawat Inap	116,79	0,00	0,38	0,38
5.4 Jasa Kesehatan Lainnya	108,29	0,00	0,00	0,00

Sumber : Perkembangan Indeks Harga Konsumen Kota Pekanbaru, Desember 2023 BRS No.01/01/1471/Th.VIII, 2 Januari 2024



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pada Desember 2023, tingkat inflasi yoy sebesar 2,50 persen dan tingkat inflasi ytd sebesar 2,50 persen. Tingkat inflasi yoy untuk Desember 2022 dan Desember 2021 masing masing sebesar 7,04 persen dan 1,55 persen. Sedangkan tingkat inflasi ytd Desember 2022 dan Desember 2021 masing-masing sebesar 7,04 persen dan 1,55 persen

Tabel 2.6 Tingkat Inflasi *Month to Month (MtM)*, *Year to Date (YtD)*, dan *Year on Year (YoY)* Tahun 2021 s.d. 2023

Tingkat Inflasi	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Month to Month (mtm) Desember	0,07	0,92	0,21
Year to Date (ytd) Desember	1,55	7,04	2,50
Year on Year (yoy) Desember	1,55	7,04	2,50

### 2.1.3.1 Dampak Kenaikan BBM

Kenaikan harga BBM di Indonesia, tidak terkecuali Kota Pekanbaru akan membawa konsekuensi penyesuaian harga pada berbagai sektor. Dan tentu saja biaya hidup semakin meningkat. Tingkat harga BBM bisa dibbilang krusial dalam perekonomian masyarakat, sehingga salah satunya menyebabkan daya beli masyarakat yang menurun. Selain itu juga menyebabkan terjadinya inflasi dimana harga barang dan jasa yang mengalami kenaikan terus menerus, sehingga nilai mata uang akan semakin berkurang dan daya beli masyarakat pun menjadi rendah

## 2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ketahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

Keuangan daerah merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Ditinjau dari APBD, keuangan daerah yang dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan, dari tahun ke tahun diperkirakan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan perkembangan kebutuhan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik dalam bentuk peningkatan pelayanan. Kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena keuangan daerah merupakan instrument penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal daerah mengandung tiga misi utama yaitu:

1. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Desentralisasi fiskal mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila desentralisasi fiskal dipusatkan pada pengeluaran/belanja publik. Desentralisasi fiskal yang diukur dengan pengeluaran pemerintah daerah menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan di daerah-daerah. Dengan adanya transfer dana dari pemerintah pusat dan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada, memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

### **2.2.1 Mandatory Spending dalam APBD 2023**

#### **2.2.1.1 Pendidikan (27,04%)**

Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 3 ayat (4). Hal ini sudah terpenuhi karena untuk anggaran pendidikan pada tahun 2023 dalam APBD sebesar 27,04%

#### **2.2.1.2 Kesehatan (16,72%)**

Alokasi anggaran untuk kesehatan sebesar 10% diluar gaji dalam APBD sesuai ketentuan UU No. 36 Tahun 2009. Untuk anggaran kesehatan dalam APBD 2023 sebesar 16,72% dan hal ini juga telah melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan.

#### **2.2.1.3. Infrastruktur (57,95%)**

Alokasi dana untuk infrastruktur paling sedikit 40% yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan manguangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah ( UU APBN ).Dalam struktur APBD tahun 2023



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

telah dianggarkan untuk infrastruktur sebesar 57,95%. Hal ini tentu saja telah melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan.

### 2.2.1.4. Pengawasan ( 0,61%)

Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan minimal 0,5% dari total Belanja Daerah. Dalam Struktur APBD Tahun Anggaran 2023 telah dianggarkan untuk kegiatan pengawasan sebesar 0,61%. Hal ini telah melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan.

### 2.2.2. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tuntutan peningkatan pendapatan daerah semakin besar seiring dengan banyaknya kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada daerah serta tuntutan dari target-target capaian program pembangunan daerah dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui program dan kegiatan pembangunan daerah.

Secara garis besar pendapatan daerah Kota Pekanbaru terdiri atas 3 (tiga) komponen yaitu **Pertama**, Pendapatan Asli Daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. **Kedua**, Pendapatan Transfer yang terdiri atas transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. **Ketiga**, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dalam Tahun 2023, antara lain:

a. *Peningkatan Basis Data Perpajakan* dengan cara:

- pendataan ulang *upgrading database* pajak;
- Menghimpun data dan melakukan verifikasi dan validasi terhadap alamat Wajib dan Objek Pajak melalui turun lapangan pada saat penagihan pajak;
- Menghimpun data potensi Individual pada PBB-P2;
- Meningkatkan koordinasi antara Bapenda dengan bagian penerbitan izin;
- Memberikan insentif berupa potongan pajak;
- Pendekatan persuasif dengan upaya dengan pemanggilan terhadap objek pajak baru.

b. *Penilaian, Penagihan, dan Pemeriksaan Pajak*, dilakukan dengan cara:

- Dalam melakukan Penilaian dan Penagihan dikerjasamakan dengan instansi berwenang lainnya sehingga Penilaian, Penagihan, dan Pemeriksaan dapat memperoleh hasil maksimal;
- Dalam melakukan Pemeriksaan berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan, BPK & BPKP.

c. *Peningkatan SDM Pajak*, dilakukan dengan cara:



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

- Untuk meningkatkan kemampuan SDM dilakukan dengan Penambahan jumlah diklat untuk ahli penilaian, penagihan, pemeriksaan, dan praktik pemungutan perpajakan yang baik;
  - Penambahan kualitas dan kuantitas SDM ditunjang oleh perbaikan sarana prasarana penyelenggaraan pajak;
  - Membangun kerjasama yang saling menguntungkan antara Pemerintah, swasta dan Masyarakat;
  - Penguatan Peran Penilai Pemerintah dalam Penilaian Individual PBB-P2;
  - Penguatan Pemeriksa dalam Pengawasan Pajak Daerah yang bersifat *Self Assessment* (Melibatkan APIP untuk penguatannya);
  - Optimalisasi Peran Juru Sita Pajak Daerah dalam Penagihan Pajak objek tertentu;
  - Optimalisasi Peran Satgas Pajak Bapenda yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam penertiban & penyampaian Ketetapan pajak kepada Wajib Pajak.
- d. *Penyesuaian dasar pengenaan pajak*, melalui:
- Penilaian ulang dasar pengenaan pajak sesuai kemampuan membayar pajak; Melakukan penyesuaian faktor perhitungan;
  - Melakukan Penyesuaian tarif dan harga dasar.
- e. *Modernisasi*, dengan cara:
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Integrated Database, pelayanan perpajakan;
  - Mewujudkan manajemen pelayanan pajak secara mudah dan cepat.

Pendapatan transfer merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, maka yang perlu diupayakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, antara lain:

- a. Perbaikan pencatatan basis pajak;
- b. Memperbaiki data dasar yang digunakan dalam perhitungan dan penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) seperti: Data Kebutuhan Fiskal, Data Kapasitas Fiskal, Jumlah Formasi, dan *Bezetting* Belanja Pegawai; dan
- c. Rekonsiliasi terhadap data dana transfer tahun-tahun sebelumnya sampai dengan tahun berjalan secara periodik.

### 2.2.3. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek *multiplier* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpol. Belanja daerah pada Tahun 2023 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditargetkan dalam RPD Kota Pekanbaru 2023-2026. Sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian tujuan tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas,



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat.

Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 telah mengacu kepada ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang terdiri atas **Pertama**, Belanja Operasi yang memuat belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. **Kedua**, Belanja Modal yang memuat belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya. **Ketiga**, Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. **Keempat**, Belanja Transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi keuangan daerah, dirinci atas belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan dan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial disamping juga untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat.

Tema pembangunan Kota Pekanbaru pada tahun 2023 telah diselaraskan dengan tema pembangunan Nasional tahun 2023 dan tema pembangunan Provinsi Riau tahun 2023. Tema pembangunan nasional tahun 2023 adalah Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, sedangkan tema pembangunan Provinsi Riau tahun 2023 adalah “Memantapkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah yang kompetitif”. Merujuk dari kedua tema diatas maka Kota Pekanbaru merumuskan tema pembangunan Kota Pekanbaru Tahun 2023 yaitu : “Peningkatan Pembangunan Manusia dan Kualitas Infrastruktur Untuk Transformasi Ekonomi dan Daya Saing Daerah.”

Prioritas pembangunan Kota Pekanbaru Tahun 2023 sesuai dengan arah kebijakan pembangunan tahun pertama RPD. Arah kebijakan pembangunan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 difokuskan pada peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah, , meningkatkan pemerataan ketersediaan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta meningkatkan keharmonisan hidup bermasyarakat di Kota Pekanbaru.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

Dalam Implementasi arah kebijakan diatas Perencanaan Pembangunan 2023 adalah menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan di Kota Pekanbaru. Permasalahan- permasalahan yang akan diselesaikan adalah sebagai berikut :

- A. Penanganan titik banjir/genangan
- B. Pengelolaan Persampahan
- C. Kualitas dan kuantitas prasarana jalan
- D. Sarana dan Prasaran Pendidikan ( Unit Sekolah Baru SMP)
- E. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP
- F. Konvergensi Stunting
- G. Masih tingginya Angka Kematian Bayi
- H. Masih tingginya Angka Kematian Ibu
- I. Penyediaan Air Bersih Perpipaan
- J. Prasarana Air Limbah Perpipaan
- K. Pengurangan Kawasan Kumuh
- L. Masih kecilnya luas RTH Publik
- M. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) => dulu PMKS
- N. Penurunan Angka Kemiskinan
- O. Penurunan Angka Pengangguran Terbuka
- P. Belum Optimalnya Pengembangan Infrastruktur Pariwisata
- Q. Belum Optimalnya Promosi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- R. Rendahnya Kapasitas Wirausaha (Entrepreneur)
- S. Rendahnya Persentase Koperasi Aktif
- T. Masih Kurangnya Dukungan Infrastruktur Penunjang Kegiatan Industri (terutama KIT)
- U. Keterjangkauan Trayek Angkutan Umum
- V. Cakupan Pelayanan Penerangan Jalan Umum
- W. Persiapan Pemilu 2024 X. Pendirian Politeknik Vokasi

Berikut adalah prioritas Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2023 yang telah diselaraskan dengan RKP Nasional dan RKPD Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas SDM.
2. Peningkatan Ketentraman Masyarakat Melalui Implementasi Nilai-Nilai Budaya Melayu.
3. Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, transparan dan akuntabel.

#### 2.2.4. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksud untuk menutup *defisit* dan atau memanfaatkan *surplus* anggaran.



## **PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

---

Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana diatur juga dalam Bab II huruf E Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah dan/ atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

#### **2.3.1 Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Kota Pekanbaru**

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas mengenai kebijakan keuangan daerah, lebih lanjut dijabarkan dalam indikator pencapaian fiskal daerah, sehingga Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki sasaran dan tujuan yang pasti mengenai apa yang ingin dicapai dalam Tahun Anggaran 2022. Pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan melalui APBD Murni berdasarkan :

- a. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023;
- b. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 112 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023;
- c. Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 112 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023.

Pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan :

- a. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023;
- b. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023; dan



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

- c. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023.

Tabel 2.7 Ringkasan APBD Kota Pekanbaru 2023

(dalam rupiah)

URAIAN		APBD MURNI	PERUBAHAN APBD	KENAIKAN /PENURUNAN APBD	(%)
<b>I. Pendapatan Daerah</b>		<b>2.699.548.066.279,00</b>	<b>2.918.749.835.614,00</b>	<b>219.201.769.335,00</b>	<b>8,12</b>
I.1	Pendapatan Asli Daerah	961.638.042.727	1.018.123.042.427	56.484.999.700,00	5,87
I.2	Pendapatan Transfer	1.737.910.023.552	1.900.626.793.187	162.716.769.635,00	9,36
I.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	-	-	-	-
<b>II. Belanja</b>		<b>2.679.548.066.279,00</b>	<b>2.913.438.094.805,00</b>	<b>233.890.028.526,00</b>	<b>8,73</b>
II.1	Belanja Operasi	2.359.726.498.928	2.573.034.756.193	213.308.257.265,00	9,04
II.2	Belanja Modal	299.871.567.351	332.020.013.830	32.148.446.479,00	10,72
II.3	Belanja Tidak Terduga	19.950.000.000	8.383.324.782	(11.566.675.218,00)	(57,98)
II.4	Belanja Transfer	-	-	-	-
Surplus/Defisit		20.000.000.000,00	5.311.740.809,00	(14.688.259.191,00)	100,00
<b>III. Pembiayaan</b>		<b>(20.000.000.000,00)</b>	<b>(5.311.740.809,00)</b>	<b>14.688.259.191,00</b>	<b>100,00</b>
III.1	Penerimaan	-	14.688.259.191,00	14.688.259.191,00	100,00
III.2	Pengeluaran	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-	-
SILPA Tahun berjalan		-	-	-	-

Sumber : APBD dan Perubahan APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023

### 2.3.2. Indikator Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Kota Pekanbaru

Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD. Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat impact yang diukur setiap tahunnya.

Pada Tahun 2023, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan Tema Pembangunan tahunan yang telah diselaraskan dengan tema pembangunan Nasional Tahun 2023 maupun tema pembangunan Provinsi Riau Tahun 2023. Tema pembangunan Kota Pekanbaru tahun 2023 yakni “Peningkatan Pembangunan Manusia dan Kualitas Infrastruktur untuk Transformasi Ekonomi dan Daya Saing Daerah”.



## **PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

---

Dalam menjalankan tema pembangunan tersebut, terdapat lima prioritas pembangunan Kota Pekanbaru Tahun 2023 yakni :

1. Peningkatan Kualitas SDM
2. Peningkatan Ketentraman Masyarakat melalui implementasi nilai-nilai Budaya Melayu
3. Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, transparan dan akuntabel.

Dan untuk mewujudkan prioritas pembangunan tersebut telah ditetapkan 15 Sasaran dan 44 program prioritas, dengan pencapaian program strategis Kota Pekanbaru Tahun 2023 yang dapat dilihat pada lampiran 10.

Prioritas pembangunan Kota Pekanbaru pada Tahun 2023 terdiri dari 5 (lima) dengan didukung 17 (tujuh belas) strategi/sasaran dan 44 program prioritas. Rata-rata capaian prioritas yang digambarkan dari pencapaian target sasaran pembangunan di Kota Pekanbaru sebesar 86,72 % dengan peringkat kinerja “Tinggi”. Adapun capaian masing-masing sasaran prioritas dapat dilihat pada Lampiran 11

Dari tujuh belas sasaran prioritas pembangunan Kota Pekanbaru Tahun 2023 dengan 28 indikator kinerja sekaligus sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Pekanbaru, terdapat 9 indikator yang capaian kinerjanya Melebihi Target diantaranya Angka Harapan Hidup, Pengeluaran per Kapita, Keterjangkauan Layanan Angkutan, Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata), Nilai Investasi berskala Nasional, Indeks Kualitas Udara, Nilai IKM, Nilai SPBE dan Nilai AKIP. Sementara Indikator Kinerja Utama yang capaian kinerjanya Sangat Rendah yakni Cakupan Rumah Tangga Bersanitasi Layak, Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau serta Luasan RTH publik di wilayah perkotaan.

Berdasarkan Evaluasi Kinerja sampai dengan akhir tahun 2023 yang merupakan Hasil Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut :



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 2.8. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Pekanbaru Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,75	15,58	98,92	
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	12,01	11,94	99,42	
3	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,5	73,02	100	Melebihi target
4	Pengeluaran per kapita	Rupiah	14.360.000	14.983.000	100	Melebihi target
5	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	100	100	100	
6	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	
7	Persentase Budaya Melayu yang direvitalisasi	%	15	13,55	90,39	
8	Jalan dalam kondisi mantap	%	72,11	71,4	99,01	
9	Keterjangkauan layanan angkutan	%	78	80%	100	Melebihi target
10	Cakupan Rumah Tangga pelayanan air bersih perpipaan	SR	16.850	13.328	79,09	
11	Cakupan Rumah Tangga bersanitasi layak	SR	1.000	250	25	
12	Luas areal Kawasan kumuh	Ha	217,76	229,91	94,72	
13	Rasio perumahan yang difasilitasi PSU	Rasio	12	12	100	
14	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	%	86,49	12,68	14,67	
15	Jumlah titik genangan yang tertangani	Jumlah titik	20	13	65	
16	Luasan RTH Publik di wilayah perkotaan	%	5,62	0,28	4,98	
17	Gini Rasio	Indeks	0,385	0,392	98,21	
18	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	%	21,35	20,14	94,33	
19	Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (Pariwisata)	Rupiah (Milyar)	2.019,35	2.521,23	100	Melebihi target
20	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	90,56	Belum Rilis		
21	Nilai invetasi berskala nasional	PMDN (Rp.)	2,21 T	5,89 T	100	Melebihi target
		PMA (Rp.)	1,90 T	606 M	31,89	
22	Indeks Kualitas Air	Indeks	51,69	51,11	98,88	
23	Indeks Kualitas Udara	Indeks	85,73	89,03	100	Melebihi target
24	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	27,17	25,05	92,2	
25	Nilai IKM	Nilai	85,58	86,21	100	Melebihi target
26	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	2,7	3,42	100	Melebihi target
27	Nilai AKIP	Nilai	65	66,99	100	Melebihi target
28	Nilai LPPD	Nilai	3,6	Belum Rilis		
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>						<b>86,72</b>

Sumber: Laporan Evaluasi RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2023



## **PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

---

Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Pekanbaru pada tahun 2023 adalah sebesar 86,72 persen dengan predikat kinerja Tinggi yang berarti pencapaian/realisasi kinerja sebagian besar telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Dari dua puluh delapan indikator kinerja utama terdapat 9 indikator (32,14 %) yang capaiannya melebihi target, 1 indikator memenuhi target (3,57 %), 15 indikator yang belum memenuhi target (53,57 %) dan 2 indikator (7,14 %) yang tidak dapat diperoleh datanya belum rilis dari instansi pemerintah pusat.



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

### BAB III

#### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

### 3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Anggaran Pendapatan Kota Pekanbaru pada Tahun 2023 sebesar Rp2.917.972.332.647,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1.018.123.042.427,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.899.849.290.220,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp0,00. Sedangkan realisasi pendapatan Pemerintah Kota Pekanbaru pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.753.144.818.421,38 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp890.286.830.690,38, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.862.857.987.731,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp0,00.

Anggaran Belanja Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2023 sebesar Rp2.912.660.591.838,00 terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp2.575.063.645.278,00, Belanja Modal sebesar Rp329.213.621.778,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp8.383.324.782,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Pemerintah Kota Pekanbaru sebesar Rp2.748.798.260.183,38 terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp2.432.229.639.203,50, Belanja Modal sebesar Rp315.807.494.723,88, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp761.126.257,00, dan Belanja Transfer sebesar Rp0,00.

Penerimaan Pembiayaan yang diterima oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sebesar Rp14.688.259.191,00 dan pengeluaran sebesar Rp10.000.000.000,00 sehingga Pembiayaan neto sebesar Rp4.688.259.191,91. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp9.034.817.428,91. Secara rinci realisasi APBD Kota Pekanbaru Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1. Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

URAIAN	TARGET (ANGGARAN)	REALISASI	SELISIH	(%)
I. Pendapatan	2.917.972.332.647,00	2.753.144.818.421,38	164.827.514.225,62	94,35
I.1 Pendapatan Asli Daerah	1.018.123.042.427,00	890.286.830.690,38	127.836.211.736,62	87,44
I.2 Pendapatan Transfer	1.899.849.290.220,00	1.862.857.987.731,00	36.991.302.489,00	98,05
I.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah			-	---



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

URAIAN	TARGET (ANGGARAN)	REALISASI	SELISIH	(%)
II. Belanja	2.912.660.591.838,00	2.748.798.260.184,38	163.862.331.653,62	94,37
II.1 Belanja Operasi	2.575.063.645.278,00	2.432.229.639.203,50	142.834.006.074,50	94,45
II.2 Belanja Modal	329.213.621.778,00	315.807.494.723,88	13.406.127.054,12	95,93
II.3 Belanja Tidak Terduga	8.383.324.782,00	761.126.257,00	7.622.198.525,00	9,08
II.4 Belanja Transfer	-	-	-	---
Surplus/Defisit	5.311.740.809,00	4.346.558.237,00	965.182.572,00	81,83
III. Pembiayaan	(5.311.740.809,00)	4.688.259.191,91	(10.000.000.000,91)	(88,26)
III.1 Penerimaan	14.688.259.191,00	14.688.259.191,91	(0,91)	100,00
III.2 Pengeluaran	20.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	50,00
SILPA Tahun berjalan	-	9.034.817.428,91	(9.034.817.428,91)	---

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2023.

Secara umum pada Ikhtisar Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023 masih belum optimal, dari sisi pencapaian target Pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada sisi PAD, terdapat beberapa kondisi teknis yang menjadi penghambat diantaranya kurangnya pengawasan karena keterbatasan personalil dalam pengawasan objek pajak, masih terdapat pembukuan ganda dari WP dalam pelaporan kewajiban pajak, tidak adanya sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh, sanksi yang diberikan masih hanya sebatas administratif, banyaknya tempat hiburan yang belum memiliki izin resmi. Masih terdapat wajib pajak yang belum mendaftarkan objek pajak yang dimiliki, masih kurangnya SDM pengawan untuk terjun ke lapangan memantau kecurangan kecurangan yang terjadi mengenai pajak reklame, sehingga potensi yang diperoleh Bapenda masih belum maksimal. Terjadi kenaikan target yang cukup signifikan pada tahun 2023. Kenaikan target ini dipicu oleh adanya potensi piutang PBB yang sebelumnya berstatus Fasilitas Umum (Fasum) yang kemudian ditetapkan yang kemudian ditetapkan kembali sebagai piutang PBB di tahun berjalan. Tidak optimalnya penerimaan piutang PBB-P2 sampai dengan 31 Desember 2023 karena masih banyak data Subjek dan Objek Pajak PBB-P2 yang belum dimutakhirkan sehingga menghambat pendistribusian SPPT PBB-P2 kepada wajib pajak. SDM pemeriksa pajak daerah ditambah dengan kemampuan dan kapasitas petugas pelayanan pajak baik dalam penguasaan teknologi informasi maupun teknik belum memadai, serta belum maksimalnya peran satgas pajak dalam penertiban pajak dan penyampaian ketetapan pajak kepada Wajib Pajak.

Untuk perbedaan pada Target dan realisasi Belanja pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023 ini artinya secara kinerja keuangan sudah mulai seimbang antara Belanja dan pendapatan hampir sama. Dan untuk tahun 2023 tidak ada tunda Bayar. Dan penyelesaian Tunda Bayar tahun tahun sebelumnya juga sudah banyak yang terselesaikan.

Ada beberapa hal yang masih menjadi hambatan dalam pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023, diantaranya adalah adanya kesalahan dalam penganggaran, belanja modal yang tidak terdapat di RKBMD, serta masih adanya tunda bayar karena kurangnya ketersediaan dana di akhir tahun. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kesalahan penganggaran untuk tahun



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

berikutnya secara teknis TAPD telah melakukan perbaikan terhadap kode rekening belanja sesuai dengan peruntukannya. Selain itu TAPD juga memberikan sosialisasi tentang kodefikasi belanja sesuai dengan Permendagri serta pemahaman yang lebih terinci pada saat asistensi penyusunan RKA. Dan dalam implementasi kedepan terhadap SKPD yang masih melakukan kesalahan penganggaran akan ditunda proses pencairan belanja sampai diperbaiki kode rekening yang benar.

Dalam memenuhi ketersediaan dana di masa mendatang, Pemerintah Kota Pekanbaru akan berkomitmen menyelesaikan Tunda Bayar di 2024. Selanjutnya Pemerintah kota Pekanbaru akan terus mengupayakan peningkatan potensi dan pencapaian PAD, serta menginventarisasi kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas.

### 3.1.1. PENDAPATAN

Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dikelompokkan atas:

#### a. Pendapatan Asli Daerah

Tabel 3.2. Perkembangan PAD Tahun Anggaran 2014 s.d. 2023

(dalam rupiah)

NO.	TAHUN ANGGARAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	2014	554.863.814.574,00	440.550.158.026,39	79,40
2	2015	1.037.870.534.336,00	492.511.317.377,00	47,45
3	2016	870.406.974.034,00	482.031.164.869,27	55,38
4	2017	1.149.338.489.770,00	697.466.656.719,96	60,68
5	2018	1.085.555.818.588,00	592.707.161.811,78	54,60
6	2019	963.784.076.614,00	710.129.196.650,75	73,68
7	2020	1.126.476.692.701,00	618.090.322.805,90	54,87
8	2021	1.015.371.119.895,00	684.642.966.382,18	67,43
9	2022	840.108.063.019,00	799.021.514.425,65	95,11
10	2023	1.018.123.042.427,00	890.286.830.690,38	87,44

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Target dan realisasi PAD dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2023, digambarkan dengan tabel dan grafik untuk mempermudah dalam membaca dan memahaminya.

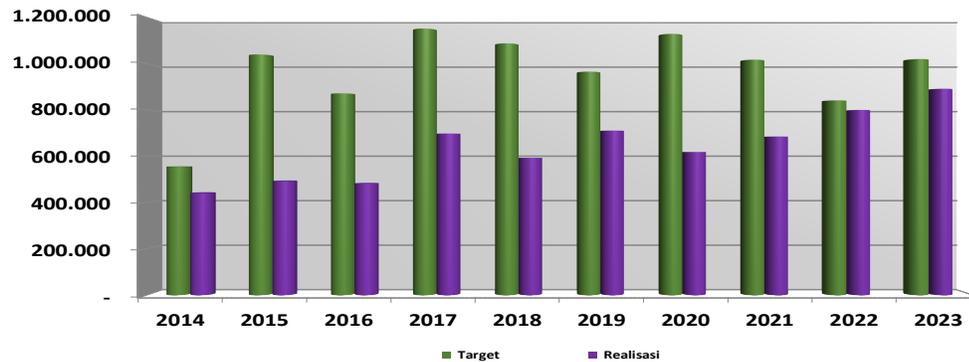


**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

**Grafik 3.1. Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah  
 Tahun Anggaran 2014 s.d. 2023**

(dalam jutaan rupiah)



**b. Pendapatan Dana Transfer**

Target dan realisasi dana perimbangan dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2023, digambarkan dengan tabel, grafik, dan penjelasan secara rinci guna mempermudah membaca dan memahaminya.

**Tabel 3.3. Perkembangan Dana Transfer Tahun Anggaran 2014 s.d. 2023**

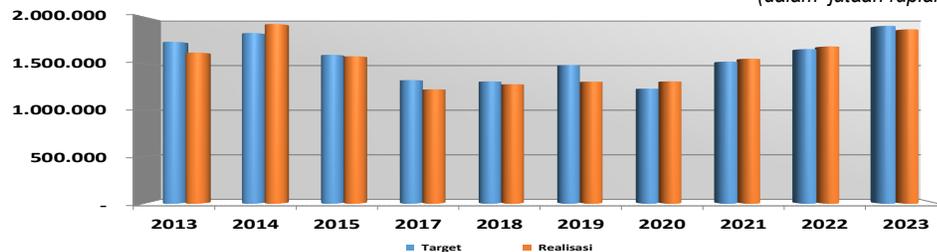
(dalam rupiah)

NO.	TAHUN ANGGARAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	2014	1.823.360.384.012,00	1.919.642.118.749,27	105,28
2	2015	1.590.974.733.642,00	1.574.848.785.941,99	98,99
3	2016	1.563.982.095.880,00	1.545.058.420.302,31	98,79
4	2017	1.320.906.554.000,00	1.222.248.651.620,00	92,53
5	2018	1.306.724.185.000,00	1.277.237.744.503,00	97,74
6	2019	1.481.646.756.800,00	1.304.793.092.679,00	88,06
7	2020	1.229.773.057.000,00	1.307.245.078.083,00	106,30
8	2021	1.265.078.176.000,00	1.287.025.703.524,00	101,73
9	2022	1.651.901.204.829,00	1.680.225.855.620,00	101,71
10	2023	1.899.849.290.220,00	1.862.857.987.731,00	98,05

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pekanbaru

**Grafik 3.2. Perkembangan Target dan Realisasi Dana Transfer  
 Tahun Anggaran 2014 s.d. 2023**

(dalam jutaan rupiah)





## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

### c. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup beberapa ketentuan antara lain:

- 1) Pendapatan Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pendapatan Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.

Mulai Tahun Anggaran 2013, Laporan Pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi Anggaran disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I berupa Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota dimana Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri dari:

- 1) Pendapatan Hibah;
- 2) Pendapatan Dana Darurat; dan
- 3) Pendapatan Lainnya.

Dengan berubahnya format laporan pertanggungjawaban, yakni mengelompokkan sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, hal ini secara data berdampak pada pengurangan target dan realisasi dari lain-lain pendapatan yang sah. Untuk mempermudah membaca dan memahami perkembangan lain-lain pendapatan yang sah berikut disajikan dengan tabel, grafik dan penjelasan secara rinci.

**Tabel 3.4. Perkembangan Lain-lain Pendapatan yang Sah  
Tahun Anggaran 2014 s.d. 2023**

(dalam rupiah)

NO.	TAHUN ANGGARAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	2014	10.266.000.000,00	10.266.000.000,00	100,00
2	2015	-	-	---
3	2016	62.783.749.000,00	62.783.747.396,00	100,00
4	2017	161.323.536.141,00	251.875.056.752,63	156,13
5	2018	250.760.517.285,00	365.073.596.424,46	145,59
6	2019	99.077.080.000,00	99.077.345.031,00	100,00
7	2020	127.229.557.188,00	120.244.219.401,00	94,51
8	2021	104.428.080.000,00	103.259.251.870,00	98,88
9	2022	-	-	---
10	2023	-	-	---

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

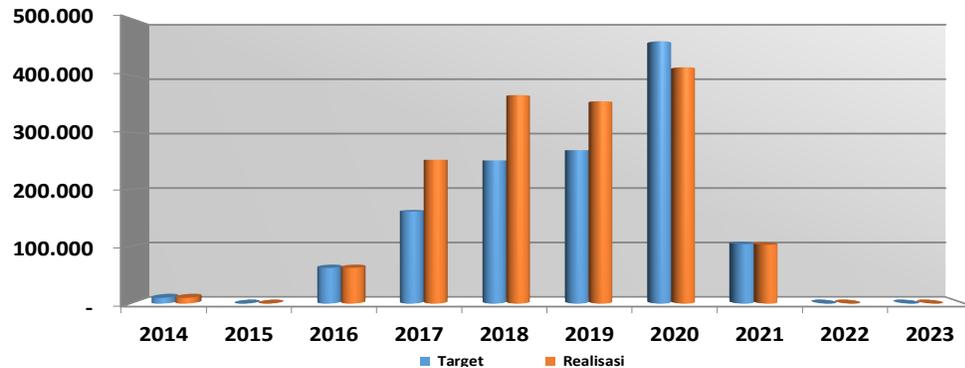


## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Grafik 3.3. Perkembangan Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2014 s.d. 2023

(dalam jutaan rupiah)



Target dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah tahun sebelumnya merupakan dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau. Mulai Tahun Anggaran 2016, dana bantuan keuangan tersebut dicatat dan merupakan bagian dari pendapatan dana transfer sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

### 3.1.2. BELANJA

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan membagi jenis belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga, dan berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian dituangkan lebih terperinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab II huruf D bahwa belanja diklasifikasikan menjadi: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Hal ini mulai berlaku pada tahun 2021, sementara untuk tahun 2020 kebawah klasifikasi belanja masih mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana belanja menurut kelompoknya terdiri dari: Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung. Perbedaan jenis belanja tersebut sangat signifikan, sehingga untuk menghasilkan laporan berupa laporan realisasi anggaran harus dilakukan konversi dari kode rekening ke kode akun.

Perkembangan belanja yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak terduga dari Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2023, dapat digambarkan dan dijelaskan melalui tabel dan grafik sebagai berikut:

#### a. Belanja Operasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 3.5. Perkembangan Belanja Operasi Tahun Anggaran 2014 s.d. 2023

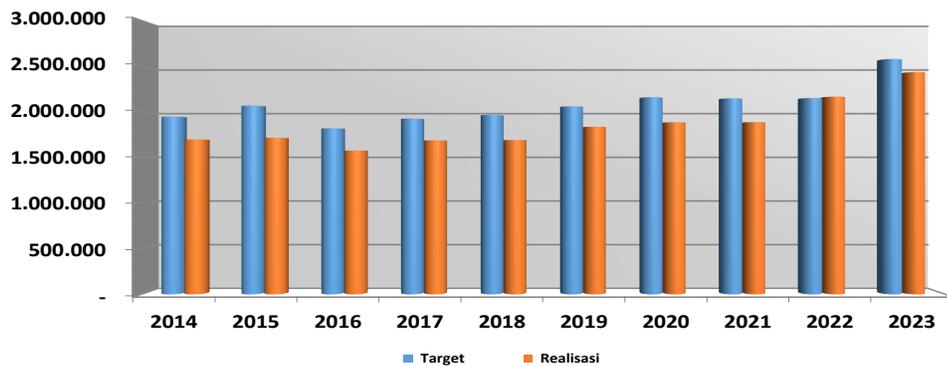
(dalam rupiah)

NO.	TAHUN ANGGARAN	TARGET	REALISASI	KENAIKAN/PENURUNAN	
				(Rp)	(%)
1	2014	1.944.820.487.397,00	1.695.021.105.218,00	1.695.021.105.218,00	122,43
2	2015	2.065.283.078.311,00	1.713.933.712.651,00	18.912.607.433,00	1,12
3	2016	1.817.170.368.316,00	1.573.935.577.763,00	(139.998.134.888,00)	(8,17)
4	2017	1.923.930.674.247,00	1.685.449.641.171,42	111.514.063.408,42	7,09
5	2018	1.963.656.993.130,00	1.689.047.575.602,52	3.597.934.431,10	0,21
6	2019	2.057.674.924.787,00	1.834.291.017.148,58	145.243.441.546,06	8,60
7	2020	2.157.087.953.444,00	1.883.129.143.266,01	48.838.126.117,43	2,66
8	2021	2.144.732.714.390,00	1.884.629.712.698,26	1.500.569.432,25	0,08
9	2022	2.148.449.929.315,00	2.163.366.664.652,36	278.736.951.954,10	14,79
10	2023	2.575.063.645.278,00	2.432.229.639.203,50	268.862.974.551,14	12,43

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru.

Grafik 3.4. Perkembangan Target dan Realisasi Belanja Operasi  
Tahun Anggaran 2014 s.d. 2023

(dalam jutaan rupiah)



Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat perkembangan anggaran dan realisasi Belanja Operasi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023.

### b. Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Perkembangan belanja modal digambarkan dengan tabel, grafik dan penjelasan terinci sebagai berikut:



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

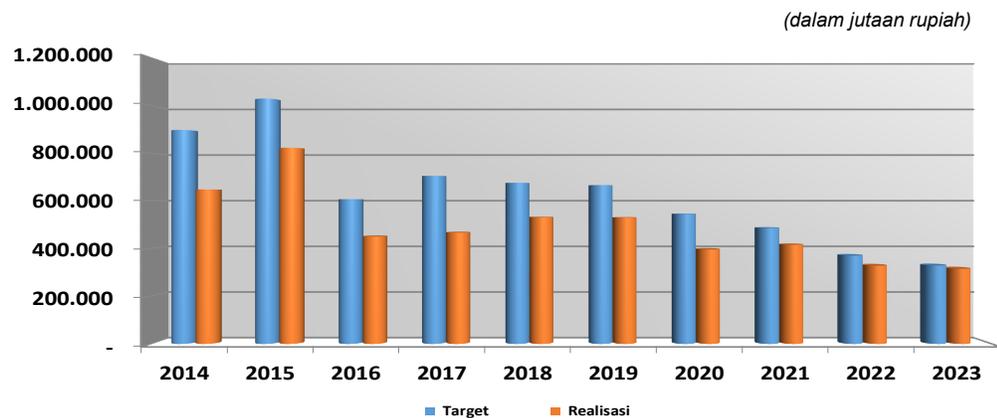
**Tabel 3.6. Perkembangan Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal**  
Tahun Anggaran 2014 s.d. 2023

*(dalam rupiah)*

NO.	TAHUN ANGGARAN	TARGET	REALISASI	KENAIKAN/PENURUNAN REALISASI TAHUN SEBELUMNYA	
				Rp.	%
1	2014	896.023.178.523,00	647.098.439.363,00	176.114.011.436,00	37,39
2	2015	1.027.107.385.478,00	821.626.769.354,00	174.528.329.991,00	26,97
3	2016	606.426.881.383,00	450.341.770.647,18	(371.284.998.706,82)	(45,19)
4	2017	704.359.361.463,00	466.573.845.628,18	16.232.074.981,00	3,60
5	2018	675.054.013.524,00	531.148.865.175,09	64.575.019.546,91	13,84
6	2019	665.316.399.675,00	529.533.719.916,67	(1.615.145.258,42)	(0,30)
7	2020	544.586.463.906,00	396.136.063.968,73	(133.397.655.947,94)	(25,19)
8	2021	486.309.309.814,00	415.994.763.452,07	19.858.699.483,34	5,01
9	2022	370.667.304.025,00	328.335.985.976,99	(87.658.777.475,08)	(21,07)
10	2023	329.213.621.778,00	315.807.494.723,88	(12.528.491.253,11)	(3,82)

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru.

**Grafik 3.5. Perkembangan Target dan Realisasi Belanja Modal**  
Tahun Anggaran 2014 s.d. 2023



**c. Belanja Tak Terduga**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya

**Tabel 3.7. Perkembangan Anggaran Dan Realisasi Belanja Tak Terduga**  
Tahun Anggaran 2018 s.d. 2023

*(dalam rupiah)*

NO.	TAHUN ANGGARAN	TARGET	REALISASI	KENAIKAN/PENURUNAN REALISASI TAHUN SEBELUMNYA	
				Rp.	%
1	2018	600.000.000,00	163.063.442,00	13.826.264,00	9,26
2	2019	1.500.000.000,00	365.873.336,50	202.809.894,50	124,37
3	2020	127.978.717.243,00	61.915.973.605,00	61.550.100.268,50	16.822,79
4	2021	19.000.000.000,00	18.171.412.227,93	(43.744.561.377,07)	(70,65)
5	2022	1.000.000.000,00	964.331.717,00	(17.207.080.510,93)	(94,69)
6	2023	8.383.324.782,00	761.126.257,00	(203.205.460,00)	(21,07)

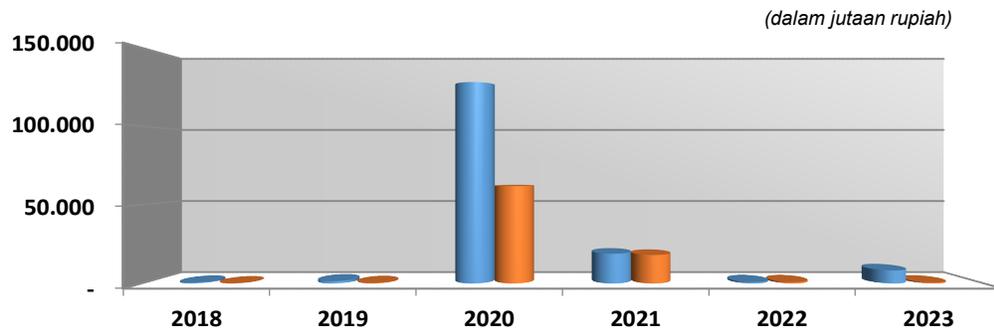
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Grafik 3.6. Perkembangan Target dan Realisasi Belanja  
Tak Terduga Tahun Anggaran 2018 s.d. 2023



Pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang cukup signifikan belanja tak terduga disebabkan oleh belanja penanganan *COVID 19*.

### 3.1.3. PEMBIAYAAN

Pembiayaan daerah merupakan salah satu pos untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus. Tahun Anggaran 2023, target penerimaan pembiayaan sebesar Rp14.688.259.191,00 direalisasikan sebesar Rp14.688.259.191,91 atau 100,00% yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022. Terkait alokasi pengeluaran pembiayaan tahun 2023 sebesar Rp20.000.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp10.000.000.000,00 atau 50,00%. Sehingga target Pembiayaan Netto Tahun 100,00%

Surplus/defisit Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp5.311.740.809,00. Pembiayaan netto dianggarkan sebesar minus Rp.5.311.740.809,00 dan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp4.688.259.191,91 Pembiayaan netto ditambah dengan surplus anggaran terdapat SiLPA sebesar Rp 9.034.817.428,91.

### 3.2. PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM

Pencapaian kinerja program merupakan gambaran tentang ketercapaian serangkaian aktivitas dalam bentuk pelaksanaan kegiatan, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Representasi dari peran SKPD yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang didefinisikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Pada Tahun Anggaran 2023, alokasi Belanja Daerah yang terbesar adalah untuk menunjang pelaksanaan urusan Pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp563.000.117.834,00 dari total belanja sebesar Rp2.520.117.233.340,00 atau 22,34%. Urusan Wajib digunakan untuk mendanai 146 Program dengan 646 Kegiatan. Tabel berikut menggambarkan alokasi belanja berdasarkan urusan.



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 3.8. Alokasi Belanja Daerah per Urusan Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6
I	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>33</b>	<b>126</b>	<b>1.614.117.238.255,00</b>	<b>1.541.831.639.189,92</b>
1	Pendidikan	3	11	703.183.862.648,00	686.902.654.970,76
2	Kesehatan	5	19	327.118.662.321,00	304.641.828.482,71
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	19	332.539.564.804,00	313.175.894.048,45
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	17	168.724.899.198,00	160.309.274.816,00
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	4	16	66.273.918.087,00	62.818.699.946,00
6	Sosial	6	44	16.276.331.197,00	13.983.286.926,00
II	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>69</b>	<b>177</b>	<b>445.413.505.055,00</b>	<b>413.673.122.770,55</b>
1	Tenaga Kerja	4	11	8.431.390.418,00	6.288.193.709,00
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9	22	14.722.273.287,00	12.228.362.452,00
3	Pangan	5	14	7.843.719.249,00	7.518.847.751,00
4	Pertanahan	3	8	9.693.377.864,00	6.965.974.465,00
5	Lingkungan Hidup	8	13	124.265.156.015,00	117.708.523.014,55
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	16	19.277.806.539,00	18.092.002.437,00
7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	14	17.098.485.329,00	15.532.223.996,00
8	Perhubungan	3	11	144.397.545.567,00	136.279.028.579,00
9	Komunikasi dan Informatika	5	12	20.997.831.609,00	19.459.426.268,00
10	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	7	15	12.037.577.959,00	10.678.364.926,00
11	Penanaman Modal	6	12	29.102.589.995,00	26.484.137.774,00
12	Kepemudaan dan Olahraga	4	14	24.534.377.746,00	23.999.437.585,00
13	Perpustakaan	5	15	13.011.373.478,00	12.438.599.814,00
	<b>JUMLAH URUSAN WAJIB</b>	<b>102</b>	<b>303</b>	<b>2.059.530.743.310</b>	<b>1.955.504.761.960</b>
III	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	<b>19</b>	<b>40</b>	<b>43.702.225.371,00</b>	<b>39.501.601.499,00</b>
1	Pariwisata	6	16	8.765.395.671,00	8.160.142.609,00
2	Pertanian dan Perikanan	7	13	17.209.493.926,00	15.225.790.833,00
3	Perdagangan dan Perindustrian	6	11	17.727.335.774,00	16.115.668.057,00
IV.	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>7</b>	<b>40</b>	<b>387.188.848.576,00</b>	<b>367.986.592.429,91</b>
1	Sekretariat Daerah	4	20	186.792.978.741,00	177.372.520.485,91
2	Sekretariat DPRD	3	20	200.395.869.835,00	190.614.071.944,00
V.	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>13</b>	<b>50</b>	<b>163.036.467.532,00</b>	<b>141.639.008.414,00</b>
1	Perencanaan	3	12	13.212.169.950,00	10.566.739.175,00
2	Keuangan	5	15	126.031.069.198,00	109.570.619.481,00
3	Kepegawaian	3	12	16.329.401.664,00	14.414.124.495,00
4	Penelitian dan Pengembangan	2	11	7.463.826.720,00	7.087.525.263,00



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

No.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
VI.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	3	12	17.976.388.060,00	15.177.468.661,00
1	Inspektorat Daerah	3	12	17.976.388.060,00	15.177.468.661,00
VII.	UNSUR KEWILAYAHAN	6	15	191.610.655.644,00	180.981.323.102,00
1	Kecamatan	6	15	191.610.655.644,00	180.981.323.102,00
VIII.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	6	13	49.615.263.345,00	48.007.504.118,00
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	6	13	49.615.263.345,00	48.007.504.118,00
	Jumlah	156	473	2.912.660.591.838,00	2.748.798.260.184,38

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru.

### 3.3 MANDATORY SPENDING TAHUN ANGGARAN 2023

*Mandatory spending* adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Alokasi anggaran pendidikan sebesar 27,04% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1);
- Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 16,72% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);
- Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN) itu sebesar 57,95%, dan
- Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Realisasi anggaran belanja Pemerintah Kota Pekanbaru TA 2023 dalam rangka pemenuhan *Mandatory spending* adalah sebagai berikut:



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

**Tabel 3.9. Alokasi Mandatory Spending Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2023**

*(dalam rupiah)*

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	<b>a. Urusan Bidang Pendidikan:</b>	<b>703.183.862.648,00</b>	<b>686.897.946.697,76</b>	<b>97,68%</b>
	1) Belanja Operasi:	618.066.940.820,00	603.101.569.271,42	97,58%
	a. belanja pegawai;	405.027.763.049,00	395.286.269.340,00	97,59%
	b. belanja barang dan jasa;	146.546.842.384,00	140.999.272.351,42	96,21%
	c. belanja hibah;	66.492.335.387,00	66.816.027.580,00	100,49%
	d. belanja bantuan sosial.	-	-	0,00%
	2) Belanja Modal;	85.116.921.828,00	83.796.377.426,34	98,45%
	3) Belanja Transfer;	-	-	0,00%
	<b>b. Urusan Bidang Kebudayaan:</b>	<b>8.765.395.671,00</b>	<b>8.160.142.609,00</b>	<b>93,09%</b>
	1) Belanja Operasi:	8.677.428.871,00	8.072.362.609,00	93,03%
	a. belanja pegawai;	4.866.431.576,00	4.649.600.348,00	95,54%
	b. belanja barang dan jasa;	3.810.997.295,00	3.422.762.261,00	89,81%
	c. belanja hibah;	-	-	0,00%
	d. belanja bantuan sosial.	-	-	0,00%
	2) Belanja Modal;	87.966.800,00	87.780.000,00	99,79%
	3) Belanja Transfer;	-	-	0,00%
	<b>c. Urusan Bidang Perpustakaan:</b>	<b>13.011.373.478,00</b>	<b>12.438.599.814,00</b>	<b>95,60%</b>
	1) Belanja Operasi:	12.159.608.478,00	11.595.802.989,00	95,36%
	a. belanja pegawai;	7.218.520.858,00	6.891.537.322,00	95,47%
	b. belanja barang dan jasa;	4.941.087.620,00	4.704.265.667,00	95,21%
	c. belanja hibah;	-	-	0,00%
	d. belanja bantuan sosial.	-	-	0,00%
	2) Belanja Modal;	851.765.000,00	842.796.825,00	98,95%
	3) Belanja Transfer;	-	-	0,00%
	<b>d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga:</b>	<b>24.534.377.746,00</b>	<b>23.999.437.585,00</b>	<b>97,82%</b>
	1) Belanja Operasi:	22.775.009.910,00	22.261.773.585,00	97,75%
	a. belanja pegawai;	4.321.205.592,00	4.124.537.915,00	95,45%
	b. belanja barang dan jasa;	15.453.804.318,00	15.137.235.670,00	97,95%
	c. belanja hibah;	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00%
	d. belanja bantuan sosial.	-	-	0,00%
	2) Belanja Modal;	1.759.367.836,00	1.737.664.000,00	98,77%



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
e.	Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:	37.949.940.384,00	36.310.799.152,00	95,68%
	1) Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.532.871.180,00	1.498.891.526,00	59,18%
	2) Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar pada SKPD Dinas Kesehatan	18.740.096,00	-	0,00%
	3) Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada SKPD BAPPEDA	174.804.000,00	70.152.100,00	40,13%
	4) Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada SKPD Inspektorat	464.791.000,00	142.316.426,00	30,62%
	5) Sub Kegiatan : Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar pada SKPD Dinas Sosial	-	-	0,00%
	6) Sub Kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi pada SKPD Dinas Tenaga Kerja	150.003.008,00	-	0,00%
	7) Sub Kegiatan : Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal pada SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15.862.000,00	14.620.000,00	92,17%
	8) Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	0,00%
	9) Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	34.592.869.100,00	34.584.819.100,00	99,98%
2.	Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	787.444.949.927,00	767.806.925.857,76	97,51%
3.	Total Belanja Daerah	2.912.660.591.838,00	2.748.793.551.911,38	94,37%
4.	Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Belanja Daerah	27,04%	27,93%	



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

**Tabel 3.10. Alokasi Mandatory Spending Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023**

*(dalam rupiah)*

No		Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pesentase (%)
1.	a.	Belanja pada Dinas Kesehatan:	327.118.662.321,00	304.592.988.482,71	93,11%
		1) Belanja Operasi:	300.452.959.454,00	278.687.530.310,62	92,76%
		a. belanja pegawai;	151.599.072.854,00	144.933.959.909,00	95,60%
		b. belanja barang dan jasa;	148.003.886.600,00	133.253.570.401,62	90,03%
		c. belanja hibah;	850.000.000,00	500.000.000,00	58,82%
		d. belanja bantuan sosial.			0,00%
		2) Belanja Modal;	26.665.702.867,00	25.905.458.172,09	97,15%
		3) Belanja Transfer;			0,00%
	b.	Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	959.065.711,00	912.017.405,00	95,09%
		1) Belanja Transfer:			0,00%
		2) Sub Kegiatan : Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (Dinas Sosial)	-	-	0,00%
		3) Sub Kegiatan : Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	122.190.324,00	100.665.324,00	82,38%
		4) Sub Kegiatan : Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	43.500.000,00	43.500.000,00	100,00%
		5) Sub Kegiatan : Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	-	-	0,00%
		6) Sub Kegiatan : Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	22.565.000,00	22.465.000,00	99,56%
		7) Sub Kegiatan : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Koperasi dan UKM)	-	-	0,00%
		8) Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Koperasi dan UKM)	38.562.426,00	38.562.426,00	100,00%
		9) Sub Kegiatan : Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Koperasi dan UKM)	117.870.353,00	95.381.655,00	80,92%



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pesentase (%)
	10) Sub Kegiatan : Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dinas Pertanian dan Perikanan)	-	-	0,00%
	11) Sub Kegiatan : Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (Dinas Pendidikan)	614.377.608,00	611.443.000,00	99,52%
2.	Alokasi Anggaran Kesehatan (a+b)	328.077.728.032,00	305.505.005.887,71	93,12%
3.	Total Belanja Daerah	2.912.660.591.838,00	2.748.793.551.911,38	94,37%
4.	Gaji ASN	950.745.441.134,00	917.756.173.837,00	96,53%
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	1.961.915.150.704,00	1.831.037.378.074,38	93,33%
6.	Rasio anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	16,72%	16,68%	

**Tabel 3.11. Alokasi Mandatory Spending Bidang Infrastruktur Pelayanan Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

<b>A. PERHITUNGAN BELANJA BAGI HASI DAN/ATAU TRANSFER KEPADA DAERAH/DESA</b>				
No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Penerimaan			
	Dana Transfer Umum			
	a) DAU	867.954.823.000,00	867.953.880.162,00	100,00%
	b) DBH	270.596.736.000,00	292.039.521.136,00	107,92%
	Jumlah Penerimaan	1.138.551.559.000,00	1.159.993.401.298,00	101,88%
2	Pengurang			
	a) DBH CHT	-	931.052.176,00	0,00%
	b) DBH DR	-	-	0,00%
	c) ADD	-	-	0,00%
	Jumlah pengurang	-	931.052.176,00	0,00%
3	Jumlah dana transfer umum yang diperhitungkan	1.138.551.559.000,00	1.159.062.349.122,00	101,80%
<b>B. PERHITUNGAN BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH</b>				
1.	a) Belanja Modal:	329.213.621.778,00	315.859.523.923,88	95,94%
	1) Tanah;	2.383.706.824,00	769.811.525,00	32,29%
	2) Peralatan dan mesin;	79.397.383.653,00	75.859.366.195,00	95,54%
	3) Bangunan dan gedung;	95.922.266.444,00	94.006.938.248,86	98,00%
	4) Jalan, jaringan, dan irigasi;	134.454.097.534,00	128.207.813.682,02	95,35%
	5) Aset tetap lainnya;	16.907.852.323,00	16.867.589.273,00	99,76%
	6) Aset lainnya.	148.315.000,00	148.005.000,00	99,79%
	b) Belanja Pemeliharaan	106.411.368.034,00	100.604.786.800,07	94,54%
2.	a) Belanja hibah;	224.206.906.172,00	220.160.981.885,55	98,20%
	b) Belanja bantuan sosial;	-	-	0,00%
	c) Belanja bantuan keuangan.	-	-	0,00%
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	659.831.895.984,00	636.625.292.609,50	96,48%
4.	Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum	57,95%	54,93%	



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

#### 3.4. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2023

Secara umum, faktor-faktor penunjang dalam pencapaian target Pendapatan Tahun 2023 antara lain:

- a. Bertambahnya sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
- b. Adanya peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan pembinaan, baik secara eksternal maupun internal atau peningkatan jenjang pendidikan;
- c. Semakin meningkatnya koordinasi antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. Penyebarluasan informasi tentang pentingnya membayar pajak dan retribusi semakin memadai;
- e. Adanya sistem aplikasi yang membantu dalam percepatan dan kemudahan administrasi serta keamanan data;
- f. Adanya rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala dengan memanggil seluruh SKPD yang langsung dipimpin oleh Walikota; dan
- g. Semakin mudahnya Wajib Pajak mengurus pajak tanpa harus datang langsung ke kantor melalui Aplikasi Smart Tax dan pembayaran pajak bisa melalui E-Commerce dan ke Bank yang bekerja sama dengan Bapenda.

Secara umum, faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian target Pendapatan Tahun 2023 antara lain:

- a. Pemberian stimulus pajak / insentif pajak dalam rangka pemulihan ekonomi nasional;
- b. Piutang pajak air tanah dari Pemerintah Pusat belum dibayarkan atas nama wajib pajak PT. Caltex Pacific Indonesia (CPI);
- c. Kapasitas yang tersedia tidak mengalami pertambahan sehingga potensi objek retribusi yang ada kurang dapat dimanfaatkan secara maksimal;
- d. Sistem aplikasi pengelolaan pendapatan dan retribusi yang digunakan belum sepenuhnya menghasilkan laporan-laporan yang diinginkan;
- e. Kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia terutama aparatur pengelola keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum memadai;
- f. Penempatan ASN di Bapenda sebaiknya disesuaikan dengan kompetensi, kualifikasi dan motivasi terhadap pengelolaan pajak daerah; dan
- g. *Refocussing* anggaran terhadap pemberian insentif pajak daerah.

Secara khusus, faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian target Pendapatan Tahun 2023 antara lain:

- a. Kurangnya pengawasan karena keterbatasan personil dalam pengawasan objek pajak, masih terdapat pembukuan ganda dari WP dalam pelaporan kewajiban pajak, tidak adanya sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh, sanksi yang diberikan masihhanya sebatas sanksi administratif.
- b. Banyaknya tempat hiburan yang belum memiliki izin resmi, sementara perkembangan usaha dibidang hiburan di kota Pekanbaru semakin tumbuh dan berkembang.



## **PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

---

- c. Dengan keadaan Kota Pekanbaru yang bertransformasi menjadi Kota Metropolitan, hal ini membuat tidak sesuainya pembudidayaan habitat burung walet di Kota Pekanbaru karena menimbulkan kebisingan sehingga tidak jarang mendapatkan complain dari masyarakat sekitar, menyebabkan banyak penguasa sarang burung walet memindahkan usahanya ke daerah lain yang habitatnya lebih baik;
- d. Dalam pajak reklame masih banyak WP yg belum mendaftarkan Objek Pajak yang dimiliki ke Bapenda, Reklame yang sudah habis masa pajaknya masih tetap terpasang dan tidak diperpanjang kembali izinnya
- e. Kota Pekanbaru bukan merupakan daerah penghasil mineral bukan logam dan batuan yang besar, sehingga potensi pajaknya tidaklah besar/signifikan. Masih banyak wajib pajak yang belum mendaftarkan objek pajak yang dimiliki. Realisasi penerimaan pajak Minerba di Kota Pekanbaru selama ini bergantung pada Kegiatan proyek-proyek pembangunan. Terlebih telah beralihnya perizinan pertambangan Minerba dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Pusat turut berimbas pada capaian penerimaan pajak Minerba Kota Pekanbaru;
- f. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu;
- g. Belum maksimal dalam pelaksanaan verifikasi atau validasi data Objek Pajak terhadap piutang hasil dari pelimpahan KPP Pratama;
- h. Masih Terdapat beberapa objek yang berpotensi besar belum dilakukan penilaian secara individual; dan
- i. Kurangnya pendataan secara aktif di lapangan terhadap potensi objek baru.
- j. WP sering tidak menerima SPT
- k. Keberatan WP terhadap NJOP.

### **3.5. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2023**

Faktor pendukung yang membantu terlaksananya pencapaian target guna menuju hasil yang maksimal, antara lain:

- a. Adanya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah memuat Sasaran yang lebih berorientasi hasil dengan pencapaian sasaran diturunkan ke Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya sehingga pencapaian target kinerja dilakukan secara terpadu
- b. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam hal pembiayaan program dan kegiatan baik bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun bantuan keuangan Provinsi sehingga efek keterbatasan anggaran dari Pemerintah dalam pembangunan daerah dapat ditekan.
- c. Komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru dan Perangkat Daerahnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai target kinerja.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

- d. Peningkatan koordinasi, sinergitas, kerjasama dan pelibatan secara langsung baik dengan perguruan tinggi, Lembaga/stakeholder terkait maupun masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga outcome program dapat tercapai.
- e. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan untuk menjangkau masyarakat lebih luas dan tanpa Batasan waktu dan tempat sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian target kinerja.

Di samping itu, faktor penghambat dalam pencapaian target kinerja keuangan antara lain:

- a. Terbatas dan masih rendahnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di Perangkat Daerah dalam menjalankan program dan kegiatan sehingga perlu ditingkatkan mengingat SDM yang handal dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana di Perangkat Daerah untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam menjalankan tugas dan fungsi sehingga menghambat pencapaian target kinerja.
- c. Belum optimalnya dokumen perencanaan dari sisi Belanja sehingga pencapaian Tujuan dan Sasaran dari program-program yang ada tidak maksimal
- d. Belum optimalnya dokumen perencanaan dari sisi pendapatan sehingga proyeksi pendapatan dalam penganggaran tidak sesuai dengan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah
- e. Pemahaman yang masih rendah dalam menyusun Belanja pada program dan kegiatan sehingga belanja tersebut benar-benar menggambarkan pencapaian program dan kegiatan

Dengan tercapainya target dan realisasi kinerja program sebagaimana yang telah ditetapkan, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap terlaksananya pembangunan sebagaimana mestinya dan terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang memuaskan dan lebih baik sehingga tujuan dari pembangunan akan tercapai yaitu menuju masyarakat yang maju dan sejahtera, sesuai dengan komitmen semboyan Kota Pekanbaru "Bergerak, Bertumbuh dan Bermartabat, Pekanbaru Kota Bertuah.



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

### BAB IV

#### KEBIJAKAN AKUNTANSI

#### 4.1. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pemerintah Kota Pekanbaru merupakan entitas pelaporan yang melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagaimana peraturan yang berlaku.

Laporan keuangan Tahun Anggaran 2023 disusun dengan mengkonsolidasi laporan keuangan setiap entitas akuntansi, dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). LKPD Kota Pekanbaru sebelum disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terlebih dahulu direviu oleh pengawas internal yakni Inspektorat Kota Pekanbaru.

Jumlah entitas akuntansi yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru pada Tahun Anggaran 2023 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) SKPD ditambah 1 (Satu) SKPKD, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.1. Entitas Akuntansi di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru**

No	SKPD	Alamat Kantor
1	Dinas Pendidikan	JL. H. SYAMSUL BAHRI NO.8 KELURAHAN SUNGAISIBAM KECAMATAN BINA WIDYA
2	Dinas Kesehatan	JL. ABDUL RAHMAN HAMID GEDUNG B2 LT. 1 DAN 2
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	JALAN. ABDUL RAHMAN HAMID KOMPLEK PERKANTORAN TENAYAN RAYA GEDUNG B.9 LT.4-5
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOM. PERKANTORAN TANAYAN RAYA GEDUNG B.9 LANTAI 3 KEC. TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU - RIAU
5	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Jl. Abdul Hamid Komplek Perkantoran Walikota Pekanbaru Tenayan Raya Gedung B6 Lt.2
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jl. Mustafa Sari No.1 Pekanbaru
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jln. Cempaka No. 31 Kelurahan Pulau Karomah Kecamatan Sukajadi Pekanbaru, Riau 28156
8	Dinas Sosial	Jl. Datuk Setia Maharaja No.6
9	Dinas Tenaga Kerja	Jl. Samarinda No. 29 Pekanbaru
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat	KOMPLEK PERKANTORAN JL.ABDUL RAHMAN HAMID KEL.TUAH NEGERI KEC. TENAYAN RAYA GEDUNG B2 LT.4
11	Dinas Ketahanan Pangan	JL. ABDUL RAHMAN HAMID GEDUNG B5 KOMPLEK PERKANTORAN TENAYAN RAYA
12	Dinas Pertanahan	Jl. Abdul Rahman Hamid Komplek Perkantoran Walikota Pekanbaru Gedung B3 Lt.4 Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru 28285
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	JL. DATUK SETIA MAHARAJA NO. 4
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jl. Jendra Sudirman No. 464 Komplek MPP Pekanbaru
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KOMPLEK PERKANTORAN WALIKOTA PEKANBARU GEDUNG B2 Lt. III JL. ABDUL RAHMAN HAMID KEL. TUAH NEGERI KEC. TENAYAN RAYA



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

No	SKPD	Alamat Kantor
16	Dinas Perhubungan	JL. ABDUL RAHMAN HAMID, KEL. TUAH NEGERI, KEC. TENAYAN RAYA, KOTA PEKANBARU
17	Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian	Jl. Komplek Perkantoran Waikota Tenayan Raya Gedung Utama Lt.3 Jl.Abdul Rahman Hamid Tenayan Raya
18	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jalan Abdul Hamid Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jl. Jendral Sudirman No.464 Pekanbaru
20	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Jln. Abdul Rahman Hamid Gedung B5 Komplek Perkantoran Tenayan Raya
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Jln. Abdul rahman Hamid, Gedung B6, lantai 4 Kel tuah Negeri kec. Tenayan Raya
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jl. Dr. Sutomo No.1
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	Jl. Ibrahim Sattah No.30 Kel. Cinta Raja Kec. Sail
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	JL. ABDUL RAHMAN HAMID GEDUNG B5 LANTAI 3 KEC. TENAYAN RAYA
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Komplek Perkantoran Waikota Tenayan Raya Gedung Utama Lt.2 Jl.Abdul Rahman Hamid Tenayan Raya
26	Badan Pendapatan Daerah	Jl. Teratai No.81
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Kompek Perkantoran Waikota Pekanbaru, JL. Abdul Rahman Hamid, Gedung B3, Kec. Tenayan Raya, PEKANBARU-28285
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jl. Komplek Perkantoran Waikota Tenayan Raya Gedung Utama Lt.1 Jl.Abdul Rahman Hamid Tenayan Raya
29	Badan Penelitian dan Pengembangan	Jl. Abdul Rahman Hamid Komplek Perkantoran Waikota Pekanbaru Gedung B3 Lt. 4 & 5 Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru 28285
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jl. Arifin Ahmad No.39 Kec. Marpoyan Damai
31	Sekretariat Daerah	Komplek Perkantoran Waikota Tenayan Raya Gedung Utama Jl.Abdul Rahman Hamid Tenayan Raya
32	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Jl. Sudirman No.454
33	Kecamatan Bukit Raya	Jl. Kaharuddin Nasution No.37
34	Kecamatan Marpoyan Damai	Jl. Arifin Ahmad
35	Kecamatan Payung Sekaki	Jl. Payung Sekaki
36	Kecamatan Rumbai	Jl. Sembilang Ujung No.2 Kel. Meranti Pandak, Kec. Rumbai
37	Kecamatan Rumbai Barat	Jl. Tengku Kasim Perkasa, Kel. Maharani, Kec Rumbai Barat
38	Kecamatan Rumbai Timur	Jl. Pramuka Ujung, Kec. Rumbai Timur
39	Kecamatan Tuah Madani	Jl. HR. Soebrantas KM. 14.5
40	Kecamatan Binawidya	Jl. HR. Soebrantas No.52
41	Kecamatan Tenayan Raya	Jl. Budi Luhur No. 1 Kel. Sialang Sakti
42	Kecamatan Kulim	Jl. Lintas Timur KM 13 Kel. Mentangor
43	Kecamatan Limapuluh	Jl. Sultan Syarif Kasim No.123
44	Kecamatan Pekanbaru Kota	Jl. Teuku Umar No.20 Kel. Kota tinggi
45	Kecamatan Senapelan	Jl. Panglima Undan No.47
46	Kecamatan Sukajadi	Jl. Jendral Ahmad yani No.148 Kel. Pulau Karomah
47	Kecamatan Sail	Jl.Mulyorejo No.06 Kelurahan Cintaraja
48	Inspektorat	Jl. Abdul Rahman Hamid Komplek Perkantoran Waikota Pekanbaru Gedung B3 Lt.3 Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru 28285



## **PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

---

Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Setiap entitas akuntansi menyusun laporan keuangan pada SKPD masing-masing, kemudian disampaikan kepada Walikota Pekanbaru (entitas pelaporan) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru selaku SKPKD.

#### **4.2. BASIS AKUNTANSI**

Pemerintah Kota Pekanbaru menggunakan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kota Pekanbaru sejak tahun 2015. Basis akrual digunakan untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Untuk pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan menggunakan basis kas.

#### **4.3. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL**

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Kebijakan akuntansi tersebut disusun oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah meliputi kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.

- 1) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
- 2) Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan SAP atas:
  - a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP
  - b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Lampiran I mengatur pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan di seluruh Indonesia. Kota Pekanbaru dalam menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 mengacu pada peraturan tersebut. Dan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa perkara yang mengatur mengenai



## **PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

---

kebijakan akuntansi pemerintah daerah ditetapkan paling lama tahun 2022. Sebagai implementasi dari peraturan tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru menyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru dengan membuat Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 105 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru Tanggal 30 Desember 2022 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 105 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru.

Peraturan Wali Kota ini menjadi dasar Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mulai Bulan Januari Tahun 2023.

Tanggung jawab penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru berada pada entitas pelaporan yakni Walikota Pekanbaru, dalam hal ini dilakukan oleh BPKAD dengan mengonsolidasikan laporan keuangan semua entitas akuntansi atau SKPD termasuk laporan keuangan PPKD.

Komponen laporan keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru terdiri dari:

- a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
- c) Neraca
- d) Laporan Operasional (LO)
- e) Laporan Arus Kas (LAK)
- f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:

- a. Nama SKPD/PPKD/Pemerintah Kota Pekanbaru;
- b. Cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau gabungan dari beberapa entitas akuntansi;
- c. Tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
- d. Mata uang pelaporan adalah rupiah; dan
- e. Tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.



## **PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

---

#### **4.3.1. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 01 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN**

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan adalah:

- a) Laporan Realisasi Anggaran;
- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c) Neraca;
- d) Laporan Operasional (LO);
- e) Laporan Arus Kas;
- f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi pembendaharaan umum, dan Laporan Perubahan SAL yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasian.

#### **4.3.2. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 02 TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS DAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding di tingkat SKPD, PPKD, dan Pemerintah Kota Pekanbaru. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran dari entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran ini diterapkan dalam penyajian LRA yang disusun oleh SKPD, PPKD, dan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih memberikan informasi tentang kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih hanya disajikan oleh entitas Pemerintah Kota Pekanbaru.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi mengenai perubahan gunggung saldo SiLPA atau SiKPA pada tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

Entitas akuntansi/entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan-LRA menurut kelompok dan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

PPKD selaku Bendahara Umum Daerah dan Pemerintah Kota Pekanbaru selaku entitas pelaporan menyajikan laporan keuangan konsolidasian.



## **PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

---

#### **4.3.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 03 TENTANG NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang serta ekuitas dalam neraca.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset non keuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan non lancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

#### **4.3.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 04 TENTANG LAPORAN ARUS KAS**

Tujuan penyusunan Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, non anggaran dan transitoris selama satu periode akuntansi.

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Pemerintah Kota Pekanbaru menyusun dan menyajikan laporan arus kas sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok untuk setiap periode penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk penyusunan laporan arus kas Pemerintah Kota Pekanbaru yang disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Aktivitas operasi adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kota Pekanbaru selama satu periode akuntansi.

Aktivitas investasi aset nonkeuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset nonkeuangan lainnya.

Aktivitas pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Pencatatan investasi pada Pemerintah Kota Pekanbaru dan kemitraan dapat dilakukan



## **PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

---

dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya. Investasi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, di mana keuntungan yang diperoleh perusahaan akan mempengaruhi jumlah investasi yang dimiliki pemerintah daerah. Entitas pelaporan melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas pendanaan. Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas investasi.

Aktivitas nonanggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan Pemerintah Kota Pekanbaru. Dan aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

#### **4.3.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 05 TENTANG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/entitas pelaporan. Oleh karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan.

Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:

- a. Penggantian struktur organisasi dan fungsi selama tahun berjalan;
- b. Kesalahan struktur organisasi dan fungsi terdahulu yang telah dikoreksi oleh yang baru;
- c. Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada neraca;
- d. Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

- e. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah daerah.

### 4.3.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 06 TENTANG LAPORAN OPERASIONAL DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Tujuan laporan perubahan ekuitas menggambarkan pergerakan ekuitas pemerintah daerah. Laporan perubahan ekuitas disusun dengan menggunakan data ekuitas awal dan data perubahan ekuitas periode yang salah satunya diperoleh dari laporan operasional. Laporan operasional yang menggambarkan pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan daerah. Sedangkan, laporan perubahan ekuitas menggambarkan pergerakan ekuitas pemerintah daerah.

Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan pokok yang sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:
  - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
  - 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; dan
- d. Ekuitas akhir.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

### 4.3.7. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 07 TENTANG LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Laporan keuangan untuk tujuan umum dari Pemerintah Kota Pekanbaru yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut Kebijakan Akuntansi ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas.

Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

#### a. Definisi

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (reciprocal accounts). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Selaku penerima anggaran belanja (APBD) BLUD adalah entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.

Selaku satuan kerja pelayanan berupa badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan Negara yang dipisahkan, BLUD adalah entitas pelaporan.

#### b. Prosedur Konsolidasi

Konsolidasi yang dimaksud oleh kebijakan ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD, dengan mengeliminasi akun timbal balik.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

#### c. Pengungkapan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

### 4.3.8. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 08 TENTANG AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

#### a. Definisi

**Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

**Kas Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

**Kas Umum Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Kota Pekanbaru.

**Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Kota Pekanbaru yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran Pemerintah Kota Pekanbaru pada bank yang ditetapkan.

Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Kas di Kas Daerah.
- b. Kas di Bendahara Penerimaan
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran
- d. Kas di Badan Layanan Umum Daerah
- e. Kas Dana BOS
- f. Kas Dana Kapitasi pada FKTP
- g. Kas Lainnya
- h. Setara Kas

#### b. Pengakuan

Pengakuan transaksi kas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas. Transaksi penerimaan kas adalah transaksi yang menambah saldo uang daerah. Transaksi pengeluaran kas adalah transaksi yang mengurangi saldo uang daerah.

Pengakuan kas dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Kas dari transaksi pendapatan
2. Kas dari transaksi belanja
3. Penerimaan kas akibat penerimaan pembiayaan
4. Pengeluaran kas akibat pengeluaran pembiayaan
5. Kas berasal dari penerimaan transfer



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

6. Kas berasal dari pengeluaran transfer
7. Kas pada penerimaan lainnya/Non Anggaran
8. Kas pada pengeluaran lainnya/Non Anggaran

b. Pengukuran

Penerimaan dan pengukuran kas dicatat sebesar nilai nominal kas yaitu sebesar nilai rupiah yang diterima atau dikeluarkan dan disahkan pada Rekening Kas Umum Daerah.

c. Penyajian

Seluruh uang yang dikuasai pemerintah dilaporkan dalam Neraca, dan disajikan dalam kelompok aset lancar

d. Pengungkapan

Pengungkapan kas dan setara kas mengungkapkan hasil sebagai berikut: rincian kas dan setara kas dan Informasi lainnya yang dianggap penting.

### 4.3.9. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 09 TENTANG INVESTASI

a. Definisi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau/atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi diklasifikasikan menjadi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

b. Pengakuan

Pengakuan Investasi

Pengeluaran kas untuk memperoleh investasi dan/atau konversi aset untuk memperoleh investasi, dan penerimaan hibah dalam bentuk investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal (*reliable*).

Pengakuan Hasil Investasi

- Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito dan bunga obligasi, yang telah menjadi hak pemerintah daerah diakui sebagai piutang hasil investasi pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Penerimaan hasil investasi akan diakui sebagai pengurang piutang hasil investasi pada saat kas diterima. Hasil investasi yang diterima tunai akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.
- Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek atau investasi jangka



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

panjang nonpermanen berupa pendapatan dividen tunai (*cash dividend*) diakui sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional pada saat dividen diumumkan dalam RUPS. Pendapatan dividen tunai (*cash dividend*) tersebut diakui sebagai pengurang piutang dividen pada neraca pada saat kas diterima. Penerimaan dividen tunai (*cash dividend*) tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.

- Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya pada saat diumumkan dalam RUPS dicatat sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Hasil investasi berupa dividen tunai akan diakui sebagai pengurang piutang dividen pada saat kas diterima. Penerimaan hasil investasi berupa dividen tunai tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.
- Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan penambah nilai investasi pemerintah pada neraca. Dividen tunai diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah pada saat diumumkan dalam RUPS. Dividen tunai yang telah diterima pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak menambah nilai investasi pemerintah, sehingga tidak diakui sebagai pendapatan. Dividen dalam bentuk saham yang diterima akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.

### c. Pengukuran dan Penilaian

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

#### a) Pengukuran investasi jangka pendek

##### (1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

- Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan biaya perolehan investasi yang meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut;
- Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan apabila tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

##### (2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

b) Pengukuran investasi jangka panjang:

- (1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- (2) Investasi jangka panjang non permanen:
  - Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehan investasi tersebut;
  - Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
  - Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
  - Investasi nonpermanen dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, jika dan hanya jika investasi tersebut dalam rangka kebijakan nasional yang akan dilepas/dijual atau berupa investasi dalam bentuk tagihan. Dalam hal investasi dalam rangka kebijakan nasional yang akan dilepas/dijual, nilai investasi dicatat sebesar nilai pelepasan/penjualan dikurangi dengan biaya pelepasan. Dalam hal investasi berupa tagihan, nilai investasi dicatat sebesar nilai investasi dikurangi penyisihan tak tertagih.

### Metode Akuntansi Investasi

Akuntansi investasi permanen Pemerintah Daerah dilakukan dengan dua metode, yaitu :

a) Metode biaya

Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b) Metode ekuitas

Pengakuan awal aset investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan menambah nilai investasi pemerintah.

Dividen tunai pada saat diumumkan dalam RUPS diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah. Dividen tunai yang telah diterima oleh



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan akibat perubahan ekuitas badan usaha penerima investasi (*investee*), misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Dampak penyesuaian tersebut akan diakui sebagai penambah atau pengurang ekuitas Pemerintah Daerah.

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- Kepemilikan 20% sampai dengan 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

d. Pengungkapan

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan investasi pemerintah daerah, antara lain:

- Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
- Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang memiliki harga pasar;
- Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- Rekonsiliasi nilai investasi awal dan akhir atas investasi dengan metode ekuitas;
- Investasi yang disajikan dengan nilai nihil dan bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi;
- Kewajiban yang timbul dari bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi dalam hal pemerintah memiliki tanggung jawab hukum;
- Perubahan klasifikasi pos investasi;
- Perubahan prosi kepemilikan atau pengaruh signifikan yang mengakibatkan perubahan metode akuntansi.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

#### 4.3.10. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 10 TENTANG PIUTANG

##### a. Definisi

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kota Pekanbaru dan/atau hak Pemerintah Kota Pekanbaru yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Penyisihan piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Kualitas piutang merupakan lampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan umur piutang dan/atau upaya tagih Pemerintah Kota Pekanbaru kepada debitur.

##### b. Pengakuan

Piutang diakui pada saat timbulnya hak tagih yang berasal dari pungutan pendapatan daerah, perikatan, transfer antar pemerintahan, maupun dari tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti kerugian daerah.

##### - **Piutang pendapatan daerah**

Piutang pendapatan pajak daerah akan diakui seiring dengan pengakuan pendapatan pajak daerah pada saat penerbitan SKP daerah dan piutang pendapatan retribusi daerah didahului dengan penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), dan diakui pada akhir tahun bila terdapat selisih kurang bayar antara jumlah yang seharusnya diterima berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dengan jumlah yang diterima Pemerintah Kota Pekanbaru.

##### - **Piutang berdasarkan perikatan**

Piutang berdasarkan perikatan diakui sebagai piutang apabila memenuhi kriteria: harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; jumlah piutang dapat diukur; telah diterbitkan Surat Penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

##### - **Piutang pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat**

Piutang pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat, seperti Dana Perimbangan (DAU, DBH, DAK) dan transfer lainnya, piutang akan diakui bila terdapat dokumen yang mengakui adanya kurang salur dari entitas penyalur.

##### - **Piutang yang berasal dari pemberian pinjaman**

Piutang yang berasal dari pemberian pinjaman kepada Pemerintah Daerah/Institusi Lain diakui pada saat dikeluarkannya Kas dari rekening Kas Umum Daerah kepada institusi yang mendapat pinjaman.

##### - **Piutang lainnya**

Piutang lainnya digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang tidak dapat dicatat tersendiri dalam akun piutang di atas.

##### - **Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi**



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi dapat diakui apabila telah memenuhi kriteria, yaitu: telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); dan telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian daerah.

### a. Pengukuran dan Penilaian

Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi. Piutang pajak/retribusi daerah dicatat sebesar jumlah pajak/retribusi daerah yang sudah ditetapkan di dalam Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah yang sampai akhir tahun anggaran belum dibayar oleh wajib pajak/retribusi.

Bila terdapat sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak/retribusi daerah oleh wajib pajak/retribusi, jumlah sanksi administrasi tersebut dapat ditambahkan ke akun Piutang Pajak/Retribusi Daerah.

Apabila SKPD/PPKD menetapkan Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak/Retribusi Daerah kepada wajib pajak/retribusi, maka Surat Ketetapan ini dapat menjadi bukti untuk pencatatan piutang pajak/retribusi.

Piutang Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat seperti Dana Perimbangan (DAU, DBH, DAK) dan Transfer Lainnya, dicatat sebesar nilai nominal yang dinyatakan dalam dokumen kurang salur yang diterbitkan oleh entitas penyalur.

Penyajian Nilai Piutang di Neraca disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*), yaitu nilai nominal piutang dikurangi penyisihan piutang tak tertagih.

Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

### b. Penyajian dan Pengungkapan

Piutang disajikan dalam Neraca dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya:

- Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, pengukuran, dan penilaian serta penyajian piutang;
- Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- Penjelasan atas penyelesaian piutang;
- Penyisihan piutang tidak tertagih; dan
- Jaminan atau sita jaminan jika ada.

### c. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penggolongan kualitas piutang dapat diklasifikasikan menjadi kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, dan kualitas macet. Penyisihan besaran piutang diklasifikasikan sebagai berikut:



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

- Kualitas lancar sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
- Kualitas kurang lancar sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- Kualitas diragukan sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- Kualitas macet 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Ketentuan lebih rinci mengenai kualitas piutang pajak dan kualitas piutang retribusi diatur dalam kebijakan akuntansi No. 10 tentang Piutang.

### 4.3.11. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 11 TENTANG DANA TRANSFER

#### a. Definisi

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi. Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta bantuan keuangan. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

#### b. Pengakuan

- Transfer masuk diakui pada saat diterimanya Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk.
- Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.
- Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
- Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

### c. Pengukuran dan Penilaian

- Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.
- Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.
- Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
- Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

### d. Penyajian dan pengungkapan

- Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :
  - 1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

- 2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya;
  - 3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional; dan
  - 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
- 1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
  - 2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
  - 3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional; dan
  - 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

### 4.3.12. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 12 TENTANG PERSEDIAAN

#### a. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Pekanbaru, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diklasifikasikan sebagai berikut:

- Barang Pakai Habis
- Barang Tak Habis Pakai
- Barang Bekas Dipakai

#### b. Pengakuan

Pengakuan persediaan diakui pada saat:

- Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Kota Pekanbaru dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah
- Pada setiap semester dan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname) persediaan.

#### c. Pengukuran dan Penilaian

Persediaan disajikan sebesar:



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
- Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Nilai Persediaan semesteran dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

- 1) Untuk Persediaan yang variasinya banyak namun nilai pembelian per unitnya tidak material, contoh persediaan ATK, nilai persediaan akhir dihitung berdasarkan jumlah unit persediaan yang tersisa pada akhir tahun dikalikan dengan nilai pembelian yang terakhir;
- 2) Untuk pembelian persediaan yang memiliki nilai nominal, seperti Buku KIR, nilai persediaan akhir dihitung berdasarkan harga pencetakan yang terakhir; dan
- 3) Untuk persediaan yang menggunakan Kartu Kendali Persediaan dengan pencatatan dilakukan secara kontiniu, setiap kali terdapat pembelian dan penggunaan, seperti persediaan obat-obatan, nilai persediaan akhirnya mengacu kepada Kartu Kendali Persediaan tersebut. Jika dari hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) terdapat persediaan obat-obatan yang kadaluarsa, rusak atau hilang, maka nilai persediaan akhir dihitung berdasarkan jumlah barang persediaan yang ada dengan kondisi baik hasil *stock opname* dikalikan nilai pembelian akhir yang terdapat dalam kartu kendali persediaan.

### Metode Pencatatan Persediaan

Pencatatan jurnal atas transaksi pembelian/perolehan Persediaan dicatat dengan sistem periodik dengan menggunakan pendekatan beban, yaitu dengan mencatat akun Beban Persediaan setiap kali terjadi transaksi pembelian/perolehan Persediaan dan pada tiap akhir semester dilakukan jurnal penyesuaian untuk mengakui persediaan pada tiap akhir semester dan beban persediaan selama semester yang berkenaan.

#### d. Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Persediaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

- Penjelasan lebih lanjut, persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

- Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

### 4.3.13. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 13 TENTANG ASET TETAP

#### a. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas sebagai berikut:

- Tanah;
- Peralatan dan Mesin;
- Gedung dan Bangunan;
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- Aset Tetap Lainnya; dan
- Konstruksi Dalam Pengerjaan.

#### b. Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

- berwujud;
- mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Kecuali untuk aset tetap berupa tanah, jalan, irigasi dan jaringan, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah, jalan, irigasi dan jaringan.
- Batasan minimal nilai rupiah kapitalisasi aset tetap Pemerintah Kota Pekanbaru dapat dilihat dalam lampiran Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru.

#### c. Pengukuran dan Penilaian

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti IMB, notaris dan pajak.

#### d. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*). Penyusutan aset tetap dihitung berdasarkan periode bulanan dan mulai dihitung sejak bulan perolehan tanpa memperhitungkan tanggal perolehan.

#### e. Penyajian dan Pengungkapan

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - 1) Penambahan;
  - 2) Pelepasan;
  - 3) Akumulasi Penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
  - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
- Informasi penyusutan, meliputi:
  - 1) Nilai penyusutan;
  - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
  - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
  - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

### 4.3.14. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 14 TENTANG KONSTRUKSI DALAM PENERJAAN

#### a. Definisi

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Kontrak Konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

#### b. Pengakuan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

#### c. Pengukuran dan Penilaian

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai Konstruksi yang dikerjakan secara swakelola:

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya.

#### d. Penyajian dan pengungkapan

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan di Neraca. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi :

- Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
- Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan masih harus dibayar;
- Uang muka kerja yang diberikan;
- Retensi.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

### 4.3.15. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 15 TENTANG DANA CADANGAN

a. Definisi

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

b. Pengakuan

Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan. Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah-bukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

c. Pengukuran dan Penilaian

Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

d. Penyajian dan pengungkapan

Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Nonlancar. Dana Cadangan disajikan dengan nilai Rupiah. Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Pengungkapan Dana Cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Peraturan daerah pembentukan Dana Cadangan;
- Tujuan pembentukan Dana Cadangan;
- Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
- Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan;
- Sumber Dana Cadangan; dan
- Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan Dana Cadangan.

Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang Sah sebagai Pendapatan LO. Pencairan Dana Cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan. Pembentukan Dana Cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran pembiayaan. Pencairan Dana Cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi. Pembentukan Dana Cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

### 4.3.16. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 16 TENTANG ASET LAINNYA

#### a. Definisi

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam aset lainnya adalah tagihan jangka panjang; kemitraan dengan pihak ketiga; aset tidak berwujud; dan aset lain-lain. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Kota Pekanbaru. Kemitraan dengan pihak ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Aset tidak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.

#### b. Pengakuan

Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:

- Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- Diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya – Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya – Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Bangun Guna Serah (BGS) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya – Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Bangun Serah Guna (BSG) diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah Daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

### c. Pengukuran dan Penilaian

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.. Sewa, Kerja Sama Pemanfaatan, dan Bangun Guna Serah (BGS), dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor. Aset yang berada dalam Sewa, Kerjasama Pemanfaatan dan BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap. Bangun Guna Serah (BSG) dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut. Aset Sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.

Penyerahan/pengembalian aset BGS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut:

- Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
- Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.

### d. Penyajian dan pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Rincian aset lainnya;
- Kebijakan Amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BGS dan BSG); dan
- Informasi lainnya yang penting.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

### 4.3.17. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 17 TENTANG KEWAJIBAN

#### a. Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Pekanbaru.

#### b. Pengakuan

- Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh Pemerintah Kota Pekanbaru atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- Utang perhitungan fihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
- Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
- Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.
- Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila barang yang dibeli sudah diterima, atau jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan. Contoh Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Persalinan.
- Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.
- Beban yang Masih Harus Dibayar, diakui pada saat beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar; terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah; dan barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

c. Pengukuran dan Penilaian

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominalnya. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Pada saat Pemerintah Kota Pekanbaru menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

d. Penyajian dan pengungkapan

Penyajian Kewajiban dalam neraca kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang Pemerintah Kota Pekanbaru disajikan di sisi pasiva. Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah Kota Pekanbaru dan jatuh temponya;
- Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
  - (1) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
    - Pengurangan pinjaman;
    - Modifikasi persyaratan utang;
    - Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
    - Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
    - Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
    - Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
  - (2) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
  - (3) Biaya pinjaman:
    - Perlakuan biaya pinjaman;
    - Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
    - Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan

#### 4.3.18. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 18 TENTANG PENDAPATAN-LRA

a. Definisi

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

### b. Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
- Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke BUD, dengan syarat setelah mendapat pengesahan dari PPKD selaku BUD.
- Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD.

### c. Pengukuran dan Penilaian

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia

### d. Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah :

- Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### 4.3.19. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 19 TENTANG BELANJA

##### a. Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari:

- Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial;



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

- Belanja Modal; dan
- Belanja Tak Terduga.
- Belanja Transfer

b. Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

c. Pengukuran dan Penilaian

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

d. Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, yaitu: belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

### 4.3.20. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 20 TENTANG AKUNTANSI PEMBIAYAAN

a. Definisi

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kota Pekanbaru terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.



## **PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

---

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari:

- 1) penerimaan pinjaman;
- 2) penjualan obligasi Pemerintah Kota Pekanbaru;
- 3) hasil privatisasi perusahaan daerah;
- 4) penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain;
- 5) penjualan investasi permanen lainnya; dan
- 6) pencairan dana cadangan.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain:

- 1) pemberian pinjaman kepada entitas lain, seperti dana bergulir;
- 2) penyertaan modal Pemerintah Kota Pekanbaru;
- 3) pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu; dan
- 4) pembentukan dana cadangan.

**b. Pengakuan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kecuali untuk SiLPA, dan untuk pengeluaran/pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

**c. Pengukuran Pembiayaan**

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

**d. Akuntansi Pembiayaan Neto**

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

**e. Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Dana Bergulir**

Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh Pemerintah Kota Pekanbaru apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.

Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.

Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.

Mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

f. Pengungkapan Pembiayaan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Kota Pekanbaru.
- Informasi lainnya yang dianggap perlu.

### 4.3.21. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 21 TENTANG PENDAPATAN-LO

a. Definisi

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kota Pekanbaru yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

b. Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); dan/atau
- Pendapatan direalisasi yaitu saat adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan-LO pada saat timbulnya hak atas pendapatan dilakukan untuk

- Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
- Pengakuan Pendapatan LO diakui pada saat adanya aliran masuk sumber daya



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

ekonomi untuk jenis pendapatan yang tidak harus didahului dengan penetapan.

- Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan self assessment system diakui pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau Rekening Kas Daerah tanpa terlebih dahulu menerbitkan ketetapan.
- Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan official assessment system diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan pajak. Timbulnya hak menagih tersebut adalah pada saat diterbitkan ketetapan.
- Pengakuan Pendapatan Transfer-LO yaitu pada saat kas diterima dan pada saat terdapat pengakuan kewajiban kurang salur oleh pihak yang melakukan transfer kepada entitas penerima.

c. Pengukuran dan Penilaian

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

d. Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah :

- Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- Informasi lainnya yang dianggap perlu.

### 4.3.22. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 22 TENTANG BEBAN

a. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).

b. Pengakuan

Beban diakui pada:

- Saat timbulnya kewajiban.

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

daerah.

- Saat terjadinya konsumsi aset.

Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Kota Pekanbaru.

- Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran atau pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

### c. Pengukuran dan Penilaian

Beban diukur sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan sesuai dengan:

- Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

### d. Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- Beban Operasi-LO, yang terdiri dari: Beban Pegawai-LO, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Lain-lain;
- Beban Transfer;
- Defisit Non Operasional; dan
- Beban Luar Biasa.

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

- Pengeluaran beban tahun berkenaan.
- Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
- Informasi lainnya yang dianggap perlu.

### 4.3.23. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 23 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, KESALAHAN, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI DAN OPERASI YANG DIHENTIKAN

#### a. Definisi

1. **Estimasi akuntansi** adalah perkiraan elemen laporan keuangan, item atau akun karena tidak adanya pengukuran yang tepat dan mempunyai dampak terhadap laporan keuangan.
2. **Kebijakan akuntansi** adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
3. **Kesalahan** adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
4. **Koreksi** adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
5. **Kesalahan periode sebelumnya** adalah pencatatan atau penyajian yang tidak sesuai dengan seharusnya dan dikoreksi dalam laporan keuangan tahun berjalan yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi andal yang:
  - a) Tersedianya pada saat laporan keuangan periode tersebut diotorisasi untuk terbit; dan
  - b) Secara rasional dapat diperoleh dan digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut.

Kesalahan tersebut termasuk dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta serta kecuramngan.

6. **Operasi yang dihentikan** adalah penghentian sebagian atau seluruh tugas dan fungsi suatu entitas tertentu yang dapat mengakibatkan beralihnya aset, dan kewajiban, serta berhentinya operasi.
7. **Perubahan estimasi akuntansi** adalah revisi estimasi karena terdapat informasi baru, tambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
8. **Penyajian kembali (restatement)** adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.

9. **Perubahan Kebijakan Akuntansi** adalah perubahan pilihan dari berbagai kebijakan akuntansi yang tersedia dalam SAP umumnya dan PSAP khususnya menjadi sebuah kebijakan akuntansi yang lain dibanding kebijakan akuntansi periode lalu bagi entitas.
10. **Prospektif** adalah penerapan kebijakan akuntansi baru yang hanya berdampak pada periode berjalan dan periode selanjutnya.
11. **Retrospektif**

Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

### **Kebijakan Akuntansi**

Ketika suatu PSAP secara spesifik mengatur suatu transaksi, peristiwa atau kondisi tertentu, maka kebijakan yang diterapkan menggunakan PASP dimaksud.

Dalam hal tidak ada PSAP yang secara spesifik mengatur transaksi, peristiwa atau kondisi tertentu, entitas menggunakan pertimbangan dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi, dengan mengacu pada sumber-sumber berikut ini, dengan hierarki :

- a) Ketentuan PSAP yang mengatur hal serupa dan berhubungan dengan kondisi, situasi atau transaksi terkait;
- b) Definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran untuk aset, kewajiban, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, arus kas dan perubahan ekuitas yang dijelaskan dalam Kerangka Konseptual.

Entitas memilih dan menetapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa lain, dan kondisi yang sejenis, kecuali suatu PSAP secara spesifik mengizinkan pengelompokan tersebut, maka suatu kebijakan akuntansi yang tepat harus dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok tersebut.

### **Perubahan Kebijakan Akuntansi**

Suatu entitas mengubah kebijakan akuntansi hanya apabila:

- a) Disyaratkan oleh suatu PSAP, atau
- b) Perubahan kebijakan akuntansi tersebut akan menghasilkan informasi yang lebih andal dan relevan terkait dengan pengaruh transaksi, peristiwa serta kondisi lain dalam penyajian laporan keuangan entitas.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi yang berpengaruh pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada Neraca, dan/atau Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan dalam Catatan Laporan Keuangan.

Bila entitas melakukan perubahan kebijakan akuntansi, entitas mengungkapkan :

- a) Sifat perubahan kebijakan akuntansi;
- b) Alasan penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang lebih andal dan relevan;
- c) Nilai penyesuaian untuk setiap item laporan keuangan yang terdampak perubahan kebijakan akuntansi untuk periode berjalan dan setiap periode sebelumnya yang disajikan, sepanjang memungkinkan;
- d) Laporan keuangan berikutnya tidak perlu mengulangi pengungkapan yang sama;
- e) Dalam hal perubahan kebijakan akuntansi disebabkan adanya penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang baru, maka pengungkapan ditambahkan dengan judul standar yang baru dan tanggal efektif penerapan standar tersebut.

### **Kesalahan**

Kesalahan yang ditemukan pada periode tahun berjalan dan kesalahan yang ditemukan setelah tanggal neraca, sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, dilakukan penyesuaian dalam laporan keuangan tahun berjalan.

Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

Kesalahan atas pencatatan aset yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, koreksi dilakukan dengan pembedaan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LRA dan belanja yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi dengan pembedaan pada akun LP SAL dan akun Neraca terkait.

Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LO dan beban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedaan pada akun neraca dan akun ekuitas terkait.

Kesalahan atas pencatatan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembedaan pada akun Neraca (kas) dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedaan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.



## **PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

---

Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo Ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan yang terjadi setelah laporan keuangan diotorisasi untuk terbit diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **Perubahan Kebijakan Akuntansi**

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **Perubahan Kelebihan Penerimaan Pendapatan**

Pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya diakui sebagai pengurang realisasi pendapatan pada tahun berjalan.

Pengembalian penerimaan pendapatan setelah laporan keuangan diotorisasi bukan merupakan kesalahan periode sebelumnya, sehingga pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan tersebut tidak diperlukan sebagai koreksi kesalahan namun sebagai pengurang realisasi pendapatan LRA maupun pendapatan LO tahun berjalan.

#### **Perubahan Estimasi Akuntansi**

Perubahan dasar pengukuran merupakan perubahan kebijakan akuntansi dan bukan merupakan perubahan estimasi akuntansi. Ketika perubahan kebijakan akuntansi dengan perubahan estimasi akuntansi tidak dapat dibedakan secara andal, perubahan diperlakukan sebagai perubahan estimasi.

#### **Operasi yang tidak dilanjutkan**

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus disajikan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

#### **4.3.24. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 24 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

Secara umum, Standar Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah mengacu pada seluruh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), kecuali diatur tersendiri dalam PSAP ini.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

BLUD merupakan instansi di lingkungan pemerintah daerah yang mengelola kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan sebagai instansi pemerintah, BLUD menerapkan pernyataan standar ini dalam menyusun laporan keuangan.

### a. Definisi

**Badan Layanan Umum Daerah** adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah dan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

**Laporan Keuangan BLUD** adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

### **Komponen-komponen Laporan Keuangan**

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan BLUD adalah:

- a) Laporan Realisasi Anggaran;
- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c) Neraca;
- d) Laporan Operasional (LO);
- e) Laporan Arus Kas;
- f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g) Catatan atas Laporan Keuangan.

### **Struktur dan Isi**

#### **Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Pendapatan-LRA;
- b) Belanja;
- c) Surplus/deficit;
- d) Penerimaan pembiayaan;
- e) Pengeluaran pembiayaan;
- f) Pembiayaan neto;
- g) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA); dan



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

- h) Pendapatan BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetorkan ke kas Daerah merupakan pendapatan daerah.

### Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a) Saldo Anggaran Lebih awal;
- b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
- e) Lain-lain; dan
- f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

BLUD juga menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca BLUD Pemerintah Kota Pekanbaru menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a) Kas dan setara kas;
- b) Investasi jangka pendek;
- c) Piutang dari kegiatan BLUD;
- d) Persediaan;
- e) Investasi jangka panjang;
- f) Aset tetap;
- g) Aset lainnya;
- h) Kewajiban Jangka Pendek;
- i) Kewajiban Jangka Panjang; dan
- j) Ekuitas.

Kas pada BLUD yang sudah dipertanggungjawabkan kepada SKPKD merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

Walaupun kepemilikan investasi pada BLUD ada pada SKPKD, tetapi investasi tersebut tetap dilaporkan pada laporan keuangan BLUD. Perlakuan pelaporan investasi ini selaras dengan status BLUD sebagai entitas pelaporan, di mana seluruh sumber daya ekonomi yang digunakan BLUD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD. SKPKD selaku BUD sebagai pemilik investasi melaporkan juga investasi yang dicatat oleh BLUD pada Laporan Keuangan BUD

### Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a) Pendapatan-LO;
- b) Beban;
- c) Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional;
- d) Kegiatan Non Operasional;
- e) Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa;
- f) Pos Luar Biasa; dan
- g) Surplus/Defisit-LO.

### Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas pada BLUD menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

### Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:

- a) Ekuitas awal;
- b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
  - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-6 periode sebelumnya; dan



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

- 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d) Ekuitas akhir.

### **Penggabungan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ke Dalam Laporan Keuangan Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan**

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya. Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum atau SKPKD. Laporan Perubahan SAL BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan SAL Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan entitas yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (reciprocal accounts) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan

### **Penghentian Satuan Kerja Badan Layanan Umum Menjadi Satuan Kerja Biasa**

Dalam hal satuan kerja tidak lagi menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, maka satuan kerja tersebut menyusun laporan keuangan selayaknya entitas akuntansi pemerintah lainnya, dan satuan kerja tersebut harus menyusun laporan keuangan penutup per tanggal pencabutan statusnya sebagai BLUD.

#### **4.3.25. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 25 TENTANG AKUNTANSI PERJANJIAN KONSESI JASA – PEMBERI KONSESI**

Tujuan dari pernyataan kebijakan ini adalah mengatur akuntansi perjanjian konsesi jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah selaku pemberi konsesi.

##### **a. Definisi**

Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemerintah daerah sebagai pemberi konsesi dan mitra.

Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa.

##### **b. Pengakuan Aset Konsesi Jasa**

Pemerintah daerah mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

- pemerintah daerah mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
- pemerintah daerah mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.
- Kebijakan akuntansi ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika persyaratan terpenuhi.

Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri dimana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset

c. Pengukuran Aset Konsesi Jasa

- Pemerintah daerah melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa sebesar nilai wajar, kecuali atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi.
- Reklasifikasi aset menjadi aset konsesi jasa diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.
- Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan kebijakan akuntansi Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.

d. Pengakuan Kewajiban atas Aset Konsesi Jasa

- Pemerintah daerah mengakui kewajiban pada saat pemerintah daerah mengakui aset konsesi jasa. diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa yaitu sebesar nilai wajar, disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemerintah daerah kepada mitra, atau sebaliknya.
- Pemerintah daerah tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra.

e. Pengukuran Kewajiban atas Aset Konsesi Jasa

Pemerintah daerah memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema kombinasi dari:

- a. pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (*financial liability model*);
- b. pemberian hak usaha kepada mitra (*grant of a right to the operator model*)



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

Pemerintah daerah mengakui kewajiban sebagai kewajiban keuangan dalam hal pemerintah daerah memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa.

Perlakuan atas kewajiban keuangan yang diakui berpedoman pada standar akuntansi mengenai instrumen keuangan. Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan dan ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra sesuai maksud perjanjian konsesi jasa, diakui sebagai beban. Pemerintah daerah mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi atau yang masih ditangguhkan sebagai kewajiban.

Pemerintah daerah memberikan imbalan berupa pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian aset konsesi jasa, dan pembayaran tersebut diakui sebagai belanja pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan beban pada Laporan Operasional (LO).

### **4.3.26. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 26 TENTANG AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI**

Tujuan dari pernyataan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi properti investasi dan pengungkapan yang terkait.

#### **a. Definisi**

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau:
- dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Apabila pemerintah daerah mengelola aset properti untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau memperoleh kenaikan nilai, maka aset tersebut termasuk dalam definisi properti investasi.

#### **b. Properti Investasi**

Pemerintah daerah dapat memiliki properti investasi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai dengan keadaan sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial; atau



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

- b. Pemerintah daerah memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya.

Dalam hal pemerintah daerah memiliki aset yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, penentuan klasifikasi asetnya sebagai berikut:

- a. apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, pemerintah daerah mempertanggungjawabkannya secara terpisah;
- b. apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

Untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah, transaksi properti investasi terjadi antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi tidak memenuhi definisi properti investasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Pesewa menyajikan aset tersebut sebagai properti investasi jika pola penyewaan dilakukan secara komersial, namun demikian untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasian aset tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi aset.

Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

### c. Pengakuan

Properti investasi diakui pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/perjanjian kerjasama atau berita acara serah terima (BAST) atau surat ketetapan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah. Untuk dapat diakui sebagai properti investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria:

- besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke pemerintah daerah di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

### d. Pengukuran saat pengakuan awal

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

e. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap yang berlaku. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi.

f. Penyajian Properti Investasi

Properti investasi disajikan sebagai aset non lancar pada neraca dalam mata uang rupiah. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.

g. Alih Guna

Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan. Alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri, dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Alih guna aset properti investasi menggunakan nilai tercatat pada saat dilakukannya alih guna.

h. Pelepasan

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat:

- pelepasan; atau
- ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen; atau
- tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasan.

Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar.



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

### BAB V

#### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

##### 5.1. PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Pekanbaru disajikan sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 112 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 35 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

##### 5.1.1. PENDAPATAN

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
2.753.144.818.421,38	2.479.247.340.045,65

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1 Rincian Pendapatan Daerah

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/ Kurang	%	Realisasi 2022
Pendapatan Asli Daerah	1.018.123.042.427,00	890.286.830.690,38	(127.836.211.736,62)	87,44	799.021.484.426,65
Pendapatan Transfer	1.899.849.290.220,00	1.862.857.987.731,00	(36.991.302.489,00)	98,05	1.680.225.855.620,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	---	-
Jumlah	2.917.972.332.647,00	2.753.144.818.421,38	(164.827.514.225,62)	94,35	2.479.247.340.045,65

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Tabel 5.1.1 diatas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.753.144.818.421,38 atau 94,35% dari anggaran sebesar Rp2.917.972.332.647,00 dan mengalami kenaikan realisasi sebesar Rp273.897.478.375,73 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp2.479.247.340.045,65

Berdasarkan rincian Pendapatan Daerah di atas, dapat dilihat pada Tahun Anggaran 2023, realisasi Pendapatan Tansfer memberikan kontribusi paling besar pada Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2023 yakni sebesar 67,66% dari total Pendapatan Daerah.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

Hal ini menunjukkan Pemerintah Kota Pekanbaru masih memiliki ketergantungan yang relatif tinggi terhadap pendanaan dari Pemerintah Pusat untuk menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya.

**5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah**

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
<b>890.286.830.690,38</b>	<b>799.021.484.425,65</b>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Tahun Anggaran 2023 yang telah diterima oleh Kas Daerah terdiri dari:

**Tabel 5.1.2 Rincian Pendapatan Asli Daerah**

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/ Kurang	%	Realisasi 2022
Pendapatan Pajak Daerah	838.721.740.651,00	784.892.588.210,00	(53.829.152.441,00)	93,58	719.418.610.925,80
Pendapatan Retribusi Daerah	62.161.000.082,00	26.824.967.951,00	(35.336.032.131,00)	43,15	16.500.827.908,00
Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.943.817.264,00	5.943.817.264,00	-	100,00	3.443.846.490,00
Lain-lain PAD yang Sah	111.296.484.430,00	72.625.457.265,38	(38.671.027.164,62)	65,25	59.658.199.101,85
<b>Jumlah</b>	<b>1.018.123.042.427,00</b>	<b>890.286.830.690,38</b>	<b>(127.836.211.736,62)</b>	<b>87,44</b>	<b>799.021.484.425,65</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Tabel 5.1.2 diatas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp890.286.830.690,38 atau 87,44% dari anggaran sebesar Rp1.018.123.042.427,00 dan mengalami kenaikan realisasi sebesar Rp91.265.346.264,73 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp799.021.484.425,65

Berdasarkan rincian PAD di atas, Pendapatan Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari target yang telah ditetapkan tidak memenuhi target Pendapatan Pajak Daerah.

Anggaran dan Realisasi Uraian Pendapatan Asli Daerah per SKPD Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.3 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Per Jenis Pendapatan Daerah per SKPD Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

SKPD	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang	%
<b>I. Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>838.721.740.651,00</b>	<b>784.892.588.210,00</b>	<b>(53.829.152.441,00)</b>	<b>93,58</b>
Badan Pendapatan Daerah	838.721.740.651,00	784.892.588.210,00	(53.829.152.441,00)	93,58
<b>II. Pendapatan Retribusi Daerah</b>	<b>62.161.000.082,00</b>	<b>26.824.967.951,00</b>	<b>(35.336.032.131,00)</b>	<b>43,15</b>
Dinas Kesehatan	358.198.000,00	246.276.000,00	(111.922.000,00)	68,75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.800.000.000,00	12.344.457.200,00	(3.455.542.800,00)	78,13
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	313.800.000,00	346.600.000,00	32.800.000,00	110,45
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.000.000.000,00	914.859.340,00	(85.140.660,00)	91,49



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

SKPD	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang	%
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	32.746.985.792,00	4.386.567.790,00	(28.360.418.002,00)	13,40
Dinas Perhubungan	5.468.520.000,00	3.542.558.506,00	(1.925.961.494,00)	64,78
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2.100.000.000,00	1.562.900.625,00	(537.099.375,00)	74,42
Dinas Pertanian dan Perikanan	650.000.000,00	574.546.300,00	(75.453.700,00)	88,39
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.464.910.000,00	1.133.903.200,00	(331.006.800,00)	77,40
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.258.586.290,00	1.772.298.990,00	(486.287.300,00)	0,00
<b>III. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>5.943.817.264,00</b>	<b>5.943.817.264,00</b>	-	<b>100,00</b>
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.943.817.264,00	5.943.817.264,00	-	100,00
<b>IV. Pendapatan Lain lain PAD yang Sah</b>	<b>111.296.484.430,00</b>	<b>72.625.457.265,38</b>	<b>(38.671.027.164,62)</b>	<b>65,25</b>
Dinas Kesehatan	36.523.493.818,00	32.261.055.207,71	<b>(4.262.438.610,29)</b>	88,33
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.000.000.000,00	41.200.000,00	<b>(1.958.800.000,00)</b>	2,06
Dinas Perhubungan	25.301.655.053,00	20.995.260.334,00	<b>(4.306.394.719,00)</b>	82,98
Dinas Kominfo	24.914.177,00	68.597.067,00	<b>43.682.890,00</b>	275,33
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	39.446.421.382,00	13.743.028.031,67	<b>(25.703.393.350,33)</b>	34,84
Badan Pendapatan Daerah	8.000.000.000,00	5.516.316.625,00	(2.483.683.375,00)	68,95
<b>Jumlah</b>	<b>1.018.123.042.427,00</b>	<b>890.286.830.690,38</b>	<b>(127.836.211.736,62)</b>	<b>87,44</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

**5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah**

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
<b>784.909.347.016,00</b>	<b>719.418.610.925,80</b>

Pendapatan Pajak Daerah merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Pajak Daerah adalah pendapatan yang sifatnya memaksa dan tarifnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru. Pemungutan dan pengelolaan pendapatan pajak daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah per 31 Desember 2023 dan realisasi Tahun Anggaran 2023 dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.1.4. Rincian Pendapatan Pajak Daerah**

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/ Kurang	%	Realisasi 2022
Pajak Hotel	43.000.000.000,00	47.258.290.299,00	4.258.290.299,00	109,90	40.575.959.444,00
Pajak Restoran	133.999.999.999,00	140.233.444.897,00	6.233.444.898,00	104,65	122.480.347.886,80
Pajak Hiburan	18.000.000.001,00	18.154.112.772,00	154.112.771,00	100,86	15.818.557.793,00
Pajak Reklame	30.000.000.000,00	34.619.938.493,00	4.619.938.493,00	115,40	28.661.352.274,00
Pajak Penerangan Jalan	151.000.000.000,00	156.951.389.265,00	5.951.389.265,00	103,94	147.071.137.194,00
Pajak Parkir	20.000.000.000,00	20.635.230.899,00	635.230.899,00	103,18	16.466.099.821,00



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/ Kurang	%	Realisasi 2022
Pajak Air Bawah Tanah	11.500.000.000,00	12.128.843.473,00	628.843.473,00	105,47	12.169.495.871,00
Pajak Sarang Burung Walet	75.000.000,00	89.254.500,00	14.254.500,00	119,01	104.323.500,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.000.000,00	12.915.095,00	2.915.095,00	129,15	9.152.040,00
Pajak Bumi dan bangunan sektor perkotaan	240.330.054.433,00	151.017.226.127,00	(89.312.828.306,00)	62,84	149.222.073.128,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	190.806.686.218,00	203.808.701.196,00	13.002.014.978,00	106,81	186.840.111.974,00
<b>Jumlah</b>	<b>838.721.740.651,00</b>	<b>784.909.347.016,00</b>	<b>(53.812.393.635,00)</b>	<b>93,58</b>	<b>719.418.610.925,80</b>
<i>Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru</i>					(65.490.736.090,20)

Tabel 5.1.4 di atas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp784.909.347.016,00 atau 93,58% dari anggaran sebesar Rp838.721.740.651,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp65.490.736.090,20 dibandingkan realisasi Tahun 2022 adalah sebesar Rp719.418.610.925,80.

Pengelolaan pajak daerah menggunakan dua metode yaitu :

1. *Self-assesment.*

*Self-assesment* memberikan tanggung jawab dan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk berinisiatif mendaftarkan diri guna mendapatkan NPWPD, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. Jenis pajak yang menggunakan *self-assesment* adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan BPHTB.

2. *Official-assesment.*

*Official-assesment* merupakan sistem pengelolaan pajak yang memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besaran pajak terutang, di mana Wajib Pajak bersifat pasif, utang pajak timbul setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang ditandatangani oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Jenis Pajak yang digolongkan kedalam *official-assesment* adalah Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah, serta Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan rincian penerimaan Pajak Daerah di atas, terdapat 10 (sepuluh) jenis pajak daerah melampaui target pendapatan yang ditetapkan, sedangkan 1 (satu) jenis pajak masih dibawah target. Realisasi Pendapatan Daerah yang paling besar adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp12.915.095,00 dan berkontribusi sebesar 129,15 % total realisasi pajak daerah.

Beberapa jenis pajak yang belum mencapai target disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan, dengan pencapaian 62,84% disebabkan Terjadi Kenaikan target yang cukup signifikan pada tahun 2024 sebesar 37,34% dari target tahun 2022. Kenaikan target ini dipicu oleh adanya potensi Piutang PBB yang



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

sebelumnya berstatus Fasilitas Umum (Fasum) yang kemudian ditetapkan kembali sebagai Piutang PBB pada tahun berjalan.

- b. Tidak Optimalnya penerimaan Piutang PBB-P2 s.d 31 Desember 2023 karena masih banyak Data Subjek dan Objek Pajak PBB-P2 yang belum dimutakhirkan sehingga menghambat pendistribusian SPPT PBB-P2 kepada Wajib Pajak

**5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah**

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
26.824.967.951,00	16.500.827.908,00

Pendapatan Retribusi Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Untuk pengelolaan dan pemungutan Pendapatan Retribusi Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unit penghasil.

Retribusi Daerah merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa retribusi daerah dibagi menjadi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Realisasi Retribusi Daerah yang telah dipungut selama Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

**Tabel 5.1.5. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah**

*(dalam rupiah)*

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/ Kurang	%	Realisasi 2022
Retribusi Jasa Umum	42.260.093.792,00	11.118.125.955,00	(31.141.967.837,00)	26,31	11.358.338.726,00
Retribusi Jasa Usaha	4.097.386.290,00	3.358.884.796,00	(738.501.494,00)	81,98	1.560.568.182,00
Retribusi Perizinan Tertentu	15.803.520.000,00	12.347.957.200,00	(3.455.562.800,00)	78,13	3.581.921.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>62.161.000.082,00</b>	<b>26.824.967.951,00</b>	<b>(35.336.032.131,00)</b>	<b>43,15</b>	<b>16.500.827.908,00</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Tabel 5.1.5 di atas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp26.824.967.951,00 atau 43,15% dari anggaran sebesar Rp62.161.000.082,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp10.324.140.043,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp16.500.827.908,00. Tidak ada jenis retribusi daerah yang melampaui target penerimaan.

**Tabel 5.1.6. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per SKPD**

*(dalam rupiah)*

NO	SKPD	JENIS RETRIBUSI	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	LEBIH / KURANG
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	32.746.985.792,00	4.386.567.790,00	(28.360.418.002,00)
2	Dinas Perumahan dan Pemukiman	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	120.000.000,00	180.150.000,00	60.150.000,00
	Dinas Perumahan dan Pemukiman	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	193.800.000,00	166.450.000,00	(27.350.000,00)
3	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Retribusi Pelayanan Pasar	1.034.910.000,00	627.284.000,00	(407.626.000,00)



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

NO	SKPD	JENIS RETRIBUSI	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	LEBIH / KURANG
4	Dinas Perhubungan	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	4.500.000.000,00	2.953.745.000,00	(1.546.255.000,00)
	Dinas Perhubungan	Retribusi Terminal	15.000.000,00	15.660.000,00	660.000,00
		Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	950.000.000,00	569.653.506,00	
	Dinas Perhubungan	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.520.000,00	3.500.000,00	(20.000,00)
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.000.000.000,00	914.859.340,00	(85.140.660,00)
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	400.000.000,00	492.619.200,00	92.619.200,00
6	Dinas Komunikasi Informatika, statistik	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.	2.100.000.000,00	1.562.900.625,00	(537.099.375,00)
7	Dinas Kesehatan	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	246.276.000,00	246.276.000,00
		Retribusi Pelayanan Kesehatan	358.198.000,00	-	
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	30.000.000,00	14.000.000,00	(16.000.000,00)
9	Dinas Pertanian dan Perikanan	Retribusi Rumah Potong Hew an	650.000.000,00	574.546.300,00	(75.453.700,00)
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	15.800.000.000,00	12.344.457.200,00	(3.455.542.800,00)
11	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.258.586.290,00	1.772.298.990,00	(486.287.300,00)
	<b>Jumlah</b>		<b>62.161.000.082,00</b>	<b>26.824.967.951,00</b>	<b>(35.336.032.131,00)</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

**Tabel 5.1.7. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Per Jenis Pendapatan Retribusi Daerah per SKPD Tahun Anggaran 2023**

*(dalam rupiah)*

SKPD	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang	%
<b>I. RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>62.161.000.082,00</b>	<b>26.824.967.951,00</b>	<b>(35.336.032.131,00)</b>	<b>43,15</b>
<b>A. Retribusi Jasa Umum</b>	<b>42.260.093.792,00</b>	<b>11.118.125.955,00</b>	<b>(31.141.967.837,00)</b>	<b>26,31</b>
<b>1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan</b>	<b>32.746.985.792,00</b>	<b>4.386.567.790,00</b>	<b>(28.360.418.002,00)</b>	<b>13,40</b>
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	32.746.985.792,00	4.386.567.790,00	(28.360.418.002,00)	13,40
<b>2. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>180.150.000,00</b>	<b>60.150.000,00</b>	<b>150,13</b>
Dinas Perumahan dan Pemukiman	120.000.000,00	180.150.000,00	60.150.000,00	150,13
<b>3. Retribusi Pelayanan Pasar</b>	<b>1.034.910.000,00</b>	<b>627.284.000,00</b>	<b>(407.626.000,00)</b>	<b>60,61</b>
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.034.910.000,00	627.284.000,00	(407.626.000,00)	60,61
<b>4. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor</b>	<b>4.500.000.000,00</b>	<b>2.953.745.000,00</b>	<b>(1.546.255.000,00)</b>	<b>65,64</b>
Dinas Perhubungan	4.500.000.000,00	2.953.745.000,00	(1.546.255.000,00)	65,64
<b>5. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>914.859.340,00</b>	<b>(85.140.660,00)</b>	<b>91,49</b>
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.000.000.000,00	914.859.340,00	(85.140.660,00)	91,49



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

SKPD	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang	%
<b>6.Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>492.619.200,00</b>	<b>92.619.200,00</b>	<b>123,15</b>
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	400.000.000,00	492.619.200,00	92.619.200,00	123,15
<b>7.Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.</b>	<b>2.100.000.000,00</b>	<b>1.562.900.625,00</b>	<b>(537.099.375,00)</b>	<b>74,42</b>
Dinas Komunikasi Informatika, statistik	2.100.000.000,00	1.562.900.625,00	(537.099.375,00)	74,42
<b>Retribusi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>358.198.000,00</b>	<b>-</b>	<b>(358.198.000,00)</b>	<b>0,00</b>
Dinas Kesehatan	358.198.000,00	-	(358.198.000,00)	0,00
<b>B. Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>4.097.386.290,00</b>	<b>3.358.884.796,00</b>	<b>(738.501.494,00)</b>	<b>81,98</b>
<b>1.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	<b>2.482.386.290,00</b>	<b>2.199.024.990,00</b>	<b>(283.361.300,00)</b>	<b>88,59</b>
Dinas Kesehatan	-	246.276.000,00	246.276.000,00	0,00
Dinas Perumahan dan Pemukiman	193.800.000,00	166.450.000,00	(27.350.000,00)	85,89
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	30.000.000,00	14.000.000,00	(16.000.000,00)	46,67
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.258.586.290,00	1.772.298.990,00	(16.000.000,00)	78,47
<b>2.Retribusi Terminal</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>104,40</b>
Dinas Perhubungan	15.000.000,00	15.660.000,00	660.000,00	104,40
<b>3.Retribusi Rumah Potong Hewan</b>	<b>650.000.000,00</b>	<b>574.546.300,00</b>	<b>(75.453.700,00)</b>	<b>88,39</b>
Dinas Pertanian dan Perikanan	650.000.000,00	574.546.300,00	(75.453.700,00)	88,39
<b>4.Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan</b>	<b>950.000.000,00</b>	<b>569.653.506,00</b>	<b>(380.346.494,00)</b>	<b>59,96</b>
Dinas Perhubungan	950.000.000,00	569.653.506,00	(380.346.494,00)	59,96
<b>C. Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>15.803.520.000,00</b>	<b>12.347.957.200,00</b>	<b>(3.455.562.800,00)</b>	<b>78,13</b>
<b>1.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan</b>	<b>15.800.000.000,00</b>	<b>12.344.457.200,00</b>	<b>(3.455.542.800,00)</b>	<b>78,13</b>
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.800.000.000,00	12.344.457.200,00	(3.455.542.800,00)	78,13
<b>2.Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>(20.000,00)</b>	<b>99,43</b>
Dinas Perhubungan	3.520.000,00	3.500.000,00	(20.000,00)	99,43

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, konversi untuk Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2020 dijelaskan sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

- Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.
- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Retribusi Pelayanan Pasar.
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

2. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :
  - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
  - Retribusi Terminal.
  - Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila.
  - Retribusi Rumah Potong Hewan.
  - Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :
  - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
  - Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan PAD yang berhubungan langsung dengan Pelayanan Umum Pemerintahan dan dapat dirinci pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.8. Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum**

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/ Kurang	%	Realisasi 2022
Retribusi Pelayanan Kesehatan	358.198.000,00	-	-	0,00	-
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	32.746.985.792,00	4.386.567.790,00	(28.360.418.002,00)	13,40	4.207.945.765,00
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	120.000.000,00	180.150.000,00	60.150.000,00	150,13	169.350.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	1.034.910.000,00	627.284.000,00	(407.626.000,00)	60,61	662.331.500,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	4.500.000.000,00	2.953.745.000,00	(1.546.255.000,00)	65,64	2.764.098.775,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	400.000.000,00	492.619.200,00	92.619.200,00	123,15	429.548.000,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.000.000.000,00	914.859.340,00	(85.140.660,00)	91,49	957.542.186,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	2.100.000.000,00	1.562.900.625,00	(537.099.375,00)	74,42	2.167.522.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>42.260.093.792,00</b>	<b>11.118.125.955,00</b>	<b>(30.783.769.837,00)</b>	<b>26,31</b>	<b>11.358.338.726,00</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Dari Tabel 5.1.8 di atas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp11.118.125.955,00 atau 26,31% dari anggaran sebesar Rp42.260.093.792,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp240.212.771,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp11.358.338.726,00.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Retribusi Jasa Umum dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun 2023 hanya dikelola Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan target Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp32.746.985.792,00 dengan realisasi sebesar Rp4.386.567.790,00 atau sebesar 13,40%.
  - b) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat merupakan target Retribusi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan retribusi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurusan serta pembakaran/pengabuan mayat target pada Tahun 2023 sebesar Rp120.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp180.150.000,00.
  - c) Retribusi Pelayanan Pasar berada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan dengan target penerimaan Tahun 2023 sebesar Rp1.034.910.000,00 yang terbagi pada 3 (tiga) jenis retribusi yaitu retribusi pelataran, retribusi los dan retribusi kios dengan realisasi sebesar Rp627.284.000,00 atau sebesar 60,61%.
  - d) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor berada pada Dinas Perhubungan dengan target Tahun 2023 sebesar Rp4.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.953.745.000,00 atau 65,64%.
  - e) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan target retribusi yang berada pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian yaitu Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Untuk Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp400.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.492.619.200,00 atau 123,15%.
  - f) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran target Tahun 2023 berada pada Dinas Pemadam Kebakaran ditargetkan sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp914.859.340,00 yang terdapat pada Dinas Pemadam Kebakaran atau 91,49% .
  - g) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp2.100.000.000,00 dengan realisasi Rp1.562.900.625,00 atau 74,42%.
- b. Retribusi Jasa Usaha

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha merupakan sumber pendapatan PAD yang berhubungan dengan pemakaian Aset Daerah. Retribusi Jasa Usaha dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.1.9. Rincian Retribusi Jasa Usaha**

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/ Kurang	%	Realisasi 2022
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.482.386.290,00	2.199.024.990,00	(283.361.300,00)	88,59	365.529.000,00
Retribusi Terminal	15.000.000,00	15.660.000,00	660.000,00	104,40	15.050.000,00
Retribusi Rumah Potong Hew an	650.000.000,00	574.546.300,00	(75.453.700,00)	88,39	599.290.500,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	950.000.000,00	569.653.506,00	(380.346.494,00)	59,96	580.698.682,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.097.386.290,00</b>	<b>3.358.884.796,00</b>	<b>(738.501.494,00)</b>	<b>81,98</b>	<b>1.560.568.182,00</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dari Tabel 5.1.9 di atas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp3.358.884.796,00 atau 81,98% dari anggaran sebesar Rp4.097.386.290,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.798.316.614,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.560.568.182,00.

Retribusi Jasa Usaha dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dikelola oleh 4 (empat) SKPD, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.10. Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per SKPD Tahun Anggaran 2023**

*(dalam rupiah)*

SKPD	Anggaran (2023)	Realisasi (2023)	Lebih/ Kurang	%
Dinas Kesehatan	-	246.276.000,00	246.276.000,00	---
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	193.800.000,00	166.450.000,00	(27.350.000,00)	85,89
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	30.000.000,00	14.000.000,00	(16.000.000,00)	46,67
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.258.586.290,00	1.772.298.990,00	(486.287.300,00)	78,47
<b>Jumlah</b>	<b>2.482.386.290,00</b>	<b>2.199.024.990,00</b>	<b>(283.361.300,00)</b>	<b>88,59</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

- b) Retribusi Terminal berada pada Dinas Perhubungan dengan target Tahun 2023 sebesar Rp15.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp15.660.000,00 atau 104,40%.
- c) Retribusi Rumah Potong Hewan berada pada Dinas Pertanian dan Perikanan dengan target Tahun 2023 sebesar Rp650.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp574.546.300,00 atau 88,39%.
- d) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan berada pada Dinas Perhubungan dengan target Tahun 2023 sebesar Rp950.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp569.653.506,00 atau 59,96%.
- e) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari tiga jenis perizinan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.1.11. Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu**

*(dalam rupiah)*

Uraian	Anggaran (2023)	Realisasi (2023)	Lebih / Kurang	%	Realisasi (2022)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	15.800.000.000,00	12.344.457.200,00	(3.455.542.800,00)	78,13	3.578.295.600,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.520.000,00	3.500.000,00	(20.000,00)	99,43	3.625.400,00
<b>Jumlah</b>	<b>15.803.520.000,00</b>	<b>12.347.957.200,00</b>	<b>(3.455.562.800,00)</b>	<b>78,13</b>	<b>3.581.921.000,00</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dari Tabel 5.1.11 di atas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp12.347.957.200,00 atau 78,13% dari anggaran sebesar Rp15.803.520.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp5.562.265.300,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp3.581.921.000,00.

Retribusi Perizinan Tertentu dapat dirinci sebagai berikut:

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan target Tahun 2023 sebesar Rp15.800.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp12.344.457.200,00 atau 78,13%.
- Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum berada pada Dinas Perhubungan dengan target Tahun 2023 sebesar Rp3.520.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.500.000,00 atau 99,43%.

### 5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
5.943.817.264,00	3.443.846.490,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dividen/bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan bersumber dari Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD).

Untuk Tahun Anggaran 2023, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari:

**Tabel 5.1.12. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/ Kurang	%	Realisasi 2022
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.061.656.530,00	3.061.656.530,00	-	100,00	3.112.899.838,00
Bank Riau kepri	3.061.656.530,00	3.061.656.530,00	-	100,00	3.112.899.838,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)	2.882.160.734,00	2.882.160.734,00	-	100,00	330.946.652,00
PT. Bumi Siak Pusako	2.882.160.734,00	2.882.160.734,00	-	100,00	330.946.652,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.943.817.264,00</b>	<b>5.943.817.264,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>3.443.846.490,00</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

Dari Tabel 5.1.12 di atas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp5.943.817.2640,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp5.943.817.2640,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp2.499.970.774,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 adalah sebesar Rp3.443.846.490,00. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022 hanya berasal dari penerimaan dividen dari PT. Bank Riau Kepri sebesar Rp3.061.656.530,00 dan dividen dari PT. Bumi Siak Pusako sebesar Rp2.882.160.734,00, sementara penyertaan modal Pemerintah Kota Pekanbaru pada PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru, PT. BPR Pekanbaru dan PDAM Kota Pekanbaru pada Tahun 2023 tidak menghasilkan dividen.

**5.1.1.1.4.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
72.608.698.459,38	59.658.199.101,85

Akun Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.13. Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / Kurang	%	Realisasi 2022
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.926.476.000,00	2.194.164.500,00	(732.311.500,00)	74,98	370.927.500,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	7.585.736.726,00	2.048.757.168,00	(5.536.979.558,00)	27,01	1.181.857.748,91
3	Jasa Giro	4.832.211.462,00	1.842.361.695,00	(2.989.849.767,00)	38,13	1.478.990.215,00
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	7.975.656,00	9.021.956,00	1.046.300,00	113,12	5.095.924,00
5	Pendapatan Bunga	-	-	-	---	108.904.110,00
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.781.495.867,00	426.662.376,46	(2.354.833.490,54)	15,34	37.800.000,00
7	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	150.000.146,00	152.906.983,00	2.906.837,00	101,94	92.680.393,00
8	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	28.315.368,00	111.502.001,20	83.186.633,20	393,79	104.403.865,00
9	Pendapatan Denda Pajak Daerah	7.850.000.000,00	5.346.650.982,00	(2.503.349.018,00)	68,11	476.184.420,00
10	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	2.015.854.577,00	1.680.064.967,00	(335.789.610,00)	83,34	1.917.258.328,00
11	Pendapatan dari Pengembalian	20.784.010.157,00	7.110.158.189,01	(13.673.851.967,99)	34,21	10.764.000.138,44
12	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	2.000.200.000,00	41.600.000,00	(1.958.600.000,00)	2,08	1.211.844.946,00
13	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	-	-	-	---	-
14	Pendapatan BLUD	60.334.208.471,00	51.644.847.641,71	(8.689.360.829,29)	85,60	41.908.251.513,50
15	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	-	-	-	---	-
	<b>Jumlah</b>	<b>111.296.484.430,00</b>	<b>72.608.698.459,38</b>	<b>(38.687.785.970,62)</b>	<b>65,24</b>	<b>59.658.199.101,85</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Dari Tabel 5.1.13 di atas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp72.608.698.459,38 atau 65,24% dari anggaran sebesar Rp111.296.484.430,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp12.950.499.357,53 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp59.658.199.101,85.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

Pendapatan dari hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan berasal dari proses penghapusan BMD yang terdiri dari penjualan alat angkutan, alat kantor dan rumah tangga serta aset lainnya. Pada tahun 2023 terjadi kenaikan nilai dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp370.927.500,00 menjadi Rp2.194.164.500,00. Kota pekanbaru saat ini menjalin kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) dengan beberapa perusahaan, yaitu:

- CV. Putra Bertuah / PT. Riau Kerta Raharja (Pasar Sail)
- PT. Dalena PI (Pasar Bawah)
- PT. Peputra Mahajaya (Pasar Senapelan)
- PT. Makmur Papan Permata (Pasar Sukaramai)
- PT. Agung Rafa Bonai, KSO (Pasar Induk)

Pendapatan jasa giro berasal dari seluruh rekening bank Pemerintah Kota Pekanbaru, baik rekening kas daerah maupun rekening kas bendahara. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan nilai dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1.478.990.215,00 menjadi Rp1.842.361.695,00.

Pendapatan dari hasil pengelolaan dana bergulir berasal dari pengembalian dana dari Program Ekonomi Kerakyatan (PEK) dan Pengentasan Kemiskinan (Taskin). Pada tahun 2023 terjadi penurunan nilai dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp5.095.924,00 menjadi Rp9.021.956,00.

Pendapatan bunga berasal dari bunga deposito. Pada tahun 2023 terjadi penurunan nilai dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp108.904.110,00 menjadi Rp0,00.

Pendapatan penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah berasal dari TPTGR non Bendahara. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan nilai dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp37.800.000,00 menjadi Rp426.662.376,46.

Pendapatan penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain pada tahun 2023 terjadi peningkatan nilai dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp92.680.393,00 menjadi Rp152.906.983,00.

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada tahun 2023 terjadi peningkatan nilai dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp104.403.865,00 menjadi Rp111.502.001,20.

Pendapatan denda pajak daerah tahun 2023 terjadi peningkatan nilai dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp476.184.420,00 menjadi Rp5.346.650.982,00.

Pendapatan denda retribusi daerah tahun 2023 terjadi penurunan nilai dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1.917.258.328,00 menjadi Rp1.680.064.967,00.

Pendapatan dari pengembalian berasal dari pengembalian gaji, perjalanan dinas, dan dana hibah. Pada tahun 2023 terjadi penurunan nilai dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp10.764.000.138,44,00 menjadi Rp7.110.158.189,01.

Pendapatan BLUD merupakan pendapatan yang diterima oleh Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, Rumah Sakit Madani dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang berasal dari JKN dan Retribusi Pelayanan



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

Kesehatan dan BLUD parkir serta BLUD Trans Metro pada Dinas Perhubungan dengan realisasi sebesar Rp51.644.847.641,71. Rincian Pendapatan BLUD sebagai berikut:

**Tabel 5.1.14. Rincian Penerimaan BLUD Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

No.	Nama Puskesmas	Jenis Penerimaan				Total
		Jasa Layanan Umum	Dana Kapitasi	Dana Non Kapitasi	Pendapatan Lain yang Sah	
1	SIMPANG TIGA	146.840.000,00	1.988.817.082,00	-	-	2.135.657.082,00
2	SIDOMLYO RI	51.797.000,00	943.494.070,00	-	-	995.291.070,00
3	TENAYAN RAYA	77.930.100,00	1.445.239.839,00	-	-	1.523.169.939,00
4	KARYA WANITA	15.900.000,00	1.090.324.562,00	-	-	1.106.224.562,00
5	MUARA FAJAR	12.177.000,00	513.313.894,00	-	-	525.490.894,00
6	LANGSAT	17.951.000,00	571.869.658,00	-	-	589.820.658,00
7	MELUR	51.407.000,00	920.168.510,00	-	-	971.575.510,00
8	SENAPELAN	44.694.000,00	1.124.326.333,00	-	-	1.169.020.333,00
9	RUMBAI	80.774.000,00	1.082.835.050,00	-	-	1.163.609.050,00
10	UMBAN SARI	14.934.880,00	1.336.971.718,00	-	-	1.351.906.598,00
11	RUMBAI BUKIT	20.832.000,00	517.046.707,00	-	-	537.878.707,00
12	PAYUNG SEKAKI	33.004.000,00	1.725.697.005,00	-	-	1.758.701.005,00
13	SIMPANG BARU	52.825.000,00	584.213.369,00	-	-	637.038.369,00
14	SIDOMLYO RJ	68.918.000,00	1.740.958.180,00	-	-	1.809.876.180,00
15	GARUDA	44.098.500,00	1.381.519.700,00	-	-	1.425.618.200,00
16	HARAPAN RAYA	39.242.000,00	1.173.294.364,00	-	-	1.212.536.364,00
17	SAIL	51.769.000,00	897.787.447,00	-	-	949.556.447,00
18	REJOSARI	51.021.000,00	2.544.261.572,00	-	-	2.595.282.572,00
19	LIMAPULUH	40.456.000,00	1.074.953.608,00	-	-	1.115.409.608,00
20	PEKANBARU KOTA	63.985.000,00	932.589.433,00	-	-	996.574.433,00
21	SAPTA TARUNA	44.791.000,00	554.001.035,00	-	-	598.792.035,00
22	RS MADANI	7.092.025.591,71	-	-	-	7.092.025.591,71
23	BLUD PARKIR	14.143.417.311,00	-	-	-	14.143.417.311,00
24	BLUD Transmetro	5.240.375.123,00	-	-	-	5.240.375.123,00
<b>Jumlah</b>		<b>27.501.164.505,71</b>	<b>24.143.683.136,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51.644.847.641,71</b>

Sumber : Kertas Kerja Pendapatan dan Belanja BLUD Tahun Anggaran 2023

**5.1.1.2. Pendapatan Transfer**

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
<b>1.862.857.987.731,00</b>	<b>1.680.225.855.620,00</b>

Pendapatan Transfer merupakan akun untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan, transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan transfer Pemerintah Daerah Lainnya, serta Bantuan Keuangan. Untuk Tahun Anggaran 2023 Pendapatan Transfer yang telah diterima oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Kas Daerah terdiri dari:



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

**Tabel 5.1.15. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer**  
(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/ Kurang	%	Realisasi 2022
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.510.329.218.000,00	1.519.391.551.743,00	9.062.333.743,00	100,60	1.375.146.123.683,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	-	-	-	-	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah	389.520.072.220,00	343.466.435.988,00	(46.053.636.232,00)	88,18	305.079.731.937,00
Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.899.849.290.220,00</b>	<b>1.862.857.987.731,00</b>	<b>(36.991.302.489,00)</b>	<b>98,05</b>	<b>1.680.225.855.620,00</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Dari Tabel 5.1.15 di atas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.862.857.987.731,00 atau 98,05% dari anggaran sebesar Rp1.899.849.290.220,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp182.632.132.111,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.680.225.855.620,00.

### 5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
<b>1.519.391.551.743,00</b>	<b>1.375.146.123.683,00</b>

Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan, dan Dana Insentif Daerah untuk Tahun Anggaran 2023 yang disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Beberapa regulasi yang menjadi pedoman dalam perhitungan Transfer Pemerintah Pusat, yaitu:

- Peraturan Presiden RI Nomor 104 tahun 2021 tanggal 29 November 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2022;
- Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2022.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dimana realisasi penerimaan akun ini terdiri dari:

**Tabel 5.1.16. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / Kurang	%	Realisasi 2022
1	Dana Perimbangan	1.491.150.617.000,00	1.500.212.950.743,00	(9.062.333.743,00)	100,61	1.375.146.123.683,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)	19.178.601.000,00	19.178.601.000,00	-	100,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>1.510.329.218.000,00</b>	<b>1.519.391.551.743,00</b>	<b>(9.062.333.743,00)</b>	<b>100,60</b>	<b>1.375.146.123.683,00</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Dari Tabel 5.1.16 di atas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.519.391.551.743,00 atau 100,60% dari anggaran sebesar Rp1.510.329.218.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp144.245.428.060,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.375.146.123.683,00.

Realisasi pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2023 adalah sebesar Rp19.178.601.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp19.178.601.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp19.178.601.000,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp0,00.

Rincian Penerimaan Bagi Dana Perimbangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.17. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / Kurang	%	Realisasi 2022
1	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH)	270.596.736.000,00	292.039.521.136,00	21.442.785.136,00	107,92	246.485.534.861,00
2	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum (DAU)	867.954.823.000,00	867.953.880.162,00	(942.838,00)	100,00	790.284.259.030,00
3	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	33.387.348.000,00	32.786.713.679,00	(600.634.321,00)	98,20	55.839.140.812,00
4	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	319.211.710.000,00	307.432.835.766,00	(11.778.874.234,00)	96,31	282.537.188.980,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.491.150.617.000,00</b>	<b>1.500.212.950.743,00</b>	<b>9.062.333.743,00</b>	<b>100,61</b>	<b>1.375.146.123.683,00</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Dari Tabel 5.1.17 di atas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.500.212.950.743,00 atau 100,61% dari anggaran sebesar Rp1.491.150.617.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp125.066.827.060,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.375.146.123.683,00. Nominal transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan yang paling besar diterima dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp867.953.880.162,00, sedangkan penerimaan yang melebihi target adalah Dana Bagi Hasil sebesar Rp292.039.521.136,00 atau 107,92%.

Realisasi pendapatan Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH) dapat dirinci sebagai berikut:



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

**Tabel 5.1.18. Rincian dan Realisasi Pendapatan Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH)**

*(dalam rupiah)*

No	PMK Tahun 2023	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi Hak TA 2022 di TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 atau s.d 31 Des 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6=(4+5)/3	7
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	42.878.417.000,00	42.878.417.000,00	2.539.923.741,00	105,92	45.418.340.741,00
2	DBH PPh Pasal 21	99.198.703.000,00	99.198.703.000,00	10.384.587.996,00	110,47	109.583.290.996,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOFDN	7.447.954.000,00	7.447.954.000,00	903.070.389,00	112,13	8.351.024.389,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	930.578.282,00	473.894,00	0,00	931.052.176,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	90.452.404.000,00	90.452.404.000,00	9.800.654.097,00	110,84	100.253.058.097,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	7.490.489.000,00	7.490.489.000,00	593.812.442,00	107,93	8.084.301.442,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	2.894.090.000,00	2.894.090.000,00	312.759.995,00	110,81	3.206.849.995,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	18.974.738.000,00	14.232.837.229,00	718.825.071,00	78,80	14.951.662.300,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.259.941.000,00	1.048.187.789,00	211.753.211,00	100,00	1.259.941.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>270.596.736.000,00</b>	<b>266.573.660.300,00</b>	<b>25.465.860.836,00</b>	<b>107,92</b>	<b>292.039.521.136,00</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Realisasi pendapatan Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil Tahun 2023 sebesar Rp292.039.521.136,00 yang terdiri dari penerimaan piutang Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil tahun 2021 sebesar Rp25.465.860.836,00 dan penerimaan Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil TA. 2022 sebesar Rp246.485.534.861,00.

**5.1.1.2.2. Transfer Antar Daerah**

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
<b>343.466.435.988,00</b>	<b>305.079.731.937,00</b>

Pendapatan transfer antar daerah yang terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan kepada Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023 yang diterima dari Pemerintah Provinsi Riau.

Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.19. Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah**

*(dalam rupiah)*

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/ Kurang	%	Realisasi 2022
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	366.620.587.420,00	320.607.751.188,00	(46.012.836.232,00)	87,45	290.850.417.394,00
Bantuan Keuangan	22.899.484.800,00	22.858.684.800,00	(40.800.000,00)	99,82	14.229.314.543,00
<b>Jumlah</b>	<b>389.520.072.220,00</b>	<b>343.466.435.988,00</b>	<b>(46.053.636.232,00)</b>	<b>88,18</b>	<b>305.079.731.937,00</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Dari Tabel 5.1.19 di atas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp343.466.435.988,00 atau 88,18% dari anggaran sebesar Rp389.520.072.220,00 dan



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

mengalami kenaikan sebesar Rp38.386.704.051,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp305.079.731.937,00, terlihat bahwa secara keseluruhan realisasi penerimaan Tahun 2023 melampaui target yang terdapat pada jenis penerimaan berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dengan realisasi sebesar Rp290.850.417.394,04 atau 124,00%.

### 5.1.1.3.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
0,00	0,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023 sebesar Rp0,00 yang terdiri dari pendapatan hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 5.1.2.BELANJA

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
2.748.798.260.184,38	2.492.666.952.346,35

Sebagai penerapan dari kebijakan belanja daerah berdasarkan jenis terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Rincian mengenai alokasi belanja daerah dan realisasi pengeluaran yang telah dilakukan baik melalui Kas Daerah maupun Bendahara Pengeluaran SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.20. Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/ Kurang	%	Realisasi 2022
Belanja Operasi	2.575.063.645.278,00	2.432.229.639.203,50	(142.834.006.074,50)	94,45	2.163.366.634.652,36
Belanja Modal	329.213.621.778,00	315.807.494.723,88	(13.406.127.054,12)	95,93	328.335.985.976,99
Belanja Tidak Terduga	8.383.324.782,00	761.126.257,00	(7.622.198.525,00)	9,08	964.331.717,00
Belanja Transfer	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.912.660.591.838,00</b>	<b>2.748.798.260.184,38</b>	<b>(163.862.331.653,62)</b>	<b>94,37</b>	<b>2.492.666.952.346,35</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Dari Tabel 5.1.20 di atas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.748.798.260.184,38 atau 94,37% dari anggaran sebesar Rp2.912.660.591.838,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp256.131.307.838,03 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp2.492.666.952.346,35 terlihat bahwa realisasi seluruh jenis belanja berada di bawah alokasi anggaran yang disediakan dengan realisasi terendah pada akun Belanja Tidak Terduga yaitu sebesar 9,08%.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

**5.1.2.1. Belanja Operasi**

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
2.432.229.639.203,38	2.163.366.634.652,36

Belanja Operasi merupakan pos pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kota Pekanbaru yang memberi manfaat jangka pendek. Pos Belanja Operasi terdiri dari:

**Tabel 5.1.21. Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja Operasi**

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2022
Belanja Pegawai	950.745.441.134,00	917.756.173.837,00	(32.989.267.297,00)	96,53	908.095.040.997,56
Belanja Barang dan Jasa	1.509.953.297.830,00	1.401.017.172.439,50	(108.936.125.390,50)	92,79	1.174.095.944.026,80
Belanja Bunga	-	-	-	0,00	-
Belanja Subsidi	1.966.314.147,00	1.115.804.147,00	(850.510.000,00)	56,75	7.283.227.572,00
Belanja Hibah	112.398.592.167,00	112.340.488.780,00	(58.103.387,00)	99,95	73.892.422.056,00
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	---	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.575.063.645.278,00</b>	<b>2.432.229.639.203,50</b>	<b>(142.834.006.074,50)</b>	<b>94,45</b>	<b>2.163.366.634.652,36</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Dari Tabel 5.1.21 di atas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.432.229.639.203,50 atau 94,45% dari anggaran sebesar Rp2.575.063.645.278,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp268.863.004.551,14 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp2.163.366.634.652,36. Penjelasan atas realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 sebagai berikut:

- Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp917.756.173.837,00 atau 96,53%, dapat dirinci berdasarkan jenis sebagai berikut:

**Tabel 5.1.22. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai**

(dalam rupiah)

No.	Jenis Belanja Pegawai	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/ Kurang	%	Realisasi 2022
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	484.491.573.587,00	481.897.950.510,00	(2.593.623.077,00)	99,46	497.307.648.586,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	234.262.994.978,00	213.714.374.501,00	(20.548.620.477,00)	91,23	250.403.638.916,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	191.134.841.121,00	181.798.843.527,00	(9.335.997.594,00)	95,12	122.468.800.532,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	34.595.357.578,00	34.275.789.008,00	(319.568.570,00)	99,08	33.101.944.443,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDHWKDH	830.546.102,00	671.475.141,00	(159.070.961,00)	80,85	453.366.225,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDHWKDH	1.392.480.000,00	1.389.120.000,00	(3.360.000,00)	99,76	1.011.040.000,00
7	Insentif Pemungutan Pajak	-	-	-	---	-
8	Insentif Pemungutan Retribusi	-	-	-	---	-
9	Belanja Pegawai BLUD	4.037.647.768,00	4.008.621.150,00	(29.026.618,00)	-	3.348.602.295,56
10	Belanja Pegawai BOS	-	-	-	---	-
<b>J U M L A H</b>		<b>950.745.441.134,00</b>	<b>917.756.173.837,00</b>	<b>(32.989.267.297,00)</b>	<b>96,53</b>	<b>908.095.040.997,56</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Dari Tabel 5.1.22 di atas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp917.756.173.837,00 atau 96,53% dari anggaran sebesar Rp950.745.441.134,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp9.661.132,839,44 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp908.095.040.997,56.



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai per SKPD Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.1.23. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per SKPD

(dalam rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%	Realisasi 2022
1	Dinas Pendidikan	405.027.763.049,00	395.286.269.340,00	9.741.493.709,00	97,59	384.920.743.732,00
2	Dinas Kesehatan	151.599.072.854,00	144.933.959.909,00	6.665.112.945,00	95,60	140.095.237.402,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.997.920.948,00	9.073.106.560,00	924.814.388,00	90,75	9.274.614.394,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.593.745.426,00	5.330.425.885,00	263.319.541,00	95,29	5.140.318.179,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	9.756.928.880,00	9.318.467.304,00	438.461.576,00	95,51	9.498.334.345,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.472.411.446,00	4.264.689.434,00	207.722.012,00	95,36	4.576.532.094,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6.831.282.932,00	6.494.938.670,00	336.344.262,00	95,08	6.376.452.244,00
8	Dinas Sosial	4.502.877.434,00	4.302.544.233,00	200.333.201,00	95,55	4.162.832.878,00
9	Dinas Tenaga Kerja	4.469.536.138,00	4.265.286.504,00	204.249.634,00	95,43	3.907.092.314,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.439.204.788,00	4.237.966.825,00	201.237.963,00	95,47	4.553.444.509,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	3.201.824.360,00	3.040.683.644,00	161.140.716,00	94,97	3.782.803.841,00
12	Dinas Pertahanan	3.306.261.232,00	3.161.699.071,00	144.562.161,00	95,63	3.308.263.107,00
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	7.388.193.288,00	7.046.067.647,00	342.125.641,00	95,37	7.097.932.020,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.514.787.760,00	9.043.876.492,00	470.911.268,00	95,05	9.226.171.523,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.586.347.250,00	3.398.802.618,00	187.544.632,00	94,77	3.900.620.264,00
16	Dinas Perhubungan	14.205.563.994,00	13.569.193.303,00	636.370.691,00	95,52	12.646.475.747,56
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4.115.305.944,00	3.853.154.710,00	262.151.234,00	93,63	4.290.417.280,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	4.128.484.118,00	3.930.855.066,00	197.629.052,00	95,21	4.285.430.527,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.314.642.546,00	10.761.941.228,00	552.701.318,00	95,12	10.815.108.480,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4.321.205.592,00	4.124.537.915,00	196.667.677,00	95,45	4.368.265.906,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.218.520.858,00	6.891.537.322,00	326.983.536,00	95,47	6.254.684.047,00
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.866.431.576,00	4.649.600.348,00	216.831.228,00	95,54	4.693.441.630,00
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	10.399.225.312,00	9.867.444.771,00	531.780.541,00	94,89	9.643.409.365,00
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	6.916.838.804,00	6.533.146.486,00	383.692.318,00	94,45	7.677.574.308,00
25	Sekretariat Daerah	23.166.709.137,00	21.711.274.614,00	1.455.434.523,00	93,72	21.119.469.184,00
26	Sekretariat DPRD	42.862.707.480,00	42.193.168.152,00	669.539.308,00	98,44	41.126.298.510,00
27	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	6.393.901.782,00	6.068.669.461,00	325.232.321,00	94,91	6.783.756.669,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10.413.125.550,00	9.978.073.930,00	435.051.620,00	95,82	13.673.484.635,00
29	Badan Pendapatan Daerah	44.431.416.847,00	43.923.020.871,00	508.395.976,00	98,86	38.228.237.654,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.916.767.861,00	7.496.951.344,00	419.816.517,00	94,70	7.773.998.472,00
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	4.680.224.022,00	4.453.919.031,00	226.304.991,00	95,16	4.626.502.451,00
32	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	13.055.346.400,00	12.368.904.931,00	686.441.469,00	94,74	13.433.145.888,00
33	Kecamatan Bukit Raya	6.855.237.476,00	6.546.229.988,00	309.007.488,00	95,49	6.905.789.776,00
34	Kecamatan Tenayan Raya	8.156.407.098,00	7.774.921.694,00	381.485.404,00	95,32	7.941.314.705,00
35	Kecamatan Sail	4.650.094.288,00	4.433.267.269,00	216.827.019,00	95,34	4.683.024.907,00



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

No	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%	Realisasi 2022
36	Kecamatan Lima Puluh	4.712.749.558,00	4.501.571.471,00	211.178.087,00	95,52	4.715.086.643,00
37	Kecamatan Pekanbaru Kota	5.298.488.694,00	5.031.607.344,00	266.881.350,00	94,96	5.681.252.229,00
38	Kecamatan Sukajadi	7.239.857.768,00	6.906.851.404,00	333.006.364,00	95,40	7.577.841.705,00
39	Kecamatan Payung Sekaki	6.359.927.874,00	6.057.100.785,00	302.827.089,00	95,24	6.457.269.509,00
40	Kecamatan Senapelan	5.485.861.480,00	5.234.681.035,00	251.180.445,00	95,42	5.925.914.127,00
41	Kecamatan Marpoyan Damai	8.097.269.310,00	7.751.468.891,00	345.800.419,00	95,73	8.071.073.161,00
42	Kecamatan Binawidya	7.231.745.984,00	6.916.767.469,00	314.978.515,00	95,64	7.016.775.739,00
43	Kecamatan Tuah Madani	6.474.220.030,00	6.177.911.570,00	296.308.460,00	95,42	6.433.988.494,00
44	Kecamatan Rumbai	5.757.322.130,00	5.483.043.701,00	274.278.429,00	95,24	5.711.184.017,00
45	Kecamatan Rumbai Timur	4.491.684.842,00	4.273.872.408,00	217.812.434,00	95,15	4.174.499.388,00
46	Kecamatan Rumbai Barat	5.201.306.440,00	4.948.920.289,00	252.386.151,00	95,15	5.067.971.493,00
47	Kecamatan Kulim	5.959.675.260,00	5.663.059.506,00	296.615.754,00	95,02	5.818.000.132,00
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.679.017.314,00	4.480.721.394,00	198.295.920,00	95,76	4.652.961.353,00
	<b>Jumlah</b>	<b>950.745.441.134,00</b>	<b>917.756.173.837,00</b>	<b>32.989.267.297,00</b>	<b>96,53</b>	<b>908.095.040.997,56</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

b. Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.401.017.172.439,50.

**Tabel 5.1.24. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa per jenis**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/ Kurang	%	Realisasi 2022
1	Belanja Barang	455.094.840.723,00	414.978.938.507,00	(40.115.902.216,00)	91,19	253.864.137.676,00
2	Belanja Jasa	645.957.781.003,00	603.757.954.093,26	(42.199.826.909,74)	93,47	500.365.329.462,00
4	Belanja Pemeliharaan	106.411.368.034,00	100.604.786.800,07	(5.806.581.233,93)	94,54	74.295.225.356,66
3	Belanja Perjalanan Dinas	67.685.577.100,00	58.620.384.287,00	(9.065.192.813,00)	86,61	57.425.699.804,00
4	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	111.808.314.005,00	107.820.493.105,55	(3.987.820.899,45)	80,43	158.109.487.486,00
5	Belanja Barang dan Jasa BOS	80.930.422.268,00	80.334.273.574,00	(596.148.694,00)	-	84.175.207.219,50
6	Belanja Barang dan Jasa BLUD	42.064.994.697,00	34.900.342.072,62	(7.164.652.624,38)	82,97	45.860.857.022,64
	<b>J U M L A H</b>	<b>1.509.953.297.830,00</b>	<b>1.401.017.172.439,50</b>	<b>(108.936.125.390,50)</b>	<b>92,79</b>	<b>1.174.095.944.026,80</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Dari Tabel 5.1.24 di atas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.401.017.172.439,50 atau 92,79% dari anggaran sebesar Rp1.509.953.297.830,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp226.921.228.412,70 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.174.095.944.026,80.

c. Pos Belanja Subsidi menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.115.804.147,00 atau 56,75% dari anggaran sebesar Rp1.966.314.147,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp6.167.423.425,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp7.283.227.572,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pembayaran LS pada Dinas Perhubungan Atas Belanja Hutang Subsidi 2021 (Tunda Bayar) pada Sub. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

Kabupaten/Kota DISHUB T.A 2023 sebesar Rp966.314.147,00 pada tanggal 29 Desember 2023.

2. Pembayaran LS pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Belanja Subsidi kepada BUMD (Subsidi Bunga kepada PT. BPR Pekanbaru Madani untuk Pelaku Usaha Mikro) pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Dinas Koperasi UKM Kota Pekanbaru TA. 2023 sebesar Rp149.490.000,00.

d. Pos Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp112.398.592.167,00. Rincian realisasi pos belanja ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.25. Rincian Belanja Hibah**

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2022
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	4.017.939.680,00	3.990.044.100,00	(27.895.580,00)	99,31	4.443.058.100,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	52.162.097.100,00	51.678.009.100,00	(484.088.000,00)	99,07	19.982.435.000,00
Belanja Hibah Dana BOS	52.144.435.387,00	52.598.315.580,00	453.880.193,00	100,87	48.263.341.330,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	4.074.120.000,00	4.074.120.000,00	-	100,00	1.203.587.626,00
<b>Jumlah</b>	<b>112.398.592.167,00</b>	<b>112.340.488.780,00</b>	<b>(58.103.387,00)</b>	<b>99,95</b>	<b>73.892.422.056,00</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Dari Tabel 5.1.25 di atas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp112.340.488.780,00 atau 99,95% dari anggaran sebesar Rp112.398.592.167,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp38.448.066.724,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp73.892.422.056,00

Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah per SKPD Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.26. Belanja Hibah per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**

(dalam rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	66.492.335.387,00	66.816.027.580,00	(323.692.193,00)	(0,48)
2	Dinas Kesehatan	850.000.000,00	500.000.000,00	350.000.000,00	70,00
3	Dinas Sosial	126.100.000,00	122.200.000,00	3.900.000,00	3,19
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.018.200.000,00	1.018.200.000,00	-	0,00
5	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	0,00
6	Sekretariat Daerah	5.763.979.680,00	5.736.084.100,00	27.895.580,00	0,49
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	35.147.977.100,00	35.147.977.100,00	-	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>112.398.592.167,00</b>	<b>112.340.488.780,00</b>	<b>58.103.387,00</b>	<b>0,05</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci pada tabel berikut:



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

**Tabel 5.1.27. Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2023**

(dalam rupiah)

No.	Penerima Bantuan Keuangan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/Kurang	%
1	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	158.700.000,00	158.700.000,00	-	100,00
2	Partai Gerindra	682.300.000,00	682.300.000,00	-	100,00
3	Partai Amanat Nasional (PAN)	529.690.000,00	529.690.000,00	-	100,00
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	482.430.000,00	482.430.000,00	-	100,00
5	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	183.990.000,00	183.990.000,00	-	100,00
6	Partai Golongan Karya	462.540.000,00	462.540.000,00	-	100,00
7	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	348.180.000,00	348.180.000,00	-	100,00
8	Partai Demokrat	581.860.000,00	581.860.000,00	-	100,00
9	Partai Nasdem	-	-	-	---
10	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	664.430.000,00	664.430.000,00	-	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.094.120.000,00</b>	<b>4.094.120.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

- e. Pos Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp0,00 dan realisasi Rp0,00 atau 0,00%, dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00.

**5.1.2.2. Belanja Modal**

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
<b>315.807.494.723,88</b>	<b>328.335.985.976,99</b>

Belanja Modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran dan realisasi belanja modal Pemerintah Kota Pekanbaru pada Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

**Tabel 5.1.28. Rincian Belanja Modal**

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2022
Belanja Tanah	2.383.706.824,00	769.811.525,00	1.613.895.299,00	32,29	8.509.166.113,00
Belanja Peralatan dan Mesin	79.397.383.653,00	75.888.516.195,00	3.508.867.458,00	95,58	108.335.049.831,00
Belanja Gedung dan Bangunan	95.922.266.444,00	94.006.938.248,86	1.915.328.195,14	98,00	77.949.693.104,00
Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	134.454.097.534,00	128.207.813.682,02	6.246.283.851,98	95,35	121.218.807.527,99
Belanja Aset Tetap Lainnya	16.907.852.323,00	16.786.410.073,00	121.442.250,00	99,28	12.215.030.401,00
Belanja Aset Lainnya	148.315.000,00	148.005.000,00	310.000,00	99,79	108.239.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>329.213.621.778,00</b>	<b>315.807.494.723,88</b>	<b>13.406.127.054,12</b>	<b>95,93</b>	<b>328.335.985.976,99</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dari Tabel 5.1.28 di atas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp315.807.494.723,88 atau 95,93% dari anggaran sebesar Rp329.213.621.778,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp12.528.491.253,11 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp328.335.985.976,99. Realisasi Belanja Modal ini dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD selama Tahun Anggaran 2023.

Terdapat perbedaan antara jumlah realisasi Belanja Modal sebesar Rp315.807.494.723,88 dengan yang dicatat sebagai aset tetap sebesar Rp249.325.685.882,00 hasil dari pengadaan Tahun Anggaran 2023. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- Realisasi Belanja modal tidak seluruhnya akan menjadi aset tetap dan aset lainnya, walaupun secara penganggaran telah dianggarkan pada kode rekening belanja modal. Setelah dilakukan penghitungan dengan membuat kertas kerja penghitungan belanja modal per kegiatan dan per jenis aset, seringkali terdapat belanja modal yang ternyata berupa barang persediaan. Apabila ditemukan hal demikian, maka nilai yang ditemukan tersebut akan dipisahkan menjadi belanja modal bukan aset tetap;
- Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota yang mengatur mengenai aset tetap, terhadap belanja modal yang tidak memenuhi batas kapitalisasi akan direklasifikasi menjadi barang yang bukan aset tetap, ditetapkan dan akan dicatat dalam catatan *extracomptable* dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan; dan
- Terdapat komponen Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa yang menjadi bagian nilai perolehan/atribusi aset tetap dan aset lainnya.

Belanja modal Pemerintah Kota Pekanbaru pada Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

- Belanja Modal Tanah.

Tahun Anggaran 2023 belanja modal untuk pembelian tanah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.29. Belanja Modal Tanah**

*(dalam rupiah)*

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2022
Belanja Modal Tanah Persil	-	-	-	---	1.125.016.000,00
Belanja Modal Lapangan	2.383.706.824,00	769.811.525,00	(1.613.895.299,00)	32,29	7.384.150.113,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.383.706.824,00</b>	<b>769.811.525,00</b>	<b>(1.613.895.299,00)</b>	<b>32,29</b>	<b>8.509.166.113,00</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Dari Tabel 5.1.29 di atas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp769.811.525,00 atau 32,29% dari anggaran sebesar Rp2.383.706.824,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp7.739.354.588,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp8.509.166.113,00. Pengadaan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 berada di Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.1.30. Belanja Modal Tanah per OPD

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2022
<b>1. Belanja Modal Tanah Persil</b>					
Dinas Pertanahan	-	-	-	---	1.125.016.000,00
<b>2. Belanja Modal Lapangan</b>					
Dinas Pertanahan	2.383.706.824,00	769.811.525,00	(1.613.895.299,00)	32,29	7.384.150.113,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.383.706.824,00</b>	<b>769.811.525,00</b>	<b>(1.613.895.299,00)</b>	<b>32,29</b>	<b>8.509.166.113,00</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

### b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Untuk belanja modal pengadaan peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2023 secara jenis dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 5.1.31. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Alat Besar	8.510.361.500,00	8.172.329.000,00	(338.032.500,00)	96,03	471.280.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	5.194.648.400,00	5.042.655.000,00	(151.993.400,00)	97,07	22.457.039.000,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	87.873.600,00	74.750.000,00	(13.123.600,00)	85,07	1.073.909.246,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	-	-	-	---	-
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	22.816.302.294,00	21.715.293.910,00	(1.101.008.384,00)	95,17	38.454.096.112,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.794.910.025,00	1.641.009.800,00	(153.900.225,00)	91,43	13.595.990.300,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	11.288.014.843,00	11.081.071.937,00	(206.942.906,00)	98,17	6.257.329.576,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	5.955.053.500,00	5.928.682.170,00	(26.371.330,00)	99,56	411.529.631,00
9	Belanja Modal Komputer	9.680.902.984,00	8.806.686.720,00	(874.216.264,00)	90,97	12.247.761.700,00
10	Belanja Modal Alat Eksplorasi	-	-	-	---	55.000.000,00
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	5.750.000,00	5.750.000,00	-	100,00	63.270.000,00
12	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	186.430.125,00	185.619.000,00	(811.125,00)	99,56	-
13	Belanja Modal Rambu Rambu	2.772.000.000,00	2.750.379.010,00	(21.620.990,00)	99,22	394.506.501,00
14	Belanja Modal Peralatan Olahraga	-	-	-	---	49.000.000,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	7.867.088.822,00	7.550.893.451,00	(316.195.371,00)	95,98	8.983.358.373,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.238.047.560,00	2.933.396.197,00	(304.651.363,00)	90,59	3.820.979.392,00
<b>Jumlah</b>	<b>79.397.383.653,00</b>	<b>75.888.516.195,00</b>	<b>- 3.508.867.458,00</b>	<b>95,58</b>	<b>108.335.049.831,00</b>	

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Dari Tabel 5.1.31 di atas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp75.888.516.195,00 atau 95,58% dari anggaran sebesar Rp79.397.383.653,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp32.446.533.636,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp108.335.049.831.



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.1.32. Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD

(dalam rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	14.866.381.152,00	14.512.551.451,00	(353.829.701,00)	(2,44)
2	Dinas Kesehatan	19.286.600.267,00	18.820.730.304,00	(465.869.963,00)	(2,48)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.890.228.510,00	8.742.690.000,00	(147.538.510,00)	(1,69)
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.051.280.700,00	1.650.953.000,00	(400.327.700,00)	(24,25)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	360.973.600,00	343.885.300,00	(17.088.300,00)	(4,97)
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.562.439.000,00	3.372.040.000,00	(190.399.000,00)	(5,65)
7	Dinas Sosial	11.580.000,00	-	(11.580.000,00)	#DIV/0!
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	126.682.700,00	125.888.900,00	(793.800,00)	(0,63)
9	Dinas Ketahanan Pangan	190.000.000,00	188.953.000,00	(1.047.000,00)	(0,55)
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.830.100.750,00	1.730.434.000,00	(99.666.750,00)	(5,76)
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	946.083.000,00	897.985.800,00	(48.097.200,00)	(5,36)
12	Dinas Perhubungan	3.622.834.900,00	3.473.156.810,00	(149.678.090,00)	(4,31)
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	294.730.200,00	253.655.000,00	(41.075.200,00)	(16,19)
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	111.313.400,00	104.007.000,00	(7.306.400,00)	(7,02)
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.660.348.050,00	3.982.862.110,00	(677.485.940,00)	(17,01)
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	114.448.000,00	114.039.000,00	(409.000,00)	(0,36)
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	475.000.000,00	467.376.000,00	(7.624.000,00)	(1,63)
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	87.966.800,00	87.780.000,00	(186.800,00)	(0,21)
19	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	91.500.000,00	-	(91.500.000,00)	#DIV/0!
20	Sekretariat Daerah	10.481.820.300,00	10.247.562.320,00	(234.257.980,00)	(2,29)
21	Sekretariat DPRD	907.290.700,00	897.320.700,00	(9.970.000,00)	(1,11)
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.750.082.974,00	1.672.403.000,00	(77.679.974,00)	(4,64)
23	Badan Pendapatan Daerah	2.277.894.200,00	2.148.464.400,00	(129.429.800,00)	(6,02)
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	111.577.800,00	102.425.000,00	(9.152.800,00)	(8,94)
25	Badan Penelitian dan Pengembangan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	0,00
26	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	81.565.400,00	-	(81.565.400,00)	#DIV/0!
27	Kecamatan Bukit Raya	112.510.200,00	112.210.000,00	(300.200,00)	(0,27)
28	Kecamatan Sail	68.019.000,00	67.765.500,00	(253.500,00)	(0,37)
29	Kecamatan Lima Puluh	239.425.400,00	221.454.000,00	(17.971.400,00)	(8,12)
30	Kecamatan Pekanbaru Kota	15.040.600,00	15.030.000,00	(10.600,00)	(0,07)
31	Kecamatan Sukajadi	117.434.800,00	105.580.000,00	(11.854.800,00)	(11,23)
32	Kecamatan Payung Sekaki	176.459.600,00	-	(176.459.600,00)	#DIV/0!
33	Kecamatan Marpoyan Damai	262.020.250,00	257.348.300,00	(4.671.950,00)	(1,82)
34	Kecamatan Binawidya	359.562.400,00	353.430.000,00	(6.132.400,00)	(1,74)
35	Kecamatan Rumbai	434.301.800,00	401.683.300,00	(32.618.500,00)	(8,12)
36	Kecamatan Rumbai Timur	223.381.700,00	223.183.000,00	(198.700,00)	(0,09)
37	Kecamatan Rumbai Barat	9.490.800,00	9.379.000,00	(111.800,00)	(1,19)
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	181.514.700,00	176.790.000,00	(4.724.700,00)	(2,67)
<b>Jumlah</b>		<b>79.397.383.653,00</b>	<b>75.888.516.195,00</b>	<b>(3.508.867.458,00)</b>	<b>(4,62)</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

### c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Belanja modal gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.1.33. Belanja Modal Bangunan dan Gedung**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	95.375.813.844,00	93.633.894.380,77	(1.741.919.463,23)	98,17	73.974.813.854,00
2	Belanja Modal Monumen	-	-	-	---	-
3	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-	-	---	663.546.000,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	546.452.600,00	373.043.868,09	(173.408.731,91)	68,27	3.311.333.250,00
	<b>Jumlah</b>	<b>95.922.266.444,00</b>	<b>94.006.938.248,86</b>	<b>(1.915.328.195,14)</b>	<b>98,00</b>	<b>77.949.693.104,00</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Dari Tabel 5.1.33 di atas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp94.006.938.248,86 atau 98,00% dari anggaran sebesar Rp95.922.266.444,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp16.057.245.144,86 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp77.949.693.104,00

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung per SKPD Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.34. Belanja Modal Bangunan dan Gedung per SKPD**

(dalam rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	55.705.287.153,00	54.488.339.052,34	(1.216.948.100,66)	(2,23)
2	Dinas Kesehatan	7.129.952.600,00	6.886.574.868,09	(243.377.731,91)	(3,53)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26.560.700.230,00	26.157.240.278,43	(403.459.951,57)	(1,54)
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.215.410.000,00	1.205.883.000,00	(9.527.000,00)	(0,79)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	127.421.000,00	126.440.900,00	(980.100,00)	(0,78)
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	152.100.000,00	149.300.000,00	(2.800.000,00)	(1,88)
7	Dinas Ketahanan Pangan	181.440.000,00	181.149.000,00	(291.000,00)	(0,16)
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	200.000.000,00	196.966.000,00	(3.034.000,00)	(1,54)
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	362.880.000,00	362.035.945,00	(844.055,00)	(0,23)
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	793.050.000,00	791.513.000,00	(1.537.000,00)	(0,19)



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

No	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
11	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.644.919.836,00	1.623.625.000,00	(21.294.836,00)	(1,31)
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	332.640.000,00	331.613.225,00	(1.026.775,00)	(0,31)
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	-	0,00
14	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	-	-	-	#DN/0!
15	Kecamatan Bukit Raya	403.185.625,00	398.066.980,00	(5.118.645,00)	0,00
16	Kecamatan Payung Sekaki	100.000.000,00	99.400.000,00	(600.000,00)	(0,60)
17	Kecamatan Bina Widya	1.013.280.000,00	1.008.791.000,00	(4.489.000,00)	(0,44)
18	Kecamatan Binawidya	-	-	-	#DN/0!
<b>Jumlah</b>		<b>95.922.266.444,00</b>	<b>94.006.938.248,86</b>	<b>(1.915.328.195,14)</b>	<b>(2,04)</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

c. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Tahun Anggaran 2023, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.35. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	91.411.848.564,00	89.364.576.363,02	(2.047.272.200,98)	97,76	77.414.113.563,52
2	Belanja Modal Bangunan Air	38.074.075.150,00	35.615.946.900,00	(2.458.128.250,00)	93,54	27.319.669.964,47
3	Belanja Modal Instalasi	4.968.173.820,00	3.227.290.419,00	(1.740.883.401,00)	64,96	347.705.000,00
4	Belanja Modal Jaringan	-	-	-	---	15.172.191.000,00
5	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	-	-	-	---	965.128.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>134.454.097.534,00</b>	<b>128.207.813.682,02</b>	<b>(6.246.283.851,98)</b>	<b>95,35</b>	<b>121.218.807.527,99</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Dari Tabel 5.1.35 di atas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp128.207.813.682,02 atau 95,35% dari anggaran sebesar Rp134.454.097.534,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp6.989.006.154,03 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp121.218.807.527,99.

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci pada tabel berikut:



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

**Tabel 5.1.36. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD**  
**Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	Dinas Kesehatan	200.000.000,00	198.153.000,00	(1.847.000,00)	(0,93)
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.976.552.714,00	14.298.868.582,02	(1.677.684.131,98)	(11,73)
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	117.155.886.000,00	112.656.692.800,00	(4.499.193.200,00)	(3,99)
4	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	251.785.000,00	251.300.000,00	(485.000,00)	0,00
5	Dinas Ketahanan Pangan	176.700.000,00	176.398.000,00	(302.000,00)	(0,17)
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	568.173.820,00	502.330.000,00	(65.843.820,00)	(13,11)
7	Sekretariat Daerah	125.000.000,00	124.071.300,00	(928.700,00)	(0,75)
<b>Jumlah</b>		<b>134.454.097.534,00</b>	<b>128.207.813.682,02</b>	<b>(6.246.283.851,98)</b>	<b>(4,87)</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja Modal aset tetap lainnya pada Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.37. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	44.125.000,00	43.807.600,00	(317.400,00)	99,28	866.263.200,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	33.772.000,00	28.527.000,00	(5.245.000,00)	84,47	83.793.900,00
3	Belanja Modal Tanaman	-	-	-	---	99.200.000,00
4	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	-	-	-	---	-
5	Belanja Modal Hewan	-	-	-	---	-
6	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	130.000.000,00	129.257.000,00	(743.000,00)	99,43	1.255.305.000,00
7	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.979.000.000,00	1.673.370.750,00	(305.629.250,00)	84,56	669.359.140,00
8	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	14.545.253.523,00	14.743.457.723,00	198.204.200,00	101,36	8.717.509.161,00
9	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	175.701.800,00	167.990.000,00	(7.711.800,00)	95,61	523.600.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>16.907.852.323,00</b>	<b>16.786.410.073,00</b>	<b>(121.442.250,00)</b>	<b>99,28</b>	<b>12.215.030.401,00</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Dari Tabel 5.1.37 di atas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp16.786.410.073,00 atau 99,28% dari anggaran sebesar Rp16.907.852.323,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp4.571.379.672,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp12.215.030.401,00.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.38. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per SKPD**

(dalam rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	14.545.253.523,00	14.743.457.723,00	198.204.200,00	1,34
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	383.772.000,00	178.510.000,00	(205.262.000,00)	(114,99)
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	130.000.000,00	129.257.000,00	(743.000,00)	(0,57)
5	Dinas Pertanahan	130.000.000,00	128.676.750,00	(1.323.250,00)	0,00
6	Dinas Perhubungan	175.701.800,00	167.990.000,00	(7.711.800,00)	(4,59)
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	44.125.000,00	43.807.600,00	(317.400,00)	(0,72)
8	Sekretariat DPRD	650.000.000,00	648.461.000,00	(1.539.000,00)	(0,24)
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	196.000.000,00	97.680.000,00	(98.320.000,00)	(100,66)
	Badan Pendapatan Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	-	0,00
8	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia	248.000.000,00	244.400.000,00	(3.600.000,00)	(1,47)
9	Inspektorat Daerah	75.000.000,00	74.370.000,00	(630.000,00)	(0,85)
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	80.000.000,00	79.800.000,00	(200.000,00)	(0,25)
	<b>Jumlah</b>	<b>16.907.852.323,00</b>	<b>16.786.410.073,00</b>	<b>(121.442.250,00)</b>	<b>(0,72)</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

e. Belanja Modal Aset Lainnya.

Belanja Modal aset lainnya pada Tahun Anggaran 2023 adalah merupakan Belanja Modal Aset lainnya dengan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp148.005.000,00 atau 99,79% dari anggaran sebesar Rp148.315.000,00 yang berada pada Dinas Kesehatan sebesar Rp48.840.000,00 dan Dinas Perhubungan sebesar Rp99.165.000,00, dan mengalami kenaikan sebesar Rp39.766.000,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp108.239.000,00.

**5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga**

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
<b>761.126.257,00</b>	<b>964.331.717,00</b>

Belanja tidak terduga dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah. Belanja tidak terduga juga dapat digunakan untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada Tahun-Tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dipergunakan untuk:

**Tabel 5.1.39. Rencana dan Realisasi Belanja Tidak Terduga**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi BTT 2023
1	2	3
1	Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau TA 2022 yang Dialokasikan Pada Tahun Anggaran 2023 sesuai SK Walkota Nomor 22 Tahun 2023 Pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana	20.126.257,00
2	SPJ TU BTT Santunan Kematian Tahap I	500.000.000,00
3	Pembayaran Belanja Tak Terduga Untuk Pengembalian Pajak Daerah Lebih Bayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan An. Arif Budi Pratama Tahun Anggaran 2022 yang Dialokasikan Pada TA. 2023	2.000.000,00
4	SPJ TU BTT Santunan Kematian Tahap II Ke Dinas Sosial	200.000.000,00
5	SPJ TU BTT Santunan Kematian Tahap III	39.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>761.126.257,00</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dari Tabel 5.1.39 di atas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp761.126.257,00 atau 9,08% dari anggaran sebesar Rp8.383.324.782,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp203.205.460,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp964.331.717,00. Realisasi Belanja Tidak Terduga sesuai dengan Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Tahun 2023, penanganan Bencana Alam-Banjir, dan pengembalian terhadap lebih setor pendapatan. Sedangkan pada tahun 2023, realisasi Belanja Tidak Terduga merupakan tindaklanjut arahan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan dan jajarannya, Pemerintah Provinsi melalui Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah, serta pengembalian terhadap lebih setor pendapatan.

### 5.1.3. SURPLUS/DEFISIT

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
4.346.558.237,00	(13.419.612.300,70)

Surplus terjadi apabila realisasi pendapatan daerah lebih besar dari realisasi belanja daerah dan sebaliknya terjadi defisit. Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023 menganggarkan surplus/defisit sebesar Rp5.311.740.809,00 namun dalam realisasinya surplus sebesar Rp4.346.568.237,00. Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 terjadi kenaikan realisasi surplus sebesar Rp17.766.170.538,70 dari realisasi Tahun lalu sebesar defisit sebesar minus Rp13.419.795.900,70.

### 5.1.4. PEMBIAYAAN

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
4.688.259.191,91	28.107.871.492,61

Pembiayaan Netto menunjukkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp4.688.259.191,91 dari anggaran sebesar minus Rp5.311.740.809,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp23.419.612.300,70 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp28.107.965.492,00. Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama ditujukan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

#### 5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
14.688.259.191,91	30.957.871.492,61

Penerimaan pembiayaan menunjukkan realisasi Tahun 2023 realisasi sebesar Rp14.688.259.191,91 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp14.688.259.191,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp16.269.612.300,70 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp30.957.965.492,00.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

### 5.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
10.000.000.000,00	2.850.000.000,00

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru menunjukkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp10.000.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp20.000.000.000,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.850.000.000,00.

### 5.1.5. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
9.034.817.428,91	14.688.259.191,91

Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SiKPA), yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Pekanbaru pada Tahun Anggaran 2023 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp9.034.817.428,91 dengan penurunan realisasi sebesar Rp5.653.441.763,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 dengan realisasi SiLPA sebesar Rp14.688.259.191,91. Komponen SiLPA Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

Tabel 5.1.40. Komponen SiLPA

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2023	2022
1.	Saldo Kas di BUD	3.266.103.751,40	8.542.039.915,40
2.	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	620.794.242,00	1.044.471.384,00
3.	Saldo Kas BOK	1.208.997.346,00	
4.	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	29.174.754,00	379.382.391,00
5.	Saldo Kas di Bendahara BOS	31.763.016,00	105.835.536,00
6.	Pendapatan Jasa giro belum diterima namun dipotong Bank	15.000,00	15.000,00
7.	Saldo Kas Blud Dinas Kesehatan & Kas Blud Dinas Perhubungan	3.877.969.319,51	4.616.514.965,51
	<b>Jumlah</b>	<b>9.034.817.428,91</b>	<b>14.688.259.191,91</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

### 5.2 PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023, adalah sebagai berikut:

#### 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
14.688.259.191,91	30.957.965.492,61

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya dan Tahun Anggaran berkenaan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp14.688.259.191,91 dan SAL Awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp30.957.965.492,61.

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

Tabel 5.2.1 Komponen Saldo Lebih Awal Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	01 Januari 2023	01 Januari 2022
1	Saldo Kas di BUD	8.542.039.915,40	275.417.815,90
2	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	1.044.471.384,00	77.538.000,00
3	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Lainnya (Pajak	-	212.282.445,00
4	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	379.382.391,00	12.988.080,00
5	Saldo Kas di Bendahara BLUD/JKN	-	-
6	Pendapatan Jasa giro belum diterima namun dipotong Bank	15.000,00	-
7	Saldo Kas BLUD Puskesmas, RS Madani, Blud Parkir & Transmetro	4.616.514.965,51	29.646.952.412,21
8	Saldo Kas di Bendahara BOS	105.835.536,00	732.786.739,50
<b>Jumlah</b>		<b>14.688.259.191,91</b>	<b>30.957.965.492,61</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

#### 5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
14.688.259.191,91	30.957.871.492,61

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan Tahun Berjalan merupakan saldo anggaran lebih yang telah digunakan sebagai penerimaan pembiayaan Tahun berjalan. Tahun Anggaran 2023 penggunaan SAL merupakan penerimaan pembiayaan Tahun berjalan sebesar Rp14.688.259.191,91 dan mengalami penurunan sebesar Rp16.269.706.300,70 atau 52,55% dibandingkan dengan penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp30.957.871.492,61.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

### 5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
9.034.817.428,91	14.688.259.191,91

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) merupakan selisih lebih/kurang realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran. SiLPA Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.034.817.428,91 dan mengalami penurunan sebesar Rp5.653.441.763,00 atau 38,49% dibandingkan dengan SiLPA Tahun 2022 sebesar Rp14.688.259.191,91.

Perhitungan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan (SiLPA/SiKPA) dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.2. Perhitungan SiLPA

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2023	2022
1	Pendapatan Asli Daerah	890.286.830.690,38	799.021.514.425,65
2	Pendapatan Transfer	1.862.857.987.731,00	1.680.225.855.620,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-
4	Jumlah Pendapatan (1 s.d. 3)	2.753.144.818.421,38	2.479.247.370.045,65
5	Belanja Operasi	2.432.229.639.203,50	2.163.366.664.652,36
6	Belanja Modal	315.807.494.723,88	328.335.985.976,99
7	Belanja Tak Terduga	761.126.257,00	964.331.717,00
8	Transfer	-	-
9	Jumlah Belanja (5 s.d. 8)	2.748.798.260.184,38	2.492.666.982.346,35
10	Penerimaan Pembiayaan	14.688.259.191,91	30.957.871.492,61
11	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00	2.850.000.000,00
12	Pembiayaan Neto (10 - 11)	4.688.259.191,91	28.107.871.492,61
<b>SiLPA/SiKPA (4 - 9 + 12)</b>		<b>9.034.817.428,91</b>	<b>14.688.259.191,91</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

### 5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
0,00	94.000,00

Koreksi Kesalahan Pembukuan Silpa tahun Sebelumnya Akhir Tahun 2023 sebesar Rp0,00 dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp94.000,00

### 5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
9.034.817.428,91	14.688.259.191,91

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2023 sebesar Rp9.034.817.428,91 dibandingkan dengan SiLPA Tahun 2022 sebesar Rp14.688.259.191,91 dan mengalami penurunan Rp5.653.441.763,00 atau 38,49% dibandingkan dengan SiLPA Tahun 2022 sebesar Rp14.688.259.191,91.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

### 5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Yang dimaksud dengan posisi keuangan adalah posisi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset mencakup seluruh sumber daya yang memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang memiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Kewajiban merupakan utang yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dimasa yang akan datang. Ekuitas mencerminkan kekayaan bersih Pemerintah Daerah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban.

#### 5.3.1 ASET

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
8.305.159.239.962,61	8.147.874.843.515,61

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Tahun 2023 jumlah aset Pemerintah Kota Pekanbaru sebesar Rp8.305.159.239.962,61 dan mengalami kenaikan sebesar Rp157.284.396.447,00 atau 1,93% dibandingkan dengan Tahun 2022 jumlah aset sebesar Rp8.147.874.843.515,61. Aset Pemerintah Kota Pekanbaru terbagi dalam rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1. Rincian Aset

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	Persentase (%)
1	Aset Lancar	548.454.030.485,53	375.540.322.345,74	172.913.708.139,79	46,04
2	Investasi Jangka Panjang	184.356.466.061,90	192.690.759.929,80	(8.334.293.867,90)	(4,33)
3	Aset tetap	7.020.967.926.817,43	7.078.094.631.794,61	(57.126.704.977,18)	(0,81)
4	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	-
5	Aset Lainnya	551.380.816.597,75	501.549.129.445,46	49.831.687.152,29	9,94
	Jumlah	8.305.159.239.962,61	8.147.874.843.515,61	157.284.396.447,00	1,93

Sumber : Neraca Pemerintah Kota Pekanbaru

#### 5.3.1.1. Aset Lancar

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
548.454.030.485,53	375.540.322.345,74

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Tahun 2023 total aset lancar Pemerintah Kota Pekanbaru sebesar, Rp548.454.030.485,53 dan mengalami kenaikan sebesar Rp172.913.708.139,79



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

atau 46,04% dibandingkan dengan Tahun 2022 total aset lancar sebesar Rp375.540.322.345,74. Aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekanbaru pada tanggal 31 Desember 2023 terdiri dari:

**Tabel 5.3.2. Rincian Aset Lancar**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Kas dan Setara Kas	9.357.550.537,21	15.305.859.685,91	(5.948.309.148,70)	(38,86)
2	Piutang Pajak Daerah	724.527.353.249,00	607.996.247.690,00	116.531.105.559,00	19,17
3	Piutang Retribusi Daerah	6.475.259.242,00	5.631.584.012,00	843.675.230,00	14,98
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	9.788.103.073,70	9.726.158.260,70	61.944.813,00	0,64
5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
6	Piutang Transfer Antar Daerah	35.412.084.524,00	24.037.615.280,00	11.374.469.244,00	47,32
7	Piutang Lainnya	1.857.721.949,25	787.166.524,00	1.070.555.425,25	136,00
8	Penyisihan Piutang	(404.743.212.196,20)	(423.632.712.893,00)	18.889.500.696,80	(4,46)
9	Beban dibayar dimuka	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00
10	Persediaan	165.674.050.106,57	135.583.403.786,13	30.090.646.320,44	22,19
	<b>Jumlah</b>	<b>548.454.030.485,53</b>	<b>375.540.322.345,74</b>	<b>172.913.708.139,79</b>	<b>46,04</b>

Sumber : Neraca Pemerintah Kota Pekanbaru

**5.3.1.1.1. Kas dan Setara Kas**

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
<b>9.357.550.537,21</b>	<b>15.305.859.685,91</b>

Kas dan Setara Kas merupakan pos neraca yang paling likuid. Pos ini menunjukkan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana BOS dan Kas Lainnya serta Jasa Bongkar Tiang Reklame yang dititipkan di Kas Lainnya Pemko yang belum jatuh tempo.

Saldo kas yang tertera pada neraca sebagian menunjukkan hak Pemerintah Kota Pekanbaru yang berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan sebagian merupakan uang titipan sebagai Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berupa pajak yang belum disetorkan serta pendapatan yang belum disetorkan pada 31 Desember 2023. Adapun realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp9.357.550.537,21 dan mengalami penurunan 5.948.309.148,70 atau 38,86% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp15.305.859.685,91 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.3. Rincian Kas dan Setara Kas**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Kas di Kas Daerah	3.266.103.751,40	8.542.039.915,40	(5.275.936.164,00)	(61,76)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	29.174.754,00	379.382.391,00	(350.207.637,00)	(92,31)
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	620.794.242,00	1.044.471.384,00	(423.677.142,00)	(40,56)
4	Kas di BLUD	3.877.969.319,51	4.616.514.965,51	(738.545.646,00)	(16,00)
5	Kas di Bendahara BOS	31.763.016,00	105.835.536,00	(74.072.520,00)	(69,99)
7	Kas Lainnya	322.748.108,30	617.615.494,00	(294.867.385,70)	(47,74)
8	Kas Dana BOK Puskesmas	1.208.997.346,00	0,00	1.208.997.346,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>9.357.550.537,21</b>	<b>15.305.859.685,91</b>	<b>(5.948.309.148,70)</b>	<b>(38,86)</b>

Sumber : Neraca Pemerintah Kota Pekanbaru



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

### 5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
3.266.103.751,40	8.542.039.915,40

Kas di Kas Daerah menunjukkan keberadaan saldo Kas Daerah Kota Pekanbaru per 31 Desember 2023. Kas pada Kas Daerah yang disimpan pada rekening giro Nomor 107.02.01730 PT.Bank Riau Kepri, dengan saldo kas Tahun 2023 sebesar Rp2.688.055.265,40 dan pada PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp578.048.486,00 sehingga total Kas Daerah sebesar Rp3.266.103.751,40. Nilai Kas Daerah mengalami penurunan sebesar Rp5.275.936.164,00 atau 61,76% dibanding dengan Tahun 2022 sebesar Rp8.542.039.915,40.

Tabel 5.3.4. Mutasi Kas di Kas Daerah/BUD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Tambah	Kurang	Saldo Akhir
1	Kas di Kas Daerah/BUD	8.542.039.915,40	2.540.833.948.174,02	2.546.109.884.338,02	3.266.103.751,40
	Jumlah	8.542.039.915,40	2.540.833.948.174,02	2.546.109.884.338,02	3.266.103.751,40

Sumber : Neraca Pemerintah Kota Pekanbaru

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 terdapat ketidaksamaan pencatatan pada Buku Kas Umum Daerah dengan Rekening Koran Kas Umum Daerah dimana saldo menurut rekening koran PT. Bank Riau Kepri tercatat sebesar Rp2.703.823.087,40 sedangkan saldo menurut Buku Kas Umum Daerah adalah sebesar Rp2.688.055.265,40 sehingga terdapat selisih sebesar Rp15.767.822,00 untuk itu dilakukan penerbitan Berita Acara Rekonsiliasi Bank atas selisih tersebut dengan rincian dapat dilihat di daftar Lampiran 4.

### 5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
29.174.754,00	379.382.391,00

Kas di Bendahara Penerimaan adalah saldo kas yang masih berada di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 belum disetor ke Bendahara Umum Daerah sebesar Rp29.174.754,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp350.207.637,00 atau 92,31,00% dari saldo kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp379.382.391,00.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan posisi per 31 Desember 2023 terdiri atas antara lain saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah yang merupakan Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak PBB, sebesar Rp27.915.139,00 dan pada Dinas Perhubungan yang merupakan Jasa Giro di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dan UPT Pelayanan Kepelabuhan sebesar Rp2.017,00 dan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang merupakan Retribusi Pelayanan Persampahan sebesar Rp74.878,00 seta pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang merupakan Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp1.182.720,00 yang sudah diterima pada rekening Bendahara Penerimaan, namun sampai dengan 31 Desember 2023 belum disetorkan ke Kas Daerah.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

Mutasi Kas di Bendahara Penerimaan selama Tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 5.3.5. Mutasi Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Perhubungan	3.453.525,00	2.017,00	3.453.525,00	2.017,00
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	845.201,00	74.878,00	845.201,00	74.878,00
3	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	1.182.720,00		1.182.720,00
4	Badan Pendapatan Daerah	375.083.665,00	27.915.139,00	375.083.665,00	27.915.139,00
<b>Jumlah</b>		<b>379.382.391,00</b>	<b>29.174.754,00</b>	<b>379.382.391,00</b>	<b>29.174.754,00</b>

Sumber : Neraca Pemerintah Kota Pekanbaru

**5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran**

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
<b>620.794.242,00</b>	<b>1.044.471.384,00</b>

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD Kota Pekanbaru Tahun 2023 yang belum disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah Kota adalah sebesar Rp620.794.242,00 dan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp1.044.471.384,00, terdapat penurunan sebesar Rp423.677.142,00 atau 40,56%.

Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran berupa Uang Yang Harus Disetor (UYHD) selama Tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 5.3.6. Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai	Penyetoran ke Kas Daerah	
			No. STS	Tanggal
<b>UYHD Per Tanggal 31 Desember 2022</b>				
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.039.969.885,00	00005/2.11.0.00.0.00.01/STS/2023 dan 00009/2.11.0.00.0.00.01/STS/2023	10 Januari 2023 dan 11 Januari 2023
2	Dinas Pertanahan	3.578.196,00	00001/2.10.0.00.0.00.01/STS/2023	06 Januari 2023
3	Kecamatan Binaw idya	923.303,00	00001/7.01.0.00.0.00.13/STS/2023	30 Januari 2023
<b>Jumlah</b>		<b>1.044.471.384,00</b>		
<b>UYHD Per Tanggal 31 Desember 2023</b>				
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	620.794.216,00	00003/2.11.0.00.0.00.01/STS/2024, 00028/2.11.0.00.0.00.01/STS/2024, 00029/2.11.0.00.0.00.01/STS/2024, 00030/2.11.0.00.0.00.01/STS/2024 dan 00053/2.11.0.00.0.00.01/STS/2024	01 Januari 2024, 26, 27, 28 Februari 2024 dan 8 Maret 2024
2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26,00	00001/3.26.2.22.0.00.01/STS/2024	12 Januari 2024
<b>Jumlah</b>		<b>620.794.242,00</b>		

Sumber : Neraca Pemerintah Kota Pekanbaru



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

**5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD**

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
<b>3.877.969.315,51</b>	<b>4.616.514.965,51</b>

Kas di Bendahara BLUD Tahun 2023 sebesar Rp3.877.969.319,51 mengalami penurunan sebesar Rp738.545.646,00 atau 16,00% dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp4.616.514.965,51.

Saldo Kas di Bendahara BLUD merupakan sisa kas Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas yang terdiri atas 21 Puskesmas di bawah koordinasi Dinas Kesehatan, BLUD RSD Madani dan sisa Kas BLUD Dinas Perhubungan. Rincian Sisa Kas BLUD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.7. Rincian Sisa Kas BLUD Tahun 2023**

(dalam rupiah)

No	OPD	Keterangan	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	BLUD Puskesmas dan RSUD Madani	2.559.819.047,07
2	Dinas Perhubungan	BLUD Parkir dan BLUD Transmetro	1.318.150.272,44
<b>Jumlah</b>			<b>3.877.969.319,51</b>

Sumber : Neraca Pemerintah Kota Pekanbaru

Rincian penerimaan dan pengeluaran pada BLUD Kota Pekanbaru dapat dirinci pada tabel berikut:

**Tabel 5.3.8. Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada BLUD Kota Pekanbaru Tahun 2023**

(dalam rupiah)

No	Puskesmas	Saldo Awal	Penerimaan Dana Jasa Pelayanan Umum	Pengeluaran Dana Jasa Pelayanan Umum	Sisa Kas
1	SIMPANG TIGA	34.829.144,59	2.135.657.082,00	1.865.690.245,00	304.795.981,59
2	RI SIDOMULYO	113.692.551,00	995.291.070,00	1.095.805.781,00	13.177.840,00
3	TENAYAN RAYA	23.009.539,00	1.523.169.939,00	1.498.633.544,00	47.545.934,00
4	KARYA WANITA	167.483.808,00	1.106.224.562,00	1.178.747.843,00	94.960.527,00
5	RI MUARA FAJAR	24.884.110,00	525.490.894,00	469.416.375,00	80.958.629,00
6	LANGSAT	157.455.012,70	589.820.658,00	561.596.708,00	185.678.962,70
7	MELUR	83.159.373,36	971.575.510,00	1.000.728.441,71	54.006.441,65
8	SENAPELAN	156.347.944,00	1.169.020.333,00	1.138.420.488,00	186.947.789,00
9	RUMBAI	10.775.795,52	1.163.609.050,00	1.127.440.297,00	46.944.548,52
10	UMBAN SARI	109.742.256,00	1.351.906.598,00	1.288.388.126,00	173.260.728,00
11	RUMBAI BUKIT	43.215.741,52	537.878.707,00	574.828.024,00	6.266.424,52
12	PAYUNG SEKAKI	234.825.526,42	1.758.701.005,00	1.756.926.167,00	236.600.364,42
13	SIMPANG BARU	46.515.317,50	637.038.369,00	635.286.094,00	48.267.592,50
14	SIDOMULYO RJ	118.067.665,00	1.809.876.180,00	1.696.448.792,00	231.495.053,00
15	GARUDA	204.981.221,00	1.425.618.200,00	1.450.090.208,00	180.509.213,00
16	HARAPAN RAYA	208.243.390,36	1.212.536.364,00	1.295.269.434,00	125.510.320,36
17	SAIL	34.451.267,00	949.556.447,00	977.534.834,00	6.472.880,00
18	REJOSARI	7.097.883,60	2.595.282.572,00	2.442.762.950,00	159.617.505,60
19	LIMA PULUH	54.943.506,00	1.115.409.608,00	1.092.847.549,00	77.505.565,00
20	PEKANBARU KOTA	97.708.391,00	996.574.433,00	1.082.450.416,00	11.832.408,00
21	SAPTA TARUNA	191.816.078,00	598.792.035,00	635.543.290,00	155.064.823,00
22	RSD MADANI	22.408.615,50	7.092.025.591,71	6.982.034.691,00	132.399.516,21
23	BLUD PARKIR	2.172.644.786,44	14.143.417.311,00	5.029.852.508,00	1.286.209.589,44
24	BLUD TRANSMETRO	298.216.042,00	5.240.375.123,00	5.506.650.482,00	31.940.683,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.616.514.965,51</b>	<b>51.644.847.641,71</b>	<b>42.383.393.287,71</b>	<b>3.877.969.319,51</b>

Sumber : Neraca Pemerintah Kota Pekanbaru TA.2023



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

Kas tersebut terdapat pada rekening bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran BLUD Puskesmas, BLUD Parkir dan BLUD Transmetro. Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas memiliki 3 (tiga) rekening masing-masing untuk menampung dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dana dari APBD Kota Pekanbaru, dan rekening untuk menampung penerimaan Retribusi Kesehatan, sedangkan Bendahara Pengeluaran BLUD memiliki satu rekening.

**5.3.1.1.15 Kas di Bendahara BOS**

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
<b>31.763.016,00</b>	<b>105.835.536,00</b>

Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 merupakan dana yang masih berada di tangan Bendahara Dana BOS sebesar Rp31.763.016,00 dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp105.835.536,00 atau terdapat penurunan sebesar Rp74.072.520,00 atau 69,99%.

Rincian realisasi Penerimaan dan Belanja Dana BOS, dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.3.9. Realisasi Penerimaan dan Belanja Dana BOS Tahun 2023**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	PENDAPATAN TA 2023	PENERIMAAN NON BOS	PENERIMAAN JASA GIRO BANK TAHUN 2023	TOTAL PENERIMAAN TA 2023	PENGEMBALIAN JASA GIRO BANK TAHUN 2022 DI TAHUN 2023	PENGELUARAN NON BOS	EXPERT BUNGA BANK YANG DI TARIK OTOMATIS OLEH KASDA TAHUN 2023	BELANJA TA 2023	TOTAL PENGELUARAN TA 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
1	SD Negeri	30.038.161,00	66.953.106.628,00	9.007.497,00	33.981.005,00	67.026.133.291,00	615.066,00	4.207.497,00	33.969.592,00	66.973.540.458,00	67.012.332.603,00	13.800.688,00
2	SMP Negeri	75.797.375,00	35.623.394.066,00	33.542.000,00	17.430.253,00	35.750.163.694,00	161.719,00	59.623.250,00	17.332.107,00	35.655.094.290,00	35.732.201.396,00	17.982.328,00
	Jumlah	105.835.536,00	102.576.500.694,00	42.549.497,00	51.411.258,00	102.776.296.985,00	776.775,00	63.830.747,00	51.301.699,00	102.628.624.748,00	102.744.533.999,00	31.763.016,00

Sumber : Neraca Pemerintah Kota Pekanbaru

Kas di tangan Bendahara Dana BOS sebesar Rp.31.763.016,00 termasuk pengembalian temuan inspektorat yang belum di setor ke Kasda pada SD Negeri 180 Pekanbaru sebesar Rp. 4.800.000,00 dan Jasa Giro Bank Dana BOS Tahun 2023 yang belum di setor ke Kasda pada tahun 2023 sebesar Rp. 109.559,00.

**Tabel 5.3.10. Jasa Giro Bank Dana BOS Tahun 2023 belum di setor ke Kas Daerah**

(dalam rupiah)

NO	SEKOLAH	PENERIMAAN JASA GIRO BANK TAHUN 2023	EXPERT JASA GIRO BANK YANG DI TARIK OTOMATIS OLEH KASDA TAHUN 2023	Jasa Giro Tahun 2023 belum di setor ke Kasda
1	SD Negeri	33.981.005,00	33.969.592,00	11.413,00
2	SMP Negeri	17.430.253,00	17.332.107,00	98.146,00
	Jumlah	<b>51.411.258,00</b>	<b>13.939.270,00</b>	<b>109.559,00</b>

Sumber : Neraca Pemerintah Kota Pekanbaru



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

Rincian jumlah Jasa giro Dana Bos Tahun Anggaran 2023 yang belum di setor ke kasda, dirinci sebagai berikut;

1. SD Negeri 196 Pekanbaru sebesar Rp.11.413,00
2. SMP Negeri 46 Pekanbaru sebesar Rp.93.142,00
3. SMP Negeri sebesar Rp.8,00
4. SMP Negeri sebesar Rp.4.996,00

Rincian jumlah Penerimaan Dana Bos Tahun Anggaran 2023, dirinci sebagai berikut;

**Tabel 5.3.11. Rincian Realisasi Penerimaan Dana BOS Tahun 2023**

(dalam rupiah)

NO	SEKOLAH	SALDO PER 31 DESEMBER 2022 (Rp)	PENDAPATAN TA.2023 (Rp)	PENERIMAAN NON BOS	PENERIMAAN JASA GIRO BANK TAHUN 2023	TOTAL PENERIMAAN TA 2023 (Rp)
1	SD Negeri	30.038.161,00	66.953.106.628,00	9.007.497,00	33.981.005,00	67.026.133.291,00
2	SMP Negeri	75.797.375,00	35.623.394.066,00	33.542.000,00	17.430.253,00	35.750.163.694,00
Jumlah		105.835.536,00	102.576.500.694,00	42.549.497,00	51.411.258,00	102.776.296.985,00

Sumber : Neraca Pemerintah Kota Pekanbaru

Rincian jumlah Pengeluaran Dana Bos Tahun Anggaran 2023, dirinci sebagai berikut;

**Tabel 5.3.12. Rincian Realisasi Belanja Dana BOS Tahun 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	B. BARANG & JASA	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	Total Belanja Dana Bos
1	SD Negeri	52.913.932.780,00	4.533.618.155,00	9.525.989.523,00	66.973.540.458,00
2	SMP Negeri	27.420.340.794,00	3.017.275.296,00	5.217.468.200,00	35.655.084.290,00
Jumlah		80.334.273.574,00	7.550.893.451,00	14.743.457.723,00	102.628.624.748,00

Sumber : Neraca Pemerintah Kota Pekanbaru

Penjelasan lebih lanjut mengenai penerimaan dan belanja BOS diuraikan dalam Laporan Operasional pada bagian penerimaan dan belanja.

**5.3.1.1.1.6 Kas Lainnya**

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
322.748.108,30	617.615.494,00

Saldo Kas Lainnya sampai dengan 31 Desember 2023 merupakan utang pajak yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2023 yaitu pajak BLUD, pajak dana BOS dan Jasa Bongkar Tiang Reklame yang belum jatuh tempo dititipkan di Kas Lainnya Pemko sebesar Rp.115.351.927.50 yang ada di BAPPENDA .



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

Pajak yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

**Tabel 5.3.13. Pajak yang belum disetor per 31 Desember 2023**

(dalam rupiah)

No	SKPD	PPN	PPh Ps 21	PPh Ps 22	PPh Ps 23	PPh Ps 4	Pajak Restoran	Jumlah
1	Dinas Pendidikan (BOS)	606.981,00	336.000,00	-	511.480,00	-	5.027.500,00	6.481.961,00
2	Dinas Perhubungan	1.247.400,00	-	170.100,00	-	-	-	1.417.500,00
3	Dinas Kesehatann (RS. Madani)	134.440.575,66	40.696.926,00	13.172.319,14	1.931.855,00	7.083.044,00	2.172.000,00	199.496.719,80
<b>Jumlah</b>		<b>136.294.956,66</b>	<b>41.032.926,00</b>	<b>13.342.419,14</b>	<b>2.443.335,00</b>	<b>7.083.044,00</b>	<b>7.199.500</b>	<b>207.396.180,80</b>

Sumber : Neraca Pemerintah Kota Pekanbaru

Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran Lainnya selama Tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 5.3.14. Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran Lainnya Tahun 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan	183.685.345,00	6.481.961,00	183.685.345,00	6.481.961,00
2	Dinas Kesehatan	44.106.403,00	199.496.719,80	44.106.403,00	199.496.719,80
3	Dinas Tenaga Kerja	2.175.000,00	-	2.175.000,00	-
4	Sekretariat DRPD	387.648.746,00	-	387.648.746,00	-
5	Dinas Perhubungan	-	1.417.500,00	-	1.417.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>617.615.494,00</b>	<b>207.396.180,80</b>	<b>617.615.494,00</b>	<b>207.396.180,80</b>

Sumber : Neraca Pemerintah Kota Pekanbaru

Pada 31 Desember 2023, masih adanya Kas di Rekening Koran Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan tercatat Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sebesar Rp3.343.825.000,00. Atas belanja ini, sudah selesai ditransfer dan direalisasikan pada 2 Januari 2024. Selain itu, pada Rekening Koran pada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan, tercatat Belanja Jasa Bimbingan Teknis sebesar Rp2.600,00, Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara dan Panitia sebesar Rp3.135.000,00 dan Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rp875.000,00 atas belanja ini juga sudah ditransfer atau direalisasikan pada 10 Januari 2024.

**5.3.1.1.1.7 Kas Dana BOK Puskesmas**

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
<b>1.208.997.346,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas sampai dengan 31 Desember 2023 merupakan Sisa Kas Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru. Rincian penerimaan dan pengeluaran pada Kas Bantuan Operasional Kesehatan pada BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru dapat dirinci pada tabel berikut:



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

**Tabel 5.3.15. Penerimaan dan Pengeluaran Kas Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru Tahun 2023**

(dalam rupiah)

No	Puskesmas	Saldo Awal	Penerimaan Dana BOK	Pengeluaran Dana BOK	Sisa Kas
1	SIMPANG TIGA	-	393.179.000,00	333.006.856,00	60.172.144,00
2	RI SIDOMULYO	-	406.493.000,00	359.938.352,00	46.554.648,00
3	TENAYAN RAYA	-	400.615.000,00	355.083.847,00	45.531.153,00
4	KARYA WANITA	-	381.931.000,00	356.085.536,00	25.845.464,00
5	RI MUJARA FAJAR	-	390.988.000,00	350.306.209,00	40.681.791,00
6	LANGSAT	-	407.346.000,00	269.883.000,00	137.463.000,00
7	MELUR	-	370.340.000,00	307.048.356,00	63.291.644,00
8	SENAPELAN	-	353.583.000,00	259.170.519,00	94.412.481,00
9	RUMBAI	-	413.992.000,00	358.668.182,00	55.323.818,00
10	UMBAN SARI	-	363.193.000,00	279.205.987,00	83.987.013,00
11	RUMBAI BUKIT	-	268.880.500,00	176.893.615,00	91.986.885,00
12	PAYUNG SEKAKI	-	354.117.000,00	297.880.145,00	56.236.855,00
13	SIMPANG BARU	-	438.974.000,00	360.817.659,00	78.156.341,00
14	SIDOMULYO RJ	-	359.446.000,00	340.637.572,00	18.808.428,00
15	GARUDA	-	383.921.000,00	376.580.086,00	7.340.914,00
16	HARAPAN RAYA	-	414.840.000,00	374.134.390,00	40.705.610,00
17	SAIL	-	363.321.000,00	314.220.684,00	49.100.316,00
18	REJOSARI	-	383.338.000,00	336.204.602,00	47.133.398,00
19	LIMA PULUH	-	373.500.000,00	326.583.901,00	46.916.099,00
20	PEKANBARU KOTA	-	363.046.000,00	287.917.453,00	75.128.547,00
21	SAPTA TARUNA	-	420.849.000,00	376.628.203,00	44.220.797,00
<b>Jumlah</b>		-	<b>8.005.892.500,00</b>	<b>6.796.895.154,00</b>	<b>1.208.997.346,00</b>

Sumber : Neraca Pemerintah Kota Pekanbaru TA. 2023

### Investasi Jangka Pendek

#### Piutang

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
373.317.429.841,75	224.546.058.873,70

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Saldo Piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp373.317.429.841,75. Nilai tersebut merupakan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) dari nilai bruto sebesar Rp778.060.642.037,95 dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp404.743.212.196,20.

Adapun rincian Piutang Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2023 terdiri atas:



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

**Tabel 5.3.16. Rincian Piutang**

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAI		TAMBAH KURANG TAHUN BERJALAN		SALDO AKHIR	% KENAIKAN/ PENURUNAN
		TAMBAH	KURANG	PENAMBAHAN	PEMBAYARAN		
1	2	3	4	5	6	7 = 2+3-4+5-6	8
Piutang Pajak Daerah	607.996.247.690,00	2.993.841.803,00	60.392.677.144,00	199.648.751.305,00	25.718.810.405,00	724.527.353.249,00	19,17
Piutang Retribusi Daerah	5.631.584.012,00	1.117.882.800,00	-	948.949.135,00	1.223.156.705,00	6.475.259.242,00	14,98
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	9.726.158.260,70	9.022.037,00	-	1.164.825.908,00	1.111.903.132,00	9.788.103.073,70	0,64
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	120.000,00	-	120.000,00	-
Piutang Transfer Antar Daerah	24.037.615.280,00	-	-	35.412.084.524,00	24.037.615.280,00	35.412.084.524,00	47,32
Piutang Lainnya	787.166.524,00	1.302.555.425,25	-	-	232.000.000,00	1.857.721.949,25	136,00
Penyisihan Piutang	- 423.632.712.893,00	- 902.953.217,00	- 41.117.312.623,48	- 22.538.087.227,67	- 1.213.228.518,00	- 404.743.212.196,20	- 4,46
<b>JUMLAH</b>	<b>224.546.058.873,70</b>	<b>4.520.348.848,25</b>	<b>19.275.364.520,52</b>	<b>214.636.643.644,33</b>	<b>51.110.257.004,00</b>	<b>373.317.429.841,75</b>	<b>66,25</b>

Sumber: Neraca Pemerintah Kota Pekanbaru

**5.3.1.1.2. Piutang Pajak Daerah**

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
<b>724.527.353.249,00</b>	<b>607.996.247.690,00</b>

Saldo Piutang Pajak Daerah Kota Pekanbaru pada tahun 2023 sebesar Rp724.527.353.249,00 mengalami peningkatan sebesar Rp116.531.105.559,00 atau 19,17% dibandingkan dengan piutang tahun 2022 sebesar Rp607.996.247.690,00. Akun piutang pajak merupakan selisih antara nilai pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dengan nilai yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Badan Pendapatan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.17. Rincian Per Objek Piutang Pajak Daerah**

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAI		TAMBAH KURANG TAHUN BERJALAN		SALDO AKHIR	% KENAIKAN/ PENURUNAN
		TAMBAH	KURANG	PENAMBAHAN	PEMBAYARAN		
1	2	3	4	5	6	7 = 2+3-4+5-6	8
Piutang Pajak Hotel	608.082.714,00	1.001,00	206.168.000,00	244.132.186,00	372.877.915,00	273.169.986,00	- 55,08
Piutang Pajak Restoran	3.665.704.378,00	-	737.364.000,00	3.694.672.904,00	727.321.657,00	5.895.691.625,00	60,83
Piutang Pajak Hiburan	181.257.912,00	-	164.670.000,00	13.397.650,00	16.587.912,00	13.397.650,00	- 92,61
Piutang Pajak Reklame	7.995.638.671,00	-	-	1.168.836.736,00	487.136.023,00	8.677.339.384,00	8,53
Piutang Pajak Penerangan Jalan	15.394.950,00	-	-	433.119,00	-	15.828.069,00	2,81
Piutang Pajak Air Tanah	539.146.524,00	-	-	86.421.193,00	17.939.224,00	607.628.493,00	12,70
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	589.492.353.858,00	2.993.840.802,00	56.631.832.450,00	194.440.857.517,00	24.096.947.674,00	706.198.272.053,00	19,80
Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.498.668.683,00	-	2.652.642.694,00	-	-	2.846.025.989,00	- 48,24
<b>JUMLAH</b>	<b>607.996.247.690,00</b>	<b>2.993.841.803,00</b>	<b>60.392.677.144,00</b>	<b>199.648.751.305,00</b>	<b>25.718.810.405,00</b>	<b>724.527.353.249,00</b>	<b>19,17</b>

Sumber :Neraca Pemerintah Kota Pekanbaru

Definisi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak daerah tertuang dalam UU Nomor. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Aturan ini menggantikan UU Nomor. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor. 34 Tahun 2000.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

Metode penghitungan nilai pajak untuk Pajak Daerah ada dua yaitu Metode *official-assesment* dan Metode *self-assesment*. Metode *official-assesment* antara lain Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2). Metode *official-assesment* Pendapatan diakui saat Surat Ketetapan Pajak Daerah diterbitkan. Metode *self-assesment* untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(BPHTB). Metode *self-assesment* Pendapatan diakui pada saat wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Saldo akhir piutang pajak per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp Rp724.527.353.249,00. Rincian penambahan dan pengurangan piutang pajak daerah selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.3.18. Penambahan dan Pengurangan Piutang Pajak Daerah**

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAI		TAMBAH KURANG TAHUN BERJALAN		SALDO AKHIR	% KENAIKAN/ PENURUNAN
		TAMBAH	KURANG	PENAMBAHAN	PEMBAYARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
Piutang Pajak Hotel	606.610.214,00	1.001,00	206.168.000,00	239.638.411,00	371.530.415,00	268.551.211,00	- 55,73
Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	1.472.500,00	-	-	4.493.775,00	1.347.500,00	4.618.775,00	213,67
Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.897.405.031,00	-	737.364.000,00	3.425.259.912,00	649.587.550,00	4.935.713.393,00	70,35
Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	295.346.320,00	-	-	53.851.940,00	11.203.020,00	337.995.240,00	14,44
Piutang Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	472.953.027,00	-	-	210.507.891,00	66.531.087,00	616.929.831,00	30,44
Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya	-	-	-	241.000,00	-	241.000,00	-
Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	-	-	-	4.812.161,00	-	4.812.161,00	-
Piutang Pajak Tontonan Film	435.500,00	-	-	201.500,00	435.500,00	201.500,00	- 53,73
Piutang Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	5.040.000,00	-	5.040.000,00	-	-	-	- 100,00
Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	13.291.214,00	-	9.000.000,00	5.220.000,00	4.291.214,00	5.220.000,00	- 60,73
Piutang Pajak Permainan Bilhar dan Bowling	49.250.000,00	-	49.250.000,00	350.000,00	-	350.000,00	- 99,29
Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	102.391.150,00	-	101.380.000,00	3.732.600,00	1.011.150,00	3.732.600,00	- 96,35
Piutang Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	10.375.048,00	-	-	3.333.550,00	10.375.048,00	3.333.550,00	- 67,87
Piutang Pajak Pertandingan Olahraga	475.000,00	-	-	560.000,00	475.000,00	560.000,00	17,89
Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	7.766.565.396,00	-	-	1.141.553.513,00	487.136.023,00	8.420.982.886,00	8,43
Piutang Pajak Reklame Kain	224.239.353,00	-	-	27.036.192,00	-	251.275.545,00	12,06
Piutang Pajak Reklame Berjalan	4.833.922,00	-	-	247.031,00	-	5.080.953,00	5,11
Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	15.394.950,00	-	-	433.119,00	-	15.828.069,00	2,81
Piutang Pajak Air Tanah	539.146.524,00	-	-	86.421.193,00	17.939.224,00	607.628.493,00	12,70
Piutang PBBP2	589.492.353.858,00	2.993.840.802,00	56.631.832.450,00	194.440.857.517,00	24.096.947.674,00	706.198.272.053,00	19,80
Piutang BPHTB-Pemindahan Hak	1.543.439.647,00	-	1.104.769.126,00	-	-	438.670.521,00	- 71,58
Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru	3.955.229.036,00	-	1.547.873.568,00	-	-	2.407.355.468,00	- 39,13
<b>JUMLAH</b>	<b>607.996.247.690,00</b>	<b>2.993.841.803,00</b>	<b>60.392.677.144,00</b>	<b>199.648.751.305,00</b>	<b>25.718.810.405,00</b>	<b>724.527.353.249,00</b>	<b>19,17</b>

Sumber : Kertas Kerja Pendapatan dan Piutang

Penjelasan atas koreksi penambah dan pengurang saldo piutang pajak daerah Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pada Piutang Pajak Hotel, di tahun 2022 terdapat saldo piutang sebesar Rp606.610.214,00. Adanya koreksi atas piutang sebesar Rp. 1.001.- dan penghapusan piutang sebesar Rp206.168.000,00. Sehingga saldo awal piutang 2023 menjadi Rp400.443.215,00.
2. Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya, pada tahun 2022 terdapat saldo piutang sebesar Rp2.897.405.031,00. Adanya koreksi atas piutang sebesar Rp1.950.000.00



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

- dan penghapusan piutang sebesar Rp737.364.000,00. Sehingga saldo awal piutang 2023 menjadi Rp2.160.041.031,00.
3. Piutang Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan sejenisnya, terdapat koreksi pada saldo piutang awal berupa koreksi kurang sebesar Rp5.040.000,00 sehingga saldo piutang pajak restoran dan sejenisnya menjadi Rp0,00.
  4. Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan sejenisnya, terdapat koreksi pada saldo piutang awal berupa koreksi kurang sebesar Rp9.000.000,00 sehingga saldo piutang pajak restoran dan sejenisnya menjadi Rp5.220.000,00.
  5. Piutang Pajak Permainan Biliar dan Bowling, terdapat koreksi pada saldo piutang awal berupa koreksi kurang sebesar Rp49.250.000,00 sehingga saldo piutang pajak restoran dan sejenisnya menjadi Rp350.000,00.
  6. Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan, terdapat koreksi pada saldo piutang awal berupa koreksi kurang sebesar Rp101.380.000,00 sehingga saldo piutang pajak restoran dan sejenisnya menjadi Rp3.732.600,00.
  7. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), Pada tahun 2022 terdapat saldo piutang sebesar Rp589.492.353.858,00. Adanya koreksi atas piutang sebesar Rp2.983.277.275,00 untuk pembayaran di luar piutang, koreksi karena faktor penambah ketetapan Rp10.563.527,00, koreksi karena faktor pengurang ketetapan Rp539.010.504,00 dan penghapusan piutang sebesar Rp56.092.821.946,00. Sehingga saldo awal piutang 2023 menjadi Rp535.854.362.210,00.
  8. Piutang Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-Pemindahan Hak, terdapat koreksi kurang pada saldo piutang awal sebesar Rp1.104.769.126,00 sehingga saldo piutang pajak hotel menjadi Rp438.670.521,00.
  9. Piutang Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-Pemberian Hak Baru, di tahun 2022 terdapat saldo piutang sebesar Rp3.955.229.036,00. Adanya penghapusan piutang sebesar Rp1.547.873.568,00. Sehingga saldo awal piutang 2023 menjadi Rp2.407.355.468,00.

Bahwa memang benar Pemerintah Kota Pekanbaru pada Tahun 2022 belum memiliki regulasi terkait dengan penghapusan piutang pajak daerah, namun pada dasarnya Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Badan Pendapatan Daerah telah melakukan kajian dan menyusun draft Peraturan Walikota tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah dimulai dari tahun 2018, namun karena masih terdapat kekurangan terhadap draft dimaksud maka diperlukan referensi dari beberapa daerah yang telah menetapkan dan melaksanakan peraturan tentang penghapusan piutang pajak daerah, disamping itu juga perlu melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti inspektorat selaku APIP, BPKP, BPKAD untuk meminta pandangan dan masukan terutama terhadap kriteria penghapusan utang pajak daerah dan mekanisme penghapusan piutang pajak daerah, dimulai dari penghapusbukuan sampai dengan penghapustagihan piutang pajak, daerah, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam merumuskan Perwako tersebut.

Bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru saat ini telah memiliki Peraturan Walikota tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah yakni Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 20 Februari 2023, dan kemudian telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 251 tahun 2023 tentang Pembentukan Tim



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

Inventarisasi dan Penelitian Piutang Pajak Daerah, dengan telah dibentuknya tim tersebut maka Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan verifikasi kembali secara administrasi dan peninjauan lapangan dalam rangka memastikan apakah piutang tersebut layak untuk dihapus bukuan sebagaimana mestinya.

Penghapusan Piutang Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru didukung dengan Hasil Laporan Reviu Penghapusbukuan Piutang Pajak Daerah Nomor B.PW01.02/ REVIU/ INSPEKTORAT/ 163/2023 tanggal 20 November 2023.

**5.3.1.1.3. Piutang Retribusi Daerah**

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
6.475.259.242,00	5.631.584.012,00

Saldo Piutang Piutang Retribusi Daerah Kota Pekanbaru pada tahun 2023 sebesar Rp6.475.259.242,00 mengalami kenaikan sebesar Rp843.675.230,00 atau 14,98% dibandingkan dengan piutang tahun 2022 sebesar Rp5.631.584.012,00. Akun piutang retribusi daerah merupakan selisih antara nilai retribusi yang ditetapkan dengan nilai yang dibayar oleh wajib retribusi termasuk tunggakan tahun sebelumnya. Retribusi yang menimbulkan piutang adalah yang melalui mekanisme penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan berdasarkan perjanjian. Piutang retribusi daerah yang dikelola oleh SKPD disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.3.19. Rincian Per Objek Piutang Retribusi Daerah**

*(dalam rupiah)*

URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAI		TAMBAH KURANG TAHUN BERJALAN		SALDO AKHIR	% KENAIKAN/ PENURUNAN
		TAMBAH	KURANG	PENAMBAHAN	PEMBAYARAN		
1	2	3	4	5	6	7 = 2+3-4+5-6	8
Piutang Retribusi Jasa Umum	218.017.459,00	-	-	710.137.375,00	38.715.125,00	889.439.709,00	307,97
Piutang Retribusi Jasa Usaha	3.639.959.193,00	1.117.882.800,00	-	238.811.760,00	1.184.441.580,00	3.812.212.173,00	4,73
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	1.773.607.360,00	-	-	-	-	1.773.607.360,00	-
<b>JUMLAH</b>	<b>5.631.584.012,00</b>	<b>1.117.882.800,00</b>	<b>-</b>	<b>948.949.135,00</b>	<b>1.223.156.705,00</b>	<b>6.475.259.242,00</b>	<b>14,98</b>

Sumber : Kertas Kerja Pendapatan dan Piutang

Rincian Piutang Retribusi Daerah Per Sub Rincian Objek dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.3.20. Rincian Piutang Retribusi Daerah Per OPD**

*(dalam rupiah)*

URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAI		TAMBAH KURANG TAHUN BERJALAN		SALDO AKHIR	% KENAIKAN/ PENURUNAN
		TAMBAH	KURANG	PENAMBAHAN	PEMBAYARAN		
1	2	3	4	5	6	7 = 2+3-4+5-6	8
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	170.150.500,00	-	-	36.339.250,00	19.678.250,00	186.811.500,00	9,79
Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	27.498.620,00	-	-	-	-	27.498.620,00	-
Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	20.368.339,00	-	-	673.798.125,00	19.036.875,00	675.129.589,00	3.214,60
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.716.713.940,00	1.117.882.800,00	-	238.811.760,00	1.184.441.580,00	1.888.966.920,00	10,03
Piutang Retribusi Terminal	73.245.253,00	-	-	-	-	73.245.253,00	-
Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.850.000.000,00	-	-	-	-	1.850.000.000,00	-
Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.773.607.360,00	-	-	-	-	1.773.607.360,00	-
<b>JUMLAH</b>	<b>5.631.584.012,00</b>	<b>1.117.882.800,00</b>	<b>-</b>	<b>948.949.135,00</b>	<b>1.223.156.705,00</b>	<b>6.475.259.242,00</b>	<b>14,98</b>

Sumber : Kertas Kerja Pendapatan dan Piutang



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

**5.3.1.1.4. Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
<b>9.788.103.073,70</b>	<b>9.726.158.260,70</b>

Saldo Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kota Pekanbaru pada tahun 2023 sebesar Rp9.788.103.073,70 mengalami kenaikan sebesar Rp61.944.813,00 atau 0,64% dibandingkan dengan piutang tahun 2022 sebesar Rp9.726.158.260,70.

Pos Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri atas Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Piutang Jasa Giro, Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah, Piutang Pendapatan dari Pengembalian, dan Piutang Pendapatan BLUD sampai dengan Tanggal 31 Desember 2023.

Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.3.21. Rincian Per Objek Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAI		TAMBAH KURANG TAHUN BERJALAN		SALDO AKHIR	% KENAIKAN/ PENURUNAN
		TAMBAH	KURANG	PENAMBAHAN	PEMBAYARAN		
1	2	3	4	5	6	7 = 2+3-4+5-6	8
Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	7.184.304.382,00	-	-	471.046.157,00	579.049.050,00	7.076.301.489,00	(1,50)
Piutang Jasa Giro	6.191.245,70	-	-	628.357.179,00	-	634.548.424,70	10149,12
Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	9.021.956,00	-	-	9.021.956,00	-	0,00
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.213.020.033,00	81,00	-	65.422.572,00	29.901.326,00	1.248.541.360,00	2,93
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	808.756.000,00	-	-	-	-	808.756.000,00	0,00
Piutang Pendapatan BLUD	513.886.600,00	-	-	-	493.930.800,00	19.955.800,00	(96,12)
<b>JUMLAH</b>	<b>9.726.158.260,70</b>	<b>9.022.037,00</b>	<b>-</b>	<b>1.164.825.908,00</b>	<b>1.111.903.132,00</b>	<b>9.788.103.073,70</b>	<b>0,64</b>

Sumber : Kertas Kerja Pendapatan dan Piutang

Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat dirinci pada sub rincian objek sebagai berikut:

**Tabel 5.3.22. Rincian Per Objek Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAI		TAMBAH KURANG TAHUN BERJALAN		SALDO AKHIR	% KENAIKAN/ PENURUNAN
		TAMBAH	KURANG	PENAMBAHAN	PEMBAYARAN		
1	2	3	4	5	6	7 = 2+3-4+5-6	8
Piutang Hasil dari Bangun Guna Serah	7.184.304.382,00	-	-	471.046.157,00	579.049.050,00	7.076.301.489,00	- 1,50
Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00	-
Piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	6.176.245,70	-	-	628.357.179,00	-	634.533.424,70	10.173,77
Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	9.021.956,00	-	-	9.021.956,00	-	-
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	1.213.020.033,00	81,00	-	65.422.572,00	29.901.326,00	1.248.541.360,00	2,93
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	808.756.000,00	-	-	-	-	808.756.000,00	-
Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	513.886.600,00	-	-	-	493.930.800,00	19.955.800,00	- 96,12
<b>JUMLAH</b>	<b>9.726.158.260,70</b>	<b>9.022.037,00</b>	<b>-</b>	<b>1.164.825.908,00</b>	<b>1.111.903.132,00</b>	<b>9.788.103.073,70</b>	<b>0,64</b>

Sumber : Kertas Kerja Pendapatan dan Piutang



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

Perhitungan kontribusi terhadap hasil dari bangun guna serah pasar di Kota Pekanbaru berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan mitra pihak ketiga, hal tersebut dijelaskan lebih detail pada Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan pada Laporan Keuangan ini.

Dikarenakan belum adanya dokumen tagihan dari dinas teknis, maka nilai penyisihan piutang di nol kan agar sesuai dengan kebijakan akuntansi Kota Pekanbaru. Selain koreksi terhadap nilai penyisihan piutang, juga dilakukan koreksi terhadap nilai piutang. Koreksi tersebut dilakukan berdasarkan perhitungan pada surat perjanjian dan konfirmasi kepada pihak ketiga. Berikut ini rincian Piutang Hasil dari Bangun Guna Serah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.23. Rincian Piutang Hasil Dari Bangun Guna Serah Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian**

*(Dalam Rupiah)*

REKENING	2022				2023				
	PIUTANG DAN PENYISIHAN			KEWAJIBAN	PENDAPATAN LO	PENDAPATAN LRA	PIUTANG DAN PENYISIHAN		
	PIUTANG	%	PENYISIHAN				PIUTANG	%	PENYISIHAN
Hasil dari Bangun Guna Serah	7.184.304.382,00	-	-	8.350.000,00	1.552.220.407,00	1.651.873.300,00	7.076.301.489,00	-	-
Hasil dari Bangun Guna Serah	7.184.304.382,00	-	-	8.350.000,00	1.552.220.407,00	1.651.873.300,00	7.076.301.489,00	-	-
CV. Putra Bertuah / PT. Riau Kerta Raharja (Pasar Sali)	243.444.931,00	-	-	-	-	-	243.444.931,00	-	-
PT. Pupuha Mahajaya (Pasar Senapelan)	4.746.204.625,00	-	-	-	152.849.765,00	299.675.300,00	4.599.379.090,00	-	-
PT. Makmur Papan Permata (Pasar Sukaramei)	757.104.850,00	-	-	8.350.000,00	412.338.250,00	675.012.000,00	486.081.100,00	-	-
PT. Agung Rafa Bonai, KSO (Pasar Induk)	1.437.549.976,00	-	-	-	309.846.392,00	-	1.747.396.368,00	-	-
PT. Ali Akbar, KSO (Pasar Bawah)	-	-	-	-	677.186.000,00	677.186.000,00	-	-	-

Sumber : Kertas Kerja Pendapatan dan Piutang

**5.3.1.1.5. Piutang Transfer Pemerintah Pusat**

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
120.000,00	0,00

Saldo Transfer Pemerintah Pusat Kota Pekanbaru pada tahun 2023 sebesar Rp120.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp120.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan piutang tahun 2022 sebesar Rp0,00. Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Pekanbaru tidak mencatat piutang transfer pemerintah pusat, hal ini sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang berlaku di Pemerintah Kota Pekanbaru yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru menyebutkan bahwa “Untuk pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat, seperti Dana Perimbangan (DAU, DBH, DAK) dan transfer lainnya, piutang akan diakui bila terdapat dokumen yang mengakui adanya kurang salur dari entitas penyalur”. Pada saat tanggal pelaporan dokumen sumber sebagai dasar belum diperoleh.

Pada 31 Desember 2023, Pemerintah Kota Pekanbaru mencatat Piutang Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp120.000,00 yang merupakan Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau.

Rincian per sub rincian objek Piutang Transfer Pemerintah Pusat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

**Tabel 5.3.24. Rincian Per Jenis Piutang Piutang Transfer Pemerintah Pusat**

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAI		TAMBAH KURANG TAHUN BERJALAN		SALDO AKHIR	% KENAIKAN/ PENURUNAN
		TAMBAH	KURANG	PENAMBAHAN	PEMBAYARAN		
1	2	3	4	5	6	7 = 2+3-4+5-6	8
Piutang Dana Perimbangan	-	-	-	120.000,00	-	120.000,00	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>

Sumber : Kertas Kerja Pendapatan dan Piutang

**5.3.1.1.6. Piutang Transfer Antar Daerah**

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
<b>35.412.084.524,00</b>	<b>24.037.615.280,00</b>

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah Kota Pekanbaru pada tahun 2023 sebesar Rp35.412.084.524,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.374.469.244,00 atau 47,32% dibandingkan dengan piutang tahun 2022 sebesar Rp24.037.615.280,00. Rincian per objek Piutang Transfer Pemerintah Pusat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.3.25. Rincian Per Jenis Piutang Transfer Antar Daerah**

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAI		TAMBAH KURANG TAHUN BERJALAN		SALDO AKHIR	% KENAIKAN/ PENURUNAN
		TAMBAH	KURANG	PENAMBAHAN	PEMBAYARAN		
1	2	3	4	5	6	7 = 2+3-4+5-6	8
Piutang Pendapatan Bagi Hasil	24.037.615.280,00	-	-	35.412.084.524,00	24.037.615.280,00	35.412.084.524,00	47,32
<b>JUMLAH</b>	<b>24.037.615.280,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35.412.084.524,00</b>	<b>24.037.615.280,00</b>	<b>35.412.084.524,00</b>	<b>47,32</b>

Sumber : Kertas Kerja Pendapatan dan Piutang

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah tahun 2023 antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau nomor:973/BA/Bapenda/II.3/07 terdapat kurang salur Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp9.601.731.557,00. Selain itu, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau nomor:359/IV/2024 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV (Desember 2023) untuk Kabupaten/Kota Se-Propinsi Riau tahun anggaran 2024 terdapat kurang salur Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp10.629.285.592,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp6.157.987.363,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp8.921.627.688,00 dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp101.452.324,00.

Berikut ini adalah rincian Piutang Transfer Antar Daerah Kota Pekanbaru tahun anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

**Tabel 5.3.26. Rincian Sub Rincian Piutang Transfer Antar Daerah**

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAI		TAMBAH KURANG TAHUN BERJALAN		SALDO AKHIR	% KENAIKAN/ PENURUNAN
		TAMBAH	KURANG	PENAMBAHAN	PEMBAYARAN		
1	2	3	4	5	6	7 = 2+3-4+5-6	8
Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	9.207.480.467,00	-	-	20.231.017.149,00	9.207.480.467,00	20.231.017.149,00	119,72
Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.761.952.725,00	-	-	6.157.987.363,00	5.761.952.725,00	6.157.987.363,00	6,87
Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.960.605.825,00	-	-	8.921.627.688,00	8.960.605.825,00	8.921.627.688,00	(0,43)
Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	107.576.263,00	-	-	101.452.324,00	107.576.263,00	101.452.324,00	(5,69)
<b>JUMLAH</b>	<b>24.037.615.280,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35.412.084.524,00</b>	<b>24.037.615.280,00</b>	<b>35.412.084.524,00</b>	<b>47,32</b>

Sumber : Kertas Kerja Pendapatan dan Piutang

**5.3.1.1.7. Piutang Lainnya**

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
<b>1.857.721.949,25</b>	<b>787.166.524,00</b>

**Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

Saldo Piutang Pajak Daerah Kota Pekanbaru pada Tahun 2023 sebesar Rp1.857.721.949,25 mengalami peningkatan sebesar Rp1.070.555.425,25 atau 136,00% dibandingkan dengan piutang tahun 2022 sebesar Rp787.166.524,00. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri dari Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.27. Rincian Per Objek Piutang Transfer Antar Daerah**

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAI		TAMBAH KURANG TAHUN BERJALAN		SALDO AKHIR	% KENAIKAN/ PENURUNAN
		TAMBAH	KURANG	PENAMBAHAN	PEMBAYARAN		
1	2	3	4	5	6	7 = 2+3-4+5-6	8
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	787.166.524,00	1.302.555.425,25	-	-	232.000.000,00	1.857.721.949,25	136,00
<b>JUMLAH</b>	<b>787.166.524,00</b>	<b>1.302.555.425,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>232.000.000,00</b>	<b>1.857.721.949,25</b>	<b>136,00</b>

Sumber : Kertas Kerja Pendapatan dan Piutang

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain merupakan reklas dari Aset Lainnya, yaitu Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp651.277.716,00, dari total keseluruhan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp2.475.110.855,00 yang ditetapkan dengan SKTJM No.01/SKTJM-TPKD/2022 tanggal 27 Mei 2022. Pada Tahun 2022, terdapat mutasi kurang yang dikarenakan pembayaran atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara tahun 2021 sebesar Rp232.000.000,00.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

**Tabel 5.3.28. Rincian Bagian Lancar TGR-PNS bukan Bendahara**

(dalam rupiah)

OPD	INISIAL	SKTJTM	TANGGAL	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PEMBAYARAN	SALDO AKHIR
BPKAD	DS			474.636,00			474.636,00
BPKAD	HH/UY			194.453,00			194.453,00
BPKAD	HH/UY			2.981.659,00			2.981.659,00
BPKAD	SUM			313.637,00			313.637,00
BPKAD	DS			259.400,00			259.400,00
BPKAD	HER			35.165.000,00			35.165.000,00
BPKAD	ISK			1.730.000,00			1.730.000,00
BPKAD	AL	06/TJM/MPTP-TGR/XII/2014	23/12/2014	62.324.400,00			62.324.400,00
BPKAD	SU	05/SKTJM/MPTP-TGR/2015	17/11/2015	7.745.623,00			7.745.623,00
BPKAD	YB	01/SKTJM/MPTP-TGR/2015	13/11/2015	11.500.000,00			11.500.000,00
BPKAD	DS	02/SKTJM/MPTP-TGR/2015	13/11/2015	7.000.000,00			7.000.000,00
BPKAD	DM	03/SKTJM/MPTP-TGR/2015	13/11/2015	3.100.000,00			3.100.000,00
BPKAD	SFR	04/SKTJM/MPTP-TGR/2015	13/11/2015	5.000.000,00		2.000.000,00	3.000.000,00
BPKAD	SP	06/SKTJM/MPTP-TGR/2015	17/11/2015	3.900.000,00			3.900.000,00
BPKAD	LD	11/SKTJM/MPTP-TGR/2015	17/11/2015	5.200.000,00			5.200.000,00
BPKAD	ST	01/SET/TP-TGR/2016	20/06/2016	10.000.000,00			10.000.000,00
BPKAD	RC	03/SET/TP-TGR/2016	20/06/2016	9.500.000,00			9.500.000,00
BPKAD	SH	04/SET/TP-TGR/2016	20/06/2016	4.500.000,00			4.500.000,00
Sekretariat DPRD	SB	01/SKTJM-TPKD/2022	17/05/2022	616.277.716,00	1.302.555.425,25	230.000.000,00	1.688.833.141,25
				<b>787.166.524,00</b>	<b>1.302.555.425,25</b>	<b>232.000.000,00</b>	<b>1.857.721.949,25</b>

Sumber : Kertas Kerja Pendapatan dan Piutang

**5.3.1.1.8. Penyisihan Piutang**

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
<b>(404.743.212.196,20)</b>	<b>(423.632.712.893,00)</b>

Saldo penyisihan piutang Kota Pekanbaru pada tahun 2023 sebesar Rp404.743.212.196,20 mengalami penurunan sebesar Rp18.889.500.696,80 atau 4,46% dibandingkan dengan piutang tahun 2022 sebesar Rp423.632.712.893,00. Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Kota Pekanbaru piutang akan disisihkan nilainya berdasarkan tanggal jatuh temponya. Berikut ini adalah daftar rincian penyisihan piutang:

**Tabel 5.3.29. Rincian Penyisihan Piutang**

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAL		TAMBAH KURANG TAHUN BERJALAN		SALDO AKHIR	% KENAIKAN/ PENURUNAN
		TAMBAH	KURANG	BEBAN PENYISIHAN	PENDAPATAN LO		
1	2	3	4	5	6	7 = 2+3-4+5-6	8
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	415.698.487.502,00	1.001,00	41.117.312.623,48	21.614.197.214,48	142.866.144,00	396.052.506.950,00	-4,73
Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	5.569.561.806,00	902.952.216,00	-	31.748.367,63	945.629.820,00	5.588.632.569,63	-0,20
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.011.958.929,00	-	-	2.508.287,14	2.544.478,00	2.011.922.738,14	0,00
Penyisihan Piutang Pendapatan Transfer Antar Daerah	120.188.076,00	-	-	-	120.188.076,00	-	-100,00
Penyisihan Piutang Lainnya	232.516.580,00	-	-	889.633.358,43	2.000.000,00	1.120.149.938,43	381,75
<b>JUMLAH</b>	<b>423.632.712.893,00</b>	<b>902.953.217,00</b>	<b>41.117.312.623,48</b>	<b>22.538.087.227,67</b>	<b>1.213.228.518,00</b>	<b>404.743.212.196,19</b>	<b>-4,46</b>

Sumber : Kertas Kerja Pendapatan dan Piutang

Pada tahun 2023, saldo akhir penyisihan piutang, dihasilkan dari koreksi saldo awal penyisihan piutang dan perhitungan ulang persentase penyisihan sesuai dengan klasifikasi jatuh tempo piutangnya. Hal ini berlaku untuk seluruh sub rincian akun penyisihan piutang, dan dapat dilihat pada tabel-tabel rincian penyisihan berikutnya.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

**Penyisihan Piutang Pajak Daerah**

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
(396.052.506.950,00)	(415.698.487.502,00)

Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tahun 2023 sebesar Rp396.052.506.950,00 mengalami penurunan sebesar Rp19.645.980.552,00 atau 4,73% dari tahun 2022 sebesar Rp415.698.487.502,00. Perbandingan Penyisihan Piutang Pajak tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:

**Tabel 5.3.30. Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah**

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAI		TAMBAH KURANG TAHUN BERJALAN		SALDO AKHIR	% KENAIKAN PENURUNAN
		TAMBAH	KURANG	BEBAH PENYISIHAN	PENDAPATAN LO		
1	2	3	4	5	6	7 = 2+3-4+5-6	8
Penyisihan Piutang Pajak Hotel	367.115.721,00	1.001,00	206.168.000,00	27.606,00	142.829.767,00	18.146.561,00	-95,06
Penyisihan Piutang Pajak Restoran	1.374.786.067,00	-	737.364.000,00	100.788.475,00	-	738.210.542,00	-46,30
Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	164.752.940,00	-	164.670.000,00	20.426,00	36.377,00	66.989,00	-99,96
Penyisihan Piutang Pajak Reklame	4.327.814.662,00	-	-	576.671.517,00	-	4.904.486.179,00	13,32
Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	76.975,00	-	-	1.464.686,00	-	1.541.661,00	1902,81
Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	437.053.407,00	-	-	11.251.961,00	-	448.305.368,00	2,57
Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	403.528.219.047,00	-	37.356.467.929,48	20.923.972.543,48	-	387.095.723.661,00	-4,07
Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPH-TB)	5.498.668.683,00	-	2.652.642.694,00	-	-	2.846.025.989,00	-48,24
<b>JUMLAH</b>	<b>415.698.487.502,00</b>	<b>1.001,00</b>	<b>41.117.312.623,48</b>	<b>21.614.197.214,48</b>	<b>142.866.144,00</b>	<b>396.052.506.950,00</b>	<b>-4,73</b>

Sumber : Kertas Kerja Pendapatan dan Piutang TA.2023

Adapun daftar perhitungan dari penyisihan piutang pajak daerah tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran 12.

**Penyisihan Piutang Retribusi Daerah**

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
(5.558.632.569,63)	(5.569.561.806,00)

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Kota Pekanbaru pada tahun 2023 sebesar Rp5.558.632.569,63 mengalami penurunan sebesar Rp10.929.236,38 atau 0,20% dibandingkan dengan piutang tahun 2022 sebesar Rp5.569.561.806,00. Perkembangan Penyisihan Piutang tahun 2023 dan 2022 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.3.31. Perkembangan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah**

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAI		TAMBAH KURANG TAHUN BERJALAN		SALDO AKHIR	% KENAIKAN PENURUNAN
		TAMBAH	KURANG	BEBAH PENYISIHAN	PENDAPATAN LO		
1	2	3	4	5	6	7 = 2+3-4+5-6	8
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	155.995.253,00	-	-	31.748.367,63	-	187.743.620,63	20,35
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	3.639.959.193,00	902.952.216,00	-	-	945.629.820,00	3.597.281.589,00	-1,17
Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	1.773.607.360,00	-	-	-	-	1.773.607.360,00	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>5.569.561.806,00</b>	<b>902.952.216,00</b>	<b>-</b>	<b>31.748.367,63</b>	<b>945.629.820,00</b>	<b>5.558.632.569,63</b>	<b>-0,20</b>

Sumber : Kertas Kerja Pendapatan dan Piutang



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Berikut ini adalah daftar perhitungan dari penyisihan piutang retribusi pajak daerah tahun 2023:

Tabel 5.3.32. Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

KODE	REKENING URAIAN	PIUTANG DAN PENYISIHAN		
		PIUTANG	%	PENYISIHAN
4.1.02.01.05.	<b>Retribusi Pelayanan Pasar</b>	<b>186.811.500,00</b>		<b>150.653.946,00</b>
4.1.02.01.05.0003.	Retribusi Kios	186.811.500,00		150.653.946,00
	Tunggakan 2017	77.181.000,00	100,00	77.181.000,00
	Tunggakan 2018	9.930.000,00	100,00	9.930.000,00
	Tunggakan 2019	11.494.500,00	100,00	11.494.500,00
	Tunggakan 2020	12.107.250,00	100,00	12.107.250,00
	Tunggakan 2021	15.135.750,00	100,00	15.135.750,00
	Tunggakan 2022	24.623.750,00	100,00	24.623.750,00
	Tunggakan 2023	36.339.250,00	0,50	181.696,00
4.1.02.01.07.	<b>Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran</b>	<b>27.498.620,00</b>		<b>27.498.620,00</b>
4.1.02.01.07.0001.	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	27.498.620,00		27.498.620,00
	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian Dimasukkan kedalam Retribusi Pemakaian Ruang	27.498.620,00	100,00	27.498.620,00
4.1.02.01.13.	<b>Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi</b>	<b>1.331.464,00</b>		<b>1.331.464,00</b>
4.1.02.01.13.0001.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.331.464,00		1,331,464,00
	Plutang	1,331,464,00	100,00	1,331,464,00
4.1.02.01.13.	<b>Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi</b>	<b>19.036.875,00</b>		<b>95.184,00</b>
4.1.02.01.13.0001.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	19,036,875,00		95,184,00
	Plutang 2022 - Lancar	19,036,875,00	0,50	95,184,00
4.1.02.02.01.	<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	<b>1.164.350.160,00</b>		<b>949.419.576,00</b>
4.1.02.02.01.0001.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	701.580.960,00		486.650.376,00
	Plutang 2021	223.957.440,00	100,00	223.957.440,00
	Plutang 2022	238.811.760,00	100,00	238.811.760,00
	Plutang 2023	238.811.760,00	10,00	23.881.176,00
4.1.02.02.01.	<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	<b>1.187.385.960,00</b>		<b>1.187.385.960,00</b>
4.1.02.02.01.0005.	Retribusi Pemakaian Ruang	1.187.385.960,00		1.187.385.960,00
	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian Dimasukkan kedalam Retribusi Pemakaian Ruang 2008	1.187.385.960,00	100,00	1.187.385.960,00
4.1.02.02.04.	<b>Retribusi Terminal</b>	<b>73.245.253,00</b>		<b>73.245.253,00</b>
4.1.02.02.04.0003.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	73.245.253,00		73.245.253,00
	Plutang	73.245.253,00	100,00	73.245.253,00
4.1.02.02.08.	<b>Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan</b>	<b>1.850.000.000,00</b>		<b>1.850.000.000,00</b>
4.1.02.02.08.0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.850.000.000,00		1.850.000.000,00
	Plutang	1.850.000.000,00	100,00	1.850.000.000,00
4.1.02.03.01.	<b>Retribusi Izin Mendirikan Bangunan</b>	<b>1.773.607.360,00</b>		<b>1.773.607.360,00</b>
4.1.02.03.01.0001.	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	1.773.607.360,00		1.773.607.360,00
	IMB	1.773.607.360,00	100,00	1.773.607.360,00
4.1.04.03.03.	<b>Hasil dari Bangun Guna Serah</b>	<b>7.076.301.489,00</b>		-
4.1.04.03.03.0001.	Hasil dari Bangun Guna Serah	7.076.301.489,00		-
4.1.04.03.03.0001.a	CV. Putra Bertuah / PT. Riau Kerta Raharja (Pasar Sial)	243.444.931,00		-
	BGS	243.444.931,00		-
4.1.04.03.03.0001.c	PT. Peputra Mahajaya (Pasar Senapelan)	4.599.379.090,00		-
	BGS 2022	110.000.000,00		-
	BGS 2023	110.000.000,00		-
	Laba Parkir 2021	161.506.410,00		-
	Adendum 2016	37.016.000,00		-
	Adendum 2017	38.866.000,00		-
	Adendum 2018	38.839.000,00		-
	Adendum 2022	40.809.300,00		-
	Adendum 2023	42.849.765,00		-
	Selisih bagi hasil keuntungan 2021	4.019.492.615,00		-
4.1.04.03.03.0001.d	PT. Makmur Papan Permata (Pasar Sukaramai)	486.081.100,00		-
	BGS 2020	100.000.000,00		-
	BGS 2021	91.650.000,00		-
	Adendum 2020	294.431.100,00		-
4.1.04.03.03.0001.e	PT. Agung Rafa Bonal, KSO (Pasar Induk)	1.747.396.368,00		-
	BGS 2018	244.653.068,00		-
	BGS 2019	259.511.558,00		-
	BGS 2020	275.291.275,00		-
	BGS 2021	292.049.334,00		-
	BGS 2022	309.846.392,00		-
	BGS 2023	309.846.392,00		-
	Denda Keterlambatan 2021	56.198.349,00		-



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

KODE	REKENING URAIAN	PIUTANG DAN PENYISIHAN		
		PIUTANG	%	PENYISIHAN
4.1.04.05.01.	Jasa Giro pada Kas Daerah	15.000,00		1.500,00
4.1.04.05.01.0001.	Jasa Giro pada Kas Daerah	15.000,00		1.500,00
	Kekurangan STS PU karena dipotong Bank Riau ketika konversi ke syariah, jurnal piutang pada kas 2022	15.000,00	10,00	1.500,00
4.1.04.08.02.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	170.888.808,00		170.888.808,00
4.1.04.08.02.0001.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	170.888.808,00		170.888.808,00
	Plutang 2008	170.888.808,00	100,00	170.888.808,00
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.688.833.141,25		951.261.130,43
4.1.04.08.02.0001.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.688.833.141,25		951.261.130,43
	Bagian lancar TPTGR SB 2022	1.688.833.141,25		951.261.130,43
4.1.04.13.01.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	1.180.249.874,00		1.180.249.874,00
4.1.04.13.01.0006.	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.180.249.874,00		1.180.249.874,00
	Plutang	1.180.249.874,00	100,00	1.180.249.874,00
4.1.04.13.01.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	32.770.159,00		452.702,00
4.1.04.13.01.0013.	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	32.770.159,00		452.702,00
	Plutang 2022 - Lancar	29.729.621,00	0,50	148.648,00
	Plutang 2022 - Kurang Lancar	3.040.416,00	10,00	304.042,00
	Plutang 2022 - Kurang Lancar	122,00	10,00	12,00
4.1.04.15.03.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	808.756.000,00		808.756.000,00
4.1.04.15.03.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	808.756.000,00		808.756.000,00
	Temuan tunjangan anggota DPRD 2008	808.756.000,00	100,00	808.756.000,00
4.1.04.16.01.	Pendapatan BLUD	19.955.800,00		19.955.800,00
4.1.04.16.01.0001.	Pendapatan BLUD	19.955.800,00		19.955.800,00
	Plutang Umum 2021	19.950.000,00	100,00	19.950.000,00
	Plutang BPJS 2022	5.800,00	100,00	5.800,00
	Plutang Umum 2021	19.950.000,00	100,00	19.950.000,00
	Plutang BPJS 2022	2.900,00	100,00	2.900,00
	Plutang BPJS 2022	2.900,00	100,00	2.900,00

Sumber : Kertas Kerja Pendapatan dan Piutang

**Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah**

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
(2.011.922.738,14)	(2.011.958.929,00)

Saldo Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada tahun 2023 sebesar Rp2.011.922.738,14 mengalami penurunan sebesar Rp36.190,86 atau 0,00% dibandingkan dengan piutang tahun 2022 sebesar Rp2.011.958.929,00. Berikut ini adalah rincian dari penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah:

**Tabel 5.3.33. Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah**

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAI		TAMBAH KURANG TAHUN BERJALAN		SALDO AKHIR	% KENAIKAN/ PENURUNAN
		TAMBAH	KURANG	BEBAN PENYISIHAN	PENDAPATAN LO		
1	2	3	4	5	6	7 = 2+3-4+5-6	8
Penyisihan Piutang Jasa Giro	75,00	-	-	-	-	75,00	0,00
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.180.702.576,00	-	-	2.508.287,14	-	1.183.210.863,14	0,21
Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian	808.756.000,00	-	-	-	-	808.756.000,00	0,00
Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	22.500.278,00	-	-	-	2.544.478,00	19.955.800,00	-11,31
<b>JUMLAH</b>	<b>2.011.958.929,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.508.287,14</b>	<b>2.544.478,00</b>	<b>2.011.922.738,14</b>	<b>0,00</b>

Sumber : Kertas Kerja Pendapatan dan Piutang



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

**Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah**

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
(0,00)	(120.188.076,00)

Saldo Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah Kota Pekanbaru pada tahun 2023 sebesar Rp0,00 berkurang sebesar Rp120.188.076,00 atau 100,00% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp120.188.076,00.

**Tabel 5.3.34. Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah**

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAL		TAMBAH KURANG TAHUN BERJALAN		SALDO AKHIR	% KENAIKAN/ PENURUNAN
		TAMBAH	KURANG	BEBAN PENYISIHAN	PENDAPATAN LO		
1	2	3	4	5	6	7 = 2+3-4+5-6	8
Penyisihan Piutang Bagi Hasil	120.188.076,00	-	-	-	120.188.076,00	-	(100,00)
<b>JUMLAH</b>	<b>120.188.076,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>120.188.076,00</b>	<b>-</b>	<b>(100,00)</b>

Sumber : Kertas Kerja Pendapatan dan Piutang

**Penyisihan Piutang Lainnya**

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
(1.120.149.938,43)	(232.516.580,00)

Saldo Penyisihan Piutang Lainnya Kota Pekanbaru pada tahun 2023 sebesar Rp1.120.149.938,43 bertambah sebesar Rp887.633.358,43 atau sebesar 381,75% dibandingkan tahun lalu sebesar Rp232.516.580,00. Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan terhadap Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.3.35. Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAL		TAMBAH KURANG TAHUN BERJALAN		SALDO AKHIR	% KENAIKAN/ PENURUNAN
		TAMBAH	KURANG	BEBAN PENYISIHAN	PENDAPATAN LO		
1	2	3	4	5	6	7 = 2+3-4+5-6	8
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	232.516.580,00	-	-	889.633.358,43	2.000.000,00	1.120.149.938,43	381,75
<b>JUMLAH</b>	<b>232.516.580,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>889.633.358,43</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.120.149.938,43</b>	<b>381,75</b>

Sumber : Kertas Kerja Pendapatan dan Piutang

Penyisihan piutang lainnya berasal dari penyisihan piutang bagian lancar tuntutan ganti kerugian (TGR) daerah. Ada dua SKPD yang memiliki piutang bagian lancar TGR daerah yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru sebesar Rp168.888.808,00 dan Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru sebesar Rp1.688.833.141,25.

Piutang bagian lancar TGR Daerah pada BPKAD Kota Pekanbaru disisihkan 100% senilai Rp168.888.808,00 dan pada tahun 2023 ada pembayaran sebesar Rp2.000.000,00. Sedangkan, penambahan penyisihan piutang Sekretariat DPRD disisihkan



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

sebesar 56% sebesar Rp951.261.130,43 dan pada tahun 2023 ada pembayaran sebesar Rp230.000.000,00 dengan rincian nilai sebagai berikut:

**Tabel 5.3.36. Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah BPKAD dan Sekretariat DPRD Tahun 2023**

(dalam rupiah)

OPD	INISIAL	SKTJM	TANGGAL	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PEMBAYARAN	SALDO AKHIR	PENYISIHAN
BPKAD	DS			474.636,00			474.636,00	474.636,00
BPKAD	HHUY			194.453,00			194.453,00	194.453,00
BPKAD	HHUY			2.981.659,00			2.981.659,00	2.981.659,00
BPKAD	SUM			313.637,00			313.637,00	313.637,00
BPKAD	DS			259.400,00			259.400,00	259.400,00
BPKAD	HER			35.165.000,00			35.165.000,00	35.165.000,00
BPKAD	ISK			1.730.000,00			1.730.000,00	1.730.000,00
BPKAD	AL	06/TJM/MPTP-TGR/XII/2014	23/12/2014	62.324.400,00			62.324.400,00	62.324.400,00
BPKAD	SU	05/SKTJM/MPTP-TGR/2015	17/11/2015	7.745.623,00			7.745.623,00	7.745.623,00
BPKAD	YB	01/SKTJM/MPTP-TGR/2015	13/11/2015	11.500.000,00			11.500.000,00	11.500.000,00
BPKAD	DS	02/SKTJM/MPTP-TGR/2015	13/11/2015	7.000.000,00			7.000.000,00	7.000.000,00
BPKAD	DM	03/SKTJM/MPTP-TGR/2015	13/11/2015	3.100.000,00			3.100.000,00	3.100.000,00
BPKAD	SFR	04/SKTJM/MPTP-TGR/2015	13/11/2015	5.000.000,00		2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
BPKAD	SP	06/SKTJM/MPTP-TGR/2015	17/11/2015	3.900.000,00			3.900.000,00	3.900.000,00
BPKAD	LD	11/SKTJM/MPTP-TGR/2015	17/11/2015	5.200.000,00			5.200.000,00	5.200.000,00
BPKAD	ST	01/SET/TP-TGR/2016	20/06/2016	10.000.000,00			10.000.000,00	10.000.000,00
BPKAD	RC	03/SET/TP-TGR/2016	20/06/2016	9.500.000,00			9.500.000,00	9.500.000,00
BPKAD	SH	04/SET/TP-TGR/2016	20/06/2016	4.500.000,00			4.500.000,00	4.500.000,00
Sekretariat DPRD	SB	01/SKTJM-TPKD/2022	17/05/2022	616.277.716,00	1.302.555.425,25	230.000.000,00	1.688.833.141,25	951.261.130,43
				<b>787.166.524,00</b>	<b>1.302.555.425,25</b>	<b>232.000.000,00</b>	<b>1.857.721.949,25</b>	<b>1.120.149.938,43</b>

Sumber : Kertas Kerja Pendapatan dan Piutang

**5.3.1.1.9. Beban Dibayar Dimuka**

Saldo Beban Dibayar Dimuka tahun 2023 sebesar Rp105.000.000,00 dan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.37. Rincian Beban Dibayar Di Muka Tahun 2023**

(dalam rupiah)

NO.	NAMA SKPD	JENIS BELANJA	JUMLAH
1	Sekretariat Daerah	Sewa Bangunan	105.000.000,00
	<b>Jumlah</b>		<b>105.000.000,00</b>

Sumber : Kertas Kerja Pendapatan dan Piutang TA. 2023

**5.3.1.1.10. Persediaan**

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
<b>165.674.050.106,57</b>	<b>135.583.403.786,13</b>

Persediaan mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Pekanbaru, barang yang dipergunakan dan/atau dijual kembali dan/atau diserahkan kepada masyarakat.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

Untuk Tahun Anggaran 2023, penambahan dan pengurangan Persediaan terdiri dari:

**Tabel 5.3.38 Penambahan dan Pengurangan Persediaan Tahun 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	1 Januari 2023	Mutasi		31 Desember 2023
			Tambah	Kurang	
<b>A</b>	<b>Persediaan Bahan Pakai Habis</b>	<b>135.563.603.786,13</b>	<b>416.579.948.667,78</b>	<b>386.469.502.347,34</b>	<b>165.674.050.106,57</b>
	<b>Bahan</b>	<b>5.877.550.970,85</b>	<b>138.978.839.145,34</b>	<b>137.350.647.733,19</b>	<b>7.505.742.383,00</b>
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	521.468.170,85	60.138.243.198,00	60.070.437.618,85	589.273.750,00
2	Bahan Kimia	95.976.450,00	1.076.502.510,00	1.109.021.220,00	63.457.740,00
3	Bahan Bakar dan Pelumas	1.820.227.100,00	36.727.484.688,00	38.128.594.308,00	419.117.480,00
	Bahan Baku		607.242.000,00	607.242.000,00	-
	Barang Dalam Proses		129.800.000,00	129.800.000,00	-
4	Bahan/Bibit Tanaman	3.433.897.550,00	1.839.427.420,00	3.193.400.870,00	2.079.924.100,00
	Isi Tabung Pemadam Kebakaran		34.400.000,00	34.400.000,00	-
	Isi Tabung Gas		27.820.000,00	27.820.000,00	-
	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan		597.366.200,00	597.366.200,00	-
5	Bahan Lainnya	5.981.700,00	37.800.553.129,34	33.452.565.516,34	4.353.969.313,00
	<b>Suku Cadang</b>	<b>162.815.400,00</b>	<b>5.963.063.880,00</b>	<b>5.974.641.380,00</b>	<b>151.237.900,00</b>
	Suku Cadang Alat Angkutan		2.694.992.170,00	2.694.992.170,00	
	Suku Cadang Alat Besar		2.919.539.490,00	2.919.539.490,00	
	Suku Cadang Alat Laboratorium		49.580.700,00	49.580.700,00	
	Suku Cadang Alat Bengkel		14.251.000,00	14.251.000,00	
1	Suku Cadang Lainnya	162.815.400,00	284.700.520,00	296.278.020,00	151.237.900,00
	<b>Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor</b>	<b>23.214.693.516,28</b>	<b>83.067.882.659,00</b>	<b>80.517.709.938,00</b>	<b>25.764.866.237,28</b>
1	Alat Tulis Kantor	788.866.375,00	9.899.938.633,00	10.156.473.588,00	532.331.420,00
2	Kertas dan Cover	72.349.234,00	6.538.772.216,00	6.574.569.750,00	36.551.700,00
3	Bahan Cetak	601.958.081,00	27.325.928.954,00	27.349.000.044,00	578.886.991,00
4	Benda Pos	15.730.000,00	1.011.670.000,00	1.012.760.000,00	14.640.000,00
	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender		127.610.000,00	127.610.000,00	
5	Bahan Komputer	409.349.830,00	6.887.017.620,00	6.152.414.887,00	1.143.952.563,00
6	Perabot Kantor	178.795.071,00	3.482.307.287,00	3.461.968.114,00	199.134.244,00
7	Alat Listrik	2.674.770.113,00	13.850.905.673,00	12.222.012.234,00	4.303.663.552,00
	Perlengkapan Dinas		3.164.999.180,00	3.164.999.180,00	
	Perlengkapan Pendukung Olahraga		651.831.300,00	651.831.300,00	
8	Suvenir/Cendera Mata	6.150.000,00	6.210.885.400,00	6.208.860.400,00	8.175.000,00
9	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	18.466.724.812,28	3.916.016.396,00	3.435.210.441,00	18.947.530.767,28
	<b>Obat obatan</b>	<b>22.901.621.129,00</b>	<b>32.069.902.870,44</b>	<b>36.277.548.119,15</b>	<b>18.693.975.880,29</b>
1	Obat	11.623.979.243,00	26.005.204.707,44	29.242.134.958,15	8.387.048.992,29
2	Obat obatan Lainnya	11.277.641.886,00	6.064.698.163,00	7.035.413.161,00	10.306.926.888,00
	<b>Persediaan untuk Dijual/Diserahkan</b>	<b>83.406.922.770,00</b>	<b>156.500.260.113,00</b>	<b>126.348.955.177,00</b>	<b>113.558.227.706,00</b>
1	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	82.113.762.970,00	156.500.260.113,00	126.348.955.177,00	112.265.067.906,00
2	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	1.293.159.800,00	-	-	1.293.159.800,00
<b>B</b>	<b>Persediaan Barang Tak Habis Pakai</b>	<b>19.800.000,00</b>	<b>61.297.651,00</b>	<b>81.097.651,00</b>	<b>-</b>
	<b>Komponen</b>	<b>19.800.000,00</b>	<b>61.297.651,00</b>	<b>81.097.651,00</b>	<b>-</b>
	Komponen Rambu-Rambu	19.800.000,00	61.297.651,00	81.097.651,00	-
	<b>Total</b>	<b>135.583.403.786,13</b>	<b>416.641.246.318,78</b>	<b>386.550.599.998,34</b>	<b>165.674.050.106,57</b>

Sumber : Kertas Kerja Persediaan TA.2023



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dari Tabel 5.3.38. di atas menunjukkan persediaan Tahun 2023 adalah sebesar Rp165.685.594.650,28 dan mengalami kenaikan sebesar Rp30.102.190.864,15 atau 81,82% dibandingkan persediaan Tahun 2022 sebesar Rp135.563.603.786,13.

Terdapat penambahan beban atau belanja Persediaan tahun 2023 yang rincian keseluruhan penambah Persediaan dapat dilihat di lampiran 14. Rincian keseluruhan Pengurangan Persediaan selama Tahun 2023 dapat dilihat di daftar lampiran 15. Rincian persediaan per SKPD Tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 5.3.39. Rincian Persediaan per-SKPD**

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	
					%
1	Dinas Pendidikan	34.884.990,00	49.703.397,00	(14.818.407,00)	(29,81)
2	Dinas Kesehatan	19.450.528.933,29	23.716.228.343,00	(4.265.699.409,71)	(17,99)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	137.378.762.511,28	104.184.017.803,13	33.194.744.708,14	31,86
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7.907.560,00	3.146.990,00	4.760.570,00	151,27
5	Satpol PP	470.800,00	786.800,00	(316.000,00)	(40,16)
6	BPBD	1.529.200,00	2.364.738,00	(835.538,00)	(35,33)
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.262.900,00	1.206.300,00	2.056.600,00	170,49
8	Dinas Sosial	25.583.270,00	19.205.600,00	6.377.670,00	33,21
9	Disnaker	3.736.000,00	8.725.040,00	(4.989.040,00)	(57,18)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat	7.385.075,00	21.139.225,00	(13.754.150,00)	(65,06)
11	Dinas Ketahanan Pangan	6.613.600,00	4.051.700,00	2.561.900,00	63,23
12	Dinas Pertanian	457.100,00	539.600,00	(82.500,00)	(15,29)
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.079.924.100,00	3.433.897.550,00	(1.353.973.450,00)	(39,43)
14	Disdukcapil	1.353.958.675,00	381.033.380,00	972.925.295,00	255,34
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	1.341.300,00	13.943.400,00	(12.602.100,00)	(90,38)
16	Dinas Perhubungan	4.998.664.191,00	3.151.263.884,00	1.847.400.307,00	58,62
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	6.865.250,00	10.489.400,00	(3.624.150,00)	(34,55)
18	Dinas Koperasi UKM	11.851.000,00	41.943.700,00	(30.092.700,00)	(71,75)
19	DPMPSTP	5.006.250,00	213.321.650,00	(208.315.400,00)	(97,65)
20	Dispora	1.021.150,00	484.250,00	536.900,00	110,87
21	Badan Perpustakaan dan Kearsipan	8.786.300,00	1.989.364,00	6.796.936,00	341,66
22	Disbudpar	13.831.800,00	2.510.300,00	11.321.500,00	451,00
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	98.464.500,00	34.721.680,00	63.742.820,00	183,58
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	467.830,00	9.330.600,00	(8.862.770,00)	(94,99)
25	Sekretariat Daerah	15.703.435,00	28.470.020,00	(12.766.585,00)	(44,84)
26	Sekretariat DPRD	3.325.400,00	20.154.360,00	(16.828.960,00)	(83,50)
27	Bappeda	7.534.200,00	7.353.318,00	180.882,00	2,46
28	BPKAD	16.130.800,00	24.258.300,00	(8.127.500,00)	(33,50)
29	Bapenda	23.154.954,00	76.811.680,00	(53.656.726,00)	(69,85)
30	BKPSDM	10.798.700,00	9.371.500,00	1.427.200,00	15,23
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	5.995.100,00	6.341.200,00	(346.100,00)	(5,46)
32	Inspektorat Kota	14.817.000,00	21.972.500,00	(7.155.500,00)	(32,57)
33	Kec. Bukit Raya	2.593.681,00	3.280.000,00	(686.319,00)	(20,92)
34	Kec. Tenayan Raya	4.551.000,00	1.498.000,00	3.053.000,00	203,81
35	Kec. Sail	444.700,00	1.484.000,00	(1.039.300,00)	(70,03)
36	Kec. Limapuluh	9.253.000,00	7.394.500,00	1.858.500,00	25,13
37	Kec. Pekanbaru Kota	10.970.000,00	11.951.300,00	(981.300,00)	(8,21)
38	Kec. Sukajadi	4.603.250,00	4.450.400,00	152.850,00	3,43
39	Kec. Payung Sekaki	878.500,00	937.100,00	(58.600,00)	(6,25)
40	Kec. Senapelan	427.000,00	1.004.000,00	(577.000,00)	(57,47)
41	Kec. Marpoyan Damai	9.586.300,00	10.959.400,00	(1.373.100,00)	(12,53)
42	Kec. Bina Widya	9.602.041,00	9.599.999,00	2.042,00	0,02
43	Kec. Tuah Madani	1.469.080,00	3.261.841	(1.792.761,00)	(54,96)
44	Kec. Rumbai	480.000,00	2.554.794	(2.074.794,00)	(81,21)
45	Kec. Rumbai Timur	759.600,00	5.299.600	(4.540.000,00)	(85,67)
46	Kec. Rumbai Barat	13.236.780,00	8.715.420	4.521.360,00	51,88
47	Kec. Kulim	6.057.000,00	9.775.800	(3.718.800,00)	(38,04)
48	Badan Kesbangpol	374.300,00	460.060	(85.760,00)	(18,64)
<b>Jumlah</b>		<b>165.674.050.106,57</b>	<b>135.583.403.786,13</b>	<b>30.090.646.320,43</b>	<b>22,19</b>

Sumber : Kertas Kerja Persediaan TA.2023



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Rincian persediaan per Jenis tiap SKPD Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.3.40. Rincian Persediaan Per Jenis Tiap SKPD Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Persediaan Bahan	Persediaan Suku Cadang	Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	Persediaan Obat-obatan	Persediaan untuk Yang Akan Diserahkan	Persediaan Komponen
1	Dinas Pendidikan	-	-	34.884.990,00	-	-	-
2	Dinas Kesehatan	63.457.740,00	-	788.107.313,00	18.598.963.880,29	-	-
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.357.738.043,00	-	18.462.796.762,28	-	113.558.227.706,00	-
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	7.907.560,00	-	-	-
5	Satpol PP	-	-	470.800,00	-	-	-
6	BPBD	-	-	1.529.200,00	-	-	-
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	3.262.900,00	-	-	-
8	Dinas Sosial	-	-	25.583.270,00	-	-	-
9	Dsnaker	-	-	3.736.000,00	-	-	-
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	7.385.075,00	-	-	-
11	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	6.613.600,00	-	-	-
12	Dinas Pertanahan	-	-	457.100,00	-	-	-
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.079.924.100,00	-	-	-	-	-
14	Disdukcapil	-	-	1.353.958.675,00	-	-	-
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	-	-	1.341.300,00	-	-	-
16	Dinas Perhubungan	-	151.237.900,00	4.847.426.291,00	-	-	-
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-	-	6.865.250,00	-	-	-
18	Dinas Koperasi UKM	-	-	11.851.000,00	-	-	-
19	DFM/PTSP	-	-	5.006.250,00	-	-	-
20	Dispora	-	-	1.021.150,00	-	-	-
21	Badan Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	8.786.300,00	-	-	-
22	Disbudpar	-	-	13.831.800,00	-	-	-
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	3.452.500,00	-	-	95.012.000,00	-	-
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	-	-	467.830,00	-	-	-
25	Sekretariat Daerah	-	-	15.703.435,00	-	-	-
26	Sekretariat DPRD	-	-	3.325.400,00	-	-	-
27	Bappeda	-	-	7.534.200,00	-	-	-
28	BPKAD	-	-	16.130.800,00	-	-	-
29	Bapenda	-	-	23.154.954,00	-	-	-
30	BK/PSDM	-	-	10.798.700,00	-	-	-
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-	5.995.100,00	-	-	-
32	Inspektorat Kota	-	-	14.817.000,00	-	-	-
33	Kec. Bukit Raya	-	-	2.593.681,00	-	-	-
34	Kec. Tenayan Raya	-	-	4.551.000,00	-	-	-
35	Kec. Sail	-	-	444.700,00	-	-	-
36	Kec. Limapuluh	1.170.000,00	-	8.083.000,00	-	-	-
37	Kec. Pekanbaru Kota	-	-	10.970.000,00	-	-	-
38	Kec. Sukajadi	-	-	4.603.250,00	-	-	-
39	Kec. Payung Sekaki	-	-	878.500,00	-	-	-
40	Kec. Senapelan	-	-	427.000,00	-	-	-
41	Kec. Marpoyan Damai	-	-	9.586.300,00	-	-	-
42	Kec. Bina Widya	-	-	9.602.041,00	-	-	-
43	Kec. Tuah Madani	-	-	1.469.080,00	-	-	-
44	Kec. Rumbai	-	-	480.000,00	-	-	-
45	Kec. Rumbai Timur	-	-	759.600,00	-	-	-
46	Kec. Rumbai Barat	-	-	13.236.780,00	-	-	-
47	Kec. Kulim	-	-	6.057.000,00	-	-	-
48	Badan Kesbangpol	-	-	374.300,00	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>7.505.742.383,00</b>	<b>151.237.900,00</b>	<b>25.764.866.237,28</b>	<b>18.693.975.880,29</b>	<b>113.558.227.706,00</b>	<b>-</b>

Sumber : Kertas Kerja Persediaan TA.2023



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sebesar Rp113.558.227.706,00, rincian dapat dilihat di daftar Lampiran 13.

### 5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
184.356.466.061,90	192.690.759.929,80

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi dengan tujuan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan guna mendapatkan manfaat secara ekonomis sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Investasi Jangka Panjang Kota Pekanbaru Tahun 2023 sebesar Rp184.356.466.061,90 dan mengalami penurunan sebesar Rp8.334.293.867,90 atau 4,33% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp192.690.759.929,80. Investasi jangka panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan uraian sebagai berikut:

#### 5.3.1.2.1. Investasi Permanen

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
184.356.466.061,90	192.690.759.929,80

Penyertaan modal Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2023 sebesar Rp184.356.466.061,90 dan mengalami penurunan sebesar Rp8.334.293.867,90 atau 4,33% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp192.690.759.929,80, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.41. Investasi Permanen Tahun 2022 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Nama	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	PT Bank Riau Kepri	15.647.400.000,00	15.647.400.000,00	-	-
2	PDAM Kota Pekanbaru	22.230.547.765,00	30.231.755.797,00	(8.001.208.032,00)	(26,47)
3	PT Riau Airlines	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	-	-
4	PT Sarana Pembangunan Pekanbaru	131.868.039.785,88	133.428.787.902,00	(1.560.748.116,12)	(1,17)
5	PT Bank Perkreditan Rakyat	8.910.478.511,02	7.682.816.230,80	1.227.662.280,22	15,98
6	PT Bumi Siak Pusako	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>184.356.466.061,90</b>	<b>192.690.759.929,80</b>	<b>(8.334.293.867,90)</b>	<b>(4,33)</b>

Sumber : Laporan Keuangan BUMD Audited



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

Mutasi tambah kurang Investasi Permanen Tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 5.3.42. Mutasi Tambah Kurang Investasi Permanen Tahun 2023**

(dalam rupiah)

No	Nama	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	PT Bank Riau Kepri	15.647.400.000,00	-	-	15.647.400.000,00
2	PDAM Kota Pekanbaru	30.231.755.797,00	-	8.001.208.032,00	22.230.547.765,00
3	PT Riau Airlines	2.700.000.000,00	-	-	2.700.000.000,00
4	PT Sarana Pembangunan Pekanbaru	133.428.787.902,00	-	1.560.748.116,12	131.868.039.785,88
5	PT Bank Perkreditan Rakyat	7.682.816.230,80	1.227.662.280,22	-	8.910.478.511,02
6	PT Bumi Siak Pusako	3.000.000.000,00	-	-	3.000.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>192.690.759.929,80</b>	<b>1.227.662.280,22</b>	<b>9.561.956.148,12</b>	<b>184.356.466.061,90</b>

Sumber : Laporan Keuangan BUMD Audited

**a. PT BANK RIAU KEPRI**

Saldo penyertaan modal Pemerintah Kota Pekanbaru pada PT Bank Riau Kepri sampai dengan 31 Desember 2023 Rp15.647.400.000,00 atau 156.474 lembar saham atau 1,42% dari total modal PT Bank Riau Kepri. Penilaian saldo penyertaan modal pada PT Bank Riau Kepri tersebut menggunakan metode biaya.

**b. PDAM TIRTA SIAK KOTA PEKANBARU**

Saldo penyertaan modal pada PDAM Kota Pekanbaru per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp22.230.547.765,00 dan Rp30.231.755.797,00 dengan persentase kepemilikan sebesar 100%. Dikarenakan atas kepemilikan 100 % dimiliki oleh Pemerintah daerah kota Pekanbaru, maka PDAM tidak pernah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan hanya menyampaikan Data Pemutakhiran Profil BUMD setiap tahunnya, sesuai dengan nomor surat : 060/Perumd/II/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang ditujukan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya.

Pada tahun 2023, sebagaimana yang tertera pada Pasal 5 yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya yang bersumber dari APBD, yaitu penambahan Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Siak dengan SP2D Nomor: 10862/SP2D/VIII/2023 tanggal 02 Agustus 2023 sebesar Rp10.000.000.000,00. Saldo penyertaan modal pada PDAM Kota Pekanbaru sebesar Rp22.230.547.765,00 tersebut dinilai menggunakan metode ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Tahun 2023 (Unaudited), yang sampai saat sekarang



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pemerintah Pekanbaru belum menerima laporan Keuangan Audited PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.43. Penyertaan Modal pada PDAM Kota Pekanbaru  
per 31 Desember 2023 dan 2022**

*(dalam rupiah)*

Nama	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Penyertaan Modal	168.581.276.100,00	158.581.276.100,00	10.000.000.000,00	6,31
Modal Hibah	316.715.948,00	316.715.948,00	-	-
Laba Ditahan (akumulasi kerugian)	(128.666.236.251,00)	(91.874.392.020,00)	(36.791.844.231,00)	40,05
Laba (rugi) Periode Berjalan	(18.001.208.032,00)	(36.791.844.231,00)	18.790.636.199,00	(51,07)
<b>Jumlah</b>	<b>22.230.547.765,00</b>	<b>30.231.755.797,00</b>	<b>(8.001.208.032,00)</b>	<b>(26,47)</b>

Sumber : Laporan Keuangan BUMD Audited

### c. PT RIAU AIRLINES

Saldo penyertaan modal pada PT Riau Airlines per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp2.700.000.000,00 atau 2.700 lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp1.000.000,00 dan persentase kepemilikan saham sebesar 2,03%. Penilaian saldo penyertaan modal pada PT RAL tersebut menggunakan metode biaya. Tidak terdapat perubahan penyertaan modal Pemerintah Kota Pekanbaru pada PT RAL.

### d. PT SARANA PEMBANGUNAN PEKANBARU

Saldo penyertaan modal pada PT Sarana Pembangunan Pekanbaru per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp131.868.039.785,88 dan Rp133.428.787.902,00.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0027209.AH.01.01.TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Sarana Pembangunan Pekanbaru, pemegang saham PT Sarana Pembangunan Pekanbaru adalah Pemerintah Kota Pekanbaru atas 99,91 % atau sebanyak 21.200 lembar saham dengan nominal Rp21.200.000.000,00 dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Sejahtera (KP-RI Sejahtera) Kota Pekanbaru atas 0,09% atau sebanyak 20 lembar dengan nominal Rp20.000.000,00. (dapat dilihat pada Risalah Rapat Umum Pemegang Saham pada rabu tanggal 30 maret 2022 di hotel Santika Slipi Jakarta Selatan). Berdasarkan Akta Notaris Fatma Yulia, S.H.,M.Kn, Nomor 01 Tanggal 05 Juli 2023 struktur kepengurusan adalah sebagai berikut:

Dari tanggal 04 Juli 2023 s/d 01 Desember 2023

1. Pelaksana Tugas Direksi : Ahmad Ismail, ST., MT
2. Komisaris Utama : Muhammad Jamil, M.Ag, Ivlsi
3. Komisaris Anggola : Ahmad Ismail, ST., MT.

Saldo penyertaan modal pada PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru sebesar Rp131.868.039.785,88 tersebut dinilai menggunakan metode ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan (Audited) PT Sarana Pembangunan Pekanbaru Tahun 2023 yang telah diaudit



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

oleh Kantor Akuntan Publik Boy Febrian dengan Opini Wajar dengan Pengecualian, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.44. Penyertaan Modal pada PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru per 31 Desember 2023 dan 2022**

*(dalam rupiah)*

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Modal Saham	145.586.000.000,00	145.586.000.000,00
Modal Ditempatkan	9.966.977,00	9.966.977,00
Modal Tambahan	2.050.500.000,00	2.050.500.000,00
Saldo Laba (rugi)	(15.658.826.491,00)	(14.124.823.638,00)
Kepentingan Non Pengendali	4.803.111,00	33.020.778,00
<b>Jumlah</b>	<b>131.992.443.597,00</b>	<b>133.554.664.117,00</b>

Sumber : Laporan Keuangan BUMD Audited

Sesuai dengan komposisi kepemilikan saham maka kepemilikan Pemerintah Kota Pekanbaru atas PT Sarana Pembangunan Pekanbaru sebesar:

$$\frac{21.200 \text{ lbr saham Pemko}}{21.220 \text{ lbr total saham}} \times \text{Rp } 131.992.443.597,00 = \text{Rp } 131.868.039.786,00$$

### e. PT BANK PERKREDITAN RAKYAT

Saldo penyertaan modal pada PT Bank Perkreditan Rakyat per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp8.910.478.511,02 dan Rp7.682.816.23,80.

Penyertaan modal Pemerintah Kota Pekanbaru pada PT Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Madani sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 107 tanggal 28 Januari 2021 berupa penyertaan modal saham Pemerintah Kota Pekanbaru sebesar Rp8.000.000.000,00 atau 80.000 lembar saham dan PD. Pembangunan Kota Pekanbaru sebesar Rp100.000,00 atau 1 lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp100.000,00. Kepemilikan Pemerintah Kota Pekanbaru pada PT BPR Pekanbaru sebesar 99,99%.

Berdasarkan surat Pernyataan Direksi tentang Tanggungjawab atas laporan Keuangan PT. BPR Pekanbaru Madani (PERSERODA) nomor : 571/DIR-UM/III/2024 sebagai Direktur Utama Akhmad Fauzi Lindung Lubis dan sebagai Direktur Al Badri.

Berdasarkan Laporan Keuangan (Audited) PT. BPR Pekanbaru Madani (PERSERODA) Tahun 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Sandra Pracipta, CPA dengan Opini Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara wajar.

Pada Tahun 2023 laba ditahan sebesar Rp1.227.677.625,00 sehingga saldo penyertaan modal pada PT. Bank Perkreditan Rakyat sebesar Rp8.910.478.511,02 yang dinilai menggunakan metode ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan (Audited) PT. Bank Perkreditan Rakyat Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut :



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

**Tabel 5.3.45. Nilai Ekuitas pada PT. Bank Perkreditan Rakyat  
per 31 Desember 2023 dan 2022**

*(dalam rupiah)*

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Modal dasar	20.000.100.000,00	20.000.100.000,00
Modal belum disetorkan	(12.000.000.000,00)	(12.000.000.000,00)
Jumlah modal disetor	8.000.100.000,00	8.000.100.000,00
Saldo laba belum ditentukan tujuannya	(317.187.733,00)	(2.495.035.884,00)
Laba tahun berjalan	1.227.677.625,00	2.177.848.150,00
Saldo laba (rugi)	910.489.892,00	(317.187.734,00)
<b>Jumlah</b>	<b>8.910.589.892,00</b>	<b>7.682.912.266,00</b>

Sumber : Laporan Keuangan BUMD Audited

Rp 8.000.000.000	total saham Pemko	x	Rp 8.910.589.892,00	=	Rp 8.910.478.511,00
Rp 8.000.100.000	total saham perseroan				

**f. PT BUMI SIAK PUSAKO**

Saldo penyertaan modal Pemerintah Kota Pekanbaru pada PT Bumi Siak Pusako per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp3.000.000.000,00 dari total modal sebesar Rp300.000.000.000,00 atau 1,00%. Tidak terdapat perubahan penyertaan modal pada PT Bumi Siak Pusako selama tahun 2022. Penilaian saldo penyertaan modal pada PT Bumi Siak Pusako tersebut menggunakan metode biaya.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

**5.3.1. Aset Tetap**

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
7.020.967.926.817,43	7.078.094.631.794,61

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo Aset Tetap menunjukkan jumlah dan nilai perolehan Aset Tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Per 31 Desember 2023 dan 2022. Perolehan Aset Tetap berasal dari Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang diatribusikan dalam nilai Aset Tetap tahun anggaran berkenaan serta perolehan aset dari perolehan lainnya yang sah. Saldo Aset Tetap Pemerintah Kota Pekanbaru per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp7.020.967.926.817,43 mengalami penurunan sebesar Rp57.126.704.977,18 atau 0,81% dari Tahun 2022 sebesar Rp7.078.094.631.794,61 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.46. Aset Tetap Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Rincian Aset	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	Tanah	3.310.154.336.823,00	3.269.570.505.323,00	40.583.831.500,00	1,24
2	Peralatan dan Mesin	1.259.764.846.904,00	1.181.022.827.786,77	78.742.019.117,23	6,67
3	Gedung dan Bangunan	2.312.249.445.482,43	2.287.927.472.461,13	24.321.973.021,30	1,06
4	Jalan, Rigasi dan Jaringan	4.784.731.177.229,00	4.649.133.348.810,19	135.597.828.418,81	2,92
5	Aset Tetap Lainnya	57.110.242.984,00	56.630.835.923,00	479.407.061,00	0,85
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	330.024.874.062,00	328.958.019.153,52	1.066.854.908,48	0,32
7	Akumulasi Penyusutan	(5.033.066.996.667,00)	(4.695.148.377.663,00)	(337.918.619.004,00)	7,20
	<b>Jumlah</b>	<b>7.020.967.926.817,43</b>	<b>7.078.094.631.794,61</b>	<b>(57.126.704.977,18)</b>	<b>(0,81)</b>

Sumber: Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Jumlah Aset Tetap sebesar Rp7.020.967.926.817,43 merupakan nilai Aset Tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sampai dengan 31 Desember 2023, dengan rincian Aset Tetap per SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.47. Aset Tetap per SKPD Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	952.641.869.083,00	880.598.991.015,00	72.042.878.068,00	8,18
2	Dinas Kesehatan	344.743.702.443,00	341.706.371.830,68	3.037.330.612,32	0,89
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.570.247.178.177,43	3.686.502.647.725,80	(116.255.469.548,37)	(3,15)
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	640.154.259.429,00	596.014.597.365,00	44.139.662.064,00	7,41
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1.578.291.199,00	709.759.281,00	868.531.918,00	122,37
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.093.725.863,00	4.302.850.443,00	(209.124.580,00)	(4,86)
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	17.426.788.421,00	15.496.138.369,00	1.930.650.052,00	12,46
8	Dinas Sosial	2.142.216.586,00	2.285.993.227,00	(143.776.641,00)	(6,29)
9	Dinas Tenaga Kerja	1.756.032.750,00	1.861.148.173,00	(105.115.423,00)	(5,65)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	2.559.223.456,00	1.843.244.748,00	715.978.708,00	38,84
11	Dinas Ketahanan Pangan	9.748.861.000,00	9.047.595.825,00	701.265.175,00	7,75
12	Dinas Pertanahan	63.489.760.406,00	62.700.176.980,00	789.583.426,00	1,26
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	149.841.992.196,00	154.900.894.320,00	(5.058.902.124,00)	(3,27)
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.863.210.681,00	1.524.672.962,00	338.537.719,00	22,20
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.816.257.700,00	6.258.690.407,00	557.567.293,00	8,91



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

No	SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
16	Dinas Perhubungan	130.442.548.978,00	122.680.450.010,00	7.762.098.968,00	6,33
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.789.338.735,00	2.279.642.563,00	(490.303.828,00)	(21,51)
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.005.971.117,00	276.044.254,00	729.926.863,00	264,42
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	69.881.395.619,00	105.389.335.859,00	(35.507.940.240,00)	(33,69)
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	41.788.480.942,00	38.646.507.265,00	3.141.973.677,00	8,13
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16.351.097.392,00	16.470.710.793,13	(119.613.401,13)	(0,73)
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	17.024.507.716,00	15.819.144.425,00	1.205.363.291,00	7,62
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	67.234.291.054,00	67.556.579.142,00	(322.288.088,00)	(0,48)
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	154.434.397.204,00	175.760.195.596,00	(21.325.798.392,00)	(12,13)
25	Sekretariat Daerah	286.871.665.578,00	291.323.703.069,00	(4.452.037.491,00)	(1,53)
26	Sekretariat DPRD	67.135.610.330,00	66.452.395.368,00	683.214.962,00	1,03
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	772.168.965,00	983.410.807,00	(211.241.842,00)	(21,48)
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	230.841.364.152,00	252.935.854.729,00	(22.094.490.577,00)	(8,74)
29	Badan Pendapatan Daerah	19.615.212.667,00	14.771.143.935,00	4.844.068.732,00	32,79
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.405.383.086,00	1.642.075.284,00	(236.692.198,00)	(14,41)
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	1.064.108.199,00	447.407.935,00	616.700.264,00	137,84
32	Inspektorat	789.919.087,00	408.007.017,00	381.912.070,00	93,60
33	Kecamatan Bukit Raya	11.252.755.114,00	10.362.871.629,00	889.883.485,00	8,59
34	Kecamatan Tenayan Raya	8.827.891.581,00	9.200.121.847,00	(372.430.266,00)	(4,05)
35	Kecamatan Sail	9.227.319.955,00	9.378.708.140,00	(151.388.185,00)	(1,61)
36	Kecamatan Lima Puluh	20.009.233.478,00	19.945.533.624,00	63.699.854,00	0,32
37	Kecamatan Pekanbaru Kota	10.171.249.411,00	11.451.741.968,00	(1.280.492.557,00)	(11,18)
38	Kecamatan Sukajadi	12.620.961.379,00	12.740.487.319,00	(119.525.940,00)	(0,94)
39	Kecamatan Payung Sekaki	8.491.447.669,00	8.800.736.340,00	(309.288.671,00)	(3,51)
40	Kecamatan Senapelan	10.587.700.556,00	10.721.061.797,00	(133.361.241,00)	(1,24)
41	Kecamatan Marpoyan Damai	13.917.946.183,00	13.967.732.598,00	(49.786.415,00)	(0,36)
42	Kecamatan Binawidya	13.410.625.061,00	7.133.576.344,00	6.277.048.717,00	87,99
43	Kecamatan Tuah Madani	3.205.715.434,00	3.533.830.992,00	(328.115.558,00)	(9,28)
44	Kecamatan Rumbai	8.111.822.092,00	8.053.397.967,00	58.424.125,00	0,73
45	Kecamatan Rumbai Timur	1.743.845.033,00	1.829.718.062,00	(85.873.029,00)	(4,69)
46	Kecamatan Rumbai Barat	8.041.011.124,00	7.992.968.708,00	48.042.416,00	0,60
47	Kecamatan Kulim	2.503.313.317,00	2.903.703.970,00	(400.390.653,00)	(13,79)
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.294.459.219,00	482.059.767,00	812.399.452,00	168,53
Jumlah		7.020.967.926.817,43	7.078.094.631.794,61	(57.126.704.977,18)	(0,81)

Sumber: Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Pada Tahun 2023 terdapat mutasi Aset Tetap baik itu mutasi tambah maupun mutasi kurang yang mempengaruhi saldo akhir Aset Tetap. Mutasi masuk dan mutasi keluar tersebut dipengaruhi oleh:

- Koreksi saldo awal aset tetap;
- Harga perolehan aset tetap, yang terdiri dari kapitalisasi dan atribusi;
- Pencatatan atas beberapa aset yang belum tercatat pada Neraca SKPD;
- Perpindahan aset antar SKPD;
- Penghapusan aset tetap karena adanya penjualan aset, hibah, pemusnahan dan perkembangan kebijakan dan peraturan-perundangan terkait aset tetap di beberapa SKPD; dan
- Pengurangan aset tetap ekstrakomptabel.

Rincian mutasi Aset Tetap Tahun 2023 tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

**Tabel 5.3.48. Rincian Mutasi Aset Tetap**

(dalam rupiah)

Keterangan	Tanah	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Jalan, Irigasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap	3.269.570.505.323,00	1.181.022.827.786,77	2.287.927.472.461,13	4.649.133.348.810,19	56.630.835.923,00	328.958.019.153,52	11.773.243.009.457,60
Penambah dan Pengurang Tahun Berjalan							
<b>A Mutasi Tambah</b>	<b>66.364.070.197,00</b>	<b>153.680.540.341,00</b>	<b>122.715.352.356,43</b>	<b>136.395.403.313,00</b>	<b>14.872.627.319,00</b>	<b>28.774.134.288,48</b>	<b>522.802.127.814,91</b>
1 Harga Perolehan Aset Tetap	-	65.988.667.544,00	88.411.529.889,43	112.791.920.512,00	918.312.100,00	28.774.134.288,00	296.884.564.333,43
2 Inventarisasi	21.640.524.000,00	15.338.387.020,00	9.082.441.108,00	19.233.819.073,00	13.946.689.750,00		79.241.860.951,00
3 Mutasi	1.015.831.197,00	32.925.140.497,00	1.990.853.176,00				35.931.824.870,00
4 Reklas Aset Tetap		39.428.345.280,00	23.230.528.183,00	4.369.663.728,00	7.625.469,00		67.036.162.660,00
5 Koreksi	43.707.715.000,00					0,48	43.707.715.000,48
<b>B Mutasi Kurang</b>	<b>25.780.238.697,00</b>	<b>74.938.521.223,77</b>	<b>98.393.379.335,13</b>	<b>797.574.894,19</b>	<b>14.393.220.258,00</b>	<b>27.707.279.380,00</b>	<b>242.010.213.788,09</b>
1 Penghapusan	21.805.380.000,00	39.581.001.964,00	37.222.620.051,00	797.574.894,00	808.216.608,00	-	100.214.793.517,00
2 Aset Tetap Ekstrakomtabel		768.721.696,00	508.041.679,00		73.221.600,00		1.349.984.975,00
3 Inventarisasi Ekstra		1.663.657.066,00	58.991.950,00		13.511.782.050,00		15.234.431.066,00
4 Mutasi	1.015.831.197,00	32.925.140.497,00	1.990.853.176,00				35.931.824.870,00
5 Reklas Aset Tetap		-	39.328.883.279,00		-	27.707.279.380,00	67.036.162.659,00
6 Koreksi	2.959.027.500,00	0,77	19.283.989.200,13	0,19		-	22.243.016.701,09
<b>JUMLAH</b>	<b>3.310.154.336.823,00</b>	<b>1.259.764.846.904,00</b>	<b>2.312.249.445.482,43</b>	<b>4.784.731.177.229,00</b>	<b>57.110.242.984,00</b>	<b>330.024.874.062,00</b>	<b>12.054.034.923.484,40</b>

Sumber: Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

**5.3.1.3.1. Tanah**

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
<b>3.310.154.336.823,00</b>	<b>3.269.570.505.323,00</b>

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.310.154.336.823,00 mengalami kenaikan sebesar Rp40.583.831.500,00 dari Tahun 2022 sebesar Rp3.269.570.505.323,00 dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.3.49. Rincian Aset Tanah**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	Tanah Perkampungan	-	-	-	0,00
2	Tanah Hutan	5.313.946.030,00	5.313.946.030,00	-	0,00
3	Tanah Danau/Rawa	-	-	-	0,00
4	Tanah Alang-alang dan Padang Rumput	-	-	-	0,00
5	Tanah Pengguna Lain	-	-	-	0,00
6	Tanah Untuk Bangunan Gedung	-	-	-	0,00
7	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	-	-	-	0,00
8	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	30.535.776.769,00	30.535.776.769,00	-	0,00
9	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	286.941.574.367,00	278.602.726.867,00	8.338.847.500,00	2,99
10	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	685.371.548.243,00	652.961.708.243,00	32.409.840.000,00	4,96



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
11	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	3.045.356.744,00	3.045.356.744,00	-	0,00
12	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	1.148.130.000,00	-	1.148.130.000,00	0,00
13	Tanah Persil Lainnya	1.847.808.000,00	1.847.808.000,00	-	0,00
14	Tanah Basah	18.751.364.234,00	18.751.364.234,00	-	0,00
15	Tanah Kering	22.047.896.578,00	20.711.562.578,00	1.336.334.000,00	6,45
16	Tanah Perkebunan	14.084.514.662,00	14.084.514.662,00	-	0,00
17	Tanah Padang Alang-Alang/Rumput	32.520.665.712,00	32.520.665.712,00	-	0,00
18	Tanah Pertanian	3.014.040.400,00	3.014.040.400,00	-	0,00
19	Tanah Non Persil Lainnya	4.687.305.913,00	4.687.305.913,00	-	0,00
20	Tanah Lapangan Olahraga	15.636.095.164,00	15.636.095.164,00	-	0,00
21	Tanah Lapangan Penimbunan	4.717.245.720,00	4.717.245.720,00	-	0,00
22	Tanah untuk Jalan	2.089.221.618.203,00	2.070.065.558.203,00	19.156.060.000,00	0,93
23	Tanah untuk Bangunan Air	15.505.365.781,00	15.505.365.781,00	-	0,00
24	Tanah untuk Bangunan Instalasi	23.092.911.269,00	23.092.911.269,00	-	0,00
25	Tanah untuk Bangunan Jaringan	3.363.320.113,00	3.363.320.113,00	-	0,00
26	Tanah untuk Bangunan Bersejarah	560.460.000,00	560.460.000,00	-	0,00
27	Tanah untuk Makam	23.262.386.761,00	23.262.386.761,00	-	0,00
28	Tanah untuk Taman	21.666.895.160,00	43.472.275.160,00	(21.805.380.000,00)	(50,16)
29	Tanah untuk Latihan	-	-	-	0,00
30	Tanah Kampung	3.282.176.000,00	3.282.176.000,00	-	0,00
31	Lapangan Lainnya	535.935.000,00	535.935.000,00	-	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>3.310.154.336.823,00</b>	<b>3.269.570.505.323,00</b>	<b>40.583.831.500,00</b>	<b>1,24</b>

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Rincian aset tetap tanah per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.3.50. Aset Tetap Tanah per SKPD**

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	362.878.670.708,00	330.215.999.511,00	32.662.671.197,00	9,89
2	Dinas Kesehatan	52.960.741.665,00	52.960.741.665,00	-	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.059.223.237.854,00	2.059.223.237.854,00	-	0,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	39.379.488.233,00	17.738.964.233,00	21.640.524.000,00	121,99
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	696.250.000,00	696.250.000,00	-	0,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.601.045.026,00	1.601.045.026,00	-	0,00
7	Dinas Sosial	770.425.000,00	770.425.000,00	-	0,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	496.000.000,00	496.000.000,00	-	0,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-	0,00
10	Dinas Pertanahan	47.735.056.405,00	47.735.056.405,00	-	0,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	39.653.349.300,00	39.653.349.300,00	-	0,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.074.000.000,00	1.074.000.000,00	-	0,00
13	Dinas Perhubungan	38.264.152.000,00	26.966.277.000,00	11.297.875.000,00	41,90



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

No	Nama SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	35.175.000.000,00	35.175.000.000,00	-	0,00
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4.719.032.064,00	4.719.032.064,00	-	0,00
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.015.736.141,00	6.015.736.141,00	-	0,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	56.479.320.000,00	56.479.320.000,00	-	0,00
18	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	91.410.323.652,00	94.369.351.152,00	(2.959.027.500,00)	(3,14)
19	Sekretariat Daerah	155.054.494.434,00	155.307.325.631,00	(252.831.197,00)	(0,16)
20	Sekretariat DPRD	20.564.039.209,00	20.564.039.209,00	-	0,00
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	222.009.349.069,00	243.814.729.069,00	(21.805.380.000,00)	(8,94)
22	Badan Pendapatan Daerah	2.838.000.000,00	2.075.000.000,00	763.000.000,00	36,77
23	Kecamatan Bukit Raya	4.036.328.554,00	4.036.328.554,00	-	0,00
24	Kecamatan Tenayan Raya	1.880.358.000,00	1.880.358.000,00	-	0,00
25	Kecamatan Sail	5.262.350.000,00	5.262.350.000,00	-	0,00
26	Kecamatan Limapuluh	16.059.239.142,00	16.059.239.142,00	-	0,00
27	Kecamatan Pekanbaru Kota	4.502.864.000,00	5.265.864.000,00	(763.000.000,00)	(14,49)
28	Kecamatan Sukajadi	8.291.102.013,00	8.291.102.013,00	-	0,00
29	Kecamatan Payung Sekaki	5.398.437.354,00	5.398.437.354,00	-	0,00
30	Kecamatan Senapelan	6.596.645.000,00	6.596.645.000,00	-	0,00
31	Kecamatan Marpoyan Damai	7.215.045.000,00	7.215.045.000,00	-	0,00
32	Kecamatan Binaw idya	2.350.000.000,00	2.350.000.000,00	-	0,00
33	Kecamatan Tuah Madani	907.348.000,00	907.348.000,00	-	0,00
34	Kecamatan Rumbai	2.113.185.000,00	2.113.185.000,00	-	0,00
35	Kecamatan Rumbai Timur	78.800.000,00	78.800.000,00	-	0,00
36	Kecamatan Rumbai Barat	1.912.924.000,00	1.912.924.000,00	-	0,00
37	Kecamatan Kulim	552.000.000,00	552.000.000,00	-	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.310.154.336.823,00</b>	<b>3.269.570.505.323,00</b>	<b>40.583.831.500,00</b>	<b>1,24</b>

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

**Tabel 5.3.51. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tanah SKPD Tahun 2023**

(dalam rupiah)

NO	Nama SKPD	Saldo Awal 2023	Mutasi		Saldo Akhir 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dinas Pendidikan	330.215.999.511,00	32.662.671.197,00	-	362.878.670.708,00
2	Dinas Kesehatan	52.960.741.665,00	-	-	52.960.741.665,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.059.223.237.854,00	-	-	2.059.223.237.854,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17.738.964.233,00	21.640.524.000,00	-	39.379.488.233,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	696.250.000,00	-	-	696.250.000,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.601.045.026,00	-	-	1.601.045.026,00
7	Dinas Sosial	770.425.000,00	-	-	770.425.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	496.000.000,00	-	-	496.000.000,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	4.000.000.000,00	-	-	4.000.000.000,00
10	Dinas Pertanahan	47.735.056.405,00	-	-	47.735.056.405,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	39.653.349.300,00	-	-	39.653.349.300,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.074.000.000,00	-	-	1.074.000.000,00
13	Dinas Perhubungan	26.966.277.000,00	11.297.875.000,00	-	38.264.152.000,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	35.175.000.000,00	-	-	35.175.000.000,00



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

NO	Nama SKPD	Saldo Awal 2023	Mutasi		Saldo Akhir 2023
			Penambahan	Pengurangan	
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4.719.032.064,00	-	-	4.719.032.064,00
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.015.736.141,00	-	-	6.015.736.141,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	56.479.320.000,00	-	-	56.479.320.000,00
18	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	94.369.351.152,00	-	2.959.027.500,00	91.410.323.652,00
19	Sekretariat Daerah	155.307.325.631,00	-	252.831.197,00	155.054.494.434,00
20	Sekretariat DPRD	20.564.039.209,00	-	-	20.564.039.209,00
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	243.814.729.069,00	-	21.805.380.000,00	222.009.349.069,00
22	Badan Pendapatan Daerah	2.075.000.000,00	763.000.000,00	-	2.838.000.000,00
23	Kecamatan Bukit Raya	4.036.328.554,00	-	-	4.036.328.554,00
24	Kecamatan Tenayan Raya	1.880.358.000,00	-	-	1.880.358.000,00
25	Kecamatan Sail	5.262.350.000,00	-	-	5.262.350.000,00
26	Kecamatan Limapuluh	16.059.239.142,00	-	-	16.059.239.142,00
27	Kecamatan Pekanbaru Kota	5.265.864.000,00	-	763.000.000,00	4.502.864.000,00
28	Kecamatan Sukajadi	8.291.102.013,00	-	-	8.291.102.013,00
29	Kecamatan Payung Sekaki	5.398.437.354,00	-	-	5.398.437.354,00
30	Kecamatan Senapelan	6.596.645.000,00	-	-	6.596.645.000,00
31	Kecamatan Marpoyan Damai	7.215.045.000,00	-	-	7.215.045.000,00
32	Kecamatan Binawidya	2.350.000.000,00	-	-	2.350.000.000,00
33	Kecamatan Tuah Madani	907.348.000,00	-	-	907.348.000,00
34	Kecamatan Rumbai	2.113.185.000,00	-	-	2.113.185.000,00
35	Kecamatan Rumbai Timur	78.800.000,00	-	-	78.800.000,00
36	Kecamatan Rumbai Barat	1.912.924.000,00	-	-	1.912.924.000,00
37	Kecamatan Kulim	552.000.000,00	-	-	552.000.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.269.570.505.323,00</b>	<b>66.364.070.197,00</b>	<b>25.780.238.697,00</b>	<b>3.310.154.336.823,00</b>

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Tanah Tahun 2023 adalah:

1	Saldo Awal Aset Tetap Tanah Tahun 2023=====>			3.269.570.505.323,00
	Koreksi Saldo Awal			-
2	Penambah dan pengurang tahun berjalan			
A	Mutasi Tambah		66.364.070.197,00	
	- Harga Perolehan Aset Tetap			
	- Inventarisasi	21.640.524.000,00		
	- Pindah SKPD	1.015.831.197,00		
	- Koreksi	43.707.715.000,00		
	- Reklas Aset	-		
B	Mutasi Kurang		25.780.238.697,00	
	- Penghapusan	21.805.380.000,00		
	- Aset ekstra			
	- Pindah SKPD	1.015.831.197,00		
	- Reklas	2.959.027.500,00		
	- Koreksi Saldo Awal			
3	Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 =====>			3.310.154.336.823,00



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa :

1. Penambahan Aset Tanah sebesar Rp21.640.524.000,00 merupakan hibah dari FASUM FASOS PSU Perumahan 2023 Tahap I.
2. Penambahan Aset Tanah sebesar Rp1.015.831.197,00 adalah karena adanya perpindahan aset antar SKPD yaitu di Dinas Pendidikan sebesar Rp252.831.197,00, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp763.000.000,00.
3. Penambahan Aset Tanah sebesar Rp43.707.715.000,00 merupakan koreksi karena adanya Penetapan Nila Objek Tanah (NJOP) yang terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp32.409.840.000,00 dengan Nomor : KD.00.01/Bapenda-PDI/LXXVII/2023 dan Dinas Perhubungan sebesar Rp11.297.875.000,00 dengan Nomor : S.KD.01.00/Bapenda/578/2023.
4. Pengurangan Aset Tanah sebesar Rp21.805.380.000,00 karena adanya penghapusan aset yang di hibahkan ke Provinsi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan SK Nomor 841 tahun 2021.
5. Pengurangan Aset Tanah sebesar Rp2.959.027.500,00 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian karena adanya reklas aset ke Kerja Sama Pemanfaatan.
6. Pengurangan Aset Tanah sebesar Rp1.015.831.197,00 adalah karena perpindahan aset antar SKPD yaitu dari Sekretariat Daerah sebesar Rp252.831.197,00 dan Kecamatan Pekanbaru Kota sebesar Rp763.000.000,00.

**5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin**

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
<b>1.259.764.846.904,00</b>	<b>1.181.022.827.786,77</b>

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.259.764.846.904,00 mengalami kenaikan sebesar Rp78.742.019.117,23 atau 6,67% dari Tahun 2022 sebesar Rp1.181.022.827.786,77 dengan rincian Aset Tetap peralatan dan mesin sebagai berikut:

**Tabel 5.3.52. Peralatan dan Mesin per SKPD**

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	182.253.582.890,00	169.511.521.701,00	12.742.061.189,00	7,52
2	Dinas Kesehatan	217.636.023.304,00	195.426.062.986,77	22.209.960.317,23	11,36
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	103.912.723.489,00	77.545.190.760,00	26.367.532.729,00	34,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.006.861.990,00	7.570.825.239,00	3.436.036.751,00	45,39
5	Satuan Polisi Pamong Praja	8.821.054.761,00	7.435.230.101,00	1.385.824.660,00	18,64
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.028.546.193,00	7.637.664.825,00	390.881.368,00	5,12
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	35.460.126.001,00	31.441.427.410,00	4.018.698.591,00	12,78
8	Dinas Sosial	5.252.367.692,00	5.322.367.692,00	(70.000.000,00)	(1,32)
9	Dinas Tenaga Kerja	4.417.798.245,00	4.423.298.245,00	(5.500.000,00)	(0,12)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.441.370.337,00	3.740.087.889,00	1.701.282.448,00	45,49
11	Dinas Ketahanan Pangan	5.799.471.265,00	5.041.997.141,00	757.474.124,00	15,02
12	Dinas Pertanahan	5.378.737.902,00	4.689.890.077,00	688.847.825,00	14,69
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	76.207.830.872,00	74.770.446.872,00	1.437.384.000,00	1,92
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.468.706.491,00	8.570.720.691,00	897.985.800,00	10,48
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.350.764.792,00	6.014.076.245,00	1.336.688.547,00	22,23



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

No	Nama SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan		%
					Penurunan	
16	Dinas Perhubungan	116.297.776.259,00	118.953.571.039,00	(2.655.794.780,00)		(2,23)
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	18.337.612.010,00	18.313.312.760,00	24.299.250,00		0,13
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.730.588.538,00	3.387.740.230,00	1.342.848.308,00		39,64
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20.238.564.482,00	37.516.997.281,00	(17.278.432.799,00)		(46,05)
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	6.439.323.493,00	4.771.285.899,00	1.668.037.594,00		34,96
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.861.962.634,00	10.133.060.976,00	728.901.658,00		7,19
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.152.158.299,00	3.448.723.110,00	1.703.435.189,00		49,39
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	6.089.008.980,00	6.089.008.980,00	-		0,00
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	11.601.109.887,00	10.146.054.720,00	1.455.055.167,00		14,34
25	Sekretariat Daerah	210.288.212.955,00	206.735.061.961,00	3.553.150.994,00		1,72
26	Sekretariat DPRD	40.698.218.952,00	41.354.646.706,00	(656.427.754,00)		(1,59)
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.599.250.465,00	5.478.034.965,00	121.215.500,00		2,21
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	22.786.034.005,00	19.127.522.038,00	3.658.511.967,00		19,13
29	Badan Pendapatan Daerah	25.602.134.350,00	23.268.420.150,00	2.333.714.200,00		10,03
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.797.438.597,00	6.281.704.703,00	515.733.894,00		8,21
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	4.221.450.259,00	2.523.457.770,00	1.697.992.489,00		67,29
32	Inspektorat	4.495.036.643,00	3.212.598.820,00	1.282.437.823,00		39,92
33	Kecamatan Bukitraya	4.286.055.095,00	4.151.678.213,00	134.376.882,00		3,24
34	Kecamatan Tenayan Raya	4.630.896.034,00	4.906.835.734,00	(275.939.700,00)		(5,62)
35	Kecamatan Sail	2.483.570.968,00	2.415.805.468,00	67.765.500,00		2,81
36	Kecamatan Lima Puluh	2.204.994.517,00	1.978.212.517,00	226.782.000,00		11,46
37	Kecamatan Pekanbaru Kota	2.476.983.243,00	2.461.953.243,00	15.030.000,00		0,61
38	Kecamatan Sukajadi	2.619.149.245,00	2.513.569.245,00	105.580.000,00		4,20
39	Kecamatan Payung Sekaki	4.191.669.232,00	4.148.534.900,00	43.134.332,00		1,04
40	Kecamatan Senapelan	2.193.955.809,00	2.324.101.809,00	(130.146.000,00)		(5,60)
41	Kecamatan Marpoyan Damai	3.070.213.037,00	2.858.182.737,00	212.030.300,00		7,42
42	Kecamatan Binawidya	4.968.076.460,00	4.869.084.927,00	98.991.533,00		2,03
43	Kecamatan Tuah Madani	2.576.888.782,00	2.576.888.782,00	-		0,00
44	Kecamatan Rumbai	3.450.050.805,00	3.073.836.605,00	376.214.200,00		12,24
45	Kecamatan Rumbai Timur	2.261.032.926,00	2.012.380.826,00	248.652.100,00		12,36
46	Kecamatan Rumbai Barat	4.279.544.728,00	4.376.918.196,00	(97.373.468,00)		(2,22)
47	Kecamatan Kulim	2.799.165.600,00	2.799.165.600,00	-		0,00
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.600.753.391,00	3.673.669.002,00	927.084.389,00		25,24
	<b>Jumlah</b>	<b>1.259.764.846.904,00</b>	<b>1.181.022.827.786,77</b>	<b>78.742.019.117,23</b>		<b>6,67</b>

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.3.53. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD Tahun 2023**

(dalam rupiah)

Nama SKPD	Saldo Awal 2023	Mutasi		Saldo Akhir 2023
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Pendidikan	169.511.521.701,00	14.345.669.479,00	1.603.608.290,00	182.253.582.890,00
Dinas Kesehatan	195.426.062.986,77	23.550.908.905,00	1.340.948.587,77	217.636.023.304,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	77.545.190.760,00	53.674.662.114,00	27.307.129.385,00	103.912.723.489,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.570.825.239,00	3.910.913.851,00	474.877.100,00	11.006.861.990,00
Satuan Polisi Pamong Praja	7.435.230.101,00	1.730.124.660,00	344.300.000,00	8.821.054.761,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.637.664.825,00	393.069.178,00	2.187.810,00	8.028.546.193,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	31.441.427.410,00	4.284.079.591,00	265.381.000,00	35.460.126.001,00
Dinas Sosial	5.322.367.692,00	-	70.000.000,00	5.252.367.692,00
Dinas Tenaga Kerja	4.423.298.245,00	-	5.500.000,00	4.417.798.245,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	3.740.087.889,00	1.701.282.448,00	-	5.441.370.337,00
Dinas Ketahanan Pangan	5.041.997.141,00	1.647.633.054,00	890.158.930,00	5.799.471.265,00
Dinas Pertanahan	4.689.890.077,00	931.085.325,00	242.237.500,00	5.378.737.902,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	74.770.446.872,00	1.437.384.000,00	-	76.207.830.872,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.570.720.691,00	897.985.800,00	-	9.468.706.491,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga	6.014.076.245,00	1.381.688.547,00	45.000.000,00	7.350.764.792,00
Dinas Perhubungan	118.953.571.039,00	4.672.918.806,00	7.328.713.586,00	116.297.776.259,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan	18.313.312.760,00	374.257.450,00	349.958.200,00	18.337.612.010,00



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Nama SKPD	Saldo Awal 2023	Mutasi		Saldo Akhir 2023
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.387.740.230,00	1.342.848.308,00	-	4.730.588.538,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	37.516.997.281,00	3.923.431.820,00	21.201.864.619,00	20.238.564.482,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4.771.285.899,00	1.668.037.594,00	-	6.439.323.493,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.133.060.976,00	1.132.860.996,00	403.959.338,00	10.861.962.634,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.448.723.110,00	1.703.435.189,00	-	5.152.158.299,00
Dinas Pertanian dan Perikanan	6.089.008.980,00	-	-	6.089.008.980,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	10.146.054.720,00	1.455.055.167,00	-	11.601.109.887,00
Sekretariat Daerah	206.735.061.961,00	10.265.868.950,00	6.712.717.956,00	210.288.212.955,00
Sekretariat DPRD	41.354.646.706,00	901.538.293,00	1.557.966.047,00	40.698.218.952,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.478.034.965,00	1.053.557.305,00	932.341.805,00	5.599.250.465,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset	19.127.522.038,00	5.307.225.867,00	1.648.713.900,00	22.786.034.005,00
Badan Pendapatan Daerah	23.268.420.150,00	2.334.786.200,00	1.072.000,00	25.602.134.350,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber	6.281.704.703,00	709.562.277,00	193.828.383,00	6.797.438.597,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	2.523.457.770,00	1.987.802.817,00	289.810.328,00	4.221.450.259,00
Inspektorat	3.212.598.820,00	1.282.437.823,00	-	4.495.036.643,00
Kecamatan Bukitraya	4.151.678.213,00	164.522.882,00	30.146.000,00	4.286.055.095,00
Kecamatan Tenayan Raya	4.906.835.734,00	30.509.500,00	306.449.200,00	4.630.896.034,00
Kecamatan Sail	2.415.805.468,00	67.765.500,00	-	2.483.570.968,00
Kecamatan Lima Puluh	1.978.212.517,00	226.782.000,00	-	2.204.994.517,00
Kecamatan Pekanbaru Kota	2.461.953.243,00	15.030.000,00	-	2.476.983.243,00
Kecamatan Sukajadi	2.513.569.245,00	105.580.000,00	-	2.619.149.245,00
Kecamatan Payung Sekaki	4.148.534.900,00	43.134.332,00	-	4.191.669.232,00
Kecamatan Senapelan	2.324.101.809,00	-	130.146.000,00	2.193.955.809,00
Kecamatan Marpojan Damai	2.858.182.737,00	257.348.300,00	45.318.000,00	3.070.213.037,00
Kecamatan Binawidya	4.869.084.927,00	353.430.000,00	254.438.467,00	4.968.076.460,00
Kecamatan Tuah Madani	2.576.888.782,00	-	-	2.576.888.782,00
Kecamatan Rumbai	3.073.836.605,00	401.683.300,00	25.469.100,00	3.450.050.805,00
Kecamatan Rumbai Timur	2.012.380.826,00	248.652.100,00	-	2.261.032.926,00
Kecamatan Rumbai Barat	4.376.918.196,00	78.615.532,00	175.989.000,00	4.279.544.728,00
Kecamatan Kulim	2.799.165.600,00	-	-	2.799.165.600,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.673.669.002,00	1.685.375.081,00	758.290.692,00	4.600.753.391,00
<b>JUMLAH</b>	<b>1.181.022.827.786,77</b>	<b>153.680.540.341,00</b>	<b>74.938.521.223,77</b>	<b>1.259.764.846.904,00</b>

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Penambahan dan pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

1	Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Th 2023 =====>			1.181.022.827.786,77
2	Penambah dan pengurang tahun berjalan			
A	Mutasi Tambah		153.680.540.341,00	111.674.303.811,00
	- Harga Perolehan Aset Tetap	65.988.667.544,00		42.006.236.530,00
	- Reklas	39.428.345.280,00		
	- Inventarisasi	15.338.387.020,00		
	- Mutasi	32.925.140.497,00		
B	Mutasi Kurang		74.938.521.223,77	
	- Penghapusan	39.581.001.964,00		
	- Aset ekstra	768.721.696,00		
	- Inventarisasi Ekstra	1.663.657.066,00		
	- Pindah skpd	32.925.140.497,00		
	- Reklas			
	- Koreksi Saldo Awal		0,77	
3	Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023=====>			1.259.764.846.904,00



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Harga Perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari pembelian pengadaan Tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.3.54. Harga Perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	6.836.658.000,00
2	Dinas Kesehatan	16.174.921.209,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.154.307.994,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.650.953.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	-
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	393.069.178,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.292.640.000,00
8	Dinas Sosial	-
9	Dinas Tenaga Kerja	-
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	113.836.400,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	188.953.000,00
12	Dinas Pertanahan	-
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.261.395.000,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	897.985.800,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
16	Dinas Perhubungan	2.601.949.650,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	188.730.450,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	104.007.000,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.923.431.820,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	178.694.000,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	467.376.000,00
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	87.780.000,00
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	-
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	-
25	Sekretariat Daerah	9.659.045.450,00
26	Sekretariat DPRD	901.538.293,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	1.672.403.000,00
29	Badan Pendapatan Daerah	2.179.886.200,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	102.425.000,00
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	7.500.000,00
32	Inspektorat	-
33	Kecamatan Bukitraya	112.210.000,00
34	Kecamatan Tenayan Raya	-
35	Kecamatan Sail	67.765.500,00
36	Kecamatan Lima Puluh	226.782.000,00
37	Kecamatan Pekanbaru Kota	15.030.000,00
38	Kecamatan Sukajadi	105.580.000,00
39	Kecamatan Payung Sekaki	-
40	Kecamatan Senapelan	-
41	Kecamatan Marpoyan Damai	257.348.300,00
42	Kecamatan Binawidya	353.430.000,00
43	Kecamatan Tuah Madani	-
44	Kecamatan Rumbai	401.683.300,00
45	Kecamatan Rumbai Timur	223.183.000,00
46	Kecamatan Rumbai Barat	9.379.000,00
47	Kecamatan Kulim	-
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	176.790.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>65.988.667.544,00</b>

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari reklas aset lain sebesar Rp39.428.345.280,00 yang terdapat pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp99.462.000,00 dan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp39.328.883.280,00 dari aset tetap Bangunan dan Gedung ke aset tetap Peralatan dan Mesin. Penambahan aset karena inventarisasi sebesar Rp15.338.387,00, dan penambahan yang berasal dari mutasi sebesar Rp32.925.140.497,00.

Terdapat mutasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp32.925.140.497,00 yang berasal dari mutasi di beberapa SKPD. Untuk pengurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dikarenakan penghapusan sebesar Rp39.581.001.964,00, adapun rincian Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.3.55. Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD Tahun 2023**

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	1.253.075.511,00
2	Satuan Polisi Pamong Praja	344.300.000,00
3	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	265.381.000,00
4	Dinas Sosial	70.000.000,00
5	Dinas Tenaga Kerja	5.500.000,00
6	Dinas Ketahanan Pangan	359.877.738,00
7	Dinas Pertanahan	191.070.000,00
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	45.000.000,00
9	Dinas Perhubungan	6.789.100.000,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	349.958.200,00
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21.201.864.619,00
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	403.959.338,00
13	Sekretariat Daerah	4.880.968.842,00
14	Sekretariat DPRD	1.557.966.047,00
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	188.913.341,00
16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	77.000.000,00
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	193.828.383,00
18	Kecamatan Bukit Raya	30.146.000,00
19	Kecamatan Tenayan Raya	306.449.200,00
20	Kecamatan Senapelan	130.146.000,00
21	Kecamatan Marpoyan Damai	45.318.000,00
22	Kecamatan Binawidya	254.438.467,00
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	636.741.278,00
<b>JUMLAH</b>		<b>39.581.001.964,00</b>

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dikarenakan Aset Tetap ekstra komptabel sebesar Rp768.721.696,00 merupakan belanja yang menjadi kapitalisasi ekstra yang berada pada beberapa SKPD.

**Tabel 5.3.56. Aset Tetap Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin per SKPD Tahun 2023**

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Jumlah Aset Ekstrakomptabel
1	Dinas Pendidikan	8.020.000,00
2	Dinas Kesehatan	19.804.300,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.187.810,00
4	Dinas Perhubungan	539.613.586,00
5	Sekretariat Daerah	198.024.000,00
6	Badan Pendapatan Daerah	1.072.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>768.721.696,00</b>

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dikarenakan inventarisasi ekstra sebesar Rp1.663.657.066,00, rincian inventarisasi ekstra Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.57. Inventarisasi Ekstra Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD Tahun 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah Aset Ekstrakomptabel
1	Dinas Pendidikan	1.595.588.290,00
2	Dinas Kesehatan	68.068.776,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.663.657.066,00</b>

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Pengurangan Aset Aset Tetap Peralatan dan Mesin karna mutasi sebesar Rp32.925.140.497,00 dapat dilihat rinciannya per SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.58. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD Tahun 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah Mutasi Aset
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	27.307.129.385,00
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kaw asan Permukiman	474.877.100,00
3	Dinas Ketahanan Pangan	530.281.192,00
4	Dinas Pertanahan	51.167.500,00
5	Sekretariat Daerah	1.633.725.114,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	743.428.464,00
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.571.713.900,00
8	Badan Penelitian dan Pengembangan	289.810.328,00
9	Kecamatan Rumbai	25.469.100,00
10	Kecamatan Rumbai Barat	175.989.000,00
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	121.549.414,00
12	Dinas Pertanahan	
<b>JUMLAH</b>		<b>32.925.140.497,00</b>

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

### 5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
2.312.249.445.482,43	2.287.927.472.461,13

Saldo aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.312.249.445.482,43 mengalami kenaikan sebesar Rp24.321.973.021,30 atau 1,06% dari Tahun 2022 sebesar Rp2.287.927.472.461,13 dapat dirinci sebagai berikut:



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.3.59. Rincian Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Gedung dan Bangunan	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaiakan/Penurunan	%
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	-	-	0,00
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	-	-	-	0,00
3	Bangunan bersejarah	-	-	-	0,00
4	Tugu Peringatan	-	-	-	0,00
5	Monumen Bangunan Bersejarah	-	-	-	0,00
6	Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-	-	0,00
7	Bangunan Menara	-	-	-	0,00
8	Bangunan Gedung Kantor	1.128.720.782.197,43	1.167.896.533.297,00	(39.175.751.099,57)	(3,35)
9	Bangunan Gudang	4.741.310.993,00	4.186.263.451,00	555.047.542,00	13,26
10	Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	2.028.221.307,00	2.028.221.307,00	-	0,00
11	Bangunan Gedung Instalasi	6.708.624.470,00	4.255.425.615,00	2.453.198.855,00	57,65
12	Bangunan Gedung Laboratorium	12.953.338.720,00	12.953.338.720,00	-	0,00
13	Bangunan Kesehatan	170.167.217.213,00	163.756.646.396,00	6.410.570.817,00	3,91
14	Bangunan Oseanarium/Observatorium	50.983.438,00	50.983.438,00	-	0,00
15	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	10.628.013.377,00	8.919.447.258,13	1.708.566.118,87	19,16
16	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	25.609.235.816,00	25.609.235.816,00	-	0,00
17	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	525.082.561.209,00	473.694.197.837,00	51.388.363.372,00	10,85
18	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	22.593.589.190,00	22.593.589.190,00	-	0,00
19	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	44.922.037.732,00	64.054.921.932,00	(19.132.884.200,00)	(29,87)
20	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	8.688.378.629,00	8.541.078.629,00	147.300.000,00	1,72
21	Bangunan Gedung Garasi/Pool	1.700.196.981,00	1.700.196.981,00	-	0,00
22	Bangunan Gedung Pemotong Hew an	1.756.617.725,00	1.756.617.725,00	-	0,00
23	Bangunan Gedung Perpustakaan	7.986.043.232,00	7.810.075.007,00	175.968.225,00	2,25
24	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	11.273.456.200,00	11.273.456.200,00	-	0,00
25	Bangunan Terbuka	1.143.375.079,00	1.143.375.079,00	-	0,00
26	Bangunan Industri	1.255.031.380,00	1.255.031.380,00	-	0,00
27	Bangunan Peternakan/Perikanan	838.989.700,00	838.989.700,00	-	0,00
28	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	86.123.107.077,00	83.285.191.095,00	2.837.915.982,00	3,41
29	Bangunan Fasilitas Umum	46.499.749.472,00	41.279.091.937,00	5.220.657.535,00	12,65
30	Bangunan Parkir	2.805.317.506,00	2.456.519.000,00	348.798.506,00	14,20
31	Bangunan Stasiun Bus	5.367.811.203,00	5.367.811.203,00	-	0,00
32	Taman	8.094.730.949,00	7.725.785.811,00	368.945.138,00	4,78
33	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.211.184.127,00	3.105.798.296,00	105.385.831,00	3,39
34	Rumah Negara Golongan I	42.512.432.578,00	37.210.326.343,00	5.302.106.235,00	14,25
35	Rumah Tidak Bersusun	625.661.000,00	225.610.000,00	400.051.000,00	177,32
36	Rumah Negara Golongan II	16.397.928.091,00	16.273.644.091,00	124.284.000,00	0,76
37	Rumah Negara Golongan III	3.042.278.352,00	2.807.702.352,00	234.576.000,00	8,35
38	Mess/Wisma/Bungalow /Tempat Peristirahatan	1.232.104.009,00	881.212.861,00	350.891.148,00	39,82
39	Asrama	16.865.872.182,00	16.865.872.182,00	-	0,00
40	Flat/Rumah Susun	63.680.678.625,00	63.680.678.625,00	-	0,00
41	Tugu	8.727.910.416,00	8.537.851.826,00	190.058.590,00	2,23
42	Bangunan Peninggalan	4.739.967.171,00	4.739.967.171,00	-	0,00
43	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	1.015.313.162,00	1.205.371.752,00	(190.058.590,00)	(15,77)
44	Bangunan Menara Telekomunikasi	668.664.000,00	668.664.000,00	-	0,00
45	Tugu/Tanda Batas Administrasi	557.032.000,00	-	557.032.000,00	0,00
46	Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	131.241.332,00	131.241.332,00	-	0,00
47	Pagar	11.102.457.642,00	7.161.507.626,00	3.940.950.016,00	55,03
	<b>Jumlah</b>	<b>2.312.249.445.482,43</b>	<b>2.287.927.472.461,13</b>	<b>24.321.973.021,30</b>	<b>1,06</b>

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 pada masing-masing SKPD dapat dilihat sebagai berikut:



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.3.60. Aset Gedung dan Bangunan per SKPD

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	kenaikan/Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	722.861.239.439,00	669.393.152.061,00	53.468.087.378,00	7,99
2	Dinas Kesehatan	247.994.805.910,00	239.268.524.704,00	8.726.281.206,00	3,65
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	729.585.722.586,43	748.999.504.995,00	(19.413.782.408,57)	(2,59)
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	70.980.200.467,00	69.774.317.467,00	1.205.883.000,00	1,73
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.256.050.422,00	1.049.536.400,00	206.514.022,00	100,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	10.086.761.805,00	9.939.461.805,00	147.300.000,00	1,48
7	Dinas Sosial	1.379.706.000,00	1.379.706.000,00	-	0,00
8	Dinas Tenaga Kerja	561.846.600,00	561.846.600,00	-	100,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	656.471.496,00	656.471.496,00	-	0,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	3.690.244.750,00	3.299.234.050,00	391.010.700,00	11,85
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	86.552.911.982,00	85.570.195.982,00	982.716.000,00	1,15
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	402.036.000,00	402.036.000,00	-	0,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.713.663.627,00	4.332.978.572,00	380.685.055,00	8,79
14	Dinas Perhubungan	24.785.540.265,00	24.785.540.265,00	-	0,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	31.051.088.292,00	67.184.965.693,00	(36.133.877.401,00)	(53,78)
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	25.469.015.646,00	22.735.424.470,00	2.733.591.176,00	12,02
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	18.176.698.383,00	18.005.815.158,13	170.883.224,87	0,95
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	12.372.105.126,00	11.815.073.126,00	557.032.000,00	4,71
19	Dinas Pertanian dan Perikanan	11.928.856.945,00	11.781.421.285,00	147.435.660,00	1,25
20	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	75.715.045.430,00	93.194.250.082,00	(17.479.204.652,00)	(18,76)
21	Sekretariat Daerah	77.898.514.969,00	64.540.605.146,00	13.357.909.823,00	20,70
22	Sekretariat DPRD	55.624.483.120,00	53.297.111.313,00	2.327.371.807,00	4,37
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.662.094.477,00	5.193.622.653,00	(1.531.528.176,00)	(29,49)
24	Badan Pendapatan Daerah	14.283.977.609,00	10.560.834.059,00	3.723.143.550,00	35,25
25	Kecamatan Bukit Raya	7.089.950.707,00	5.861.352.327,00	1.228.598.380,00	20,96
26	Kecamatan Tenayan Raya	7.302.899.663,00	7.302.899.663,00	-	0,00
27	Kecamatan Sail	4.789.147.629,00	4.789.147.629,00	-	0,00
28	Kecamatan Limapuluh	3.960.411.340,00	3.960.411.340,00	-	0,00
29	Kecamatan Pekanbaru Kota	6.571.827.342,00	7.031.152.342,00	(459.325.000,00)	(6,53)
30	Kecamatan Sukajadi	5.272.571.491,00	5.272.571.491,00	-	0,00
31	Kecamatan Payung Sekaki	3.512.677.140,00	3.512.677.140,00	-	0,00
32	Kecamatan Senapelan	4.519.746.783,00	4.519.746.783,00	-	0,00
33	Kecamatan Marpoyan Damai	7.608.365.879,00	7.608.365.879,00	-	0,00
34	Kecamatan Binawidya	15.234.094.157,00	5.967.051.480,00	9.267.042.677,00	155,30
35	Kecamatan Tuah Madani	1.117.956.800,00	1.117.956.800,00	-	0,00
36	Kecamatan Rumbai	6.047.471.572,00	6.047.471.572,00	-	0,00
37	Kecamatan Rumbai Timur	879.876.247,00	879.876.247,00	-	0,00
38	Kecamatan Rumbai Barat	5.895.594.386,00	5.577.389.386,00	318.205.000,00	5,71
39	Kecamatan Kulim	757.773.000,00	757.773.000,00	-	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.312.249.445.482,43</b>	<b>2.287.927.472.461,13</b>	<b>24.321.973.021,30</b>	<b>1,06</b>

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.3.61. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD**

(dalam rupiah)

Nama SKPD	Saldo Awal 2023	Mutasi		Saldo Akhir 2023
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Pendidikan	669.393.152.061,00	53.511.397.378,00	43.310.000,00	722.861.239.439,00
Dinas Kesehatan	239.268.524.704,00	9.026.898.433,00	300.617.227,00	247.994.805.910,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	748.999.504.995,00	19.915.100.870,43	39.328.883.280,00	729.585.722.585,43
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	69.774.317.467,00	1.205.883.000,00	-	70.980.200.467,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.049.536.400,00	206.514.022,00	-	1.256.050.422,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9.939.461.805,00	147.300.000,00	-	10.086.761.805,00
Dinas Sosial	1.379.706.000,00	-	-	1.379.706.000,00
Dinas Tenaga Kerja	561.846.600,00	-	-	561.846.600,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	656.471.496,00	-	-	656.471.496,00
Dinas Ketahanan Pangan	3.299.234.050,00	391.010.700,00	-	3.690.244.750,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	85.570.195.982,00	982.716.000,00	-	86.552.911.982,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	402.036.000,00	-	-	402.036.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.332.978.572,00	380.685.055,00	-	4.713.663.627,00
Dinas Perhubungan	24.785.540.265,00	-	-	24.785.540.265,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	67.184.965.693,00	1.088.742.650,00	37.222.620.051,00	31.051.088.292,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	22.735.424.470,00	2.770.205.176,00	36.614.000,00	25.469.015.646,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	18.005.815.158,13	170.883.225,00	0,13	18.176.698.383,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	11.815.073.126,00	557.032.000,00	-	12.372.105.126,00
Dinas Pertanian dan Perikanan	11.781.421.285,00	147.435.660,00	-	11.928.856.945,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	93.194.250.082,00	1.876.195.000,00	19.355.399.651,00	75.715.045.431,00
Sekretariat Daerah	64.540.605.146,00	13.357.909.823,00	-	77.898.514.969,00
Sekretariat DPRD	53.297.111.313,00	2.327.371.807,00	-	55.624.483.120,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.193.622.653,00	-	1.531.528.176,00	3.662.094.477,00
Badan Pendapatan Daerah	10.560.834.059,00	3.723.143.550,00	-	14.283.977.609,00
Kecamatan Bukit Raya	5.861.352.327,00	1.228.598.380,00	-	7.089.950.707,00
Kecamatan Tenayan Raya	7.302.899.663,00	-	-	7.302.899.663,00
Kecamatan Sail	4.789.147.629,00	-	-	4.789.147.629,00
Kecamatan Limapuluh	3.960.411.340,00	-	-	3.960.411.340,00
Kecamatan Pekanbaru Kota	7.031.152.342,00	-	459.325.000,00	6.571.827.342,00
Kecamatan Sukajadi	5.272.571.491,00	-	-	5.272.571.491,00
Kecamatan Payung Sekaki	3.512.677.140,00	99.400.000,00	99.400.000,00	3.512.677.140,00
Kecamatan Senapelan	4.519.746.783,00	-	-	4.519.746.783,00
Kecamatan Marpoyan Damai	7.608.365.879,00	-	-	7.608.365.879,00
Kecamatan Binawidya	5.967.051.480,00	9.282.724.627,00	15.681.950,00	15.234.094.157,00
Kecamatan Tuah Madani	1.117.956.800,00	-	-	1.117.956.800,00
Kecamatan Rumbai	6.047.471.572,00	-	-	6.047.471.572,00
Kecamatan Rumbai Timur	879.876.247,00	-	-	879.876.247,00
Kecamatan Rumbai Barat	5.577.389.386,00	318.205.000,00	-	5.895.594.386,00
Kecamatan Kulim	757.773.000,00	-	-	757.773.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.287.927.472.461,13</b>	<b>122.715.352.356,43</b>	<b>98.393.379.335,13</b>	<b>2.312.249.445.482,43</b>

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023 adalah :

1	Saldo Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023=====>			2.287.927.472.461,13
	Koreksi Saldo Awal			-
2	Penambah dan pengurang tahun berjalan			
A	<b>Mutasi Tambah</b>		122.715.352.356,43	
	- Harga Perolehan Aset Tetap	88.411.529.889,43		
	- Inventarisasi	9.082.441.108,00		
	- Pindah SKPD	1.990.853.176,00		
	- Reklas	23.230.528.183,00		
	Kapitalisasi			
B	<b>Mutasi Kurang</b>		98.393.379.335,13	
	- Penghapusan	37.222.620.051,00		
	- Aset ekstra	508.041.679,00		
	- Inventarisasi ekstra	58.991.950,00		
	- Pindah skpd	1.990.853.176,00		
	- Koreksi Saldo Awal	19.283.989.200,13		
	- Reklas	39.328.883.279,00		
3	Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023=====>			2.312.249.445.482,43

Harga Perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari pembelian pengadaan tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 5.3.62. Harga Perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD Tahun 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	30.947.228.885,00
2	Dinas Kesehatan	8.657.580.152,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.915.100.870,43
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.205.883.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	206.514.022,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	147.300.000,00
7	Dinas Ketahanan Pangan	391.010.700,00
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	982.716.000,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	380.685.055,00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	989.381.000,00
11	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	999.607.000,00
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	170.883.225,00
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	557.032.000,00
14	Dinas Pertanian dan Perikanan	147.435.660,00
15	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.876.195.000,00
16	Sekretariat Daerah	13.218.180.300,00
17	Sekretariat DPRD	2.327.371.807,00
18	Badan Pendapatan Daerah	3.116.195.050,00
19	Kecamatan Bukit Raya	800.805.280,00
20	Kecamatan Payung Sekaki	99.400.000,00
21	Kecamatan Binawidya	956.819.883,00
22	Kecamatan Rumbai Barat	318.205.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>88.411.529.889,43</b>

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Rincian Inventarisasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

**Tabel 5.3.63. Rincian Aset Gedung dan Bangunan Inventarisasi**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	88.955.000,00
2	Dinas Kesehatan	239.788.264,00
3	Kecamatan Bukit Raya	427.793.100,00
4	Kecamatan Binaw idya	8.325.904.744,00
<b>JUMLAH</b>		<b>9.082.441.108,00</b>

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Rincian Pindah SKPD tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD sebesar Rp1.990.853.176,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.3.64. Rincian Aset Gedung dan Bangunan Pindah SKPD Tahun 2023**

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
<b>Bangunan Gedung</b>	<b>1.990.853.176,00</b>
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.531.528.176,00
Badan Pendapatan Daerah	459.325.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>1.990.853.176,00</b>

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Rincian Reklas tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD sebesar Rp23.230.528.183,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.3.65. Rincian Aset Gedung dan Bangunan Reklas Tahun 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	22.475.213.493,00
2	Dinas Kesehatan	129.530.017,00
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	99.361.650,00
4	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	239.070.000,00
5	Sekretariat Daerah	139.729.523,00
6	Badan Pendapatan Daerah	147.623.500,00
<b>JUMLAH</b>		<b>23.230.528.183,00</b>

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Mutasi kurang dikarenakan Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp37.222.620.051,00 berdasarkan SK Walikota Pekanbaru Nomor 651 Tahun 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) Karena Kebakaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, rincian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

**Tabel 5.3.66. Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023**

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Jumlah
1	Bangunan Gedung Kantor	36.397.719.905,00
2	Bangunan Gudang	98.678.513,00
3	Bangunan Kesehatan	197.123.000,00
4	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	350.189.833,00
5	Bangunan Fasilitas Umum	178.908.800,00
<b>JUMLAH</b>		<b>37.222.620.051,00</b>

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Pengurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan Aset Ekstra sebesar Rp508.041.679,00,00 ada pada Dinas Kesehatan sebesar Rp300.617.227,00, Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp36.614.000,00, Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp71.410.452,00, dan Kecamatan Payung Sekaki sebesar Rp99.400.000,00. Pengurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dikarenakan inventarisasi ekstra sebesar Rp58.991.950,00 ada pada Dinas Pendidikan sebesar Rp43.310.000,00 dan Kecamatan Binawidya sebesar Rp15.681.950,00.

Pengurangan karena reklas aset ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp39.328.883.279,57 reklas dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Pengurangan aset karena koreksi ada pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp19.283.989.200,00 berdasarkan No. PKS P.511.2/DPP-4.1/376/2023 yang merupakan Aset Lainnya (Kemitraan dengan Pihak Ketiga).. Pengurang aset karena koreksi saldo awal sebesar Rp0,13 ada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pengurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan pindah SKPD sebesar Rp1.990.853.176,00 dapat dirinci dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 5.3.67. Pengurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan Karena Pindah SKPD Tahun 2023**

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Jumlah
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.531.528.176,00
2	Kecamatan Pekanbaru Kota	459.325.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.990.853.176,00</b>

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

#### 5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
4.784.731.177.229,00	4.649.133.348.810,19

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.784.731.177.229,00 mengalami kenaikan sebesar Rp135.597.828.418,81 atau 2,92 % dari Tahun 2022 sebesar Rp4.649.133.348.810,19 dapat dirinci sebagai berikut:



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

**Tabel 5.3.68. Rincian Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan**

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	Jalan	3.837.751.611.002,00	3.742.231.264.885,65	95.520.346.116,35	2,55
2	Jembatan	204.032.512.291,00	204.032.512.290,88	0,12	0,00
3	Bangunan Air Irigasi	102.086.256.490,00	101.898.905.890,33	187.350.599,67	0,18
4	Bangunan Pengairan Pasang Surut	617.362.602,00	617.362.602,00	-	0,00
5	Bangunan Pengembangan Raw a Dan Polder	78.886.992,00	78.886.992,00	-	0,00
6	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	448.775.013.720,00	444.288.841.820,42	4.486.171.899,58	1,01
7	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	16.975.744.208,00	16.915.346.432,00	60.397.776,00	0,36
8	Bangunan Air Bersih/Air Baku	17.824.208.627,00	17.498.597.627,00	325.611.000,00	1,86
9	Bangunan Air Kotor	50.643.547.950,00	18.172.899.426,00	32.470.648.524,00	178,68
10	Instalasi Air Bersih / Air Baku	17.250.383.905,00	16.491.681.273,00	758.702.632,00	4,60
11	Instalasi Air Kotor	3.298.120.898,00	3.248.739.543,91	49.381.354,09	1,52
12	Instalasi Pengolahan Sampah	662.359.792,00	499.669.146,00	162.690.646,00	32,56
13	Instalasi Pembangkit Listrik	2.092.575.487,00	2.234.298.081,00	(141.722.594,00)	-6,34
14	Instalasi Gardu Listrik	3.365.478.498,00	3.365.478.498,00	-	0,00
15	Instalasi Pengaman	457.330.300,00	800.614.546,00	(343.284.246,00)	-42,88
16	Instalasi Lain	68.608.925,00	68.608.925,00	-	100,00
17	Jaringan Air Minum	665.907.669,00	665.907.669,00	-	0,00
18	Jaringan Listrik	74.127.265.538,00	72.018.376.773,00	2.108.888.765,00	2,93
19	Jaringan Telepon	330.877.600,00	378.231.654,00	(47.354.054,00)	-12,52
20	Jaringan Gas	3.627.124.735,00	3.627.124.735,00	-	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.784.731.177.229,00</b>	<b>4.649.133.348.810,19</b>	<b>135.597.828.418,81</b>	<b>2,92</b>

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 pada masing-masing SKPD dapat dilihat sebagai berikut:



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

**Tabel 5.3.69. Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD**

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	21.390.661.120,00	20.911.952.620,00	478.708.500,00	2,29
2	Dinas Kesehatan	5.711.909.308,00	4.925.248.275,91	786.661.032,09	15,97
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.991.237.530.433,00	2.986.567.007.933,28	4.670.522.499,72	0,16
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.662.375.518.747,00	1.534.853.143.139,00	127.522.375.608,00	8,31
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	113.403.800,00	113.403.800,00	-	0,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.483.832.040,00	1.232.532.040,00	251.300.000,00	20,39
7	Dinas Sosial	24.500.000,00	24.500.000,00	-	0,00
8	Dinas Ketahanan Pangan	609.415.800,00	423.065.800,00	186.350.000,00	44,05
9	Dinas Pertahanan	26.400.000,00	26.400.000,00	-	0,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	7.559.964.888,00	7.559.964.888,00	-	0,00
11	Disdukcapil	193.047.200,00	193.047.200,00	-	0,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	616.785.000,00	616.785.000,00	-	0,00
13	Dinas Perhubungan	86.855.509.676,00	84.481.406.911,00	2.374.102.765,00	2,81
14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	236.103.376,00	236.103.376,00	-	0,00
15	Dinas Pertanian dan Perikanan	2.165.104.704,00	2.165.104.704,00	-	0,00
16	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	482.592.302,00	482.592.302,00	-	0,00
17	Badan Pendapatan Daerah	352.951.800,00	352.951.800,00	-	0,00
18	Sekretariat Daerah	1.996.799.508,00	2.668.991.494,00	(672.191.986,00)	(25,19)
19	Sekretariat DPRD	411.307.649,00	411.307.649,00	-	0,00
20	Kecamatan Payung Sekaki	649.867.620,00	649.867.620,00	-	0,00
21	Kecamatan Binawidya	176.065.930,00	176.065.930,00	-	0,00
22	Kecamatan Tenayan Raya	44.578.328,00	44.578.328,00	-	0,00
23	Kecamatan Pekanbaru Kota	13.035.000,00	13.035.000,00	-	0,00
24	Kecamatan Sail	4.293.000,00	4.293.000,00	-	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.784.731.177.229,00</b>	<b>4.649.133.348.810,19</b>	<b>135.597.828.418,81</b>	<b>2,92</b>

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

**Tabel 5.3.70. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per SKPD**

(dalam rupiah)

Nama SKPD	Saldo Awal 2023	Koreksi Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir 2023
			Penambahan	Pengurangan	
Dinas Pendidikan	20.911.952.620,00	-	478.708.500,00	-	21.390.661.120,00
Dinas Kesehatan	4.925.248.275,91	-	786.661.032,09	-	5.711.909.308,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.986.567.007.933,28	-	4.670.522.500,53	0,81	2.991.237.530.433,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.534.853.143.139,00	-	127.522.375.608,00	-	1.662.375.518.747,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	113.403.800,00	-	-	-	113.403.800,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.232.532.040,00	-	251.300.000,00	-	1.483.832.040,00
Dinas Sosial	24.500.000,00	-	-	-	24.500.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	423.065.800,00	-	186.350.000,00	-	609.415.800,00
Dinas Pertahanan	26.400.000,00	-	-	-	26.400.000,00
Dinas Lingkungan Hidup dan	7.559.964.888,00	-	-	-	7.559.964.888,00
Disdukcapil	193.047.200,00	-	-	-	193.047.200,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	616.785.000,00	-	-	-	616.785.000,00
Dinas Perhubungan	84.481.406.911,00	-	2.374.102.765,00	-	86.855.509.676,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	236.103.376,00	-	-	-	236.103.376,00
Dinas Pertanian dan Perikanan	2.165.104.704,00	-	-	-	2.165.104.704,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	482.592.302,00	-	-	-	482.592.302,00
Sekretariat Daerah	2.668.991.494,00	-	125.382.908,00	797.574.894,00	1.996.799.508,00
Sekretariat DPRD	411.307.649,00	-	-	-	411.307.649,00
Badan Pendapatan Daerah	352.951.800,00	-	-	-	352.951.800,00
Kecamatan Tenayan Raya	44.578.328,00	-	-	-	44.578.328,00
Kecamatan Sail	4.293.000,00	-	-	-	4.293.000,00
Kecamatan Pekanbaru Kota	13.035.000,00	-	-	-	13.035.000,00
Kecamatan Payung Sekaki	649.867.620,00	-	-	-	649.867.620,00
Kecamatan Binawidya	176.065.930,00	-	-	-	176.065.930,00
<b>JUMLAH</b>	<b>4.649.133.348.810,19</b>	<b>-</b>	<b>136.395.403.313,62</b>	<b>797.574.894,81</b>	<b>4.784.731.177.229,00</b>

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Pengurangan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp797.574.894,81 merupakan mutasi kurang karena penghapusan dengan SK Walikota Nomor 651 Tahun 2023 pada Sekretariat Daerah.

Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut:



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

1	Saldo Awal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023=====>			4.649.133.348.810,19
	Koreksi Saldo Awal			-
2	Penambah dan pengurang tahun berjalan			
A	<b>Mutasi Tambah</b>		136.395.403.313,62	
	- Harga Perolehan Aset Tetap	112.791.920.512,00		
	- Inventarisasi	19.233.819.073,00		
	- Pindah SKPD			
	- Reklas	4.369.663.728,00		
	- Koreksi Saldo Awal	0,62		
B	<b>Mutasi Kurang</b>		797.574.894,81	
	- Penghapusan	797.574.894,00		
	- Aset ekstra			
	- Inventarisasi ekstra			
	- Pindah skpd			
	- Koreksi Saldo Awal	0,81		
	- Reklas			
3	Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023=====>			4.784.731.177.229,00

Harga Perolehan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dari pembelian pengadaan tahun 2023 sebesar Rp112.791.920.512,00 dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 5.3.71. Harga Perolehan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	418.195.000,00
2	Dinas Kesehatan	786.661.032,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.670.522.500,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	106.354.820.680,00
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	251.300.000,00
6	Dinas Ketahanan Pangan	186.350.000,00
7	Sekretariat Daerah	124.071.300,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>112.791.920.512,00</b>

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp66.642.887,00 terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp56.690.887,00 dan Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp9.952.000,00.

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dikarenakan Inventarisasi sebesar Rp19.233.819.073,00 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

**Tabel 5.3.72. Aset Tetap Inventarisasi per SKPD**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah Aset Inventarisasi
1	Dinas Pendidikan	24.627.500,00
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kaw asan Permukiman	16.835.088.808,00
3	Dinas Perhubungan	2.374.102.765,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>19.233.819.073,00</b>

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp4.369.663.728,00 karena reklas dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 5.3.73. Aset Tetap Reklas per SKPD**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah Aset Reklas
1	Dinas Pendidikan	35.886.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.332.466.120,00
3	Sekretariat Daerah	1.311.608,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.369.663.728,00</b>

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Pada aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan terdapat penambahan karena koreksi saldo awal sebesar Rp0,62 dengan rincian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp0,53 dan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp0,09.

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp797.574.894,00 karena penghapusan pada Sekretariat Daerah berdasarkan SK Walikota Nomor 651 Tahun 2023. Dan terdapat pengurangan aset karena adanya koreksi saldo awal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp0,81.

**Tabel 5.3.74. Mutasi Kurang Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Per SKPD Tahun 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah	
		Penghapusan	Koreksi Saldo Awal
1	Sekretariat Daerah	797.574.894	-
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	0,81
	<b>JUMLAH</b>	<b>797.574.894</b>	<b>0,81</b>

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

### 5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
57.110.242.984,00	56.630.835.923,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp57.110.242.984,00 mengalami kenaikan sebesar Rp479.407.061,00 atau 0,85% dari Tahun 2022 sebesar Rp56.630.835.923,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.3.75. Rincian Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap Lainnya	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan	%
1	Buku Umum	10.977.184.705,00	10.775.702.779,00	201.481.926,00	1,87
2	Buku Agama	225.804.200,00	225.014.200,00	790.000,00	0,35
3	Buku Ilmu Sosial	237.829.535,00	122.652.435,00	115.177.100,00	93,91
4	Buku Ilmu Bahasa	33.586.000,00	23.380.000,00	10.206.000,00	43,65
5	Alam	37.439.500,00	37.439.500,00	-	0,00
6	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	55.995.993,00	55.995.993,00	-	0,00
7	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	269.658.735,00	417.174.763,00	(147.516.028,00)	(35,36)
8	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	195.082.000,00	195.082.000,00	-	0,00
9	Serial	4.597.500,00	4.500.000,00	97.500,00	2,17
10	Buku Laporan	21.015.000,00	21.015.000,00	-	0,00
11	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	-	-	-	0,00
12	Audio Visual	5.900.000,00	5.900.000,00	-	0,00
13	Bahan Kartografi	20.392.455,00	196.694.427,00	(176.301.972,00)	(89,63)
	Lukisan Dan Ukiran	701.452.032,00	701.452.032,00	-	0,00
14	Karya Musik	319.066.648,00	319.066.648,00	-	0,00
15	Karya Grafika (Graphic Material)	87.754.738,00	87.754.738,00	-	0,00
16	Karya Grafika (Graphic Material) Lainnya	5.180.966,00	5.180.966,00	-	0,00
17	Three Dimensional Artifacts and Realita	-	9.541.000,00	(9.541.000,00)	(100,00)
18	Alat Musik	1.782.462.505,00	1.677.219.005,00	105.243.500,00	6,27
19	Lukisan	442.336.681,00	442.336.681,00	-	0,00
20	Alat Peraga Kesenian	-	-	-	0,00
21	Barang Bercorak Kesenian Lainnya	56.695.100,00	56.695.100,00	-	0,00
22	Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	132.023.000,00	103.496.000,00	28.527.000,00	27,56
23	Barang Kerajinan	42.535.000,00	42.535.000,00	-	0,00
24	Hewan Piaraan Lainnya	30.745.000,00	30.745.000,00	-	0,00
25	Ikan Budidaya	56.173.000,00	56.173.000,00	-	0,00
26	Tanaman	8.930.481.261,00	9.403.427.195,00	(472.945.934,00)	(5,03)
27	Aset Tetap Renovasi	32.438.851.430,00	31.614.662.461,00	824.188.969,00	2,61
	<b>Jumlah</b>	<b>57.110.242.984,00</b>	<b>56.630.835.923,00</b>	<b>479.407.061,00</b>	<b>0,85</b>

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.3.76. Aset Tetap Lainnya per SKPD**

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	17.206.447.561,00	16.771.539.861,00	434.907.700,00	2,59
2	Dinas Kesehatan	484.522.566,00	484.522.566,00	-	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.038.331.847,00	1.038.331.847,00	-	0,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	249.243.000,00	220.716.000,00	28.527.000,00	12,92
5	Satuan Polisi Pamong Praja	160.725.727,00	160.725.727,00	-	0,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	657.083.211,00	657.083.211,00	-	0,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	102.600.000,00	102.600.000,00	-	0,00
8	Dinas Tenaga Kerja	1.560.880.996,00	1.560.880.996,00	-	0,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	207.600.800,00	207.600.800,00	-	0,00
10	Dinas Pertanian	405.825.048,00	405.825.048,00	-	0,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	9.010.785.463,00	9.010.785.463,00	-	0,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	409.950,00	409.950,00	-	0,00
13	Dinas Perhubungan	768.011.816,00	768.011.816,00	-	0,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	793.670.000,00	793.670.000,00	-	0,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	2.726.028,00	2.726.028,00	-	0,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	467.630.608,00	(467.630.608,00)	(100,00)
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.062.279.211,00	1.967.097.211,00	95.182.000,00	4,84
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	304.066.658,00	304.066.658,00	-	0,00
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	37.000.000,00	37.000.000,00	-	0,00
20	Dinas Pertanian dan Perikanan	375.000,00	375.000,00	-	0,00
21	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	441.862.584,00	441.862.584,00	-	0,00
22	Sekretariat Daerah	8.114.300.791,00	7.716.338.822,00	397.961.969,00	5,16
23	Sekretariat DPRD	451.592.384,00	451.592.384,00	-	0,00
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	383.116.000,00	383.116.000,00	-	0,00
25	Badan Pendapatan Daerah	194.460.000	194.460.000	-	0,00
26	Badan Penelitian dan Pengembangan	164.856.300,00	164.856.300,00	-	0,00
27	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	18.913.641,00	18.913.641,00	-	0,00
28	Kecamatan Bukit Raya	1.135.894.660,00	1.135.894.660,00	-	0,00
29	Kecamatan Tenayan Raya	1.146.783.944,00	1.146.783.944,00	-	0,00
30	Kecamatan Sail	455.756.838,00	455.756.838,00	-	0,00
31	Kecamatan Lima Puluh	803.479.000,00	803.479.000,00	-	0,00
32	Kecamatan Pekanbaru Kota	538.177.343,00	538.177.343,00	-	0,00
33	Kecamatan Sukajadi	833.285.936,00	833.285.936,00	-	0,00
34	Kecamatan Payung Sekaki	3.889.000,00	3.889.000,00	-	0,00
35	Kecamatan Senapelan	601.946.578,00	601.946.578,00	-	0,00
36	Kecamatan Marpoyan Damai	1.394.794.499,00	1.394.794.499,00	-	0,00
37	Kecamatan Binawidya	513.676.000,00	513.676.000,00	-	0,00
38	Kecamatan Tuah Madani	1.029.258.600,00	1.029.258.600,00	-	0,00
39	Kecamatan Rumbai	1.074.597.279,00	1.074.597.279,00	-	0,00
40	Kecamatan Rumbai Timur	599.273.557,00	599.273.557,00	-	0,00
41	Kecamatan Rumbai Barat	1.531.876.643,00	1.531.876.643,00	-	0,00
42	Kecamatan Kulim	625.866.525,00	625.866.525,00	-	0,00
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	9.541.000,00	(9.541.000,00)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>57.110.242.984,00</b>	<b>56.630.835.923,00</b>	<b>479.407.061,00</b>	<b>0,85</b>

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya per SKPD dapat dirinci pada tabel berikut :



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.3.77. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya per SKPD

(dalam rupiah)

Nama SKPD	Saldo Awal 2023	Mutasi		Saldo Akhir 2023
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Pendidikan	16.771.539.861,00	13.946.689.750,00	13.511.782.050,00	17.206.447.561,00
Dinas Kesehatan	484.522.566,00	-	-	484.522.566,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.038.331.847,00	-	-	1.038.331.847,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	220.716.000,00	28.527.000,00	-	249.243.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	160.725.727,00	-	-	160.725.727,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	657.083.211,00	-	-	657.083.211,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	102.600.000,00	-	-	102.600.000,00
Dinas Tenaga Kerja	1.560.880.996,00	-	-	1.560.880.996,00
Dinas Ketahanan Pangan	207.600.800,00	-	-	207.600.800,00
Dinas Pertanahan	405.825.048,00	-	-	405.825.048,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	9.010.785.463,00	-	-	9.010.785.463,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	409.950,00	-	-	409.950,00
Dinas Perhubungan	768.011.816,00	-	-	768.011.816,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	793.670.000,00	-	-	793.670.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.726.028,00	-	-	2.726.028,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	467.630.608,00	-	467.630.608,00	-
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.967.097.211,00	124.596.000,00	29.414.000,00	2.062.279.211,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	304.066.658,00	43.807.600,00	43.807.600,00	304.066.658,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	37.000.000,00	-	-	37.000.000,00
Dinas Pertanian dan Perikanan	375.000,00	-	-	375.000,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	441.862.584,00	-	-	441.862.584,00
Sekretariat Daerah	7.716.338.822,00	729.006.969,00	331.045.000,00	8.114.300.791,00
Sekretariat DPRD	451.592.384,00	-	-	451.592.384,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	383.116.000,00	-	-	383.116.000,00
Badan Pendapatan Daerah	194.460.000,00	-	-	194.460.000,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	164.856.300,00	-	-	164.856.300,00
Inspektorat Daerah	18.913.641,00	-	-	18.913.641,00
Kecamatan Bukit Raya	1.135.894.660,00	-	-	1.135.894.660,00
Kecamatan Tenayan Raya	1.146.783.944,00	-	-	1.146.783.944,00
Kecamatan Sail	455.756.838,00	-	-	455.756.838,00
Kecamatan Limapuluh	803.479.000,00	-	-	803.479.000,00
Kecamatan Pekanbaru Kota	538.177.343,00	-	-	538.177.343,00
Kecamatan Sukajadi	833.285.936,00	-	-	833.285.936,00
Kecamatan Payung Sekaki	3.889.000,00	-	-	3.889.000,00
Kecamatan Senapelan	601.946.578,00	-	-	601.946.578,00
Kecamatan Marpoyan Damai	1.394.794.499,00	-	-	1.394.794.499,00
Kecamatan Binawidya	513.676.000,00	-	-	513.676.000,00
Kecamatan Tuah Madani	1.029.258.600,00	-	-	1.029.258.600,00
Kecamatan Rumbai	1.074.597.279,00	-	-	1.074.597.279,00
Kecamatan Rumbai Timur	599.273.557,00	-	-	599.273.557,00
Kecamatan Rumbai Barat	1.531.876.643,00	-	-	1.531.876.643,00
Kecamatan Kulim	625.866.525,00	-	-	625.866.525,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.541.000,00	-	9.541.000,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>56.630.835.923,00</b>	<b>14.872.627.319,00</b>	<b>14.393.220.258,00</b>	<b>57.110.242.984,00</b>

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

1	Saldo Awal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 =====>		<b>56.630.835.923,00</b>
	Koreksi Saslido Awal		
2	Penambah dan pengurang tahun berjalan		
A	<b>Mutasi Tambah :</b>		<b>14.872.627.319,00</b>
-	Harga Perolehan Aset Tetap	918.312.100,00	
-	Inventarisasi	13.946.689.750,00	
-	Pindah SKPD		
-	Reklas	7.625.469,00	
B	<b>Mutasi Kurang</b>		<b>14.393.220.258,00</b>
-	Penghapusan	808.216.608,00	
-	Aset ekstra	73.221.600,00	
-	Pindah skpd		
-	Inventarisasi Ekstra	13.511.782.050,00	
-	Reklas	-	
3	Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 =====>		<b>57.110.242.984,00</b>

Harga Perolehan Aset Tetap Lainnya dari pembelian pengadaan Tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 5.3.78. Harga Perolehan Aset Tetap Lainnya per SKPD**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	28.527.000,00
2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	124.596.000,00
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	43.807.600,00
4	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	721.381.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>918.312.100,00</b>

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Penambahan Aset Tetap Lainnya dikarenakan Inventarisasi sebesar Rp13.946.689.750,00 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.3.79. Aset Tetap Inventarisasi per SKPD Tahun 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah Aset Tetap Lainnya
1	Dinas Pendidikan	13.946.689.750,00
	<b>Jumlah</b>	<b>13.946.689.750,00</b>

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp7.625.469,00 karena reklas berada pada Sekretariat Daerah.

Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena penghapusan berdasarkan SK Walikota Nomor 651 Tahun 2023 tentang Penghapusan BMD Karena Kebakaran (DPMPSTP, Sekretariat Daerah, dan Diskominfo) Pada Sekretariat Daerah sebesar Rp331.045.000,00 dan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp467.630.608,00.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pengurangan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp13.511.782.050,00 merupakan inventarisasi ekstra pada Dinas Pendidikan. Pengurangan Aset Tetap Lainnya dikarenakan Aset Tetap ekstra komptabel sebesar Rp73.221.600,00 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.3.80. Aset Tetap Ekstrakomtable Aset Tetap Lainnya per SKPD Tahun 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah Aset Ekstrakomtable
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	43.807.600,00
2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	29.414.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>73.221.600,00</b>

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

### 5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
<b>330.024.874.062,00</b>	<b>328.958.019.153,52</b>

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp330.024.874.062,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.066.854.908,48 atau 0,32% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp328.958.019.153,52 dapat dirinci per SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.81. Aset Kontruksi Dalam Pengerjaan Per SKPD**

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	Dinas Kesehatan	510.562.972,00	640.092.989,00	(129.530.017,00)	(20,24)
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	293.125.476.253,00	293.125.476.252,52	0,48	0,00
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.928.225.000,00	3.666.412.000,00	261.813.000,00	7,14
4	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	11.949.300,00	11.949.300,00	-	0,00
5	Dinas Ketahanan Pangan	244.804.000,00	244.804.000,00	-	0,00
6	Dinas Pertanahan	14.554.433.664,00	13.784.622.139,00	769.811.525,00	5,58
7	Dinas Perhubungan	1.173.690.500,00	1.173.690.500,00	-	0,00
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.926.795.658,00	1.926.795.658,00	-	0,00
9	Dinas Perpustakaan dan Arsip	-	-	-	0,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian	84.216.000,00	84.216.000,00	-	0,00
11	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	12.053.920.453,00	11.781.374.453,00	272.546.000,00	2,31
12	Dinas Pertanian dan Perikanan	94.216.820,00	94.216.820,00	-	0,00
13	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.954.111.621,00	1.954.111.621,00	-	0,00
14	Badan Pendapatan Daerah	138.956.900,00	246.742.500,00	(107.785.600,00)	(43,68)
15	Sekretariat DPRD	124.679.921,00	124.679.921,00	-	0,00
16	Kecamatan Rumbai Barat	98.835.000,00	98.835.000,00	-	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>330.024.874.062,00</b>	<b>328.958.019.153,52</b>	<b>1.066.854.908,48</b>	<b>0,32</b>

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.3.82. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pekerjaan per SKPD**

(dalam rupiah)

Nama SKPD	Saldo Awal 2023	Mutasi		Saldo Akhir 2023
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Pendidikan	-	22.511.099.493,00	22.511.099.493,00	-
Dinas Kesehatan	640.092.989,00	-	129.530.017,00	510.562.972,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	293.125.476.252,52	0,48	-	293.125.476.253,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.666.412.000,00	4.594.279.120,00	4.332.466.120,00	3.928.225.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	11.949.300,00			11.949.300,00
Dinas Ketahanan Pangan	244.804.000,00			244.804.000,00
Dinas Pertanahan	13.784.622.139,00	769.811.525,00		14.554.433.664,00
Dinas Perhubungan	1.173.690.500,00			1.173.690.500,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.926.795.658,00			1.926.795.658,00
Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian	84.216.000,00			84.216.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	99.361.650,00	99.361.650,00	-
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	11.781.374.453,00	611.078.000,00	338.532.000,00	12.053.920.453,00
Dinas Pertanian dan Perikanan	94.216.820,00			94.216.820,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.954.111.621,00			1.954.111.621,00
Badan Pendapatan Daerah	246.742.500,00	39.837.900,00	147.623.500,00	138.956.900,00
Sekretariat DPRD	124.679.921,00	148.666.600,00	148.666.600,00	124.679.921,00
Kecamatan Rumbai	98.835.000,00			98.835.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>328.958.019.153,52</b>	<b>28.774.134.288,48</b>	<b>27.707.279.380,00</b>	<b>330.024.874.062,00</b>

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Terhadap Rincian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Tahun 2023 sebesar Rp330.024.874.062,00 yang menyajikan informasi secara lengkap per jenis KDP per SKPD disertai dengan dokumen pendukung dapat dilihat pada Lampiran 16.

Penambahan dan pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut :



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

1	Saldo Awal Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023 =====>		328.958.019.153,52
	Koreksi Saldo Awal		
2	Penambah dan pengurang tahun berjalan		
A	<b>Mutasi Tambah</b>		<b>28.774.134.288,48</b>
	- Harga Perolehan Aset Tetap	28.774.134.288,00	
	- Aset yg belum tercatat		
	- Pindah SKPD		
	- Koreksi Saldo Awal	0,48	
B	<b>Mutasi Kurang</b>		<b>27.707.279.380,00</b>
	- Penghapusan		
	- Aset ekstra	-	
	- Pindah skpd		
	- Hibah	-	
	- Reklas	27.707.279.380,00	
3	Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 =====>		330.024.874.062,00

Harga Perolehan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari pembelian pengadaan tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 5.3.83. Harga Perolehan Aset Kontruksi Dalam Pengerjaan**

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	22.511.099.493,00
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.594.279.120,00
3	Dinas Pertanahan	769.811.525,00
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	99.361.650,00
5	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	611.078.000,00
6	Sekretariat Daerah	148.666.600,00
7	Badan Pendapatan Daerah	39.837.900,00
	<b>Jumlah</b>	<b>28.774.134.288,00</b>

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Mutasi kurang dikarenakan reklas Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp27.707.279.380,00 rincian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.3.84. Reklas Kurang Aset Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023**

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	22.511.099.493,00
2	Dinas Kesehatan	129.530.017,00
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	4.332.466.120,00
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	99.361.650,00
5	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	338.532.000,00
6	Sekretariat Daerah	148.666.600,00
7	Badan Pendapatan Daerah	147.623.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>27.707.279.380,00</b>

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

**5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan**

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
(5.033.066.996.667,00)	(4.695.148.377.663,00)

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.033.066.996.667,00 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp337.918.619.004,00 atau 7,20% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp4.695.148.377.663,00.

Nilai Akumulasi Penyusutan merupakan akumulasi penyusutan untuk Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan. Berikut rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023:

**Tabel 5.3.85. Rincian Akumulasi Penyusutan Tahun 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(964.355.603.833,00)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(399.167.835.792,00)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(3.669.543.557.042,00)
<b>Jumlah</b>		<b>(5.033.066.996.667,00)</b>

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Nilai Buku Aset Tetap merupakan selisih antara Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.86. Nilai Buku Aset Tetap**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Aset Tetap per 31 Des 2023	Akumulasi Penyusutan per 31 Des 2023	Nilai Buku Aset Tetap per 31 Des 2023
1	Tanah	3.298.856.461.823,00	-	3.298.856.461.823,00
2	Peralatan dan Mesin	1.257.087.493.653,43	(964.355.603.833,00)	292.731.889.820,43
3	Gedung dan Bangunan	2.312.249.445.483,00	(399.167.835.792,00)	1.913.081.609.691,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.784.731.177.229,00	(3.669.543.557.042,00)	1.115.187.620.187,00
5	Aset Tetap Lainnya	57.110.242.984,00	-	57.110.242.984,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	330.024.874.062,00	-	330.024.874.062,00
<b>Jumlah</b>		<b>12.040.059.695.234,40</b>	<b>(5.033.066.996.667,00)</b>	<b>7.006.992.698.567,43</b>

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.030.389.643.417,00 dapat dirinci per SKPD sebagai berikut:



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

**Tabel 5.3.87. Akumulasi Penyusutan Per SKPD**

*(dalam rupiah)*

No	Nama SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	(353.948.732.635,00)	(326.205.174.739,00)	(27.743.557.896,00)	8,50
2	Dinas Kesehatan	(180.554.863.282,00)	(151.998.821.356,00)	(28.556.041.926,00)	18,79
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(2.607.875.844.285,00)	(2.479.996.101.916,00)	(127.879.742.369,00)	5,16
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(1.147.765.278.008,00)	(1.037.809.780.713,00)	(109.955.497.295,00)	10,59
5	Satuan Polisi Pamong Praja	(7.403.489.289,00)	(6.886.196.547,00)	(517.292.742,00)	7,51
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(6.657.607.763,00)	(5.851.087.793,00)	(806.519.970,00)	13,78
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	(31.319.525.751,00)	(28.832.877.212,00)	(2.486.648.539,00)	8,62
8	Dinas Sosial	(5.284.782.106,00)	(5.211.005.465,00)	(73.776.641,00)	1,42
9	Dinas Tenaga Kerja	(4.784.493.091,00)	(4.684.877.668,00)	(99.615.423,00)	2,13
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(4.034.618.377,00)	(3.049.314.637,00)	(985.303.740,00)	32,31
11	Dinas Ketahanan Pangan	(4.802.675.615,00)	(4.169.105.966,00)	(633.569.649,00)	15,20
12	Dinas Pertanahan	(4.610.692.613,00)	(3.941.616.689,00)	(669.075.924,00)	16,97
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	(71.069.645.967,00)	(63.590.643.843,00)	(7.479.002.124,00)	11,76
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(8.200.579.010,00)	(7.641.130.929,00)	(559.448.081,00)	7,32
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(6.939.365.669,00)	(5.779.559.360,00)	(1.159.806.309,00)	20,07
16	Dinas Perhubungan	(137.702.131.538,00)	(134.448.047.521,00)	(3.254.084.017,00)	2,42
17	Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian	(17.426.159.275,00)	(16.911.556.197,00)	(514.603.078,00)	3,04
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(3.727.343.449,00)	(3.114.422.004,00)	(612.921.445,00)	19,68
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(16.583.257.155,00)	(34.955.257.723,00)	18.372.000.568,00	(52,56)
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	(8.955.089.925,00)	(7.327.706.832,00)	(1.627.383.093,00)	22,21
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(12.991.630.283,00)	(11.972.231.999,00)	(1.019.398.284,00)	8,51
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	(6.788.595.226,00)	(5.733.491.328,00)	(1.055.103.898,00)	18,40
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	(9.522.591.395,00)	(9.052.867.647,00)	(469.723.748,00)	5,19
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	(27.170.648.272,00)	(24.828.026.865,00)	(2.342.621.407,00)	9,44
25	Sekretariat Daerah	(166.480.657.079,00)	(145.644.619.985,00)	(20.836.037.094,00)	14,31
26	Sekretariat DPRD	(50.738.710.905,00)	(49.750.981.814,00)	(987.729.091,00)	1,99
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(4.827.081.500,00)	(4.494.624.158,00)	(332.457.342,00)	7,40
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(17.999.229.399,00)	(15.583.135.031,00)	(2.416.094.368,00)	15,50
29	Badan Pendapatan Daerah	(23.795.267.992,00)	(21.927.264.574,00)	(1.868.003.418,00)	8,52
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	(5.392.055.511,00)	(4.639.629.419,00)	(752.426.092,00)	16,22
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	(3.322.198.360,00)	(2.240.906.135,00)	(1.081.292.225,00)	48,25
32	Inspektorat	(3.724.031.197,00)	(2.823.505.444,00)	(900.525.753,00)	31,89
33	Kecamatan Bukitraya	(5.295.473.902,00)	(4.822.382.125,00)	(473.091.777,00)	9,81
34	Kecamatan Tenayan Raya	(6.177.824.388,00)	(6.081.333.822,00)	(96.490.566,00)	1,59
35	Kecamatan Sail	(3.767.798.480,00)	(3.548.644.795,00)	(219.153.685,00)	6,18
36	Kecamatan Lima Puluh	(3.018.890.521,00)	(2.855.808.375,00)	(163.082.146,00)	5,71
37	Kecamatan Pekanbaru Kota	(3.931.637.517,00)	(3.858.439.960,00)	(73.197.557,00)	1,90
38	Kecamatan Sukajadi	(4.395.147.306,00)	(4.170.041.366,00)	(225.105.940,00)	5,40



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

No	Nama SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
39	Kecamatan Payung Sekaki	(5.265.092.677,00)	(4.912.669.674,00)	(352.423.003,00)	7,17
40	Kecamatan Senapelan	(3.324.593.614,00)	(3.321.378.373,00)	(3.215.241,00)	0,10
41	Kecamatan Marpoyan Damai	(5.370.472.232,00)	(5.108.655.517,00)	(261.816.715,00)	5,12
42	Kecamatan Binawidya	(9.831.287.486,00)	(6.742.301.993,00)	(3.088.985.493,00)	45,81
43	Kecamatan Tuah Madani	(2.425.736.748,00)	(2.097.621.190,00)	(328.115.558,00)	15,64
44	Kecamatan Rumbai	(4.573.482.564,00)	(4.255.692.489,00)	(317.790.075,00)	7,47
45	Kecamatan Rumbai Timur	(2.075.137.697,00)	(1.740.612.568,00)	(334.525.129,00)	19,22
46	Kecamatan Rumbai Barat	(5.677.763.633,00)	(5.504.974.517,00)	(172.789.116,00)	3,14
47	Kecamatan Kulim	(2.231.491.808,00)	(1.831.101.155,00)	(400.390.653,00)	21,87
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(3.306.294.172,00)	(3.201.150.235,00)	(105.143.937,00)	3,28
	Jumlah	(5.033.066.996.667,00)	(4.695.148.377.663,00)	(337.918.619.004,00)	7,20

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

### PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH MILIK PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

Guna memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Sehubungan hal dimaksud, Pemerintah Kota Pekanbaru melaksanakan inventarisasi aset barang milik daerah milik Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2023.

Pada tahap awal Pemerintah Kota Pekanbaru membentuk Tim Pelaksana Inventarisasi/Sensus BMD tahun 2023 dengan ditetapkannya SK Walikota Nomor 434 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Inventarisasi/Sensus BMD Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2023. Selanjutnya Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan Objek Inventarisasi/Sensus BMD yang terdiri dari aset tanah, peralatan dan mesin, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, persediaan.

Walikota Pekanbaru memberi instruksi tentang pelaksanaan Inventarisasi/sensus BMD kepada Perangkat Daerah selaku pengguna barang, isi instruksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Inventarisasi/Sensus BMD berdasarkan ketentuan PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/BMD
2. Berkoordinasi dengan BPKAD dan Inspektorat dalam pelaksanaan
3. Membentuk tim Inventarisasi tingkat SKPD
4. Mengkoordinir dan memimpin pelaksanaan Inventarisasi hingga unit terkecil seperti Bagian, Kelurahan, Sekolah, UPT, BLUD dan Puskesmas



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

Untuk memperkuat pemahaman bagi para Pengelola BMD, Pemerintah Kota Pekanbaru melaksanakan Launching dan sosialisasi terkait Inventarisasi / Sensus BMD. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam upaya peningkatan sinergitas dengan aparat penegak hukum terkait pengamanan Barang Milik Daerah, Pemerintah Kota Pekanbaru melibatkan Kepala Kejaksaan Negeri bersama Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru sebagai narasumber dengan agenda Sosialisasi dan Pemahaman terkait hak dan kewajiban atas Pemanfaatan BMD sebagai fasilitas kantor serta Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan permasalahan hukum perdata terkait pengelolaan BMD.

Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan surat tentang Tindak Lanjut Hasil Launching dan Sosialisasi Pelaksanaan Inventarisasi BMD bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dan pengelola BMD, agar Kepala Perangkat Daerah menginventarisir dan melaporkan permasalahan aset yang ada serta melaporkan kepada Walikota melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.

Pemerintah Kota Pekanbaru melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) terkait pelaksanaan Inventarisasi/Sensus BMD dengan mengundang seluruh Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru pada tanggal 20-21 September 2023.

Untuk memudahkan koordinasi dengan Perangkat Daerah maka pelaksanaan inventarisasi/sensus BMD dibagi menjadi tiga pokja (Kelompok Kerja) terdiri dari Pokja A, Pokja B dan Pokja C. Menindaklanjuti Hasil Inventarisasi/Sensus BMD per tanggal 31 Desember 2023 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan surat tentang Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2023 kepada seluruh Perangkat Daerah dengan kondisi sebagai berikut:

1. Sebanyak 24 Perangkat Daerah yang telah selesai melaksanakan inventarisasi/sensus dapat mencetak LKI sebagai bagian dari proses pelaporan.

**a. Pokja A: 8 Perangkat Daerah**

Kecamatan Pekanbaru Kota; Kecamatan Senapelan; Kecamatan Rumbai Barat; Kecamatan Tuah Madani; Kecamatan Tenayan Raya; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Koperasi & UMKM; Dinas Pertanian dan Perikanan

**b. Pokja B: 10 Perangkat Daerah**

Kecamatan Sail; Kecamatan Limapuluh; Kecamatan Marpoyan Damai; Inspektorat; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Dinas Tenaga



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

Kerja; Dinas Kepemudaan dan Olahraga; Dinas Pertanahan; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

**c. Pokja C: 6 Perangkat Daerah**

Kecamatan Bukit Raya; Kecamatan Binawidya; Kecamatan Payung Sekaki; Kecamatan Kulim; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2. Sebanyak 24 Perangkat Daerah yang belum selesai, agar menggesa penyelesaian inventarisasi/sensus sesuai dengan komitmen dan jadwal yang telah ditetapkan.

**a. Pokja A: 8 Perangkat Daerah**

Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pendapatan Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pendidikan

**b. Pokja B: 6 Perangkat Daerah**

Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Rumbai, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

**c. Pokja C: 10 Perangkat Daerah**

Kecamatan Rumbai Timur, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dalam pelaksanaan Inventarisasi/sensus BMD tahun 2023, Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Surat pengecualian Inventarisasi/Sensus BMD bagi Perangkat Daerah tertentu untuk dilanjutkan pada tahun 2024 dikarenakan banyaknya jumlah BMD dan keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia pada Perangkat Daerah tersebut.

Hingga tanggal 15 Mei 2024 progres inventarisasi/sensus BMD terus meningkat, Hasil tindak lanjut Inventarisasi/Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran 18.



## **PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

---

Dari total 16 Perangkat Daerah pada Pokja A terdapat 13 Perangkat Daerah yang memiliki progres inventarisasi/sensus BMD diatas 50% dan 3 Perangkat Daerah dibawah 50% dengan total aset sebanyak 678.622. Progres inventarisasi/sensus BMD yang berjalan pada Pokja A sebesar 2.87%. Jumlah persentase progres inventarisasi/sensus BMD masih tergolong kecil dikarenakan jumlah aset yang terdapat pada Pokja A sangat banyak.

Pada Pokja B, dari total 16 Perangkat terdapat 15 Perangkat Daerah yang memiliki progres inventarisasi/sensus BMD diatas 50% dan 1 Perangkat Daerah dibawah 50% dengan total aset sebanyak 69.487. Progres inventarisasi/sensus BMD yang berjalan pada Pokja B sebesar 76.62%.

Pada Pokja C, dari total 16 Perangkat Daerah terdapat 15 Perangkat Daerah yang memiliki progres inventarisasi/sensus BMD diatas 50% dan 1 Perangkat Daerah dibawah 50% dengan total aset sebanyak 36.720. Progres inventarisasi/sensus BMD yang berjalan pada Pokja C sebesar 81.54%.

Terkait progres sensus hingga saat ini, pada umumnya SKPD telah selesai pada tahapan pelaksanaan, namun masih terkendala dalam tahapan validasi oleh tim dan juga pada tahapan pelaporan. Rendahnya pemahaman, kompetensi serta kuantitas SDM menjadi kendala bagi SKPD untuk memperbaiki hasil pelaksanaan yang dianggap belum valid oleh tim. Sebagian SKPD juga mengalami kendala dalam hal pelaporan yakni Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) yang akan menjadi bukti resmi selesainya pelaksanaan sensus BMD, tidak kunjung disampaikan kepada Tim Validasi. Hal ini berakibat, progress pelaksanaan sensus BMD Pemerintah Kota Pekanbaru menjadi stagnan.

Terkait instruksi Walikota Pekanbaru nomor 08 tahun 2024 tentang lanjutan pelaksanaan inventarisasi/sensus barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, bahwasanya terdapat pengecualian Inventarisasi/Sensus BMD bagi Delapan Perangkat Daerah untuk dilanjutkan pada tahun 2024 dikarenakan banyaknya jumlah BMD dan keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia pada Perangkat Daerah tersebut, antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Dinas Pendidikan adalah salah satu Perangkat Daerah yang termasuk dalam pengecualian dan melanjutkan proses inventarisasi/sensus BMD pada tahun 2024. Dalam upaya meningkatkan pemahaman Pengelola Barang Milik Daerah Dinas Pendidikan mengadakan Sosialisasi Aset Satuan Pendidikan Kota Pekanbaru. Dengan melibatkan Tim



## **PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

---

Inventarisasi/sensus BMD. Sosialisasi diadakan selama 4 (empat) hari dengan menghadirkan seluruh pengelola BMD tingkat Sekolah Dasar di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru pada tanggal 5 s.d. 8 Maret 2024. Adapun rekapitulasi mengenai Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Milik Pemerintah Kota Pekanbaru dapat dilihat pada Lampiran 18.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

### 5.3.1.4. Aset Lainnya

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
551.380.816.597,75	501.549.129.445,46

Aset Lainnya untuk mencatat aset milik Pemerintah Kota Pekanbaru yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.88. Rincian Aset Lainnya**

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Tagihan Jangka Panjang	581.102.113,75	2.088.904.282,46	(1.507.802.168,71)	(72,18)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	176.902.661.732,00	154.659.645.032,00	22.243.016.700,00	14,38
Aset Tak Berwujud	25.875.701.713,00	24.205.867.963,00	1.669.833.750,00	6,90
Aset Lain-lain	312.916.209.791,00	314.627.623.115,00	(1.711.413.324,00)	(0,54)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(21.907.801.752,00)	(19.498.771.783,00)	(2.409.029.969,00)	12,35
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	-	-
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	57.012.943.000,00	25.465.860.836,00	31.547.082.164,00	123,88
<b>Jumlah</b>	<b>551.380.816.597,75</b>	<b>501.549.129.445,46</b>	<b>49.831.687.152,29</b>	<b>9,94</b>

Sumber : Neraca Kota Pekanbaru

Dari Tabel 5.3.88. diatas menunjukkan Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp551.380.816.597,75 dan mengalami kenaikan sebesar Rp49.831.687.152,29 atau 9,94% dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp501.549.129.445,46.

Aset Lainnya per SKPD Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci pada tabel berikut:

**Tabel 5.3.89. Aset Lainnya per SKPD**

(dalam rupiah)

No	SKPD	Tahun 2023
1	Dinas Pendidikan	152.674.194.842,00
2	Dinas Kesehatan	12.157.056.362,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.073.964.312,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	16.380.212.465,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	750.344.581,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.746.759.545,00
8	Dinas Sosial	426.042.322,00
9	Dinas Tenaga Kerja	-
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

No	SKPD	Tahun 2023
11	Dinas Ketahanan Pangan	91.199.000,00
12	Dinas Pertanahan	-
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	24.853.398.657,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.946.314.590,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.296.672.374,00
16	Dinas Perhubungan	2.082.673.233,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	540.124.543,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	39.514.384,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	45.105.640,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	350.417.095,00
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	760.776.589,00
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	232.020.275,00
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	10.873.111.342,00
25	Sekretariat Daerah	63.320.912.505,00
26	Sekretariat DPRD	1.569.653.777,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.458.231.561,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	5.238.103.571,00
29	Badan Pendapatan Daerah	5.008.636.344,00
30	Badan Kepegaw aian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	166.522.011,00
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	-
32	Inspektorat	303.046.519,00
33	Kecamatan Bukitraya	166.470.584,00
34	Kecamatan Tenayan Raya	420.869.743,00
35	Kecamatan Sail	590.702.378,00
36	Kecamatan Lima Puluh	375.345.200,00
37	Kecamatan Pekanbaru Kota	613.670.814,00
38	Kecamatan Sukajadi	594.460.694,00
39	Kecamatan Payung Sekaki	802.104.075,00
40	Kecamatan Senapelan	292.091.450,00
41	Kecamatan Marpoyan Damai	8.618.000,00
42	Kecamatan Binaw idya	273.696.640,00
43	Kecamatan Tuah Madani	-
44	Kecamatan Rumbai.	399.891.668,00
45	Kecamatan Rumbai Timur	-
46	Kecamatan Rumbai Barat	232.536.000,00
47	Kecamatan Kulim	-
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	760.744.106,00
JUMLAH		312.916.209.791,00

Sumber : Neraca Kota Pekanbaru

### 5.3.1.4.1 Tagihan Jangka Panjang

#### Tuntutan Ganti Rugi

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
581.102.113,75	2.088.904.282,46

Tagihan Jangka Panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah sedangkan Tagihan Tuntutan Kerugian daerah adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.3.90. Rincian Tuntutan Ganti Rugi

*(dalam rupiah)*

No	SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Dinas Pendidikan	0,00	181.996.513,46
2	Sekretariat DPRD	521.277.713,75	1.823.833.139,00
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	59.824.400,00	83.074.630,00
<b>Jumlah</b>		<b>581.102.113,75</b>	<b>2.088.904.282,46</b>

Sumber : Neraca Kota Pekanbaru

Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp581.102.113,75 dan mengalami penurunan sebesar Rp1.507.802.168,71 atau 72,18% dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp2.088.904.282,46 yang terdiri dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp581.102.113,75.

### 5.3.1.4.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
<b>176.902.661.732,00</b>	<b>154.659.645.032,00</b>

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki. Pada tahun 2023 Kemitraan dengan Pihak Ketiga tercatat sebesar Rp176.902.661.732,00 dan tidak terdapat perubahan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru terdiri dari Kerja Sama Pemanfaatan dan Bangun Guna Serah/ Bangun Serah Guna (BGS/BSG). Untuk Bangun Guna Serah/ Bangun Serah Guna (BGS/BSG) yaitu Pasar Sukaramai (PT Makmur Papan Permata) dengan perjanjian Nomor 270-WK/1996 dan 018/MPP/XI/1996 tanggal 30 November 1996., Pasar Bawah (PT Dalena Pratama) dengan perjanjian No 644.1/151-WK/2000 dan Nomor 060/DPI-PK/XI/2000 tanggal 17 November 2000, Pasar Sail (PT Riau Kerta Raharja) dengan perjanjian No 17/WK/1999 dan 051/PB/I/99 tanggal 22 Februari 1999 dan Pasar Senapelan (PT Peputra Mahajaya) dengan perjanjian Nomor 131 Tahun 2002 dan Nomor 497/PMJ/VII/2002 tanggal 03 Agustus 2002 dan Pasar Induk (PT Agung Rafa Bonai, KSO) dengan perjanjian Nomor 100/PKS/X/2016/12 dan Nomor 07/ARB-KSO/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016.

Untuk Kerja Sama Pemanfaatan sebesar Rp22.243.016.700,00 merupakan kerja sama antar Pemerintah Kota Pekanbaru dengan PT. Ali Akbar Sejahtera, perjanjian Nomor P.511.2?DPP-4.1/376/2023 dan 001/PKS-AAS/IV/2023 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Pasar Wisata Pasar Bawah Kota Pekanbaru.

Kemitraan dengan pihak ketiga di Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

**Tabel 5.3.91. Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

*(dalam rupiah)*

No	Nama Mitra	Tahun 2023	Tahun 2022
	<b>Kerja Sama Pemanfaatan</b>		
1	KSP - Pasar Bawah (nilai Tanah)	22.243.016.700,00	-
	<b>Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)</b>		
1	BOT - Pasar Sukaramai (nilai tanah)	83.938.644.000,00	83.938.644.000,00
2	BOT - Pasar Bawah (nilai tanah)	9.262.000.000,00	9.262.000.000,00
3	BOT - Pasar Sail (nilai tanah)	831.000.000,00	831.000.000,00
4	BOT - Pasar Senapelan (nilai tanah)	41.360.000.000,00	41.360.000.000,00
5	BOT - Pasar Induk (nilai tanah)	19.268.001.032,00	19.268.001.032,00
	<b>Jumlah</b>	<b>176.902.661.732,00</b>	<b>154.659.645.032,00</b>

Sumber : Neraca Kota Pekanbaru

Dari Tabel 5.3.91. diatas menunjukkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp176.902.661.732,00.

**a) CV. Putra Bertuah/PT.Riau Kerta Raharja sebagai Mitra Kerjasama Peremajaan Pasar Sail.**

Mengacu kepada perjanjian Pemerintah Kota Pekanbaru dengan CV.Putra Bertuah/PT.Riau Kerta Raharja nomor 17/WK/1999 dan nomor 051/PB/I/99 tanggal 22 Februari 1999 beserta Adendum pertama dan kedua terkait Pembangunan Peremajaan Pasar Sail, menyepakati beberapa hal antara lain:

1. Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan kerja sama BGS dengan CV.Bertuah/PT.Riau Kerta Raharja dalam jangka waktu 20 tahun ditambah masa pembangunan 2 tahun dimulai dari tanggal penandatanganan perjanjian kerjasama.
2. Dalam kerjasama itu pemerintah kota pekanbaru berhak atas kompensasi sebesar Rp530.118.662,00 dan aset berupa 2 pos jaga, 1 kantor UPTD serta fasilitas umum lainnya.

**b) PT. Dalena PI sebagai Mitra Kerjasama Peremajaan Pasar Bawah**

Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan kerjasama BGS dengan PT.Dalena PI dalam peremajaan Pasar Bawah sesuai dengan perjanjian Nomor 644.1/151-WK/2000 Tanggal 17 November 2000 menyepakati beberapa hal, antara lain:

1. Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan kerja sama BGS dalam jangka waktu 20 tahun ditambah masa pembangunan 1,5 tahun dimulai dari tanggal penandatanganan perjanjian kerjasama.
2. Pada saat melakukan kerjasama BGS dengan PT.Dalena, terdapat bangunan diatas tanah yang dikerjasamakan yang kemudian dikompensasi senilai Rp.421.000.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2022 kompensasi tersebut telah diselesaikan oleh PT.Dalena kepada Pemerintah Kota Pekanbaru.

**c) PT. Peputra maha Jaya sebagai Mitra Kerjasama Peremajaan Pasar Senapelan**

Mengacu kepada perjanjian antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan pihak PT.Peputra Maha Jaya (PT.PMJ) nomor 131 Tahun 2002 dan nomor



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

497/OMJ/VII/2002 tanggal 3 Agustus 2002 yang menyepakati beberapa hal yang menjadi hak Pemerintah Kota Pekanbaru, antara lain sebagai berikut:

1. Pihak Pengelola Pasar Senapelan wajib memberikan kompensasi atas tanah dan bangunan senilai Rp2.500.000.000,00;
2. Pihak Pemerintah Kota Pekanbaru berhak menerima royalti atas penggunaan tanah sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen) dari total penerimaan biaya pelayanan jasa, setelah dipotong biaya pemeliharaan (maintenance fee) terhitung mulai pasar beroperasi sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjasama, sesuai laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau minimal sebesar Rp110.000.000,00;
3. Pihak Pemerintah Kota Pekanbaru berhak menerima bagian laba bersih sebesar 30% dari laba/keuntungan bersih pengelolaan taman parkir setelah dipotong pajak sesuai dengan laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik.

Selanjutnya pada tanggal 23 September 2020 dilakukan adendum perjanjian kerjasama peremajaan Pasar Senapelan antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan pihak PT. PMJ di depan notaris Rina Hamzah, SH, MM, M.Kn dengan nomor 21 disebabkan adanya pengalihan fungsi sebagian bangunan kios pasar menjadi hotel. Adendum akibat pengalihan fungsi ini menyebabkan Pemerintah Kota Pekanbaru berhak menerima penambahan kontribusi tetap yang naik progresif setiap tahunnya semenjak tahun 2016 terhitung saat hotel mulai beroperasi.

Pada 20 Juli 2020, 14 Oktober 2020, 30 November 2020 dan 23 Desember 2020, PT. PMJ mengajukan permohonan pembebasan royalti tahun 2020 yang disebabkan wabah COVID-19 yang berdampak atas penurunan jumlah pengunjung. Atas surat dimaksud telah diberikan jawaban pada tanggal 22 Maret 2021 bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru tidak dapat memberikan penghapusan/pembebasan royalti dan meminta PT. PMJ mengirimkan laporan keuangan audited tahun 2020 dan dokumen pendukung lainnya sebagai dasar Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menetapkan kebijakan terkait penundaan jadwal pembayaran royalti dan/atau penghapusan denda keterlambatan.

Hingga rapat koordinasi satker terkait bersama PT. PMJ terakhir pada tanggal 21 Desember 2021, PT. PMJ masih mengalami kendala dalam pembayaran kontribusi tetap pasar dan hotel akibat adanya bencana global pandemik COVID-19, sehingga piutang jatuh tempo tercatat s.d. tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi tetap atas pasar 2020 dan 2021 senilai Rp220.000.000,00
2. Kontribusi tetap atas penambahan fungsi hotel 2016-2018, 2020-2021 senilai Rp194.396.300,00
3. Bagi hasil laba parkir senilai Rp161.506.410,00 (temuan LHP BPK atas LKPD Pemko Pekanbaru TA. 2020)
4. Disamping itu terdapat LHP BPK atas LKPD Pemko Pekanbaru TA. 2020 tentang kekurangan pembayaran royalti/kontribusi tetap oleh PT. PMJ sebesar Rp4.019.492.615,00 disebabkan penafsiran dari kalimat perjanjian bahwa "Pihak Pemerintah Kota Pekanbaru berhak menerima royalti atas penggunaan tanah



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen) dari total penerimaan biaya pelayanan jasa, setelah dipotong biaya pemeliharaan (maintenance fee) terhitung mulai pasar beroperasi sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjasama, sesuai laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau minimal sebesar Rp110.000.000,00”.

Atas temuan ini, pihak Pemerintah Kota Pekanbaru telah melayangkan beberapa kali surat teguran kepada pihak PT. PMJ antara lain dan mendapatkan balasan surat terakhir dengan nomor 206/M-087/PMJ-LGL/XI/2021 tanggal 26 November 2021, yang intinya bersedia melakukan klarifikasi dan telah diselenggarakan pertemuan pada tanggal 21 Desember 2021. Dari hasil rapat, terkait point temuan a) dan b) diatas, PT. PMJ berharap adanya keringanan pola pembayaran dan bersedia menyerahkan laporan keuangan audited dan dokumen pendukung lainnya sebagai bukti tertulis. Namun hingga saat ini, dokumen tersebut belum disampaikan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru. Terkait temuan point c) dan d), PT. PMJ telah mengajukan keberatan melalui surat resmi nomor 025/M-013/PMJ-LGL/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 perihal “Keberatan atas pembayaran royalti dan kontribusi pemanfaatan BOT/BGS Pasar Senapelan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” beserta lampiran kajian hukum oleh Tim Ahli.

Dalam tahun 2022, PT. PMJ telah mengirimkan Laporan Keuangan Audited untuk Tahun 2019 dan 2020, namun belum untuk Tahun 2021 serta belum disertai dokumen pendukung lainnya dalam rangka pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru terkait penundaan jadwal pembayaran royalti dan/atau penghapusan denda keterlambatan. Dalam tahun berjalan (tahun 2023), PT. PMJ telah mulai mengangsur tunggakan dengan rincian antara lain :

1. Kontribusi tetap atas pasar 2020 dan 2021 senilai Rp2.200.000.000,00;
2. Kontribusi tetap atas penambahan fungsi hotel 2020 dan 2021 senilai Rp38.866.000,00 ditambah Rp40.809.300,00.

Disamping itu, selama tahun 2022 dan 2023, tunggakan atas kontribusi tetap pasar dan hotel telah bertambah sebanyak Rp220.000.000,00 dan Rp40.809.300,00 ditambah Rp42.849.765,00 (belum termasuk perhitungan denda keterlambatan). Pemerintah Kota Pekanbaru melalui BPKAD Kota Pekanbaru telah menyurati pihak PT. PMJ terkait pelaporan audited PT. PMJ , Tindak Lanjut LHP BPK serta penyelesaian kewajiban lainnya melalui surat nomor 14.04.00/BPKAD-ASET/II/97 tanggal 20 Februari 2023.

### **d) PT. Makmur Papan Permata sebagai Mitra Kerjasama Peremajaan Pasar Sukaramai/Sukaramai Trade Center**

Pada perjanjian kerjasama kemitraan pengelolaan Pasar Sukaramai dengan mitra yakni PT. Makmur Papan Permata (PT.MPP), berdasarkan perjanjian nomor 270-WK/1996 dan 018/MPP/XI/1996 tanggal 30 November 1996 dan Adendum Perjanjian Kerjasama pasca musibah kebakaran Pasar Sukaramai pada tanggal 8 Desember 2015 dengan nomor 100/PKS/X/2016/15 dan 06/MPP/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016. Selanjutnya kembali diadendum pada tanggal 8 Januari 2018 dengan perjanjian nomor 100/KERJ/I/07/2018 dan nomor 01/MPP/I/2018 yang menyepakati mengenai



## **PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

---

pemanfaatan sebagian tanah jalan Imam Bonjol yang beralih fungsi menjadi pintu masuk, akses jalan lingkungan dalam Kawasan serta lahan parkir.

Sehubungan dengan perjanjian kerjasama berserta addendum diatas, Pemerintah Kota Pekanbaru berhak atas royalti dan pembagian keuntungan antara lain sebagai berikut:

1. PT.MPP berkewajiban membayar royalti/kontribusi ke Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru sebesar Rp100.000.000,00 per tahun atau 25% dari hasil laba bersih pengelolaan bangunan (telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pekanbaru bahwa yang disetorkan adalah sebesar Rp100.000.000,00 untuk menghindari kerancuan);
2. Atas addendum pertama pada tahun 2016, PT. MPP berkewajiban membayar royalti/kontribusi tambahan s.d 16 Oktober 2046 dengan total sebesar Rp10.689.950.858,56;
3. Pemerintah Kota Pekanbaru berhak menerima bagian laba bersih dari pengelolaan taman parkir sebesar 30% setelah dipotong pajak sesuai dengan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Pada 21 Desember 2020 dan 12 Maret 2021, PT. MPP mengajukan permohonan penundaan jadwal pembayaran royalti/kontribusi tahunan tahun 2020 yang disebabkan oleh dampak dari wabah COVID-19 yang membuat penjualan atas toko tidak maksimal. Atas surat tersebut, pada tanggal 22 Maret 2021 Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan jawaban dengan meminta PT.MPP mengirimkan Laporan Keuangan Audited tahun 2020 dan dokumen pendukung lainnya sebagai dasar Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menetapkan kebijakan terkait penundaan jadwal pembayaran royalti dan/atau penghapusan denda keterlambatan. PT.MPP telah menyampaikan hasil Laporan Keuangan Audited dari tahun 2016 s.d 2020, dan berdasarkan laporan dimaksud menyajikan bahwa PT.MPP mengalami kerugian meskipun angka rasio lancar perusahaan masih lebih dari 1.

Pada saat rapat koordinasi perangkat kerja terkait bersama PT. MPP terakhir pada tanggal 16 Februari 2022, PT. MPP masih mengalami kendala dalam pembayaran royalti/kontribusi tetap akibat pemulihan pasca bencana kebakaran dan ditambah dengan adanya bencana global pandemi COVID-19, sehingga piutang jatuh tempo tercatat s.d. tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi tetap atas perjanjian awal 2020 dan 2021 senilai Rp200.000.000,00;
2. Kontribusi tetap tambahan atas addendum perjanjian tahun 2019-2020 senilai Rp594.930.000,00;
3. Denda keterlambatan atas kontribusi tetap akibat perjanjian awaldan addendum perjanjian (temuan LHP BPK atas LKPD Pemko Pekanbaru TA. 2020) senilai Rp125.000.000,00 dan Rp70.825.000,00 atau total sebesar Rp195.825.000,00.

Tindak lanjut dari hasil pertemuan tersebut, PT. MPP telah menyurati Pemerintah Kota Pekanbaru dengan nomor 001.23/MPP-CAB/PKU/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 Perihal : Permohonan Tata Cara Pembayaran Kewajiban Royalti/Kontribusi, Denda dan PBB yang antara lain berisi bahwa :



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

1. PT.MPP telah pernah mengangsur denda keterlambatan pembayaran kontribusi tahun 2016 sebesar Rp45.000.000,00 , sehingga total denda keterlambatan yang diakui PT. MPP hanya sebesar Rp150.825.000,00
2. PT.MPP selanjutnya bermohon terkait pembayaran kewajiban royalti/kontribusi tetap sekaligus pembayaran denda hasil temuan LHP BPK RI serta PBB, akan dibayarkan secara proporsional setiap bulannya dimulai dari 16 Mei 2022 dan berakhir pada 16 April 2025 (36 bulan).

Terkait hal dimaksud, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Tim Percepatan Tindak Lanjut Temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2020 terkait Kontribusi dan Sanksi Administratif Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada PT. PMJ dan PT. MPP berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 1032 Tahun 2021, saat ini sedang menyiapkan administrasi penetapan persetujuan pemberian keringanan dalam hal pola pembayaran kontribusi tetap dan denda administratif kepada PT. PMJ dan PT. MPP selama masa pandemi COVID-19. Hal ini dimuat dalam SK Walikota Pekanbaru Nomor 374 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Keterlambatan Pembayaran Royalti/Kontribusi Tahun 2020-2021 dan Pola Pembayaran Angsuran Atas Royalti/Kontribusi Tahun 2020-2021 sebagai Dampak Penyebaran Wabah Corona Virus Disease 2019 kepada PT. Makmur Papan Permata.

Menindaklanjuti penetapan dimaksud, PT MPP selama kurun waktu Tahun 2022 telah melakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Menyelesaikan denda keterlambatan atas kontribusi tetap akibat perjanjian awal dan addendum perjanjian (temuan LHP BPK atas LKPD Pemko Pekanbaru TA. 2020) senilai Rp80.000.000,00 dan Rp70.825.000,00 atau total sebesar Rp150.825.000,00;
2. Menyelesaikan pembayaran kontribusi tetap atas perjanjian awal untuk 2020 dan 2021 senilai Rp200.000.000,00;
3. Mengangsur keterlambatan kontribusi tetap tambahan atas addendum perjanjian untuk tahun 2019-2020 yang jatuh tempo pada 16 Oktober 2020 dan 16 Oktober 2021 senilai Rp594.930.000,00 terus diangsur per bulan pada tahun berjalan oleh PT. MPP dan ditargetkan selesai pada April 2024.

### e) **PT. Agung Rafa Bonai (ARB) sebagai Mitra Kerjasama BGS Pasar Induk**

Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Pekanbaru menandatangani perjanjian kerjasama pembangunan dan pengelolaan Pasar Induk Kota Pekanbaru dengan PT.ARB melalui perjanjian kerjasama nomor 100/PKS/X/2016/20 dan nomor 07/ARB-KSO/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016. Selanjutnya perjanjian tersebut diadendum dengan perjanjian nomor 100/KERJASAMA/38/X/2018 dan nomor 08/ARB-KSO/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang berisi penambahan jangka waktu pembangunan Pasar Induk, dari semula 24 (dua puluh empat) bulan semenjak perjanjian ditandatangani, mundur menjadi tanggal 19 Oktober 2019.

Dalam perjanjian kerjasama tersebut diatas, Pemerintah Kota Pekanbaru berhak memperoleh kontribusi tahunan dengan total Rp 17.552.226.275,00, memperoleh paling sedikit 10% dari keseluruhan hasil BGS untuk digunakan langsung dalam



## **PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

---

pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah serta menerima 25% bagian laba bersih dari laba parkir, iklan dan bongkar muat.

Hingga rapat koordinasi terakhir pada tanggal 11 Maret 2022, PT. ARB baru menyelesaikan 60% dari keseluruhan target pembangunan BGS, serta baru membayarkan 2 (dua) tahun kontribusi tahunan yakni untuk pembayaran tahun 2016 dan 2017, sehingga total piutang jatuh tempo tercatat s.d. tahun 2021 adalah sebesar Rp779.455.901,00 (kontribusi tahun 2018, 2019 dan 2020). Nilai ini diluar hasil temuan BPK RI terkait denda keterlambatan sebesar Rp56.198.348,04 (untuk keterlambatan pembayaran tahun 2017 dan 2018). Hasil konfirmasi Pihak PT. ARB kepada BPK RI mengenai sebab keterlambatan pembangunan dan pembayaran kontribusi tetap ini antara lain adalah :

- a. Adanya keterlambatan keluarnya Izin Pembangunan Pasar Induk pada tanggal 31 Juli 2017 dan baru diterima PT. ARB pada tanggal 26 Oktober 2017, sehingga pembangunan tidak dimulai sesuai dengan perjanjian awal. Atas kondisi tersebut, telah dilakukan adendum masa pembangunan selama setahun hingga Oktober 2019.
- b. Adanya kendala dari pendanaan dikarenakan awalnya ada 3 perusahaan untuk pendanaan (KSO), namun dalam perjalanan hanya satu perusahaan saja yakni PT. ARB yang mendanai pembangunan pasar.
- c. Dari hasil wawancara dengan Direktur PT. ARB diketahui bahwa progress fisik dari Februari 2020 s.d. saat ini, belum mengalami peningkatan yakni masih pada angka 60%. Hal ini disebabkan adanya wabah pandemik COVID-19 dan keterbatasan keuangan perusahaan.
- d. Masalah lain yang menjadi permasalahan adalah adanya miskomunikasi antara Pemerintah Kota Pekanbaru pada saat itu melalui Dinas Pasar Kota Pekanbaru yang bersepakat dengan PT. ARB mengenai proses balik nama alas hak kepemilikan Pasar Induk menjadi sertifikat HPL akan diurus dan ditanggung biayanya oleh pihak PT. ARB. Sehingga alas hak kepemilikan Pasar Induk tersebut langsung diserahkan kepada PT. ARB pada tahun 2016. Namun akibat Dinas Pasar melebur ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan karena terbitnya Peraturan Daerah mengenai SOTK Pemerintah Kota Pekanbaru terbaru ditahun 2017, proses sertifikasi ini ternyata tidak berlanjut. Hingga akhirnya, pada bulan Juli tahun 2020 dokumen alas hak kepemilikan tersebut diserahkan kembali kepada Pemerintah Kota Pekanbaru melalui BPKAD Kota Pekanbaru. Selanjutnya atas dokumen alas hak dimaksud telah diserahkan oleh BPKAD kepada Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru pada tanggal 3 Juli 2020 untuk pengurusan sertifikat HPL. Kondisi hingga saat ini, Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru dalam proses penerbitan SK HPL di Kementerian ATR RI. Kendala ini menjadi salah satu justifikasi bagi PT. ARB sehingga tidak dapat menerbitkan sertifikat HGB diatas tanah HPL yang dapat menjadi alternatif solusi pendanaan tambahan dalam hal pembiayaan dari perbankan.

Menurut penyampaian dari pihak PT. ARB, telah disampaikan sebanyak 2 (dua) kali permohonan adendum dan penangguhan royalti kepada Pemerintah Kota



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pekanbaru. Surat pertama dengan nomor 20/ARB-IDK-PKU/XI/2020 pada tahun 2021 ditujukan kepada Walikota Pekanbaru, dan surat terakhir dengan nomor 07/ARB-IDK-PKU/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 perihal Permohonan Adendum Ke-3. Dalam pengajuan PT. ARB, memuat beberapa poin mengenai hal-hal yang akan diadendum, antara lain:

1. Adendum pelaksanaan jangka waktu BGS Pasar Induk diubah dari semula terhitung mulai perjanjian ditandatangani berubah menjadi terhitung dari terbitnya HGB;
2. Pemko Pekanbaru berkomitmen untuk tidak menerbitkan izin terhadap pasar-pasar sejenis dalam radius 5 kilometer;
3. Pemko Pekanbaru bersedia memberikan pembebasan atas kontribusi tetap PT. ARB yang tertunggak dan dimulai pembayaran terhitung sejak Pasar Induk mulai beroperasi;
4. Pihak PT. ARB boleh mengalihkan fungsi sebagian luasan lahan dalam rangka optimalisasi pendapatan.
5. Pemko Pekanbaru berkewajiban untuk memindahkan pedagang kedalam areal Pasar Induk sebagaimana komitmen Perjanjian Awal.

Disisi lain, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menyampaikan Surat Teguran Pertama dan Kedua kepada pihak PT. ARB sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. Terkait surat permohonan yang disampaikan oleh PT. ARB, telah dijawab resmi oleh OPD terkait disertai permintaan dokumen pendukung, penunjukan konsultan pengawas serta Laporan Keuangan Audited oleh PT. ARB selama kurun waktu tertagih guna merumuskan kebijakan lebih lanjut. Namun hingga saat ini, belum mendapat respon dari PT. ARB. Sebagai informasi tambahan, pada tanggal 30 Agustus 2022, telah terbit Sertifikat HPL atas aset tanah Pasar Induk dengan Nomor 00016 oleh Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia. *Update* untuk kondisi total piutang jatuh tempo tercatat s.d. tahun 2023 adalah sebesar Rp1.381.351.627,00 (untuk kontribusi tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022) diluar perhitungan denda tahun berjalan.

### 5.3.1.4.3. Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
25.875.701.713,00	24.205.867.963,00

Aset tak berwujud terdiri dari aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dapat dirinci sebagai berikut:



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.3.92. Rincian Aset Tak Berwujud per SKPD

(dalam rupiah)

No	SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Dinas Pendidikan	291.807.000,00	291.807.000,00
2	Dinas Kesehatan	886.296.007,00	837.456.007,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.312.164.387,00	11.312.164.387,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.250.378.425,00	1.100.395.425,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	177.650.000,00	177.650.000,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	88.640.000,00	88.640.000,00
8	Dinas Sosial	10.027.453,00	10.027.453,00
9	Dinas Tenaga Kerja	162.802.500,00	162.802.500,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-
11	Dinas Ketahanan Pangan	109.987.000,00	79.987.000,00
12	Dinas Pertanahan	617.530.500,00	488.853.750,00
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	582.508.217,00	582.508.217,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50.254.500,00	50.254.500,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	48.400.000,00	48.400.000,00
16	Dinas Perhubungan	1.193.619.850,00	1.094.607.850,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.320.184.010,00	1.320.184.010,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	98.077.000,00	98.077.000,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	185.225.000,00	436.192.000,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	253.322.482,00	153.744.482,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	39.160.000,00	39.160.000,00
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	288.200.000,00	288.200.000,00
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	667.253.567,00	667.253.567,00
25	Sekretariat Daerah	79.469.000,00	79.469.000,00
26	Sekretariat DPRD	1.696.266.000,00	1.047.805.000,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.239.072.689,00	1.239.072.689,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	501.373.700,00	403.693.700,00
29	Badan Pendapatan Daerah	856.693.500,00	606.693.500,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	928.064.248,00	683.664.248,00
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	29.260.000,00	29.260.000,00
32	Inspektorat	259.278.276,00	184.908.276,00
33	Kecamatan Bukitraya	74.526.800,00	74.526.800,00
34	Kecamatan Tenayan Raya	143.321.216,00	143.321.216,00
35	Kecamatan Sail	-	-
36	Kecamatan Lima Puluh	21.096.792,00	21.096.792,00
37	Kecamatan Pekanbaru Kota	-	-
38	Kecamatan Sukajadi	-	-
39	Kecamatan Payung Sekaki	12.000.000,00	12.000.000,00
40	Kecamatan Senapelan	143.660.024,00	143.660.024,00
41	Kecamatan Marpoyan Damai	47.817.200,00	47.817.200,00
42	Kecamatan Binawidya	96.792.756,00	96.792.756,00
43	Kecamatan Tuah Madani	-	-
44	Kecamatan Rumbai	-	-
45	Kecamatan Rumbai Timur	-	-
46	Kecamatan Rumbai Barat	33.721.614,00	33.721.614,00
47	Kecamatan Kulim	-	-
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	79.800.000,00	30.000.000,00
JUMLAH		25.875.701.713,00	24.205.867.963,00

Sumber : Neraca Kota Pekanbaru

Dari Tabel 5.3.92. di atas menunjukkan Aset Tak Berwujud Tahun 2023 adalah sebesar Rp25.875.701.713,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.669.833.750,00 atau 6,90% dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp24.205.867.963,00. Adapun rincian Aset Tak Berwujud Tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran 15.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

**5.3.1.4.4. Aset Lain-lain**

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
<b>312.916.209.791,00</b>	<b>314.627.623.115,00</b>

Aset Lain-lain 31 Desember 2023 sebesar Rp312.916.209.791,00 dimana mengalami penurunan sebesar Rp1.711.413.324,00 atau 0,54% dari Tahun 2022 sebesar 314.627.623.115,00. Dimana untuk Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sesuai dengan Kepmendagri 50-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah tidak disajikan lagi untuk aset lain-lain. Adapun rincian akun Aset lain-lain terdiri atas Aset Rusak Berat/Usang senilai Rp307.678.106.220,00 dan Dana Bergulir-Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (PEK) yang direklas dari semula dicatat pada Investasi Jangka Panjang - Investasi Non Permanen Dana Bergulir ke Aset lain-lain karena sudah dalam proses penghapusan di KPKNL sejak Tahun 2019 dengan nilai per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.247.125.527,00 dan pada tahun 2023 ada pelunasan Dana Bergulir-Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (PEK) sebesar Rp9.021.956,00 sehingga nilai per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.238.103.571,00.

Pada Tahun 2023 Aset Rusak Berat/Usang senilai Rp307.678.106.220,00 mengalami penurunan karna adanya penghapusan sebesar Rp1.702.392.354,00 atau 0,55% dari tahun 2022 sebesar Rp309.380.498.574,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.93. Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat**

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	2023
1	Aset Rusak Berat/Usang	309.380.498.574,00	0,00	1.702.392.354,00	307.678.106.220,00
JUMLAH		309.380.498.574,00	-	1.702.392.354,00	307.678.106.220,00

Sumber : Neraca Kota Pekanbaru

Adapun penjelasan rincian Aset Lain-lain pada SKPD dengan nilai setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5.3.94. Aset Lain-Lain per SKPD**

*(dalam rupiah)*

No	SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Dinas Pendidikan	152.674.194.842,00	152.674.194.832,00
2	Dinas Kesehatan	12.157.056.362,00	12.157.056.329,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.073.964.312,00	2.073.964.311,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	16.380.212.465,00	16.380.212.465,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	750.344.581,00	750.344.581,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	0,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.746.759.545,00	1.746.759.540,00
8	Dinas Sosial	426.042.322,00	426.042.322,00
9	Dinas Tenaga Kerja		
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

No	SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022
11	Dinas Ketahanan Pangan	91.199.000,00	91.199.000,00
12	Dinas Pertanahan		
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	24.853.398.657,00	24.853.398.657,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.946.314.590,00	2.946.314.590,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.296.672.374,00	1.296.672.374,00
16	Dinas Perhubungan	2.082.673.233,00	2.082.673.245,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-	
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	540.124.543,00	540.124.543,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	39.514.384,00	39.514.384,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	45.105.640,00	45.105.642,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	350.417.095,00	350.417.095,00
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	760.776.589,00	760.776.589,00
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	232.020.275,00	232.020.275,00
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	10.873.111.342,00	10.873.111.343,00
25	Sekretariat Daerah	63.320.912.505,00	65.012.821.692,00
26	Sekretariat DPRD	1.569.653.777,00	1.569.653.780,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.458.231.561,00	1.462.709.728,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	5.238.103.571,00	5.247.125.527,00
29	Badan Pendapatan Daerah	5.008.636.344,00	5.008.635.500,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	166.522.011,00	166.521.981,00
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	
32	Inspektorat	303.046.519,00	303.046.519,00
33	Kecamatan Bukitraya	166.470.584,00	166.470.584,00
34	Kecamatan Tenayan Raya	420.869.743,00	420.869.743,00
35	Kecamatan Sail	590.702.378,00	590.702.378,00
36	Kecamatan Lima Puluh	375.345.200,00	375.345.200,00
37	Kecamatan Pekanbaru Kota	613.670.814,00	613.670.814,00
38	Kecamatan Sukajadi	594.460.694,00	594.460.694,00
39	Kecamatan Payung Sekaki	802.104.075,00	802.104.075,00
40	Kecamatan Senapelan	292.091.450,00	292.091.450,00
41	Kecamatan Marpoyan Damai	8.618.000,00	8.618.000,00
42	Kecamatan Binawidya	273.696.640,00	279.701.640,00
43	Kecamatan Tuah Madani		
44	Kecamatan Rumbai	399.891.668,00	399.891.668,00
45	Kecamatan Rumbai Timur		
46	Kecamatan Rumbai Barat	232.536.000,00	232.536.000,00
47	Kecamatan Kulim		
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	760.744.106,00	760.744.106,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>312.916.209.791,00</b>	<b>314.627.623.115,00</b>

Sumber : Neraca Kota Pekanbaru

Selanjutnya untuk Aset Lain-Lain dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (Aset Rusak Berat/Usang) dapat dilihat pada Lampiran 16.

### 5.3.1.4.5. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
<b>(21.907.801.752,00)</b>	<b>(19.498.771.783,00)</b>

Nilai Akumulasi Amortisasi merupakan akumulasi amortisasi untuk Aset Tak Berwujud. Nilai akumulasi amortisasi Tahun 2023 sebesar Rp21.907.801.752,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp2.409.029.969,00 atau 12,35% dari Tahun 2022 sebesar Rp19.498.771.783,00 Nilai Akumulasi Amortisasi dapat dirinci sebagai berikut:



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

**Tabel 5.3.95. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud**

*(dalam rupiah)*

No	SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Dinas Pendidikan	(208.788.000,00)	(159.717.500,00)
2	Dinas Kesehatan	(698.959.590,00)	(543.617.590,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(10.376.162.925,00)	(9.350.976.421,00)
4	Dinas Perumahan dan Kaw asan Permukiman	(1.094.655.779,00)	(829.870.265,00)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(136.938.542,00)	(92.526.042,00)
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	(70.826.875,00)	(61.110.625,00)
8	Dinas Sosial	(10.027.453,00)	(10.027.453,00)
9	Dinas Tenaga Kerja	(162.802.500,00)	(162.802.500,00)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-
11	Dinas Ketahanan Pangan	(55.838.723,00)	(34.468.759,00)
12	Dinas Pertanahan	(516.941.375,00)	(488.853.750,00)
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	(413.207.146,00)	(295.579.660,00)
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(50.254.500,00)	(50.254.500,00)
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(48.400.000,00)	(48.400.000,00)
16	Dinas Perhubungan	(955.685.304,00)	(777.150.760,00)
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	(1.320.184.010,00)	(1.320.184.010,00)
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(98.077.000,00)	(98.077.000,00)
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(165.778.500,00)	(340.854.084,00)
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	(152.143.232,00)	(122.312.651,00)
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	(39.160.000,00)	(39.160.000,00)
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	(288.200.000,00)	(288.200.000,00)
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	(667.253.567,00)	(667.253.567,00)
25	Sekretariat Daerah	(61.429.188,00)	(53.964.438,00)
26	Sekretariat DPRD	(775.299.576,00)	(428.319.146,00)
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(1.239.072.689,00)	(1.204.957.792,00)
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	(314.356.201,00)	(245.335.884,00)
29	Badan Pendapatan Daerah	(620.266.833,00)	(595.473.500,00)
30	Badan Kepegaw aian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(577.160.279,00)	(452.793.176,00)
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	(29.260.000,00)	(29.260.000,00)
32	Inspektorat	(189.556.401,00)	(179.015.986,00)
33	Kecamatan Bukitraya	(74.526.800,00)	(74.526.800,00)
34	Kecamatan Tenayan Raya	(143.321.216,00)	(143.321.216,00)
35	Kecamatan Sail	-	-
36	Kecamatan Lima Puluh	(21.096.792,00)	(21.096.792,00)
37	Kecamatan Pekanbaru Kota	-	-
38	Kecamatan Sukajadi	-	-
39	Kecamatan Payung Sekaki	(12.000.000,00)	(12.000.000,00)
40	Kecamatan Senapelan	(123.751.686,00)	(99.861.680,00)
41	Kecamatan Marpoyan Damai	(47.817.200,00)	(47.817.200,00)
42	Kecamatan Binaw idya	(96.792.756,00)	(96.792.756,00)
43	Kecamatan Tuah Madani	-	-
44	Kecamatan Rumbai.	-	-
45	Kecamatan Rumbai Timur	-	-
46	Kecamatan Rumbai Barat	(33.721.614,00)	(31.588.280,00)
47	Kecamatan Kulim	-	-
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(18.087.500,00)	1.250.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>(21.907.801.752,00)</b>	<b>(19.498.771.783,00)</b>

Sumber : Neraca Kota Pekanbaru



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

### 5.3.1.4.6. Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
57.012.943.000,00	25.465.860.836,00

*Treasury Deposit Facility* (TDF) merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI). Pola penyimpanan uang ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*.

Nilai Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) merupakan saldo DBH dan/atau DAU Pemerintah Kota Pekanbaru yang disimpan pada Bank Indonesia yang menggunakan pola penyimpanan *Treasury Deposit Facility* (TDF) per 31 Desember 2023. Nilai Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) Tahun 2023 sebesar Rp57.012.943.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp31.547.082.164,00 atau 123,88% dari Tahun 2022 sebesar Rp25.465.860.836,00. Nilai Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.3.96. Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	DBH PBB	6.867.083.000,00	2.539.923.741,00
2	DBH PPh Pasal 21	19.441.843.000,00	10.384.587.996,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	209.479.000,00	903.070.389,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		473.894,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	25.869.446.000,00	9.800.654.097,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	320.672.000,00	593.812.442,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	4.304.420.000,00	312.759.995,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		718.825.071,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan		211.753.211,00
<b>JUMLAH</b>		<b>57.012.943.000,00</b>	<b>25.465.860.836,00</b>

Sumber : Neraca Kota Pekanbaru



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

**5.3.2. KEWAJIBAN**

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
163.791.180.472,93	185.967.862.723,65

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Pekanbaru.

Kewajiban Pemerintah Kota Pekanbaru berupa kewajiban jangka pendek dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.97. Rincian Kewajiban**

(dalam rupiah)

No.	Kewajiban	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	Kewajiban Jangka Pendek	163.791.180.472,93	185.967.862.723,65	(22.176.682.250,72)	(11,93)
2	Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>163.791.180.472,93</b>	<b>185.967.862.723,65</b>	<b>(22.176.682.250,72)</b>	<b>(11,93)</b>

Sumber: Neraca Kota Pekanbaru

Kewajiban tahun 2023 sebesar Rp163.791.180.472,93 dan mengalami penurunan sebesar Rp22.176.682.250,72 atau 11,93%, dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp185.967.862.723,65.

**5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek**

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
163.763.852.674,13	185.967.862.723,65

Kewajiban jangka pendek merupakan pos untuk menampung kewajiban Pemerintah Kota Pekanbaru yang diharapkan dibayar dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian kewajiban jangka pendek adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.3.98. Rincian Kewajiban Jangka Pendek**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	200.196.680,80	587.209.984,00	(387.013.303,20)	(65,91)
2	Pendapatan Diterima Dimuka	115.351.927,50	8.350.000,00	107.001.927,50	1.281,46
3	Utang Belanja	163.468.432.364,63	185.341.897.229,65	(21.873.464.865,02)	(11,80)
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.199.500,00	30.405.510,00	(23.206.010,00)	(76,32)
	<b>Jumlah</b>	<b>163.791.180.472,93</b>	<b>185.967.862.723,65</b>	<b>(22.176.682.250,72)</b>	<b>(11,93)</b>

Sumber: Neraca Kota Pekanbaru

Kewajiban jangka pendek tahun 2023 sebesar Rp163.791.180.472,93 dan mengalami penurunan sebesar Rp22.176.682.250,72 atau 11,93%, dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp185.967.862.723,65.

**5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)**

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
200.196.680,80	587.209.984,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) merupakan pajak yang dipungut Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Umum Negara sampai dengan 31



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Desember 2023. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) tahun 2023 sebesar Rp200.196.680,80 dan mengalami penurunan sebesar Rp387.013.303,20 atau 65,91%, dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp587.209.984,00. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) tahun 2023 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.99. Rincian Utang PFK**

*(dalam rupiah)*

No	SKPD	PPh Ps 21	PPh Ps 22	PPh Ps 23	PPN	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	336.000,00	0,00	511.480,00	606.981,00	1.454.461,00
2	RSD Madani	40.696.926,00	13.172.319,14	9.014.899,00	134.440.575,66	197.324.719,80
3	Dinas Perhubungan	0,00	170.100,00	0,00	1.247.400,00	1.417.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>41.032.926,00</b>	<b>13.342.419,14</b>	<b>9.526.379,00</b>	<b>136.294.956,66</b>	<b>200.196.680,80</b>

Sumber: Neraca Kota Pekanbaru

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) tahun 2022 telah disetorkan seluruhnya kepada Kas Umum Negara pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya sehingga Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) tahun 2023 adalah pajak yang dipungut Bendahara Pengeluaran namun belum disetorkan ke Kas Umum Negara sampai dengan 31 Desember 2023.

### 5.3.2.1.2. Pendapatan Diterima Dimuka

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
<b>115.351.927,50</b>	<b>8.350.000,00</b>

Pendapatan diterima dimuka disajikan dalam Neraca sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Pendapatan diterima dimuka tahun 2023 sebesar Rp115.351.927,50 dan mengalami kenaikan Rp107.001.927,50 atau 1.281,46%, dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp8.350.000,00. Adapun Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp Rp115.351.927,50 merupakan setoran kelebihan pembayaran dari pihak III yang berasal dari jaminan bongkar Reklame pada pada Badan Pendapatan Daerah.

### 5.3.2.1.3. Utang Belanja

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
<b>163.468.432.364,63</b>	<b>185.341.897.229,65</b>

Akun utang belanja digunakan untuk mencatat utang belanja pemerintah daerah kepada pihak ketiga/masyarakat yang disebabkan terjadinya transaksi belanja yang belum dibayarkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Utang belanja terdiri atas utang belanja pegawai, utang belanja barang dan jasa, utang belanja subsidi, dan utang belanja modal.

Utang belanja Tahun 2023 Rp163.468.432.364,63 dan mengalami penurunan Rp21.873.464.865,02 atau 11,80%, dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp185.341.897.229,65 dengan rincian sebagai berikut:



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.3.100. Rincian Utang Belanja per SKPD

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Utang Belanja Pegawai	Utang Belanja Barang dan Jasa	Utang Belanja Subsidi	Utang Belanja Modal	Total
1	Dinas Pendidikan	1.994.280.349,00	3.812.763.700,00	-	-	5.807.044.049,00
2	Dinas Kesehatan	8.557.903.486,00	4.279.646.008,00	-	3.557.327.000,00	16.394.876.494,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	211.845.070,00	2.303.983.720,00	-	2.632.885.921,92	5.148.714.711,92
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	128.879.843,00	6.323.269.725,00	-	10.263.495.694,00	16.715.645.262,00
5	Satpol Polisi Pamong Praja	201.242.920,00	-	-	-	201.242.920,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	102.955.256,00	421.463.125,00	-	-	524.418.381,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	172.115.512,00	163.176.100,00	-	124.200.000,00	459.491.612,00
8	Dinas Sosial	80.963.206,00	639.440.660,00	-	-	720.403.866,00
9	Dinas Tenaga Kerja	77.215.326,00	-	-	-	77.215.326,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	115.830.818,00	114.500.000,00	-	-	230.330.818,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	86.328.413,00	-	-	-	86.328.413,00
12	Dinas Pertanahan	71.066.164,00	137.855.200,00	-	1.164.080.000,00	1.373.001.364,00
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	136.504.355,00	8.767.609.726,00	-	143.980.865,00	9.048.094.946,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	230.254.311,00	-	-	-	230.254.311,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	91.612.640,00	409.226.600,00	-	82.000.000,00	582.839.240,00
16	Dinas Perhubungan	192.044.714,00	65.865.161.300,00	3.451.435.665,00	13.289.177.577,00	82.797.819.256,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	88.987.900,00	-	-	-	88.987.900,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	90.461.147,00	70.896.500,00	-	-	161.357.647,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	241.954.810,00	554.438.948,00	-	-	796.393.758,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	91.432.133,00	643.616.918,00	-	49.284.000,00	784.333.051,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	131.722.505,00	217.893.183,71	-	-	349.615.688,71
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	96.283.300,00	107.213.023,00	-	-	203.496.323,00
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	154.274.465,00	20.005.000,00	-	-	174.279.465,00
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	180.832.961,00	417.649.288,00	-	-	598.482.249,00
25	Sekretariat Daerah	518.100.626,00	442.617.253,00	-	-	960.717.879,00
26	Sekretariat DPRD	170.113.778,00	1.267.692.950,00	-	111.245.900,00	1.549.052.628,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	172.375.880,00	-	-	-	172.375.880,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	191.713.302,00	-	-	-	191.713.302,00
29	Badan Pendapatan Daerah	177.953.788,00	327.104.400,00	-	-	505.058.188,00
30	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	175.770.629,00	-	-	-	175.770.629,00
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	99.524.488,00	-	-	-	99.524.488,00
32	Inspektorat	347.021.961,00	-	-	-	347.021.961,00
33	Kecamatan Bukit Raya	127.137.899,00	977.501.000,00	-	-	1.104.638.899,00
34	Kecamatan Tenayan Raya	174.428.555,00	1.407.127.700,00	-	-	1.581.556.255,00
35	Kecamatan Sail	86.048.410,00	359.296.600,00	-	-	445.345.010,00
36	Kecamatan Lima Puluh	96.535.110,00	524.362.800,00	-	-	620.897.910,00
37	Kecamatan Pekanbaru Kota	124.871.455,00	604.374.800,00	-	-	729.246.255,00
38	Kecamatan Sukajadi	155.346.465,00	718.485.500,00	-	-	873.831.965,00
39	Kecamatan Payung Sekaki	150.416.701,00	870.671.300,00	-	-	1.021.088.001,00
40	Kecamatan Senapelan	130.780.786,00	683.316.400,00	-	14.251.400,00	828.348.586,00
41	Kecamatan Marpoyan Damai	157.283.104,00	1.321.112.800,00	-	-	1.478.395.904,00
42	Kecamatan Binawidya	140.008.214,00	1.192.466.600,00	-	69.430.000,00	1.401.904.814,00
43	Kecamatan Tuah Madani	131.561.233,00	1.598.349.765,00	-	-	1.729.910.998,00
44	Kecamatan Rumbai	113.301.878,00	1.317.287.000,00	-	-	1.430.588.878,00
45	Kecamatan Rumbai Timur	92.173.529,00	666.668.800,00	-	-	758.842.329,00
46	Kecamatan Rumbai Barat	111.905.390,00	583.486.800,00	-	-	695.392.190,00
47	Kecamatan Kulim	128.685.583,00	801.138.000,00	-	-	929.823.583,00
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	101.515.581,00	99.203.200,00	-	82.000.000,00	282.718.781,00
	<b>J U M L A H</b>	<b>17.401.565.949,00</b>	<b>111.032.072.392,71</b>	<b>3.451.435.665,00</b>	<b>31.583.358.357,92</b>	<b>163.468.432.364,63</b>

Sumber: Neraca Kota Pekanbaru



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Penjelasan/Rincian atas utang belanja adalah sebagai berikut:

### a. Utang Belanja Pegawai

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
17.401.565.949,00	17.401.565.949,00

Akun ini dipakai untuk digunakan untuk mencatat utang belanja gaji dan tunjangan ASN, utang belanja tambahan penghasilan ASN dan utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN,

Utang belanja pegawai Tahun 2023 Rp17.401.565.949,00, sama nilainya jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp17.401.565.949,00

Rincian utang belanja pegawai dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 5.3.101. Rincian Utang Belanja Pegawai per SKPD**

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	296.561.799,00	1.697.718.550,00	-	1.994.280.349,00
2	Dinas Kesehatan	152.509.791,00	2.762.113.695,00	5.643.280.000,00	8.557.903.486,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.881.785,00	203.963.285,00	-	211.845.070,00
4	Dinas Perumahan dan Kaw asan Permukiman	8.466.092,00	120.413.751,00	-	128.879.843,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	7.440.881,00	193.802.039,00	-	201.242.920,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.568.702,00	99.386.554,00	-	102.955.256,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.005.794,00	134.499.718,00	32.610.000,00	172.115.512,00
8	Dinas Sosial	4.973.059,00	75.990.147,00	-	80.963.206,00
9	Dinas Tenaga Kerja	4.617.467,00	72.597.859,00	-	77.215.326,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	8.980.736,00	106.850.082,00	-	115.830.818,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	3.132.535,00	83.195.878,00	-	86.328.413,00
12	Dinas Pertanian	2.489.103,00	68.577.061,00	-	71.066.164,00
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.140.110,00	135.364.245,00	-	136.504.355,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.690.528,00	215.563.783,00	-	230.254.311,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.523.565,00	88.089.075,00	-	91.612.640,00
16	Dinas Perhubungan	7.094.858,00	184.949.856,00	-	192.044.714,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	3.371.042,00	85.616.858,00	-	88.987.900,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.092.847,00	89.368.300,00	-	90.461.147,00



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

NO	SKPD	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Jumlah
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.215.793,00	232.739.017,00	-	241.954.810,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	967.507,00	90.464.626,00	-	91.432.133,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.839.527,00	126.882.978,00	-	131.722.505,00
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.450.879,00	92.832.421,00	-	96.283.300,00
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	5.797.855,00	148.476.610,00	-	154.274.465,00
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	6.015.598,00	157.273.363,00	17.544.000,00	180.832.961,00
25	Sekretariat Daerah	16.810.564,00	501.290.062,00	-	518.100.626,00
26	Sekretariat DPRD	11.050.811,00	159.062.967,00	-	170.113.778,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.913.758,00	166.462.122,00	-	172.375.880,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	3.422.807,00	188.290.495,00	-	191.713.302,00
29	Badan Pendapatan Daerah	6.764.156,00	171.189.632,00	-	177.953.788,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.287.002,00	169.483.627,00	-	175.770.629,00
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	3.808.349,00	95.716.139,00	-	99.524.488,00
32	Inspektorat	12.368.496,00	334.653.465,00	-	347.021.961,00
33	Kecamatan Bukitraya	4.871.537,00	122.266.362,00	-	127.137.899,00
34	Kecamatan Tenayan Raya	6.667.662,00	167.760.893,00	-	174.428.555,00
35	Kecamatan Sail	3.235.962,00	82.812.448,00	-	86.048.410,00
36	Kecamatan Lima Puluh	3.677.022,00	92.858.088,00	-	96.535.110,00
37	Kecamatan Pekanbaru Kota	4.549.567,00	120.321.888,00	-	124.871.455,00
38	Kecamatan Sukajadi	5.925.300,00	149.421.165,00	-	155.346.465,00
39	Kecamatan Payung Sekaki	14.595.582,00	135.821.119,00	-	150.416.701,00
40	Kecamatan Senapelan	4.982.300,00	125.798.486,00	-	130.780.786,00
41	Kecamatan Marpoyan Damai	5.969.597,00	151.313.507,00	-	157.283.104,00
42	Kecamatan Binawidya	6.925.619,00	133.082.595,00	-	140.008.214,00
43	Kecamatan Tuah Madani	5.931.700,00	125.629.533,00	-	131.561.233,00
44	Kecamatan Rumbai	4.324.273,00	108.977.605,00	-	113.301.878,00
45	Kecamatan Rumbai Timur	3.546.982,00	88.626.547,00	-	92.173.529,00
46	Kecamatan Rumbai Barat	4.088.197,00	107.817.193,00	-	111.905.390,00
47	Kecamatan Kulim	8.153.773,00	120.531.810,00	-	128.685.583,00
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.081.438,00	97.434.143,00	-	101.515.581,00
<b>Jumlah Utang Belanja Pegawai</b>		<b>724.780.307,00</b>	<b>10.983.351.642,00</b>	<b>5.693.434.000,00</b>	<b>17.401.565.949,00</b>

Sumber: Neraca Kota Pekanbaru

Pada Dinas Kesehatan masih terdapat utang belanja gaji dan tunjangan ASN berupa utang belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN-belanja jasa pelayanan kesehatan tahun 2018 yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp12.180.000,00. Selain itu, utang belanja pegawai yang masih belum dibayar berasal dari utang belanja gaji dan tunjangan ASN, utang belanja tambahan penghasilan ASN dan utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN tahun 2021 yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2023.

**b. Utang Belanja Barang dan Jasa**

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
<b>111.032.072.392,71</b>	<b>123.801.254.647,71</b>

Utang belanja Tahun 2023 Rp111.032.072.392,71 dan mengalami penurunan Rp12.769.182.255,00 atau 10,31%, dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp123.801.254.647,71

Utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2023 merupakan utang belanja barang dan jasa atas kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 dan sisa utang belanja barang dan jasa tahun anggaran 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 yang belum dilunasi. Rincian utang belanja barang dan jasa dapat dilihat pada Lampiran 1.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

Utang belanja barang dan jasa per SKPD yang belum dibayarkan sampai tahun 2023 yang berasal dari tahun anggaran 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 dapat dilihat pada Lampiran 2.

Adapun penambahan dan pengurangan utang belanja barang dan jasa dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.3.102. Penambahan dan Pengurangan Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023**

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Saldo Awal 2023	Mutasi		Saldo Akhir 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dinas Pendidikan	4.129.820.873,00	-	317.057.173,00	3.812.763.700,00
2	Dinas Kesehatan	4.893.708.731,00	-	614.062.723,00	4.279.646.008,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.029.694.559,00	-	725.710.839,00	2.303.983.720,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.373.278.476,00	-	50.008.751,00	6.323.269.725,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	83.620.000,00	-	83.620.000,00	-
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.209.884.260,00	-	788.421.135,00	421.463.125,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	163.176.100,00	-	-	163.176.100,00
8	Dinas Sosial	700.025.991,00	-	60.585.331,00	639.440.660,00
9	Dinas Tenaga Kerja	108.671.783,00	-	108.671.783,00	-
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	231.441.565,00	-	116.941.565,00	114.500.000,00
11	Dinas Keluhan Pangan	4.539.546,00	-	4.539.546,00	-
12	Dinas Pertanahan	137.855.200,00	-	-	137.855.200,00
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	10.543.026.810,00	-	1.775.417.084,00	8.767.609.726,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	416.591.807,00	-	7.365.207,00	409.226.600,00
15	Dinas Perhubungan	71.547.347.746,00	-	5.682.186.446,00	65.865.161.300,00
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	169.094.750,00	-	169.094.750,00	-
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	70.896.500,00	-	-	70.896.500,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	699.694.627,00	-	145.255.679,00	554.438.948,00
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	776.004.840,00	-	132.387.922,00	643.616.918,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	252.002.752,71	-	34.109.569,00	217.893.183,71
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	107.213.023,00	-	-	107.213.023,00
22	Dinas Perikanan dan Perikanan	38.603.647,00	-	18.598.647,00	20.005.000,00
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	445.854.691,00	-	28.205.403,00	417.649.288,00
24	Sekretariat Daerah	1.861.686.048,00	-	1.419.068.795,00	442.617.253,00
25	Sekretariat DPRD	1.335.188.927,00	-	67.495.977,00	1.267.692.950,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	27.176.700,00	-	27.176.700,00	-
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	94.672.600,00	-	94.672.600,00	-
28	Badan Pendapatan Daerah	383.704.945,00	-	56.600.545,00	327.104.400,00
29	Badan Penelitian dan Pengembangan	48.435.200,00	-	48.435.200,00	-
30	Kecamatan Bukitraya	987.338.365,00	-	9.837.365,00	977.501.000,00
31	Kecamatan Tenayan Raya	1.418.634.742,00	-	11.507.042,00	1.407.127.700,00
32	Kecamatan Sail	368.657.252,00	-	9.360.652,00	359.296.600,00
33	Kecamatan Lima Puluh	533.261.404,00	-	8.898.604,00	524.362.800,00
34	Kecamatan Pekanbaru Kota	612.227.556,00	-	7.852.756,00	604.374.800,00
35	Kecamatan Sukajadi	733.475.849,00	-	14.990.349,00	718.485.500,00
36	Kecamatan Payung Sekaki	884.878.116,00	-	14.206.816,00	870.671.300,00
37	Kecamatan Senapelan	692.172.206,00	-	8.855.806,00	683.316.400,00
38	Kecamatan Marpoan Damai	1.336.758.665,00	-	15.645.865,00	1.321.112.800,00
39	Kecamatan Binawidya	1.192.466.600,00	-	-	1.192.466.600,00
40	Kecamatan Tuah Madani	1.599.878.109,00	-	1.528.344,00	1.598.349.765,00
41	Kecamatan Rumbai	1.327.577.599,00	-	10.290.599,00	1.317.287.000,00
42	Kecamatan Rumbai Timur	671.397.654,00	-	4.728.854,00	666.668.800,00
43	Kecamatan Rumbai Barat	590.534.700,00	-	7.047.900,00	583.486.800,00
44	Kecamatan Kulim	808.853.139,00	-	7.715.139,00	801.138.000,00
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	160.229.994,00	-	61.026.794,00	99.203.200,00
<b>JUMLAH</b>		<b>123.801.254.647,71</b>	<b>-</b>	<b>12.769.182.255,00</b>	<b>111.032.072.392,71</b>

Sumber: Aplikasi Kewajiban Kota Pekanbaru TA.2023

Terdapat koreksi utang belanja barang dan jasa yang didukung melalui Surat Pernyataan Pengguna Anggaran pada beberapa Satker sebagai berikut:



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

**Tabel 5.3.103. Tabel Koreksi Utang Belanja Barang dan Jasa per SKPD yang dibayarkan Tahun 2023**

*(dalam rupiah)*

NO.	SKPD	No. Surat Pernyataan dan tanggal	Periode Utang Belanja	Akun Utang Belanja Barang dan Jasa yang dikoreksi	Jumlah Koreksi
1	Dinas Kesehatan	Surat Pernyataan Kepala Puskesmas Rumbai Bukit No. 445/PKM-RB/023/2023 Tanggal 19 Januari 2023	TA 2020	Utang Belanja Barang Pakai Habis Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	348.480,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	No. Surat Pernyataan : KU.13.07/BPBD-KEU/748/2023 Tanggal 20 Juni 2023	TA 2021	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,00
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Surat Pernyataan B.LH.00/DLHK-KEU/183/2023 Tanggal 04 Mei 2023	TA 2021	Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	16.259.405,00
4	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Surat Pernyataan 900/Daidukkb-Sekri/435/2023 Tanggal 7 November 2023	TA 2022	Utang Belanja Jasa Kantor Tagihan Telepon	89.582,00
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Surat Pernyataan No. B.KP.10.02/DPMTSP-S/256/2024 Tanggal 19 Februari 2024	TA 2022	Utang Belanja Jasa Kantor Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	29.281.800,00
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Surat Pernyataan No. B.900/DISPUSIP/022-a/2024 Tanggal 30 Januari 2024	TA 2022	Utang Belanja Jasa Kantor Tagihan Listrik	502.750,00
7	Sekretariat DPRD	Surat Pernyataan No. B.900.1.3.1/Setw an-3/1444/2024 Tanggal 5 Februari 2024	TA 2022	Utang Belanja Jasa Kantor Tagihan Listrik	10.000,00
8	Kecamatan Payung Sekaki	Surat Pernyataan Camat Payung Sekaki No.340/Kec.PYK-Sekra/XI/2023/ Tanggal 6 November 2023	TA 2022	Utang Belanja Jasa Kantor Tagihan Listrik	2.500,00
			TA 2022	Utang Belanja Jasa Kantor Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	366.300,00
9	Kecamatan Tuah Madani	Surat Pernyataan No.900/59.a/KTMW/2023 Tanggal 19 Februari 2023	TA 2022	Utang Belanja Jasa Kantor Tagihan Listrik	1.654.256,00
			TA 2022	Utang Belanja Jasa Kantor Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.170.600,00

Sumber: Aplikasi Kewajiban Kota Pekanbaru TA.2023

Pada 31 Desember 2023, di rekening koran Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan tercatat belanja jasa tenaga pendidikan sebesar Rp3.343.825.000,00. Atas belanja ini, sudah selesai ditransfer dan direalisasikan pada 2 Januari 2024. Selain itu, pada tanggal 31 Desember 2023, di rekening koran pada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan, tercatat belanja jasa bimbingan teknis sebesar Rp2.600.000,00, belanja honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia sebesar Rp3.135.000,00 dan belanja jasa tenaga kesehatan sebesar Rp875.000,00. Atas belanja ini, juga sudah selesai ditransfer dan direalisasikan pada 10 Januari 2024.

**c. Utang Belanja Subsidi**

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
<b>3.451.435.665,00</b>	<b>4.417.749.812,00</b>

Utang belanja subsidi per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.451.435.665,00 dan mengalami penurunan Rp966.314.147,00 atau 21,87% dari nilai utang semula Rp4.417.749.812,00 sesuai dengan hasil Laporan Hasil Reviu kegiatan tahun anggaran 2022 yang belum dibayar pada perangkat daerah di Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 700/Reviu/Inspektorat/03/2022 tanggal 25 Maret 2022. Terdapat pembayaran utang subsidi pada Tahun 2023 senilai Rp 966.314.147,00 melalui SP2D Nomor 20132/SP2D/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 melalui Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdasarkan DPA Dinas Perhubungan Nomor 2.15.02.2.09.01 Sub Kegiatan



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, di mana utang subsidi yang semula dicatat pada Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku PPKD, yang selanjutnya dimutasikan pada tahun 2022 Dinas Perhubungan yang ditunjuk sebagai pengelola Trans Metro Pekanbaru sesuai dengan SK Walikota Pekanbaru Nomor 135 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Trans Metro Pekanbaru Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Adapun penambahan dan pengurangan utang belanja subsidi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.3.104. Penambahan dan Pengurangan Utang Belanja Subsidi Tahun 2023**

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Saldo Awal 2023	Mutasi		Saldo Akhir 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dinas Perhubungan	4.417.749.812,00	-	966.314.147,00	3.451.435.665,00
<b>JUMLAH</b>		<b>4.417.749.812,00</b>	<b>-</b>	<b>966.314.147,00</b>	<b>3.451.435.665,00</b>

Sumber: Neraca Kota Pekanbaru

**d. Utang Belanja Modal**

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
<b>31.583.358.357,92</b>	<b>39.721.326.820,94</b>

Utang belanja modal per 31 Desember 2023 adalah Rp31.583.358.357,92 dan mengalami penurunan sebesar Rp8.137.968.463,02 atau 20,49% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp39.721.326.820,94, utang belanja modal per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Penambahan dan pengurangan utang belanja modal selama tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.3.105. Penambahan dan Pengurangan Utang Belanja Modal Tahun 2023**

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Saldo Awal 2023	Mutasi		Saldo Akhir 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	Utang Belanja Modal Tanah	1.164.080.000,00	-	-	1.164.080.000,00
2	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.286.764.965,00	-	802.879.800,00	1.483.885.165,00
3	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.046.579.154,00	-	-	1.046.579.154,00
4	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	35.193.902.701,94	-	7.305.088.663,02	27.888.814.038,92
5	Utang Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-
<b>JUMLAH</b>		<b>39.721.326.820,94</b>	<b>-</b>	<b>8.137.968.463,02</b>	<b>31.583.358.357,92</b>

Sumber: Neraca Kota Pekanbaru



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

Rincian utang belanja modal per SKPD selama tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.3.106. Utang Belanja Modal per SKPD**

(dalam rupiah)

No.	Nama SKPD	Utang Belanja Modal					Jumlah
		Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Aset Tidak Berwujud	
1	Dinas Kesehatan	-	851.777.000,00	-	2.705.550.000,00	-	3.557.327.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	5.000.000,00	806.095.154,00	1.821.790.767,92	-	2.632.885.921,92
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	191.200.000,00	10.072.295.694,00	-	10.263.495.694,00
4	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	124.200.000,00	-	-	-	124.200.000,00
5	Dinas Pertanahan	1.164.080.000,00	-	-	-	-	1.164.080.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	-	143.980.865,00	-	-	-	143.980.865,00
7	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	82.000.000,00	-	-	-	82.000.000,00
8	Dinas Perhubungan	-	-	-	13.289.177.577,00	-	13.289.177.577,00
9	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	-	49.284.000,00	-	-	49.284.000,00
10	Sekretariat DPRD	-	111.245.900,00	-	-	-	111.245.900,00
11	Kecamatan Senapelan	-	14.251.400,00	-	-	-	14.251.400,00
12	Kecamatan Binawidya	-	69.430.000,00	-	-	-	69.430.000,00
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	82.000.000,00	-	-	-	82.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.164.080.000,00</b>	<b>1.483.885.165,00</b>	<b>1.046.579.154,00</b>	<b>27.888.814.038,92</b>	<b>-</b>	<b>31.583.358.357,92</b>

Sumber: Neraca Kota Pekanbaru

Utang belanja modal per 31 Desember 2023 per kegiatan untuk masing-masing SKPD dapat dilihat pada Lampiran 3.

Utang belanja modal per SKPD yang belum dibayarkan sampai tahun 2023 yang berasal dari tahun anggaran 2019, 2020, 2021 dan 2022 dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 5.3.107. Rincian Utang Belanja Modal per SKPD yang belum dibayarkan hingga Tahun 2023**

(dalam rupiah)

NO.	SKPD	Jumlah
<b>Tahun 2019</b>		<b>45.116.000,00</b>
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	45.116.000,00
<b>Tahun 2020</b>		<b>5.000.000,00</b>
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.000.000,00
<b>Tahun 2021</b>		<b>6.421.218.500,00</b>
1	Dinas Kesehatan	85.356.000,00
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.072.865.000,00
3	Dinas Pertanahan	1.164.080.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	98.917.500,00
<b>Tahun 2022</b>		<b>25.112.023.857,92</b>
1	Dinas Kesehatan	3.471.971.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.627.885.921,92
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.145.514.694,00
4	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	124.200.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	45.063.365,00
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	82.000.000,00
7	Dinas Perhubungan	13.289.177.577,00
8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	49.284.000,00
9	Sekretariat DPRD	111.245.900,00
10	Kecamatan Senapelan	14.251.400,00
11	Kecamatan Binawidya	69.430.000,00
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	82.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>31.583.358.357,92</b>

Sumber: Aplikasi Kewajiban Kota Pekanbaru TA.2023



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

Adapun penambahan dan pengurangan utang belanja modal tanah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.3.108. Penambahan dan Pengurangan Utang Belanja Modal Tanah Tahun 2023**

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Saldo Awal 2023	Mutasi		Saldo Akhir 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dinas Pertanahan	1.164.080.000,00	-	-	1.164.080.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.164.080.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.164.080.000,00</b>

Sumber: Aplikasi Kewajiban Kota Pekanbaru TA.2023

Terdapat saldo Utang Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.164.080.000,00 merupakan utang atas pengadaan 2 (dua) persil tanah tahun 2022. Dinas Pertanahan belum memproses pembayaran utang tersebut karena :

- Terhadap persil tanah a.n. A seluas 1.147 m<sup>2</sup> sebesar Rp268.006.000,00 atas SKGR dengan Register Nomor 1454/590/TR/2020 tanggal 3 Nopember 2020, terdapat surat pengaduan yang disampaikan oleh Sdri. SCT kepada Dinas Pertanahan pada tanggal 27 Juli 2022 yang menyatakan tanah seluas 1.147 m<sup>2</sup> tersebut telah dijual kepadanya dihadapan Notaris pada tanggal 16 Agustus 2021; dan
- Terhadap persil tanah a.n. A seluas 4.213 m<sup>2</sup> sebesar Rp896.074.000,00 atas SKGR dengan Register No 1036/590/TR/2021 tanggal 20 September 2021, terdapat pengaduan dari masyarakat a.n. Warga Badak pada tanggal 26 Mei 2022 dan 30 Mei 2022 yang menentang ganti rugi tanah a.n. A dikarenakan tanah tersebut adalah milik Sdr S. Selanjutnya terdapat permohonan dari pengacara Sdr S yaitu Bintang Sianipar, SH & Rekan kepada Dinas Pertanahan melalui surat Nomor 012/BS-AD/Pdt/III/2023 tanggal 07 Maret 2023 agar ganti rugi tanah tersebut tidak dilakukan pembayaran disebabkan putusan dalam perkara belum *ingkraht* karena penggugat telah mengajukan memori banding atas perkara Nomor 55/G/2022/PTUN.PBR kepada Ketua PTUN Medan sesuai memori banding dari Bintang Sianipar, SH & Rekan kepada Ketua PTUN Medan tanggal 07 Maret 2023. Belum ada keputusan PTUN Medan atas pengajuan banding tersebut.

Adapun penambahan dan pengurangan utang belanja modal peralatan dan mesin dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.3.109. Penambahan dan Pengurangan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023**

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Saldo Awal 2023	Mutasi		Saldo Akhir 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dinas Kesehatan	861.777.000,00	-	10.000.000,00	851.777.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
3	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	124.200.000,00	-	-	124.200.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	143.980.865,00	-	-	143.980.865,00
5	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	82.000.000,00	-	-	82.000.000,00
6	Sekretariat DPRD	111.245.900,00	-	-	111.245.900,00
7	Kecamatan Senapelan	14.251.400,00	-	-	14.251.400,00
8	Kecamatan Binawidya	69.430.000,00	-	-	69.430.000,00
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	82.000.000,00	-	-	82.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.493.885.165,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>1.483.885.165,00</b>

Sumber: Aplikasi Kewajiban Kota Pekanbaru TA.2023



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

Untuk penambahan dan pengurangan utang belanja modal gedung dan bangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.3.110. Penambahan dan Pengurangan Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023**

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Saldo Awal 2023	Mutasi		Saldo Akhir 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	806.095.154,00	-	-	806.095.154,00
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	191.200.000,00	-	-	191.200.000,00
3	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	49.284.000,00	-	-	49.284.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.046.579.154,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.046.579.154,00</b>

Sumber: Aplikasi Kewajiban Kota Pekanbaru TA.2023

Penambahan dan pengurangan utang belanja modal jalan, jaringan dan irigasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.3.111. Penambahan dan Pengurangan Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2023**

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Saldo Awal 2023	Mutasi		Saldo Akhir 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dinas Kesehatan	2.705.550.000,00	-	-	2.705.550.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.923.329.430,94	-	7.101.538.663,02	1.821.790.767,92
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.275.845.694,00	-	203.550.000,00	10.072.295.694,00
4	Dinas Perhubungan	13.289.177.577,00	-	-	13.289.177.577,00
<b>JUMLAH</b>		<b>35.193.902.701,94</b>	<b>-</b>	<b>7.305.088.663,02</b>	<b>27.888.814.038,92</b>

Sumber: Aplikasi Kewajiban Kota Pekanbaru TA.2023

Penambahan dan pengurangan utang belanja modal aset tetap lainnya-aset tidak berwujud dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.3.112. Penambahan dan Pengurangan Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya- Aset Tidak Berwujud Tahun 2023**

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Saldo Awal 2023	Mutasi		Saldo Akhir 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30.000.000	-	30.000.000,00	-
<b>JUMLAH</b>		<b>30.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>-</b>

Sumber: Aplikasi Kewajiban Kota Pekanbaru TA.2023

**e. Utang Belanja Karena Gugatan Oleh PT Multi Inti Guna**

PT Multi Inti Guna secara Hukum telah memenangkan gugatan atas Pemerintah Kota Pekanbaru sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1365 K/Pdt/2018 tanggal 19 Juli 2018, yang isi Putusannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

-Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM PROVISI

-Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*);
3. Menyatakan Pemutusan Surat Perjanjian Jasa Angkutan Persampahan Nomor 25/KONTR-DKP/PERSAMPAHAN/XI/2015 tanggal 03 November 2015 juncto Addendum Pertama Nomor 25.a/ADD.I/KONTR-DKP/PERSAMPAHAN/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 antara Tergugat I dengan Penggugat sebagaimana dimaksud di dalam surat Tergugat II Nomor 232/DKP/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 perihal Pemutusan Kontrak Kerjasama Pengangkutan Sampah, adalah tidak sah dan dibatalkan;
4. Menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat secara seketika dan sekaligus akibat kerugian materil yang diderita oleh Penggugat, sejumlah uang Rp12.771.343.138,00 (dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh delapan rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp563.980,00 (lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; dan
7. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Atas Keputusan Mahkamah Agung tersebut Pemerintah Kota Pekanbaru secara Hukum mempunyai kewajiban terhadap PT Multi Inti Guna sebesar Rp12.771.343.138,00.

Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di tahun 2023 telah melakukan pembayaran atas kerugian tersebut sebesar Rp2.500.000.000,00 melalui SP2D Nomor 00274/SP2D/II/2023 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

### 5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
7.199.500,00	30.405.510,00

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Utang jangka pendek lainnya antara lain terdiri atas utang kelebihan pembayaran PAD, utang kelebihan pembayaran transfer, dan utang kelebihan pembayaran lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.199.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp23.206.010,00 atau 76,328% dibandingkan pada tahun 2022 sebesar Rp30.405.510,00.

Penjelasan/Rincian atas utang jangka pendek lainnya adalah sebagai berikut:



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

---

**Utang Kelebihan Pembayaran PAD**

*(dalam rupiah)*

<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
<b>7.199.500,00</b>	<b>30.405.510,00</b>

Akun ini dipakai untuk untuk mencatat utang kelebihan pembayaran pajak, utang kelebihan pembayaran retribusi, utang kelebihan pembayaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan utang kelebihan pembayaran lain-lain PAD yang sah.

Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.199.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp23.206.010,00 atau 76,32% dibandingkan pada tahun 2022 sebesar Rp30.405.510,00.

Utang Kelebihan Pembayaran PAD tahun 2023 merupakan utang kelebihan pembayaran pajak restoran pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Madani sebesar Rp2.172.000,00 dan Dinas Pendidikan sebesar Rp5.027.500,00 per 31 Desember 2023 di mana masih berada pada Kas Lainnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

### 5.4. PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN OPERASIONAL

#### 5.4.1. PENDAPATAN-LO

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
3.029.957.898.901,93	2.542.852.914.475,81

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD. Pendapatan-LO Tahun 2023 sebesar Rp3.029.957.898.901,93 mengalami kenaikan sebesar Rp487.104.984.426,12 atau 19,16% dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp2.542.852.914.475,81. Pendapatan-LO tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 5.4.1. Rincian Pendapatan - LO

(dalam rupiah)

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1. Pendapatan Asli Daerah - LO	1.064.682.880.724,92	844.775.717.510,81	219.907.163.214,11	26,03
2. Pendapatan Transfer - LO	1.905.899.847.215,00	1.675.638.427.830,00	230.261.419.385,00	13,74
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO	59.375.170.962,01	22.438.769.135,00	36.936.401.827,01	164,61
Jumlah	3.029.957.898.901,93	2.542.852.914.475,81	487.104.984.426,12	19,16

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru

Masing-masing akun Pendapatan LO dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
1.064.682.880.724,92	844.775.717.510,81

Akun PAD ini merupakan realisasi PAD pada Laporan Operasional untuk periode Tahun Anggaran 2023. PAD pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.064.682.880.724,92 mengalami kenaikan sebesar Rp219.907.163.214,11 atau 26,03% dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp844.775.717.510,81. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 5.4.2. Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO Tahun 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Pajak Daerah - LO	958.982.154.060,00	769.167.946.843,80	189.814.207.216,20	24,68
2	Retribusi Daerah - LO	27.496.390.201,00	16.582.758.783,00	10.913.631.418,00	65,81
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -	5.943.817.264,00	3.443.846.490,00	2.499.970.774,00	72,59
4	Lain lain PAD yang Sah - LO	72.260.519.199,92	55.581.165.394,01	16.679.353.805,91	30,01
Jumlah		1.064.682.880.724,92	844.775.717.510,81	219.907.163.214,11	26,03

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

Masing-masing realisasi jenis PAD Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO**

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
<b>958.982.154.060,00</b>	<b>769.167.946.843,80</b>

Pendapatan Pajak Daerah - LO pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp958.982.154.060,00 mengalami kenaikan sebesar Rp189.815.331.653,20 atau 24,68% dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp769.167.946.843,80. Pendapatan Pajak Daerah - LO terdiri dari:

**Tabel 5.4.3. Rincian Pendapatan Pajak Daerah - LO**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Pajak Hotel - LO	47.272.374.337,00	40.656.505.625,00	6.615.868.712,00	16,27
2	Pajak Restoran - LO	143.200.796.144,00	123.626.731.851,80	19.574.064.292,20	15,83
3	Pajak Hiburan - LO	18.150.958.887,00	15.835.145.705,00	2.315.813.182,00	14,62
4	Pajak Reklame - LO	35.301.639.206,00	29.462.908.456,00	5.838.730.750,00	19,82
5	Pajak Penerangan Jalan - LO	156.951.822.384,00	147.086.532.144,00	9.865.290.240,00	6,71
6	Pajak Parkir - LO	20.635.230.899,00	16.411.760.277,00	4.223.470.622,00	25,73
7	Pajak Air Tanah - LO	12.197.325.442,00	12.174.609.016,00	22.716.426,00	0,19
8	Pajak Sarang Burung Walet - LO	89.254.500,00	104.323.500,00	(15.069.000,00)	(14,44)
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	12.915.095,00	9.152.040,00	3.763.055,00	41,12
10	PBB Pedesaan dan Perkotaan - LO	321.361.135.970,00	196.960.166.255,00	124.400.969.715,00	63,16
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO	203.808.701.196,00	186.840.111.974,00	16.968.589.222,00	9,08
<b>Jumlah</b>		<b>958.982.154.060,00</b>	<b>769.167.946.843,80</b>	<b>189.814.207.216,20</b>	<b>24,68</b>

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional dibandingkan dengan Laporan Realisasi Anggaran, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.4.4. Perbandingan Pajak Daerah - LO dan Pajak Daerah - LRA**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	LO	LRA	SELISIH
1	Pajak Hotel	47.272.374.337,00	47.258.290.299,00	14.084.038,00
2	Pajak Restoran	143.200.796.144,00	140.233.444.897,00	2.967.351.247,00
3	Pajak Hiburan	18.150.958.887,00	18.154.112.772,00	(3.153.885,00)
4	Pajak Reklame	35.301.639.206,00	34.619.938.493,00	681.700.713,00
5	Pajak Penerangan Jalan	156.951.822.384,00	156.951.389.265,00	433.119,00
6	Pajak Parkir	20.635.230.899,00	20.635.230.899,00	-
7	Pajak Air Tanah	12.197.325.442,00	12.128.843.473,00	68.481.969,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	89.254.500,00	89.254.500,00	-
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	12.915.095,00	12.915.095,00	-
10	PBB Pedesaan dan Perkotaan	321.361.135.970,00	151.017.226.127,00	170.343.909.843,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	203.808.701.196,00	203.808.701.196,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>958.982.154.060,00</b>	<b>784.909.347.016,00</b>	<b>174.072.807.044,00</b>

Sumber: Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Atas perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pajak Hotel terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar Rp 14.084.038,00 yang merupakan pembentukan piutang tahun berjalan sebesar Rp244.132.186,00 dan pembayaran piutang yang telah disisihkan sebesar Rp147.869.767,00 dikurangi pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp377.917.915,00;
2. Pajak Restoran terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar Rp2.967.351.247,00 yang merupakan pembentukan piutang tahun berjalan sebesar Rp3.694.672.904,00 dikurangi pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp727.321.657,00;
3. Pajak Hiburan terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar minus Rp3.153.885,00 yang merupakan pembentukan piutang tahun berjalan sebesar Rp 13.397.650,00 dikurangi pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp16.587.912,00 dan pembayaran piutang yang telah disisihkan sebesar Rp36.377,00;
4. Pajak Reklame terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar Rp 681.700.713,00 yang merupakan pembentukan piutang tahun berjalan sebesar Rp1.168.836.736,00 dikurangi pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp487.136.023,00;
5. Pajak Penerangan Jalan terdapat perbedaan antara LO dan LRA sebesar Rp433.119,00 yang merupakan selisih pembentukan piutang tahun berjalan sebesar Rp433.119,00 ;
6. Pajak Air Tanah terdapat perbedaan antara LO dan LRA sebesar Rp68.481.969,00 yang merupakan selisih pembentukan piutang tahun berjalan sebesar Rp86.421.193,00 dikurangi pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp17.939.224,00; dan
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) terdapat perbedaan antara LO dan LRA sebesar Rp170.343.909.843,00 yang merupakan selisih pembentukan piutang tahun berjalan sebesar Rp194.440.857.517,00 dikurangi pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp24.096.947.674,00.

### 5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
27.496.390.201,00	16.582.758.783,00

Pendapatan Retribusi Daerah - LO pada Tahun 2023 sebesar Rp27.496.390.201,00 mengalami penurunan sebesar Rp 10.913.631.418,00 atau 65,81% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp16.582.758.783,00.

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan pendapatan Laporan Operasional Tahun 2022 dan menurut jenisnya ada 3 (tiga) retribusi yaitu Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan tertentu. Pendapatan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.4.5. Rincian Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
<b>A</b>	<b>Retribusi Jasa Umum - LO</b>				
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	-	-	-	---
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	4.386.567.790,00	4.207.945.765,00	178.622.025,00	4,24
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO	180.150.000,00	169.350.000,00	10.800.000,00	6,38
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	-	-	-	---
5	Retribusi Pelayanan Pasar - LO	643.945.000,00	676.963.000,00	(33.018.000,00)	(4,88)
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	2.953.745.000,00	2.764.098.775,00	189.646.225,00	6,86
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	914.859.340,00	957.542.186,00	(42.682.846,00)	(4,46)
8	Retribusi Tera/ Tera Ulang - LO	492.619.200,00	429.548.000,00	63.071.200,00	14,68
9	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	2.217.661.875,00	2.234.821.875,00	(17.160.000,00)	(0,77)
<b>B</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha - LO</b>				
10	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	2.199.024.990,00	365.529.000,00	1.833.495.990,00	501,60
11	Retribusi Terminal - LO	15.660.000,00	15.050.000,00	610.000,00	4,05
12	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	574.546.300,00	599.290.500,00	(24.744.200,00)	(4,13)
13	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan - LO	569.653.506,00	580.698.682,00	(11.045.176,00)	(1,90)
<b>C</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu - LO</b>				
14	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	12.344.457.200,00	3.578.295.600,00	8.766.161.600,00	244,98
15	Retribusi Izin Trayek - LO	3.500.000,00	3.625.400,00	(125.400,00)	(3,46)
16	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	-	-	-	---
17	Retribusi Sewa - LO	-	-	-	---
	<b>Jumlah</b>	<b>27.496.390.201,00</b>	<b>16.582.758.783,00</b>	<b>10.913.631.418,00</b>	<b>65,81</b>

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Retribusi Daerah pada Laporan Operasional dibandingkan dengan Laporan Realisasi Anggaran, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.6. Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah - LO dan Pendapatan Retribusi Daerah - LRA

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	LO	LRA	SELISIH
<b>A</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>			
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	-	-
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.386.567.790,00	4.386.567.790,00	-
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	180.150.000,00	180.150.000,00	-
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	-	-	-
5	Retribusi Pelayanan Pasar	643.945.000,00	627.284.000,00	16.661.000,00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.953.745.000,00	2.953.745.000,00	-
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	914.859.340,00	914.859.340,00	-
8	Retribusi Tera/ Tera Ulang	492.619.200,00	492.619.200,00	-
9	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	2.217.661.875,00	1.562.900.625,00	654.761.250,00



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

NO	URAIAN	LO	LRA	SELISIH
<b>B</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>			
10	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.199.024.990,00	2.199.024.990,00	-
11	Retribusi Terminal	15.660.000,00	15.660.000,00	-
12	Retribusi Rumah Potong Hewan	574.546.300,00	574.546.300,00	-
13	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	569.653.506,00	569.653.506,00	-
<b>C</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>			
14	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	12.344.457.200,00	12.344.457.200,00	-
15	Retribusi Izin Trayek	3.500.000,00	3.500.000,00	-
16	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	-	-	-
17	Retribusi Sewa	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>27.496.390.201,00</b>	<b>26.824.967.951,00</b>	<b>671.422.250,00</b>

Sumber: Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Atas perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan Pasar terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar Rp16.661.000,00 yang merupakan selisih pembentukan piutang tahun berjalan sebesar Rp36.339.250,00 dikurangi pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp19.678.250,00; dan
2. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar Rp654.761.250,00 yang merupakan selisih pembentukan piutang tahun berjalan sebesar Rp673.798.125,00 dikurangi pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp19.036.875,00.

### 5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan – LO

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
<b>5.943.817.264,00</b>	<b>3.443.846.490,00</b>

Pendapatan ini adalah PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan ini diterima dan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 sebesar Rp5.943.817.264,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.7. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Bank Riaukepri	3.061.656.530,00	3.112.899.838,00	(51.243.308,00)	(1,65)
2	PT. Bumi Siak Pusako	2.882.160.734,00	330.946.652,00	2.551.214.082,00	770,88
3	PDAM	-	-	-	-
4	PT. BPR	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>5.943.817.264,00</b>	<b>3.443.846.490,00</b>	<b>2.499.970.774,00</b>	<b>72,59</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

Dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp3.443.846.490,00, terdapat peningkatan sebesar Rp 2.499.970.774,00 atau 72,59% yaitu penambahan dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT. Bank Riau Kepri terdapat penurunan Rp51.243.308,00 dan kenaikan pendapatan PT. Bumi Siak Pusako sebesar Rp 2.551.214.082,00, sementara penyertaan modal Pemerintah Kota Pekanbaru pada PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru, PT. BPR Pekanbaru dan PDAM Kota Pekanbaru pada Tahun 2023 tidak menghasilkan dividen.

**5.4.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO**

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
<b>72.260.519.199,92</b>	<b>55.581.165.394,01</b>

Pendapatan ini merupakan pendapatan di luar pendapatan Pajak - LO, Retribusi – LO dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Tahun 2023 sebesar Rp72.260.519.199,92 dan mengalami penurunan sebesar Rp16.679.353.805,91 atau 30,01% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp55.581.165.394,01. Lain-lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO terdiri dari:

**Tabel 5.4.8. Rincian Lain-Lain PAD yang Sah – LO**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	2.194.164.500,00	370.927.500,00	1.823.237.000,00	491,53
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	1.949.104.275,00	1.062.269.290,91	886.834.984,09	83,48
3	Jasa Giro - LO	2.470.718.874,00	1.484.794.415,70	985.924.458,30	66,40
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO		5.095.924,00	(5.095.924,00)	(100,00)
5	Pendapatan Bunga - LO		108.904.110,00	(108.904.110,00)	(100,00)
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LO	14.665.863,00	305.550.518,42	(290.884.655,42)	(95,20)
7	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO	152.906.983,00	92.680.393,00	60.226.590,00	64,98
8	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	111.502.001,20	104.403.865,00	7.098.136,20	6,80
9	Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO	5.346.650.982,00	476.184.420,00	4.870.466.562,00	1.022,81
10	Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO	1.715.586.213,00	1.950.028.487,00	(234.442.274,00)	(12,02)
11	Pendapatan dari Pengembalian - LO	7.110.158.189,01	10.643.246.133,48	(3.533.087.944,47)	(33,20)
12	Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	-	-	-	---
13	Pendapatan dari BLUD - LO	51.153.461.319,71	37.765.235.390,50	13.388.225.929,21	35,45
14	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO	41.600.000,00	1.211.844.946,00	(1.170.244.946,00)	(96,57)
15	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	-	-	-	---
<b>Jumlah</b>		<b>72.260.519.199,92</b>	<b>55.581.165.394,01</b>	<b>16.679.353.805,91</b>	<b>30,01</b>

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Terdapat perbedaan antara Lain-Lain PAD yang Sah pada Laporan Operasional dibandingkan dengan Laporan Realisasi Anggaran, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.4.9. Perbandingan Lain-Lain PAD yang Sah - LO dan Lain-Lain PAD yang Sah - LRA**

*(dalam rupiah)*

NO	URAIAN	LO	LRA	SELISIH
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.194.164.500,00	2.194.164.500,00	-
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.949.104.275,00	2.048.757.168,00	(99.652.893,00)
3	Jasa Giro	2.470.718.874,00	1.842.361.695,00	628.357.179,00
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	9.021.956,00	(9.021.956,00)
5	Pendapatan Bunga	-	-	-
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	14.665.863,00	426.662.376,46	(411.996.513,46)
7	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	152.906.983,00	152.906.983,00	-
8	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	111.502.001,20	111.502.001,20	-
9	Pendapatan Denda Pajak Daerah	5.346.650.982,00	5.346.650.982,00	-
10	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.715.586.213,00	1.680.064.967,00	35.521.246,00
11	Pendapatan dari Pengembalian	7.110.158.189,01	7.110.158.189,01	-
12	Pendapatan dari BLUD	51.153.461.319,71	51.644.847.641,71	(491.386.322,00)
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	41.600.000,00	41.600.000,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>72.260.519.199,92</b>	<b>72.608.698.459,38</b>	<b>(348.179.259,46)</b>

Sumber: Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Atas perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar minus Rp99.652.893,00 karena selisih pembentukan piutang tahun berjalan sebesar Rp1.081.174.250,00 dikurangi pembayaran piutang tahun berjalan dan tahun sebelumnya Rp1.651.873.300,00;
- Jasa Giro terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar Rp628.357.179,00 karena Pendapatan atas Remunerasi (Bunga) terhadap Rekening *Treasury Deposit Facility* Transfer Ke Daerah (TDF-TKD) per 31 Desember 2023 sebesar Rp628.357.179,00 pada Rekening Laporan Operasional Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF)-LO.
- Hasil Pengelolaan Dana Bergulir terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar minus Rp9.021.956,00 karena pembayaran piutang PEK tahun sebelumnya sebesar Rp9.021.956,00.
- Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar minus Rp411.996.513,46 karena pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp411.996.513,46;
- Pendapatan Denda Retribusi Daerah terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar Rp35.521.246,00 karena selisih pembentukan piutang tahun berjalan sebesar



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

Rp65.422.572,00 dikurangi pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp29.901.326,00;

- f. Pendapatan dari BLUD terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar minus Rp491.386.322,00 karena selisih pembayaran piutang yang telah disisihkan sebesar Rp2.544.478,00 dikurangi pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp493.930.800,00.

**5.4.1.2. PENDAPATAN TRANSFER – LO**

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
<b>1.905.899.847.215,00</b>	<b>1.675.638.427.830,00</b>

Pendapatan ini merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Adapun Pendapatan Transfer - LO untuk Tahun 2023 sebesar Rp1.905.899.847.215,00 mengalami kenaikan sebesar Rp230.261.419.385,00 atau 13,74% dibanding Tahun 2022 sebesar Rp1.675.638.427.830,00. Pendapatan Transfer – LO tahun 2023 terdiri dari:

**Tabel 5.4.10. Pendapatan Transfer – LO**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO	1.531.760.152.907,00	1.367.618.233.411,00	164.141.919.496,00	12,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	19.178.601.000,00	-	19.178.601.000,00	---
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	354.961.093.308,00	308.020.194.419,00	46.940.898.889,00	15,24
<b>Jumlah</b>		<b>1.905.899.847.215,00</b>	<b>1.675.638.427.830,00</b>	<b>230.261.419.385,00</b>	<b>13,74</b>

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru

**5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO**

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
<b>1.531.760.152.907,00</b>	<b>1.367.618.233.411,00</b>

Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO Tahun 2023 sebesar Rp1.531.760.152.907,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 164.141.919.496,00 atau 12,00% dibanding Tahun 2022 sebesar Rp1.367.618.233.411,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO tahun 2023 terdiri dari:

**Tabel 5.4.11. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak - LO	176.974.177.282,00	118.785.385.451,00	58.188.791.831,00	48,99
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO	146.612.546.018,00	120.172.259.138,00	26.440.286.880,00	22,00
3	Dana Alokasi Umum - LO	867.953.880.162,00	790.284.259.030,00	77.669.621.132,00	9,83
4	Dana Alokasi Khusus - LO	340.219.549.445,00	338.376.329.792,00	1.843.219.653,00	0,54
<b>Jumlah</b>		<b>1.531.760.152.907,00</b>	<b>1.367.618.233.411,00</b>	<b>164.141.919.496,00</b>	<b>12,00</b>

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pemerintah Kota Pekanbaru mengakui DBH yang tersimpan pada *Treasury Deposit Facility* (TDF) per 31 Desember 2023 sebesar Rp57.012.943.000,00 pada Neraca Rekening Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF).

### 5.4.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak - LO

Dana Bagi Hasil Pajak – LO terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) dan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (DBH Pajak Penghasilan), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Terdapat perbedaan antara Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak – LO pada Laporan Operasional dibandingkan dengan Laporan Realisasi Anggaran, sebagai berikut:

Tabel 5.4.12. Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak – LO dan Dana Bagi Hasil – LRA

*(dalam rupiah)*

NO	URAIAN	LO	LRA	SELISIH
1	DBH PBB-LO	49.745.500.000,00	45.418.340.741,00	4.327.159.259,00
2	DBH PPh Pasal 21-LO	118.640.546.000,00	109.583.290.996,00	9.057.255.004,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	7.657.433.000,00	8.351.024.389,00	(693.591.389,00)
4	DBH CHT-LO	930.698.282,00	931.052.176,00	(353.894,00)
	Jumlah	176.974.177.282,00	164.283.708.302,00	12.690.468.980,00

Sumber: Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Atas perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- DBH PBB-LO terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar Rp4.327.159.259,00 karena selisih pembentukan piutang tahun berjalan sebagai DBH TDF-TKD sebesar Rp2.539.923.741,00 dikurangi pembayaran piutang DBH TDF-TKD tahun sebelumnya sebesar Rp1.471.669.552,00;
- DBH PPh Pasal 21-LO terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar minus Rp9.057.255.004,00 karena selisih pembentukan piutang tahun berjalan sebagai DBH TDF-TKD sebesar Rp10.384.587.996,00 dikurangi pembayaran piutang DBH TDF-TKD tahun sebelumnya sebesar Rp19.441.843.000,00;
- DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar minus Rp693.591.389,00 karena selisih pembentukan piutang tahun berjalan sebagai DBH TDF-TKD sebesar Rp209.479.000,00 dikurangi pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp903.070.389,00;
- DBH CHT-LO terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar minus Rp353.894,00 berupa pembentukan piutang tahun berjalan sebagai DBH TDF-TKD sebesar Rp120.000,00 dikurangi pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp473.894,00 dan;

### 5.4.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO terdiri atas Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Minyak Bumi – LO, DBH SDA Gas Bumi – LO, DBH SDA Mineral dan Batubara – LO, DBH SDA Kehutanan-PSDH – LO, DBH SDA Perikanan -



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

LO. Terdapat perbedaan antara Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam pada Laporan Operasional dibandingkan dengan Laporan Realisasi Anggaran, sebagai berikut:

**Tabel 5.4.13. Perbandingan Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO dan Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LRA**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	LO	LRA	SELISIH
1	DBH SDA Minyak Bumi-LO	116.321.850.000,00	100.253.058.097,00	16.068.791.903,00
2	DBH SDA Gas Bumi-LO	7.811.161.000,00	8.084.301.442,00	(273.140.442,00)
3	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	7.198.510.000,00	3.206.849.995,00	3.991.660.005,00
4	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	-	-	-
5	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	14.232.837.229,00	14.951.662.300,00	(718.825.071,00)
6	DBH SDA Perikanan-LO	1.048.187.789,00	1.259.941.000,00	(211.753.211,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>146.612.546.018,00</b>	<b>127.755.812.834,00</b>	<b>18.856.733.184,00</b>

Sumber: Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Atas perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- DBH SDA Minyak Bumi-LO terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar Rp16.068.791.903,00 karena selisih pembentukan piutang tahun berjalan sebagai DBH TDF-TKD sebesar Rp25.869.446.000,00 dikurangi pembayaran piutang DBH TDF-TKD tahun sebelumnya sebesar Rp9.800.654.097,00;
- DBH SDA Gas Bumi-LO terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar Rp minus 273.140.442,00 karena selisih pembentukan piutang tahun berjalan sebagai DBH TDF-TKD sebesar Rp320.672.000,00 dikurangi pembayaran piutang DBH TDF-TKD tahun sebelumnya sebesar Rp593.812.442,00;
- DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar Rp3.991.660.005,00 karena selisih pembentukan piutang tahun berjalan sebagai DBH TDF-TKD sebesar Rp4.304.420.000,00 dikurangi pembayaran piutang DBH TDF-TKD tahun sebelumnya sebesar Rp312.759.995,00;
- DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar minus Rp718.825.071,00 sebagai pembayaran piutang DBH TDF-TKD tahun sebelumnya;
- DBH SDA Perikanan-LO terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar minus Rp211.753.211,00 sebagai pembayaran piutang DBH TDF-TKD tahun sebelumnya;

### 5.4.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum - LO

Dana Alokasi Umum (DAU) - LO bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Untuk Dana Alokasi Umum (DAU), ditransfer setiap bulannya melalui Rekening Kas Umum Daerah Kota Pekanbaru, rekening Nomor 107.02.01730. Tahun Anggaran 2023 realisasi Dana Alokasi Umum – LO sebesar Rp 867.953.880.162,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp 790.284.259.030,00, tidak terdapat perbedaan penerimaan Dana Alokasi



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

Umum (DAU) pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023.

**Tabel 5.4.14. Perbandingan Dana Alokasi Umum - LO dan Dana Alokasi Umum – LRA**

*(dalam rupiah)*

NO	URAIAN	LO	LRA	SELISIH
1	Dana Alokasi Umum - LO	867.953.880.162,00	867.953.880.162,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>867.953.880.162,00</b>	<b>867.953.880.162,00</b>	<b>-</b>

Sumber: Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

**5.4.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO**

Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023 sebesar Rp340.219.549.445,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.843.219.653 atau 0,54% dibanding Tahun 2022 Rp338.376.329.792,00. Tidak terdapat perbedaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional.

**Tabel 5.4.15. Perbandingan Dana Alokasi Fisik (DAK) Fisik - LO dan Dana Alokasi Fisik (DAK) Fisik - LRA**

*(dalam rupiah)*

NO	URAIAN	LO	LRA	SELISIH
1	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO	32.786.713.679,00	32.786.713.679,00	-
2	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO	307.432.835.766,00	307.432.835.766,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>340.219.549.445,00</b>	<b>340.219.549.445,00</b>	<b>-</b>

Sumber: Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

**5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO**

*(dalam rupiah)*

	Tahun 2023	Tahun 2022
	<b>19.178.601.000,00</b>	<b>0,00</b>

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO Tahun 2023 sebesar Rp19.178.601.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp19.178.601.000,00, atau 100,00%. dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO merupakan penerimaan Dana Insentif Daerah. Tidak terdapat perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya pada Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran.

**Tabel 5.4.16. Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA**

*(dalam rupiah)*

NO	URAIAN	LO	LRA	SELISIH
1	Dana Insentif Daerah - LO	19.178.601.000,00	19.178.601.000,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>19.178.601.000,00</b>	<b>19.178.601.000,00</b>	<b>-</b>

Sumber: Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

**5.4.1.2.3. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO**

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
354.961.093.308,00	308.020.194.419,00

Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO Tahun 2023 sebesar Rp354.961.093.308,00 mengalami kenaikan sebesar Rp46.940.898.889,00 atau 15,24% dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp308.020.194.419,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO tahun 2022 terdiri dari:

**Tabel 5.4.17. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN / PENURUNAN	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	332.102.408.508,00	293.790.879.876,00	38.311.528.632,00	13,04
2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO	22.858.684.800,00	14.229.314.543,00	8.629.370.257,00	60,65
Jumlah		354.961.093.308,00	308.020.194.419,00	46.940.898.889,00	15,24

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru

Rincian realisasi pendapatan transfer pemerintah provinsi – LO sebagai berikut:

**Tabel 5.4.18. Rincian Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	KENAIKAN / PENURUNAN	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - LO	111.897.655.295,00	92.066.596.939,00	19.831.058.356,00	21,54
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	70.470.884.876,00	68.623.894.438,00	1.846.990.438,00	2,69
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	105.107.979.017,00	91.322.671.655,00	13.785.307.362,00	15,10
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan - LO	1.224.427.445,00	1.114.967.105,00	109.460.340,00	9,82
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - LO	43.401.461.875,00	40.662.749.739,00	2.738.712.136,00	6,74
Jumlah		332.102.408.508,00	293.790.879.876,00	38.311.528.632,00	13,04

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya – LO adalah merupakan bantuan keuangan umum dari Provinsi Riau sebesar Rp22.858.684.800,00.

Terdapat perbedaan realisasi pendapatan transfer antar daerah di Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran.

**Tabel 5.4.19. Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO dan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LRA**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	LO	LRA	SELISIH
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	332.102.408.508,00	320.607.751.188,00	11.494.657.320,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO	22.858.684.800,00	22.858.684.800,00	-
Jumlah		354.961.093.308,00	343.466.435.988,00	11.494.657.320,00

Sumber: Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar minus Rp11.494.657.320,00 karena selisih pembentukan piutang tahun berjalan sebesar Rp35.412.084.524,00 dan pembayaran Piutang Bagi Hasil Pajak yang telah disisihkan sebesar Rp120.188.076,00 dikurangi pembayaran Piutang Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 Rp24.037.615.280,00.

**5.4.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO**

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
<b>59.375.170.962,01</b>	<b>22.438.769.135,00</b>

Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO ini pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp59.375.170.962,01 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.4.20. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Tahun 2023**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Pendapatan Hibah	59.375.170.962,01	22.438.769.135,00	36.936.401.827,01	164,61
2	Pendapatan Lainnya	-	-	-	---
	Jumlah	<b>59.375.170.962,01</b>	<b>22.438.769.135,00</b>	<b>36.936.401.827,01</b>	<b>164,61</b>

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO terdiri dari:

1. Pendapatan Hibah:
  - Dinas Kesehatan berupa:
    - o Obat-obatan dari Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp20.899.558.154,01 berdasarkan BAST yang tertera pada lampiran 17.
  - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai BAST Nomor:
    - o BAST/032/PUPR/56/2022 berupa:
      - Penataan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR - Republik Indonesia sebesar Rp8.675.069.000,00; dan
      - Prasarana Sarana Utilitas di Perumahan Pondok Dahlia Indah dan Perumahan Green Fazar Asri dari Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR - Republik Indonesia sebesar Rp576.030.000,00.
    - o BAST/Perkim/232/2023 berupa:
      - FASUM FASOS PSU Perumahan 2023 Tahap 1 dari Pengembang Perumahan sebesar Rp29.224.513.808,00.

**Tabel 5.4.21. Perbandingan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	LO	LRA	SELISIH
1	Pendapatan Hibah	59.375.170.962,01	-	59.375.170.962,01
2	Pendapatan Lainnya	-	-	-
	Jumlah	<b>59.375.170.962,01</b>	<b>-</b>	<b>59.375.170.962,01</b>

Sumber: Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

Perbedaan antara Pendapatan Hibah-LO dan Pendapatan Hibah-LRA disebabkan keseluruhan Pendapatan Hibah pada Tahun 2023 berupa barang sebesar Rp59.375.170.962,01.

**5.4.2. BEBAN**

**5.4.2.1. Beban Operasi**

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
<b>2.809.977.046.774,09</b>	<b>2.551.860.944.394,06</b>

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, konsumsi aset, maupun terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban operasi yaitu beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, kemudian beban penyusutan aset dan amortisasi, beban transfer, beban tak terduga. Beban Tahun 2023 sebesar Rp2.809.977.046.774,09 dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp2.551.860.944.394,06 terdapat kenaikan sebesar Rp258.116.102.380,03 atau 10,11% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.4.22. Rincian Beban**

*(dalam rupiah)*

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Beban Pegawai	917.538.676.637,00	907.308.230.997,56	10.230.445.639,44	1,13
2	Beban Persediaan	421.017.436.556,91	306.208.022.390,70	114.809.414.166,21	37,49
3	Beban Jasa	591.098.237.414,26	483.085.838.896,00	108.012.398.518,26	22,36
4	Beban Pemeliharaan	78.045.580.864,07	55.418.448.667,66	22.627.132.196,41	40,83
5	Beban Perjalanan Dinas	58.584.694.087,00	56.772.414.722,00	1.812.279.365,00	3,19
6	Beban Subsidi	149.490.000,00	6.094.846.356,00	(5.945.356.356,00)	(97,55)
7	Beban Hibah	224.513.682.826,55	197.556.196.440,00	26.957.486.386,55	13,65
8	Beban Bantuan Sosial	-	-	-	---
9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	376.987.697.751,00	376.694.801.613,00	292.896.138,00	0,08
10	Beban Penyisihan Piutang	22.538.087.227,68	38.029.804.863,00	(15.491.717.635,32)	(40,74)
11	Beban Tak Terduga	761.126.257,00	964.331.717,00	(203.205.460,00)	(21,07)
12	Beban Lain-lain	118.742.337.152,62	123.728.007.731,14	(4.985.670.578,52)	(4,03)
<b>Jumlah</b>		<b>2.809.977.046.774,09</b>	<b>2.551.860.944.394,06</b>	<b>258.116.102.380,03</b>	<b>10,11</b>

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru

**5.4.2.1.1. Beban Pegawai**

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
<b>917.538.676.637,00</b>	<b>907.308.230.997,56</b>

Beban Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp917.538.676.637,00 mengalami kenaikan sebesar Rp10.230.445.639,44 atau 1,13% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp907.308.230.997,56.



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Rincian Beban Pegawai per OPD dapat dilihat pada tabel 5.4.23. sebagai berikut:

**Tabel 5.4.23. Rincian Beban Pegawai Per SKPD**

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Dinas Pendidikan	395.286.269.340,00	384.920.743.732,00	10.365.525.608,00	2,69
2	Dinas Kesehatan	144.716.462.709,00	140.095.237.402,00	4.621.225.307,00	3,30
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.073.106.560,00	9.274.614.394,00	(201.507.834,00)	(2,17)
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.330.425.885,00	5.140.318.179,00	190.107.706,00	3,70
5	Satuan Polisi Pamong Praja	9.318.467.304,00	9.498.334.345,00	(179.867.041,00)	(1,89)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.264.689.434,00	4.576.532.094,00	(311.842.660,00)	(6,81)
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6.494.938.670,00	6.409.062.244,00	85.876.426,00	1,34
8	Dinas Sosial	4.302.544.233,00	4.162.832.878,00	139.711.355,00	3,36
9	Dinas Tenaga Kerja	4.265.286.504,00	3.907.092.314,00	358.194.190,00	9,17
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.237.966.825,00	4.553.444.509,00	(315.477.684,00)	(6,93)
11	Dinas Ketahanan Pangan	3.040.683.644,00	3.782.803.841,00	(742.120.197,00)	(19,62)
12	Dinas Pertanahan	3.161.699.071,00	3.308.263.107,00	(146.564.036,00)	(4,43)
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	7.046.067.647,00	7.097.932.020,00	(51.864.373,00)	(0,73)
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.043.876.492,00	9.226.171.523,00	(182.295.031,00)	(1,98)
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.398.802.618,00	3.900.620.264,00	(501.817.646,00)	(12,87)
16	Dinas Perhubungan	13.569.193.303,00	12.646.475.747,56	922.717.555,44	7,30
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	3.853.154.710,00	4.290.417.280,00	(437.262.570,00)	(10,19)
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah	3.930.855.066,00	4.285.430.527,00	(354.575.461,00)	(8,27)
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.761.941.228,00	10.815.108.480,00	(53.167.252,00)	(0,49)
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4.124.537.915,00	4.368.265.906,00	(243.727.991,00)	(5,58)
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.891.537.322,00	4.693.441.630,00	2.198.095.692,00	46,83
22	Badan Perpustakaan dan Kearsipan	4.649.600.348,00	6.254.684.047,00	(1.605.083.699,00)	(25,66)
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	9.867.444.771,00	9.643.409.365,00	224.035.406,00	2,32
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	6.533.146.486,00	7.677.574.308,00	(1.144.427.822,00)	(14,91)
25	Sekretariat Daerah	21.711.274.614,00	21.119.469.184,00	591.805.430,00	2,80
26	Sekretariat DPRD	42.193.168.152,00	40.306.878.510,00	1.886.289.642,00	4,68
27	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	6.068.669.461,00	6.783.756.669,00	(715.087.208,00)	(10,54)
28	Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.978.073.930,00	13.673.484.635,00	(3.695.410.705,00)	(27,03)
29	Badan Pendapatan Daerah	43.923.020.871,00	38.228.237.654,00	5.694.783.217,00	14,90
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.496.951.344,00	7.773.998.472,00	(277.047.128,00)	(3,56)
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	4.453.919.031,00	4.626.502.451,00	(172.583.420,00)	(3,73)
32	Inspektorat Kota	12.368.904.931,00	13.433.145.888,00	(1.064.240.957,00)	(7,92)
33	Kecamatan Bukit Raya	6.546.229.988,00	6.905.789.776,00	(359.559.788,00)	(5,21)
34	Kecamatan Tenayan Raya	7.774.921.694,00	7.941.314.705,00	(166.393.011,00)	(2,10)
35	Kecamatan Sail	4.433.267.269,00	4.683.024.907,00	(249.757.638,00)	(5,33)
36	Kecamatan Limapuluh	4.501.571.471,00	4.715.086.643,00	(213.515.172,00)	(4,53)
37	Kecamatan Pekanbaru Kota	5.031.607.344,00	5.681.252.229,00	(649.644.885,00)	(11,43)
38	Kecamatan Sukajadi	6.906.851.404,00	7.577.841.705,00	(670.990.301,00)	(8,85)
39	Kecamatan Payung Sekaki	6.057.100.785,00	6.457.269.509,00	(400.168.724,00)	(6,20)



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

No	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
40	Kecamatan Senapelan	5.234.681.035,00	5.925.914.127,00	(691.233.092,00)	(11,66)
41	Kecamatan Marpoyan Damai	7.751.468.891,00	8.071.073.161,00	(319.604.270,00)	(3,96)
42	Kecamatan Bina Widya	6.916.767.469,00	7.016.775.759,00	(100.008.290,00)	(1,43)
43	Kecamatan Tuah Madani	6.177.911.570,00	6.433.988.494,00	(256.076.924,00)	(3,98)
44	Kecamatan Rumbai	5.483.043.701,00	5.711.184.017,00	(228.140.316,00)	(3,99)
45	Kecamatan Rumbai Timur	4.273.872.408,00	4.174.499.388,00	99.373.020,00	2,38
46	Kecamatan Rumbai Barat	4.948.920.289,00	5.067.971.493,00	(119.051.204,00)	(2,35)
47	Kecamatan Kulim	5.663.059.506,00	5.818.000.132,00	(154.940.626,00)	(2,66)
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.480.721.394,00	4.652.961.353,00	(172.239.959,00)	(3,70)
<b>Jumlah</b>		<b>917.538.676.637,00</b>	<b>907.308.230.997,56</b>	<b>10.230.445.639,44</b>	<b>1,13</b>

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru

Beban Pegawai-LO disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada Tahun 2023 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi Tahun 2023.

Terdapat perbedaan antara Beban Pegawai pada Laporan Operasional dan Belanja Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran, sebagai berikut:

Tabel 5.4.24. Perbandingan Beban Pegawai - LO dan Beban Pegawai - LRA

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	LO	LRA	SELISIH
1	Beban Gaji dan Tunjangan	481.897.950.510,00	481.897.950.510,00	-
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	213.714.374.501,00	213.714.374.501,00	-
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	181.581.346.327,00	181.798.843.527,00	(217.497.200,00)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	34.275.789.008,00	34.275.789.008,00	-
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	671.475.141,00	671.475.141,00	-
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.389.120.000,00	1.389.120.000,00	-
7	Beban Pegawai BLUD	4.008.621.150,00	4.008.621.150,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>917.538.676.637,00</b>	<b>917.756.173.837,00</b>	<b>(217.497.200,00)</b>

Sumber: Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Perbedaan tersebut dapat jelaskan sebagai berikut:

1. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar Rp217.497.200,00 sebagai berikut:



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

**Tabel 5.4.25. Perbandingan Belanja Tambahan Penghasilan PNS - LO dan Belanja Tambahan Penghasilan PNS – LRA**

*(dalam rupiah)*

NO	URAIAN	LO	LRA	SELISIH
1	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	28.693.267.920,00	28.693.267.920,00	-
2	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	157.174.525,00	157.174.525,00	-
3	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	131.113.733.967,00	131.113.733.967,00	-
4	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	15.803.964.032,00	15.803.964.032,00	-
5	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	-	217.497.200,00	(217.497.200,00)
6	Beban Honorarium	2.732.100.000,00	2.732.100.000,00	-
7	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	1.214.850.000,00	1.214.850.000,00	-
8	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	1.866.255.883,00	1.866.255.883,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>181.581.346.327,00</b>	<b>181.798.843.527,00</b>	<b>(217.497.200,00)</b>

Sumber: Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Perbedaan jumlah realisasi pada Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran sebagai berikut:

**Tabel 5.4.26. Rincian Perbandingan Belanja Tambahan Penghasilan PNS - LO dan Belanja Tambahan Penghasilan PNS - LRA**

*(dalam rupiah)*

Uraian		Jumlah
Belanja Tahun 2023 (LRA)		217.497.200,00
Penambahan:		-
Pengurangan:		217.497.200,00
Dinas Kesehatan	Pelunasan Utang Tahun 2022	217.497.200,00
Beban Tahun 2023 (LO)		-

Sumber: Laporan Kewajiban Kota Pekanbaru

**5.4.2.1.2. Beban Persediaan**

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
<b>421.017.436.556,91</b>	<b>306.208.022.390,70</b>

Beban Persediaan meliputi beban bahan pakai habis, beban persediaan bahan/material, dan beban cetak dan penggandaan. Beban persediaan disajikan dengan basis akrual, yaitu beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Dengan penggunaan metode fisik maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan harga pembelian terakhir.

**Tabel 5.4.27. Rincian Beban Persediaan**

*(dalam rupiah)*

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Bahan Pakai Habis	420.936.338.905,91	306.086.115.890,70	114.850.223.015,21	37,52
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	81.097.651,00	121.906.500,00	(40.808.849,00)	-33,48
<b>Jumlah</b>		<b>421.017.436.556,91</b>	<b>306.208.022.390,70</b>	<b>114.809.414.166,21</b>	<b>37,49</b>

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Beban Persediaan Tahun 2023 sebesar Rp421.017.436.556,91. Rincian keseluruhan Beban Persediaan dapat dilihat pada tabel 5.4.28 di bawah ini:

Tabel 5.4.28. Rincian Beban Persediaan

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Dinas Pendidikan	25.543.170.177,34	17.869.318.714,00	7.673.851.463,34	42,94
2	Dinas Kesehatan	39.023.148.634,72	47.029.513.051,00	(8.006.364.416,28)	-17,02
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	121.238.376.157,85	37.066.014.872,70	84.172.361.285,15	227,09
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	29.687.583.302,00	21.136.336.785,00	8.551.246.517,00	40,46
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1.018.629.450,00	2.443.458.220,00	(1.424.828.770,00)	-58,31
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.052.562.448,00	2.379.621.018,00	672.941.430,00	28,28
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.636.618.925,00	3.600.540.037,00	36.078.888,00	1,00
8	Dinas Sosial	3.184.238.014,00	1.968.261.672,00	1.215.976.342,00	61,78
9	Dinas Tenaga Kerja	539.580.640,00	1.589.383.705,00	(1.049.803.065,00)	-66,05
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.183.762.747,00	2.135.076.267,00	1.048.686.480,00	49,12
11	Dinas Ketahanan Pangan	1.428.149.280,00	2.881.017.674,00	(1.452.868.394,00)	-50,43
12	Dinas Pertanahan	1.453.895.830,00	1.852.038.230,00	(398.142.400,00)	-21,50
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	12.557.084.863,00	29.675.465.028,00	(17.118.380.165,00)	-57,69
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.289.845.990,00	2.074.510.537,00	215.335.453,00	10,38
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.638.032.106,00	2.561.650.800,00	76.381.306,00	2,98
16	Dinas Perhubungan	20.334.183.389,00	16.123.079.140,00	4.211.104.249,00	26,12
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.250.727.915,00	975.748.937,00	274.978.978,00	28,18
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah	2.598.365.476,00	924.863.124,00	1.673.502.352,00	180,95
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.015.454.890,00	3.649.051.372,00	(1.633.596.482,00)	-44,77
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3.560.707.026,00	4.902.485.159,00	(1.341.778.133,00)	-27,37
21	Badan Perpustakaan dan Kearsipan	1.694.391.480,00	1.069.936.980,00	624.454.500,00	58,36
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	873.037.187,00	674.114.435,00	198.922.752,00	29,51
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	2.054.695.097,00	750.279.774,00	1.304.415.323,00	173,86
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.918.800.701,00	949.631.517,00	969.169.184,00	102,06
25	Sekretariat Daerah	46.256.045.580,00	33.233.007.862,00	13.023.037.718,00	39,19
26	Sekretariat DPRD	45.643.020.804,00	31.588.424.000,00	14.054.596.804,00	44,49
27	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	2.023.152.620,00	1.402.965.879,00	620.186.741,00	44,21
28	Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.667.079.073,00	6.023.344.775,00	643.734.298,00	10,69
29	Badan Pendapatan Daerah	7.173.858.156,00	7.239.254.245,00	(65.396.089,00)	-0,90
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.500.683.202,00	1.304.134.163,00	196.549.039,00	15,07
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	997.171.764,00	743.070.010,00	254.101.754,00	34,20
32	Inspektorat Kota	654.055.917,00	416.271.412,00	237.784.505,00	57,12
33	Kecamatan Bukit Raya	1.172.798.331,00	1.010.162.459,00	162.635.872,00	16,10
34	Kecamatan Tenayan Raya	1.618.109.006,00	1.563.384.821,00	54.724.185,00	3,50
35	Kecamatan Sail	1.009.815.270,00	670.342.702,00	339.472.568,00	50,64
36	Kecamatan Limapuluh	1.495.513.650,00	808.551.750,00	686.961.900,00	84,96
37	Kecamatan Pekanbaru Kota	2.073.728.050,00	870.059.746,00	1.203.668.304,00	138,34
38	Kecamatan Sukajadi	1.517.546.914,00	919.008.252,00	598.538.662,00	65,13
39	Kecamatan Payung Sekaki	1.372.652.068,00	1.009.959.488,00	362.692.580,00	35,91
40	Kecamatan Senapelan	1.123.868.879,00	1.047.073.561,00	76.795.318,00	7,33
41	Kecamatan Marpoyan Damai	1.353.162.600,00	1.168.413.515,00	184.749.085,00	15,81
42	Kecamatan Binawidya	1.745.520.170,00	1.525.193.602,00	220.326.568,00	14,45
43	Kecamatan Tuah Madani	1.386.226.523,00	992.172.466,00	394.054.057,00	39,72



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

No	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
43	Kecamatan Tuah Madani	1.386.226.523,00	992.172.466,00	394.054.057,00	39,72
44	Kecamatan Rumbai	1.565.612.470,00	1.295.160.558,00	270.451.912,00	20,88
45	Kecamatan Rumbai Timur	1.267.472.961,00	1.207.955.194,00	59.517.767,00	4,93
46	Kecamatan Rumbai Barat	1.502.945.939,00	1.873.907.791,00	(370.961.852,00)	-19,80
47	Kecamatan Kulim	1.252.765.991,00	1.147.226.925,00	105.539.066,00	9,20
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.869.588.893,00	867.580.166,00	1.002.008.727,00	115,49
<b>Jumlah</b>		<b>421.017.436.556,91</b>	<b>306.208.022.390,70</b>	<b>114.809.414.166,21</b>	<b>37,49</b>

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru

Terdapat perbedaan antara Belanja Persediaan pada LRA dan Beban Persediaan pada LO sebagai berikut:

**Tabel 5.4.29. Perbandingan Beban Persediaan dan Belanja Persediaan**

*(dalam rupiah)*

NO	URAIAN	LO	LRA	SELISIH
1	Bahan Pakai Habis	420.936.338.905,91	414.912.312.856,00	6.024.026.049,91
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	81.097.651,00	66.625.651,00	14.472.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>421.017.436.556,91</b>	<b>414.978.938.507,00</b>	<b>6.038.498.049,91</b>

Sumber: Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Hubungan antara Belanja Persediaan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Beban Persediaan pada Laporan Operasional dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 5.4.30. Rincian Perbandingan Beban Persediaan dan Belanja Persediaan**

*(dalam rupiah)*

Uraian		Persediaan Bahan Pakai Habis	Persediaan Bahan Tak Habis Pakai	Jumlah
Pembelian Tahun 2023 (LRA)		414.912.312.856,00	66.625.651,00	414.978.938.507,00
Pembelian (BLUD)	+	8.737.169.240,43	-	8.737.169.240,43
Belanja Modal menjadi Persediaan	+	28.571.546.014,34	-	28.571.546.014,34
Barang Hibah yang belum ada BAST	+	20.899.558.154,01	-	20.899.558.154,01
Reklas/ Koreksi	+	38.685.345.736,00	-	38.685.345.736,00
Utang Belanja Persediaan Tahun 2023	+	-	-	-
Saldo Awal Persediaan Tahun 2023	+	135.563.603.786,13	19.800.000,00	135.583.403.786,13
		<b>647.369.535.786,91</b>	<b>86.425.651,00</b>	<b>647.455.961.437,91</b>
Utang Belanja Persediaan Tahun 2022	-	1.659.781.744,00	-	1.659.781.744,00
Barang Jasa menjadi Aset	-	852.229.330,00	-	852.229.330,00
Reklas/ Koreksi	-	46.600.396.431,00	5.328.000,00	46.605.724.431,00
Persediaan yg diserahkan ke masyarakat	-	-	-	-
Beban Persediaan LO - BLUD	-	11.646.739.269,43	-	11.646.739.269,43
Saldo Akhir Persediaan 2023	-	165.674.050.106,57	-	165.674.050.106,57
Beban Persediaan - LO		<b>420.936.338.905,91</b>	<b>81.097.651,00</b>	<b>421.017.436.556,91</b>

Sumber: Kertas Kerja Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional Kota Pekanbaru

**5.4.2.1.3. Beban Jasa**

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
<b>591.098.237.414,26</b>	<b>483.085.838.896,00</b>

Beban jasa meliputi beban jasa kantor, beban iuran jaminan/ asuransi, beban sewa tanah, beban sewa peralatan dan mesin, beban sewa gedung dan bangunan, beban sewa jalan, jaringan dan irigasi, beban sewa aset tetap lainnya, beban jasa konsultasi konstruksi, beban jasa konsultasi non konstruksi, beban jasa ketersediaan layanan (*Availability*)



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Payment), beban beasiswa Pendidikan PNS, beban kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan, beban jasa insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan beban jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi. Rincian beban jasa Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.4.31 Rincian Beban Jasa

(dalam rupiah)

No	Uraian	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Beban Jasa Kantor	487.323.156.774,26	414.444.637.332,00	72.878.519.442,26	17,58
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	46.079.918.307,00	26.999.899.701,00	19.080.018.606,00	70,67
3	Beban Sewa Tanah	69.409.000,00	331.430.200,00	(262.021.200,00)	(79,06)
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	20.845.587.962,00	13.740.237.945,00	7.105.350.017,00	51,71
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	10.642.395.473,00	6.782.192.184,00	3.860.203.289,00	56,92
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	298.181.400,00	267.320.000,00	30.861.400,00	11,54
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	10.264.614.349,00	7.128.593.863,00	3.136.020.486,00	43,99
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	5.771.427.640,00	7.246.018.405,00	(1.474.590.765,00)	(20,35)
9	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.941.090.768,00	3.315.929.548,00	625.161.220,00	18,85
10	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	5.862.455.741,00	2.829.579.718,00	3.032.876.023,00	107,18
<b>Jumlah</b>		<b>591.098.237.414,26</b>	<b>483.085.838.896,00</b>	<b>108.012.398.518,26</b>	<b>22,36</b>

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru

Rincian keseluruhan Beban Jasa dapat dilihat pada tabel 5.4.32.

Tabel 5.4.32. Rincian Beban Jasa Per SKPD

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TAHUN 2023
1	Dinas Pendidikan	37.441.986.777,00
2	Dinas Kesehatan	75.920.863.523,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	32.503.305.194,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.730.686.711,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	12.770.679.720,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.515.368.389,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	10.834.815.286,00
8	Dinas Sosial	6.036.842.339,00
9	Dinas Tenaga Kerja	1.123.778.329,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.213.959.749,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	1.856.377.128,00
12	Dinas Pertanahan	1.218.796.771,00
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	39.057.457.480,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.548.417.971,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.997.326.941,00
16	Dinas Perhubungan	82.736.772.223,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	13.440.766.639,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.178.126.598,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.445.017.447,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	7.625.793.035,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.447.683.313,00
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.771.729.657,00



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

No	URAIAN	TAHUN 2023
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	2.302.508.779,00
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	5.038.847.434,00
25	Sekretariat Daerah	53.424.467.922,26
26	Sekretariat DPRD	60.665.368.112,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.994.196.780,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	7.941.753.559,00
29	Badan Pendapatan Daerah	21.468.747.804,00
30	Badan Kepegaw aian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.410.605.899,00
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	995.867.556,00
32	Inspektorat	1.697.174.784,00
33	Kecamatan Bukitraya	5.001.314.500,00
34	Kecamatan Tenayan Raya	5.732.021.723,00
35	Kecamatan Sail	1.978.941.570,00
36	Kecamatan Lima Puluh	2.670.354.168,00
37	Kecamatan Pekanbaru Kota	3.224.804.835,00
38	Kecamatan Sukajadi	3.711.885.506,00
39	Kecamatan Payung Sekaki	3.802.559.640,00
40	Kecamatan Senapelan	3.260.128.075,00
41	Kecamatan Marpoyan Damai	5.316.150.762,00
42	Kecamatan Binaw idya	4.646.854.482,00
43	Kecamatan Tuah Madani	6.148.611.751,00
44	Kecamatan Rumbai.	5.328.809.625,00
45	Kecamatan Rumbai Timur	3.256.292.692,00
46	Kecamatan Rumbai Barat	3.476.136.252,00
47	Kecamatan Kulim	3.892.234.579,00
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.295.047.405,00
<b>Jumlah</b>		<b>591.098.237.414,26</b>

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru

Terdapat perbedaan antara beban jasa pada Laporan Operasional dan belanja jasa pada Laporan Realisasi Anggaran, sebagai berikut:

**Tabel 5.4.33. Perbandingan Beban Jasa dan Belanja Jasa**

(dalam rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	SELISIH
1	Beban Jasa Kantor	487.323.156.774,26	495.117.116.551,26	(7.793.959.777,00)
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	46.079.918.307,00	46.079.918.307,00	-
3	Beban Sew a Tanah	69.409.000,00	69.409.000,00	-
4	Beban Sew a Peralatan dan Mesin	20.845.587.962,00	20.917.507.712,00	(71.919.750,00)
5	Beban Sew a Gedung dan Bangunan	10.642.395.473,00	10.701.595.473,00	(59.200.000,00)
6	Beban Sew a Aset Tetap Lainnya	298.181.400,00	298.181.400,00	-
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	10.264.614.349,00	14.800.661.501,00	(4.536.047.152,00)
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	5.771.427.640,00	5.970.017.640,00	(198.590.000,00)
9	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.941.090.768,00	3.941.090.768,00	-
10	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	5.862.455.741,00	5.862.455.741,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>591.098.237.414,26</b>	<b>603.757.954.093,26</b>	<b>(12.659.716.679,00)</b>

Sumber: Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Perbedaan tersebut dapat jelaskan sebagai berikut:

1. Beban Jasa Kantor terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar Rp8.091.140.896,00 karena:  
Pengurangan:
  - Pembayaran utang Tahun 2022 di 2023 sebesar Rp7.911.692.019,00; dan
  - Kapitalisasi Aset Tahun 2023 sebesar Rp30.000.000,00.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

2. Beban Sewa Peralatan dan Mesin terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar Rp71.919.750,00 karena:  
Pengurangan:
  - Pembayaran utang Tahun 2021 dan 2022 di 2023 sebesar Rp71.919.750,00.
3. Beban Sewa Gedung dan Bangunan terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar Rp59.200.000,00 karena:  
Pengurangan:
  - Pembayaran utang Tahun 2021 di 2023 sebesar Rp59.200.000,00.
4. Beban Jasa Konsultansi Konstruksi terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar Rp4.536.047.152,00 karena:  
Pengurangan:
  - Kapitalisasi Aset Tahun 2022 sebesar Rp3.003.617.652,00;
  - Pembayaran utang Tahun 2021 dan 2022 di 2023 sebesar Rp1.532.429.500,00.
5. Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar Rp198.590.000,00 karena:  
Pengurangan:
  - Kapitalisasi Aset Tahun 2023 sebesar Rp198.590.000,00.

### 5.4.2.1.4. Beban Pemeliharaan

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
78.045.580.864,07	55.418.448.667,66

Beban Pemeliharaan meliputi beban pemeliharaan tanah, beban pemeliharaan peralatan dan mesin, beban pemeliharaan gedung dan bangunan, beban pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi, beban pemeliharaan aset tetap lainnya. Rincian beban pemeliharaan Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.4.34. Rincian Beban Pemeliharaan per Jenis

(dalam rupiah)

No	Uraian	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Beban Pemeliharaan Tanah	29.261.000,00	14.652.000,00	14.609.000,00	99,71
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.493.430.116,00	19.029.444.783,00	3.463.985.333,00	18,20
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29.597.283.878,07	36.270.609.884,66	(6.673.326.006,59)	(18,40)
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.925.605.870,00	103.742.000,00	25.821.863.870,00	24890,46
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	---
<b>Jumlah</b>		<b>78.045.580.864,07</b>	<b>55.418.448.667,66</b>	<b>22.627.132.196,41</b>	<b>40,83</b>

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Rincian keseluruhan Beban Pemeliharaan dapat dilihat pada tabel 5.4.35.

**Tabel 5.4.35. Rincian Beban Pemeliharaan Per SKPD**

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TAHUN 2023
1	Dinas Pendidikan	13.794.848.627,42
2	Dinas Kesehatan	3.037.135.589,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	28.316.025.467,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	453.578.979,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	89.909.600,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	498.597.000,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	453.742.000,00
8	Dinas Sosial	129.773.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja	77.130.097,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	42.073.912,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	94.667.200,00
12	Dinas Pertanahan	84.979.500,00
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.227.857.720,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	124.024.004,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	56.588.500,00
16	Dinas Perhubungan	2.153.718.990,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	52.821.193,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	50.100.200,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	882.975.750,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	109.776.000,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	379.414.500,00
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	41.363.360,00
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	35.363.400,00
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	211.282.471,00
25	Sekretariat Daerah	14.207.951.248,65
26	Sekretariat DPRD	4.526.168.210,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	134.811.965,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	856.844.138,00
29	Badan Pendapatan Daerah	1.637.273.600,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	125.403.000,00
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	53.045.170,00
32	Inspektorat	101.282.662,00
33	Kecamatan Bukitraya	366.313.000,00
34	Kecamatan Tenayan Raya	419.998.400,00
35	Kecamatan Sail	25.661.000,00
36	Kecamatan Lima Puluh	13.500.000,00
37	Kecamatan Pekanbaru Kota	22.815.000,00
38	Kecamatan Sukajadi	462.189.000,00
39	Kecamatan Payung Sekaki	440.057.000,00
40	Kecamatan Senapelan	310.039.000,00
41	Kecamatan Marpoyan Damai	795.773.000,00
42	Kecamatan Binawidya	482.804.000,00
43	Kecamatan Tuah Madani	35.395.212,00
44	Kecamatan Rumbai	201.802.800,00
45	Kecamatan Rumbai Timur	217.964.400,00
46	Kecamatan Rumbai Barat	136.608.599,00
47	Kecamatan Kulim	28.957.200,00
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	45.176.200,00
<b>Jumlah</b>		<b>78.045.580.864,07</b>

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

Terdapat perbedaan antara Beban Pemeliharaan pada Laporan Operasional dan pada Laporan Realisasi Anggaran, sebagai berikut:

**Tabel 5.4.36. Perbandingan Beban Pemeliharaan dan Belanja Pemeliharaan**

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	LO	LRA	SELISIH
1	Beban Pemeliharaan Tanah	29.261.000,00	29.261.000,00	-
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.493.430.116,00	22.493.430.116,00	-
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29.597.283.878,07	52.156.489.814,07	(22.559.205.936,00)
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.925.605.870,00	25.925.605.870,00	-
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>78.045.580.864,07</b>	<b>100.604.786.800,07</b>	<b>(22.559.205.936,00)</b>

Sumber: Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Perbedaan tersebut dapat jelaskan sebagai berikut:

1. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar minus Rp22.559.205.936,00 karena:

Pengurangan:

- Kapitalisasi Aset Tahun 2023 sebesar Rp22.143.421.036,00;
- Pembayaran utang Tahun 2021 dan 2022 di 2023 sebesar Rp415.784.900,00.

**5.4.2.1.5. Beban Perjalanan Dinas**

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
<b>58.584.694.087,00</b>	<b>56.772.414.722,00</b>

Beban Perjalanan Dinas meliputi beban perjalanan dinas dalam daerah dan beban perjalanan dinas luar negeri. Rincian keseluruhan Beban Perjalanan Dinas dapat dilihat pada tabel 5.4.37.

**Tabel 5.4.37. Rincian Beban Perjalanan Dinas Per SKPD**

*(dalam rupiah)*

No	URAIAN	TAHUN 2023
1	Dinas Pendidikan	223.525.362,00
2	Dinas Kesehatan	5.304.755.019,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	941.778.570,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	336.234.818,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	281.498.529,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	272.862.997,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	153.738.610,00
8	Dinas Sosial	140.726.339,00
9	Dinas Tenaga Kerja	178.735.396,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.030.225.404,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	280.555.353,00
12	Dinas Pertanahan	148.197.518,00
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	27.807.553,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	196.726.885,00



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

No	URAIAN	TAHUN 2023
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	66.115.251,00
16	Dinas Perhubungan	244.117.815,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	377.548.761,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	672.513.286,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	409.341.710,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	541.475.787,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	289.854.719,00
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	144.278.557,00
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	421.751.659,00
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	589.463.784,00
25	Sekretariat Daerah	6.557.762.861,00
26	Sekretariat DPRD	33.658.298.549,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	318.550.767,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	844.768.483,00
29	Badan Pendapatan Daerah	780.639.541,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	532.228.850,00
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	531.932.642,00
32	Inspektorat	288.835.867,00
33	Kecamatan Bukitraya	77.971.488,00
34	Kecamatan Tenayan Raya	5.138.900,00
35	Kecamatan Sail	54.648.792,00
36	Kecamatan Lima Puluh	74.083.735,00
37	Kecamatan Pekanbaru Kota	67.963.476,00
38	Kecamatan Sukajadi	100.212.944,00
39	Kecamatan Payung Sekaki	19.521.429,00
40	Kecamatan Senapelan	27.421.205,00
41	Kecamatan Marpoyan Damai	110.992.235,00
42	Kecamatan Binawidya	93.098.057,00
43	Kecamatan Tuah Madani	84.264.000,00
44	Kecamatan Rumbai	77.923.730,00
45	Kecamatan Rumbai Timur	10.017.000,00
46	Kecamatan Rumbai Barat	122.678.242,00
47	Kecamatan Kulim	20.449.520,00
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	851.462.092,00
<b>Jumlah</b>		<b>58.584.694.087,00</b>

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru

Terdapat perbedaan antara Beban Perjalanan Dinas pada Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran, sebagai berikut:

**Tabel 5.4.38. Perbandingan Beban Perjalanan Dinas dan Belanja Perjalanan Dinas**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	LO	LRA	SELISIH
1	Belanja/ Beban Perjalanan Dinas	58.584.694.087,00	58.620.384.287,00	(35.690.200,00)
<b>Jumlah</b>		<b>58.584.694.087,00</b>	<b>58.620.384.287,00</b>	<b>(35.690.200,00)</b>

Sumber: Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

Beban perjalanan dinas terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar Rp35.690.200,00 karena:  
Pengurangan:  
- Pembayaran utang Tahun 2021 di 2023 sebesar Rp35.690.200,00.

**5.4.2.1.6. Beban Subsidi**

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
149.490.000,00	6.094.846.356,00

Realisasi Beban Subsidi pada tahun 2023 adalah Rp149.490.000,00, diberikan kepada BUMD PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru. dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp6.094.846.356,00 terdapat penurunan sebesar Rp5.945.356.356,00 atau minus 97,55%, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.4.39. Rincian Beban/Belanja Subsidi**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Subsidi kepada BUMN..	-	-	-	---
2	Beban Subsidi kepada BUMD..	149.490.000,00	6.094.846.356,00	(5.945.356.356,00)	-97,55
3	Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Sw asta..	-	-	-	---
4	Beban Subsidi kepada Koperasi..	-	-	-	---
<b>Jumlah</b>		<b>149.490.000,00</b>	<b>6.094.846.356,00</b>	<b>(5.945.356.356,00)</b>	<b>-97,55</b>

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru

Terdapat perbedaan antara Beban Subsidi pada Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran, sebagai berikut:

**Tabel 5.4.40. Perbandingan Beban Subsidi dan Belanja Subsidi**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	LO	LRA	SELISIH
1	Belanja/Beban Subsidi	149.490.000,00	1.115.804.147,00	(966.314.147,00)
<b>Jumlah</b>		<b>149.490.000,00</b>	<b>1.115.804.147,00</b>	<b>(966.314.147,00)</b>

Sumber: Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Perbedaan antara Beban Subsidi pada Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran yang telah dijabarkan pada tabel di atas, disebabkan adanya pembayaran Utang Belanja Subsidi Tahun 2021 ke Perusahaan Daerah/BUMD (PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru) oleh Dinas Perhubungan sebesar Rp966.314.147,00.

**5.4.2.1.7. Beban Hibah**

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
224.513.682.826,55	197.556.196.440,00

Beban Hibah adalah beban yang terjadi pada Tahun 2023 dengan terealisasi sebesar Rp224.513.682.826,55 mengalami kenaikan sebesar Rp 26.957.486.386,55 atau 13,65% dibandingkan dengan Tahun 2022 Rp197.556.196.440,00. Beban Hibah tahun 2023 terdiri dari:



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

**Tabel 5.4.41. Rincian Beban/Belanja Hibah**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	112.173.194.046,55	123.663.774.384,00	(11.490.580.337,45)	-9,29
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	3.990.044.100,00	4.443.058.100,00	(453.014.000,00)	-10,20
3	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	---
4	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	51.678.009.100,00	19.982.435.000,00	31.695.574.100,00	158,62
5	Beban Hibah Dana BOS	52.598.315.580,00	48.263.341.330,00	4.334.974.250,00	8,98
6	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	4.074.120.000,00	1.203.587.626,00	2.870.532.374,00	238,50
7	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	-	-	-	---
<b>Jumlah</b>		<b>224.513.682.826,55</b>	<b>197.556.196.440,00</b>	<b>26.957.486.386,55</b>	<b>13,65</b>

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru

**Tabel 5.4.42. Perbandingan Beban Hibah dan Belanja Hibah**

(dalam rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	112.173.194.046,55	-	112.173.194.046,55
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	3.990.044.100,00	3.990.044.100,00	-
3	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-
4	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	51.678.009.100,00	51.678.009.100,00	-
5	Beban Hibah Dana BOS	52.598.315.580,00	52.598.315.580,00	-
6	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	4.074.120.000,00	4.074.120.000,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>224.513.682.826,55</b>	<b>112.340.488.780,00</b>	<b>112.173.194.046,55</b>

Sumber: Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Terdapat perbedaan antara Beban Hibah pada Laporan Operasional dibandingkan dengan Laporan Realisasi Anggaran, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Beban Uang dan/ atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain masyarakat terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar Rp112.173.194.046,55 karena beda pengelompokan nomenklatur pada LRA dan LO, pada LRA dikelompokkan pada Belanja Barang dan Jasa berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sedangkan pada LO dikelompokkan pada beban hibah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Rincian Beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat per SKPD sebagai berikut:



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

**Tabel 5.4.43. Rincian Beban Uang Dan/Atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Per SKPD**

*(dalam rupiah)*

No	URAIAN	TAHUN 2023
1	Dinas Pendidikan	36.550.000,00
2	Dinas Kesehatan	6.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	44.341.376.524,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.528.000.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	303.350.000,00
6	Dinas Ketahanan Pangan	15.000.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	55.142.952.522,55
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	25.000.000,00
9	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.912.000.000,00
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	56.050.000,00
11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	24.000.000,00
12	Dinas Pertanian dan Perikanan	314.250.000,00
13	Sekretariat Daerah	3.880.500.000,00
14	Badan Pendapatan Daerah	93.015.000,00
15	Kecamatan Bukitraya	91.600.000,00
16	Kecamatan Tenayan Raya	114.000.000,00
17	Kecamatan Sail	46.800.000,00
18	Kecamatan Lima Puluh	90.900.000,00
19	Kecamatan Pekanbaru Kota	111.100.000,00
20	Kecamatan Sukajadi	132.900.000,00
21	Kecamatan Payung Sekaki	98.650.000,00
22	Kecamatan Senapelan	99.700.000,00
23	Kecamatan Marpoyan Damai	97.900.000,00
24	Kecamatan Binawidya	92.100.000,00
25	Kecamatan Tuah Madani	75.800.000,00
26	Kecamatan Rumbai.	131.450.000,00
27	Kecamatan Rumbai Timur	104.650.000,00
28	Kecamatan Rumbai Barat	120.250.000,00
29	Kecamatan Kulim	87.350.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>112.173.194.046,55</b>

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru

**5.4.2.1.8. Beban Bantuan Sosial**

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
0,00	0,00

Realisasi Beban Bantuan Sosial pada Tahun 2023 sebesar Rp0,00 sementara pada Tahun 2022 sebesar Rp0,00, tidak ada peningkatan untuk belanja bantuan sosial tahun 2023.

**5.4.2.1.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi**

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
376.987.697.751,00	376.694.801.613,00

Beban ini merupakan beban penyusutan yang berasal dari penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud Tahun 2023. Dasar perhitungan penyusutan dan



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

amortisasi dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen dan dilakukan perhitungan penyusutan secara bulanan. Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 sebesar Rp376.987.697.751,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 292.896.138,00 atau 0,08% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp376.694.801.613,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.4.44. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	137.288.934.857,00	132.731.585.943,00	4.557.348.914,00	3,43
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	35.700.819.512,00	41.072.557.831,00	(5.371.738.319,00)	-13,08
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Rigi	201.385.313.579,00	199.974.210.748,00	1.411.102.831,00	0,71
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2.612.629.803,00	2.916.447.091,00	(303.817.288,00)	-10,42
<b>Jumlah</b>		<b>376.987.697.751,00</b>	<b>376.694.801.613,00</b>	<b>292.896.138,00</b>	<b>0,08</b>

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru

**Tabel 5.4.45. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per SKPD**

(dalam rupiah)

No	URAIAN	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	27.792.628.396,00	29.977.712.058,00	(2.185.083.662,00)	(7,29)
2	Dinas Kesehatan	29.577.983.049,00	30.041.416.461,00	(463.433.412,00)	(1,54)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	136.163.676.865,00	119.264.838.949,00	16.898.837.916,00	14,17
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	109.607.287.087,00	104.283.894.721,00	5.323.392.366,00	5,10
5	Satuan Polisi Pamong Praja	313.719.949,00	121.684.399,00	192.035.550,00	157,81
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	850.932.470,00	922.319.850,00	(71.387.380,00)	(7,74)
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.447.789.910,00	2.458.853.684,00	(11.063.774,00)	(0,45)
8	Dinas Sosial	143.776.641,00	249.343.745,00	(105.567.104,00)	(42,34)
9	Dinas Tenaga Kerja	105.115.423,00	132.398.786,00	(27.283.363,00)	(20,61)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	482.612.509,00	247.247.746,00	235.364.763,00	95,19
11	Dinas Ketahanan Pangan	717.839.467,00	468.421.845,00	249.417.622,00	53,25
12	Dinas Pertanahan	473.153.378,00	694.955.227,00	(221.801.849,00)	(31,92)
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	7.420.640.610,00	7.736.044.587,00	(315.403.977,00)	(4,08)
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	559.448.081,00	470.013.237,00	89.434.844,00	19,03
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	767.271.619,00	602.464.454,00	164.807.165,00	27,36
16	Dinas Perhubungan	9.319.624.005,00	15.404.358.881,00	(6.084.734.876,00)	(39,50)
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	647.051.897,00	1.829.373.598,00	(1.182.321.701,00)	(64,63)
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	241.269.083,00	110.966.024,00	130.303.059,00	117,43
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.920.535.707,00	7.338.132.473,00	(1.417.596.766,00)	(19,32)
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	936.496.135,00	729.929.560,00	206.566.575,00	28,30
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	761.142.219,00	726.501.370,00	34.640.849,00	4,77
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	543.479.772,00	498.716.307,00	44.763.465,00	8,98
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	469.723.748,00	547.286.668,00	(77.562.920,00)	(14,17)
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.906.104.886,00	2.134.480.864,00	(228.375.978,00)	(10,70)
25	Sekretariat Daerah	25.640.256.428,00	35.891.100.004,00	(10.250.843.576,00)	(28,56)
26	Sekretariat DPRD	2.892.675.567,00	3.540.762.607,00	(648.087.040,00)	(18,30)
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	384.544.802,00	486.491.963,00	(101.947.161,00)	(20,96)
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	1.902.757.190,00	1.788.830.603,00	113.926.587,00	6,37



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

No	URAIAN	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
29	Badan Pendapatan Daerah	1.592.443.834,00	1.921.719.442,00	(329.275.608,00)	(17,13)
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	888.480.484,00	778.174.626,00	110.305.858,00	14,17
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	376.477.500,00	255.424.435,00	121.053.065,00	47,39
32	Inspektorat	269.847.277,00	187.398.833,00	82.448.444,00	44,00
33	Kecamatan Bukitraya	313.837.798,00	305.938.091,00	7.899.707,00	2,58
34	Kecamatan Tenayan Raya	373.135.266,00	428.361.537,00	(55.226.271,00)	(12,89)
35	Kecamatan Sail	219.153.685,00	237.582.609,00	(18.428.924,00)	(7,76)
36	Kecamatan Lima Puluh	163.082.146,00	105.004.988,00	58.077.158,00	55,31
37	Kecamatan Pekanbaru Kota	218.650.474,00	234.014.282,00	(15.363.808,00)	(6,57)
38	Kecamatan Sukajadi	225.105.940,00	217.429.859,00	7.676.081,00	3,53
39	Kecamatan Payung Sekaki	309.387.671,00	369.853.142,00	(60.465.471,00)	(16,35)
40	Kecamatan Senapelan	157.251.247,00	171.284.294,00	(14.033.047,00)	(8,19)
41	Kecamatan Marpoyan Damai	307.134.715,00	266.147.412,00	40.987.303,00	15,40
42	Kecamatan Binawidya	671.323.257,00	646.389.108,00	24.934.149,00	3,86
43	Kecamatan Tuah Madani	328.115.558,00	360.471.011,00	(32.355.453,00)	(8,98)
44	Kecamatan Rumbai	343.259.175,00	312.185.293,00	31.073.882,00	9,95
45	Kecamatan Rumbai Timur	309.056.029,00	213.726.994,00	95.329.035,00	44,60
46	Kecamatan Rumbai Barat	293.169.918,00	385.643.836,00	(92.473.918,00)	(23,98)
47	Kecamatan Kulim	400.390.653,00	377.730.364,00	22.660.289,00	6,00
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	238.858.231,00	221.780.786,00	17.077.445,00	7,70
	<b>Jumlah</b>	<b>376.987.697.751,00</b>	<b>376.694.801.613,00</b>	<b>292.896.138,00</b>	<b>0,08</b>

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru

### 5.4.2.1.10. Beban Penyisihan Piutang

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
<b>22.538.087.227,68</b>	<b>38.029.804.863,00</b>

Beban Penyisihan Piutang adalah beban penyisihan piutang periode Tahun 2023 sebesar Rp22.538.087.227,68 mengalami penurunan sebesar Rp15.491.717.635,32 atau 40,74%. dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp38.029.804.863,00.

Tabel 5.4.46. Rincian Beban Penyisihan Piutang

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	21.614.197.214,48
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	31.748.367,63
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	2.508.287,14
4	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-
5	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	-
6	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	889.633.358,43
	<b>Jumlah</b>	<b>22.538.087.227,68</b>

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

Rincian Beban penyesuaian piutang per SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.4.47. Rincian Beban penyesuaian piutang Per SKPD**

*(dalam rupiah)*

No	SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Kesehatan	-	-	-	---
2	Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	10.672.693,77	547.886,00	10.124.807,77	1.847,98
3	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	23.583.961,00	80.644.139,00	(57.060.178,00)	-70,76
4	Sekretariat DPRD	889.633.358,43	61.627.772,00	828.005.586,43	1.343,56
4	PPKD	-	-	-	---
5	Badan Pendapatan Daerah	21.614.197.214,48	37.872.282.755,00	(16.258.085.540,52)	-42,93
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	14.702.311,00	(14.702.311,00)	-100,00
<b>Jumlah</b>		<b>22.538.087.227,68</b>	<b>38.029.804.863,00</b>	<b>(15.491.717.635,32)</b>	<b>-40,74</b>

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru

**5.4.2.1.11. Beban Tidak Terduga**

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
<b>761.126.257,00</b>	<b>964.331.717,00</b>

Beban Tidak Terduga pada LO digunakan untuk pembayaran kegiatan tertentu. Penggunaan BTT tersebut untuk Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) oleh Perangkat Daerah, belanja tersebut mempengaruhi Laporan Operasional dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.4.48. Perincian Belanja Dana Beban Tidak Terduga**

*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Pembayaran	Pengembalian	Saldo
1	Belanja Tidak Terduga Untuk 20.126.257,00 - 20.126.257,00 Pengembalian Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau TA 2022 yang Dialokasikan Pada Tahun Anggaran 2023 sesuai SK Walikota Nomor 22 Tahun 2023 Pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak TA. 2023	20.126.257,00	-	20.126.257,00
2	Santunan Kematian Tahap 1 Tahun 2023	500.000.000,00	-	500.000.000,00
3	Pembayaran Belanja Tidak 2.000.000,00 - 522.126.257,00 Terduga Untuk Pengembalian Pajak Daerah Lebih Bayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan An. Arif BUDI Pratama Tahun Anggaran 2022 yang Dialokasikan Pada TA. 2023	2.000.000,00	-	2.000.000,00
4	Pembayaran Belanja Tidak 2.000.000,00 - 522.126.257,00 Terduga Untuk Pengembalian Pajak Daerah Lebih Bayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan An. Arif BUDI Pratama Tahun Anggaran 2022 yang Dialokasikan Pada TA. 2023	200.000.000,00	-	200.000.000,00
5	Pembayaran Belanja Tidak 2.000.000,00 - 522.126.257,00 Terduga Untuk Pengembalian Pajak Daerah Lebih Bayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan An. Arif BUDI Pratama Tahun Anggaran 2022 yang Dialokasikan Pada TA. 2023	39.000.000,00	-	39.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>761.126.257,00</b>	<b>-</b>	<b>761.126.257,00</b>

Sumber: Laporan Belanja Tidak Terduga Kota Pekanbaru



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

**Tabel 5.4.49. Perbandingan Antara LRA dan LO Tahun Anggaran 2022**

*(dalam rupiah)*

NO	URAIAN	LO	LRA	SELISIH
1	Beban/ Belanja Tidak Terduga	761.126.257,00	761.126.257,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>761.126.257,00</b>	<b>761.126.257,00</b>	<b>-</b>

Sumber: Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Tidak terdapat perbedaan nilai Beban Tidak Terduga antara LO dengan LRA pada Tahun 2022.

**5.4.2.1.12. Beban Lain-lain**

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
<b>118.742.337.152,62</b>	<b>123.728.007.731,14</b>

Beban Lain-lain merupakan beban barang dan jasa BOS pada Dinas Pendidikan sebesar Rp80.334.273.574,00 diberikan kepada 195 SD Negeri dan 45 SMP Negeri dan beban barang dan jasa BLUD pada Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan pada sebesar Rp38.408.063.578,62.

Terdapat perbedaan antara Beban lain-lain pada Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran, sebagai berikut:

**Tabel 5.4.50. Perbandingan Beban Lain-lain**

*(dalam rupiah)*

NO	URAIAN	LO	LRA	SELISIH
1	Beban Lain - lain	118.742.337.152,62	-	118.742.337.152,62
<b>Jumlah</b>		<b>118.742.337.152,62</b>	<b>-</b>	<b>118.742.337.152,62</b>

Sumber: Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Selisih perbandingan beban lain-lain antara Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp118.742.337.152,62 karena terdapat perbedaan pengelompokan nomenklatur pada LRA dan LO, pada LRA dikelompokkan pada Belanja Barang dan Jasa berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sedangkan pada LO dikelompokkan pada beban lain-lain berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

**5.4.2.2. Beban Transfer**

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Beban Transfer adalah beban transfer dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. beban transfer Tahun 2023 sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan Tahun 2022 Rp0,00, tidak terdapat beban Transfer Tahun 2022.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

### 5.4.3. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

#### 5.4.3.1. Surplus Non Operasional

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
1.227.662.280,22	629.038.723,05

Surplus Non Operasional Tahun 2023 sebesar Rp1.227.662.280,22 mengalami peningkatan sebesar Rp598.623.557,17 atau 95,16% dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp629.038.723,05. Surplus Non Operasional terdiri dari Surplus penjualan aset non lancar dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

##### a. Surplus Penjualan Aset Non Lancar

Surplus penjualan aset non lancar Tahun 2023 sebesar Rp0,00 tidak berbeda dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp0,00.

##### b. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada tahun 2023 sebesar Rp1.227.662.280,22 mengalami peningkatan sebesar Rp598.623.557,17 atau 95,16% dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp629.038.723,05 merupakan penyesuaian Investasi Permanen atau laba dari BUMD yaitu PT. Bank Perkreditan Riau sebesar Rp1.227.662.280,22.

#### 5.4.3.2. Defisit Non Operasional

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
19.561.956.148,12	40.715.907.426,00

Defisit Non Operasional Tahun 2023 sebesar Rp19.561.956.148,12 mengalami penurunan sebesar Rp21.153.951.277,88 atau 51,95% dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp40.715.907.426,00. Defisit Non Operasional terdiri dari Defisit penjualan aset non lancar dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

##### a. Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Defisit Penjualan Aset Non Lancar sebesar Rp0,00 tidak berbeda dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp0,00.

##### b. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp19.561.956.148,12 yang merupakan kerugian dari BUMD terdiri dari Penyesuaian Investasi Permanen PDAM sebesar Rp18.001.208.032,00 dan Penyesuaian Investasi Permanen PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru sebesar Rp1.560.748.116,12.

#### 5.4.3.3. Beban Luar Biasa

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
0,00	0,00

Belanja Luar Biasa merupakan beban yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

di luar kendali atau pengaruh suatu entitas. Beban Luar Biasa Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah Rp0,00. Tidak terdapat perbedaan antara Beban Luar Biasa pada Laporan Operasional dengan Belanja Tidak Terduga pada Laporan Realisasi Anggaran.

### 5.4.4 .SURPLUS DEFISIT-LO

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
201.646.558.259,94	(49.094.898.621,20)

Surplus/Defisit dari operasi adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi, non operasional, dan pos luar biasa. Surplus/Defisit-LO Tahun 2023 sebesar Rp201.646.558.259,94 mengalami peningkatan sebesar Rp250.741.456.881,14 atau 510,73% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp49.094.898.621,20.

Tabel 5.4.51. Rincian Surplus Defisit-LO

(dalam rupiah)

No	Surplus/Defisit LO	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan	3.029.957.898.901,93	2.542.852.914.475,81	487.104.984.426,12	19,16
2	Beban	2.809.977.046.774,09	2.551.860.944.394,06	258.116.102.380,03	10,11
3	Surplus/Defisit Non Operasional	(18.334.293.867,90)	(40.086.868.702,95)	21.752.574.835,05	-54,26
	Jumlah	201.646.558.259,94	(49.094.898.621,20)	250.741.456.881,14	-510,73

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

### 5.5. PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Pekanbaru disusun berdasarkan pendapatan yang benar-benar telah diterima oleh Kas Daerah dan belanja yang telah terealisasi/yang telah dipertanggungjawabkan. Laporan Arus Kas meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan dan Aktivitas Non-Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

#### 5.5.1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
317.959.888.460,88	314.545.446.176,29

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kota Pekanbaru selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasinya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar, dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.5.1. Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	<b>ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI</b>		
2	<b>Arus Masuk Kas :</b>		
3	Penerimaan Pajak Daerah	784.909.347.016,00	719.418.610.925,80
4	Penerimaan Retribusi Daerah	26.824.967.951,00	16.500.827.908,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.943.817.264,00	3.443.846.490,00
6	Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	70.414.533.959,38	59.287.271.601,85
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	164.283.708.302,00	122.234.078.989,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	127.755.812.834,00	124.251.455.872,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	867.953.880.162,00	790.284.259.030,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	340.219.549.445,00	338.376.329.792,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah	19.178.601.000,00	-
12	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	320.607.751.188,00	290.850.417.394,00
13	Penerimaan Bantuan Keuangan	22.858.684.800,00	14.229.314.543,00
14	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	-	-
15	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>2.750.950.653.921,38</b>	<b>2.478.876.412.545,65</b>
16	<b>ARUS KELUAR KAS</b>		
17	Pembayaran Pegawai	917.756.173.837,00	908.095.040.997,56
18	pembayaran Barang dan Jasa	1.401.017.172.439,50	1.174.095.944.026,80
19	Pembayaran Subsidi	1.115.804.147,00	7.283.227.572,00
20	Pembayaran Belanja Hibah	112.340.488.780,00	73.892.422.056,00
21	Pembayaran Tak Terduga	761.126.257,00	964.331.717,00
22	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>2.432.990.765.460,50</b>	<b>2.164.330.966.369,36</b>
23	<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi</b>	<b>317.959.888.460,88</b>	<b>314.545.446.176,29</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan selisih antara arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas operasional Pemerintah Kota Pekanbaru selama Tahun 2023 sebesar Rp317.959.888.460,88 dan mengalami kenaikan sebesar Rp3.414.442.284,59 atau 1,09% dibandingkan dengan Tahun 2022 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp314.545.446.176,29.

### 5.5.1.1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
2.750.950.653.921,38	2.478.876.412.545,65

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi pada Tahun 2023 merupakan total dari seluruh arus masuk kas dari aktivitas operasional Pemerintah Kota Pekanbaru selama Tahun 2023 sebesar Rp2.750.950.653.921,38 dan mengalami kenaikan sebesar Rp272.074.241.375,73 atau 10,98% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp2.478.876.412.545,65.

#### 5.5.1.1.1. Arus Masuk Kas Dari Penerimaan Pajak Daerah

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
784.909.347.016,00	719.418.610.925,80

Jumlah Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2023 sebesar Rp784.909.347.016,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp65.490.736.090,20 atau 9,10% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp719.418.610.925,80. Arus Kas Masuk dari Pendapatan Pajak Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari pajak daerah dan telah disetorkan ke kas daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.5.2. Rincian Pendapatan Pajak Daerah**

*(dalam rupiah)*

NO.	PENDAPATAN PAJAK DAERAH	JUMLAH
1.	Pajak Hotel	47.258.290.299,00
2.	Pajak Restoran	140.233.444.897,00
3.	Pajak Hiburan	18.154.112.772,00
4.	Pajak Reklame	34.619.938.493,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	156.951.389.265,00
6.	Pajak Parkir	20.635.230.899,00
7.	Pajak Air Tanah	12.128.843.473,00
8.	Pajak Sarang Burung Walet	89.254.500,00
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	12.915.095,00
10.	PBB dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	151.017.226.127,00
11.	BPHTB	203.808.701.196,00
Jumlah Realisasi Pajak Daerah Tahun 2023		784.909.347.016,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

### 5.5.1.1.2. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Retribusi Daerah

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
26.824.967.951,00	16.500.827.908,00

Arus masuk dari Penerimaan Retribusi Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari Retribusi Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan.

Arus Kas Masuk dari Retribusi Daerah pada Tahun 2023 sebesar Rp26.824.967.951,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp10.324.140.043,00 atau 62,57% dibanding dengan Tahun 2022 sebesar Rp16.500.827.908,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.3. Rincian Arus Masuk Kas Retribusi Daerah 2023**

*(dalam rupiah)*

No	RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
1	Retribusi Jasa Umum	11.118.125.955,00
2	Retribusi Jasa Usaha	3.358.884.796,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	12.347.957.200,00
Jumlah Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2023		<b>26.824.967.951,00</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

### 5.5.1.1.3. Arus Masuk Kas Hasil Penerimaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
5.943.817.264,00	3.443.846.490,00

Arus masuk kas dari Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan sebesar Rp5.943.817.264,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp2.499.970.774,00 atau 72,59% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp3.443.846.490,00 merupakan penerimaan berasal dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.

### 5.5.1.1.4. Arus Masuk Kas Hasil Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
70.414.533.959,38	59.287.271.601,85

Arus masuk kas dari Hasil Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama Tahun 2023 sebesar Rp70.414.533.959,38 dan mengalami kenaikan sebesar Rp11.127.262.357,53 atau 18,77% dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp59.287.271.601,85.

Lain-lain PAD yang Sah pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp72.608.698.459,38 sehingga terdapat selisih sebesar Rp2.194.164.500,00 dengan Laporan Arus Kas (LAK). Perbedaan ini disebabkan dari penjualan aset peralatan dan mesin sebesar Rp1.824.579.500,00 serta penjualan aset lainnya sebesar Rp369.585.000,00.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

### 5.5.1.1.5. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
164.283.708.302,00	122.234.078.989,00

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun 2023 sebesar Rp164.283.708.302,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp42.049.629.313,00 atau 34,40% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp122.234.078.989,00.

### 5.5.1.1.6. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
127.755.812.834,00	124.251.455.872,00

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun 2023 sebesar Rp127.755.812.834,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp3.504.356.962,00 atau 2,82% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp124.251.455.872,00.

### 5.5.1.1.7. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Umum

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
867.953.880.162,00	790.284.259.030,00

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama Tahun 2023 sebesar Rp867.953.880.162,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp77.669.621.132,00 atau 9,83% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp790.284.259.030,00.

### 5.5.1.1.8. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
340.219.549.445,00	338.376.329.792,00

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama Tahun 2023 sebesar Rp340.219.549.445,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.843.219.653,00 atau 0,54% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp338.376.329.792,00.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

**5.5.1.1.8.a Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik**

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
32.786.713.679,00	55.839.140.812,00

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama Tahun 2023 sebesar Rp32.786.713.679,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp23.052.427.133,00 atau 41,28% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp55.839.140.812,00.

**5.5.1.1.8.b Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik**

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
307.432.835.766,00	282.537.188.980,00

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus yang telah diterima Kas Daerah selama tahun 2023 sebesar Rp307.432.835.766,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp24.895.646.786,00 atau 8,81% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp282.537.188.980,00.

**5.5.1.1.9. Arus Masuk Kas dari Insentif Daerah**

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
19.178.601.000,00	0,00

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Penyesuaian merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Insentif Daerah yang telah diterima Kas Daerah selama tahun 2023 sebesar Rp19.178.601.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp19.178.601.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp0,00.

**5.5.1.1.10. Arus Masuk Kas dari Bagi Hasil dari Provinsi**

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
320.607.751.188,00	290.850.417.394,00

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi merupakan penerimaan bagi hasil Pajak yang telah disetorkan Kas Daerah selama tahun 2023 sebesar Rp320.607.751.188,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp29.757.333.794,00 atau 10,23% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp290.850.417.394,00.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

### 5.5.1.1.11. Arus Masuk Kas dari Bantuan Keuangan

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
22.858.684.800,00	14.229.314.543,00

Arus masuk kas dari Bantuan Keuangan merupakan penerimaan yang telah disetorkan Kas Daerah selama tahun 2023 sebesar Rp22.858.648.800,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp8.629.370.257,00 atau 60,65%, dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp14.229.314.543,00. Penerimaan tersebut merupakan Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah daerah Provinsi.

### 5.5.1.1.12. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pendapatan Lainnya

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
0,00	0,00

Arus masuk kas dari Penerimaan Pendapatan lainnya merupakan penerimaan yang telah diterima Kas Daerah selama tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp0,00. Pendapatan lainnya merupakan Penerimaan Hibah Dana BOS SMP dan Hibah Dana BOS SD.

### 5.5.1.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
2.432.990.765.460,50	2.164.330.966.369,36

Arus kas keluar dari aktivitas operasi sebesar Rp2.432.990.765.460,50 dengan rincian sebagai berikut:

#### 5.5.1.2.1. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Belanja Pegawai

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
917.756.173.837,00	908.095.040.997,56

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Belanja Pegawai yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2023 sebesar Rp917.756.173.837,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp9.661.132.839,44 atau 1,06 % dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp908.095.040.997,56.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

### 5.5.1.2.2. Arus Keluar Kas dari Pembayaran Belanja Barang dan Jasa

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
1.401.017.172.439,50	1.174.095.944.026,80

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Belanja Barang dan Jasa yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2023 sebesar Rp1.401.017.172.439,50 dan mengalami kenaikan sebesar Rp226.921.228.412,70 atau 19,33% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp1.174.095.944.026,80 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.4. Rincian Belanja Barang Tahun 2023**

*(dalam rupiah)*

No.	Jenis Belanja Barang dan Jasa	Realisasi Tahun 2023
1	Belanja Barang	414.978.938.507,00
2	Belanja Jasa	603.757.954.093,26
3	Belanja Pemeliharaan	100.604.786.800,07
4	Belana Perjalanan Dinas	58.620.384.287,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	107.820.493.105,55
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	80.334.273.574,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	34.900.342.072,62
<b>J U M L A H</b>		<b>1.401.017.172.439,50</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

### 5.5.1.2.3. Arus Keluar Kas dari Pembayaran Belanja Subsidi

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
1.115.804.147,00	7.283.227.572,00

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Belanja Subsidi yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2023 sebesar Rp1.115.804.147,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp6.167.423.425,00 atau 84,68% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp7.283.227.572,00 berupa subsidi kepada PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru.

### 5.5.1.2.4. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Hibah

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
112.340.488.780,00	73.892.422.056,00

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Hibah yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2023 sebesar Rp112.340.488.780,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp38.448.066.724,00 atau 52,03% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp73.892.422.056,00.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

### 5.5.1.2.5. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Bantuan Sosial

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
0,00	0,00

Arus keluar kas Bantuan Sosial merupakan pengeluaran yang berasal dari Pos Pembayaran Bantuan Sosial yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2023 sebesar Rp0,00. Dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp0,00.

### 5.5.1.2.6. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten / Kota

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
0,00	0,00

Arus keluar kas dari Bantuan Keuangan merupakan pengeluaran yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan tahun 2022 sebesar Rp0,00.

### 5.5.1.2.7. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Belanja Tak Terduga

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
761.126.257,00	964.331.717,00

Arus keluar kas dari Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2023 sebesar Rp761.126.257,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp203.205.460,00 atau 21,07% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp964.331.713,00.

### 5.5.2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
(323.613.330.223,88)	(330.815.058.476,99)

Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta Investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas dengan rincian sebagai berikut:



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

**Tabel 5.5.5. Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi**

(dalam rupiah)

NO	ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	<b>Arus Masuk Kas</b>		
2	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	1.824.579.500,00	361.927.500,00
3	Penjualan Aset Lainnya	369.585.000,00	9.000.000,00
4	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>2.194.164.500,00</b>	<b>370.927.500,00</b>
5	<b>ARUS KELUAR KAS</b>		
6	Perolehan Tanah	769.811.525,00	8.509.166.113,00
7	Perolehan Peralatan dan Mesin	75.888.516.195,00	108.335.049.831,00
8	Perolehan Gedung dan Bangunan	94.006.938.248,86	77.949.693.104,00
9	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	128.207.813.682,02	121.218.807.527,99
10	Perolehan Aset Tetap Lainnya	16.786.410.073,00	12.215.030.401,00
11	Perolehan Aset Lainnya	148.005.000,00	108.239.000,00
12	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	2.850.000.000,00
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>325.807.494.723,88</b>	<b>331.185.985.976,99</b>
	<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(323.613.330.223,88)</b>	<b>(330.815.058.476,99)</b>

Sumber: Kertas Kerja Laporan Arus Kas Kota Pekanbaru TA.2023

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi aset non keuangan tahun 2023 sebesar minus Rp323.613.330.223,88 dan mengalami penurunan sebesar Rp7.201.728.253,11 atau 2,18% dibanding dengan Tahun 2022 sebesar minus Rp330.815.058.476,99.

#### 5.5.2.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Adapun rincian arus masuk kas dari aktivitas investasi adalah sebagai berikut:

##### 5.5.2.1.1 Arus Masuk Kas dari Penjualan Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
<b>1.824.579.500,00</b>	<b>361.927.500,00</b>

Arus masuk kas dari Penjualan Peralatan dan Mesin pada Tahun 2023 sebesar Rp1.824.579.500,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.462.652.000,00 atau 404,13% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp361.927.500,00.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

### 5.5.2.1.2 Arus Masuk Kas dari Penjualan Aset Lainnya

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
369.585.000,00	9.000.000,00

Arus masuk kas dari Penjualan Aset Lainnya tahun 2023 sebesar Rp369.585.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp360.585.000,00 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp9.000.000,00.

### 5.5.2.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Adapun rincian arus keluar kas dari aktivitas investasi adalah sebagai berikut:

#### 5.5.2.2.1. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Tanah

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
769.811.525,00	8.509.166.113,00

Arus keluar kas untuk Perolehan Tanah merupakan pengeluaran yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2023 sebesar Rp769.811.525,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp7.739.354.588,00 atau 90,95% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp8.509.166.113,00.

#### 5.5.2.2.2. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Peralatan dan Mesin

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
75.888.516.195,00	108.335.049.831,00

Arus keluar kas untuk Perolehan Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2023 sebesar Rp75.888.516.195,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp32.446.533.636,00 atau 29,95% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp108.335.049.831,00.

#### 5.5.2.2.3. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Gedung dan Bangunan

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
94.006.938.248,86	77.949.693.104,00

Arus keluar kas untuk Perolehan Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2023 sebesar Rp94.006.938.248,86 dan mengalami kenaikan sebesar Rp16.057.245.144,86 atau 20,60% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp77.949.693.104,00.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

**5.5.2.2.4. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan**

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
128.207.813.682,02	121.218.807.527,99

Arus keluar kas untuk Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2023 sebesar Rp128.207.813.682,02. Dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp121.218.807.527,99 terdapat kenaikan sebesar Rp6.989.006.154,03 atau 5,77%.

**5.5.2.2.5. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Aset Tetap Lainnya**

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
16.786.410.073,00	12.215.030.401,00

Arus keluar kas untuk Perolehan Aset Tetap Lainnya merupakan pengeluaran yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2023 sebesar Rp16.786.410.073,00. Dan mengalami kenaikan sebesar Rp4.571.379.672,00 atau 37,42% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp12.215.030.401,00.

**5.5.2.2.6. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Aset Lainnya**

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
148.005.000,00	108.239.000,00

Arus keluar kas untuk Perolehan Aset Lainnya merupakan pengeluaran yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2023 sebesar Rp148.005.000,00. Dan mengalami kenaikan sebesar Rp39.766.000,00 dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp108.239.000,00.

**5.5.2.2.7. Arus Keluar Kas untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
10.000.000.000,00	2.850.000.000,00

Arus keluar kas untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Aset merupakan pengeluaran yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2023 sebesar Rp10.000.000.000,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp2.850.000.000,00.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

### 5.5.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
0,00	0,00

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian Piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.6. Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

*(dalam rupiah)*

NO	ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	ARUS MASUK KAS	-	-
2	Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
3	ARUS KELUAR KAS	-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas	-	-
	<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber: Kertas Kerja LAK TA.2023

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang. Arus kas bersih dari Aktivitas Pembiayaan Tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp0,00.

### 5.5.4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
(294.867.385,70)	116.081.745,00

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah.

Arus Kas dari aktivitas non anggaran merupakan aktivitas keluar masuk transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi APBD Kota Pekanbaru. Arus Kas ini merupakan aktivitas kas yang tidak mempengaruhi anggaran, namun mempengaruhi nilai kas. Penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan aktivitas transitoris karena telah diperhitungkan dalam nilai belanja yang telah dikeluarkan. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar minus Rp294.867.385,70 merupakan selisih antara arus masuk kas sebesar Rp372.063.674.859,75 dan arus keluar kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp372.358.542.245,45 dan mengalami penurunan sebesar Rp410.949.130,70 dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp116.081.745,00.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

### 5.5.4.1. Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Transitoris

Adapun rincian arus masuk kas dari aktivitas transitoris adalah sebagai berikut:

#### 5.5.4.1.1. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Fihak Ketiga (PFK)

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
361.948.322.932,25	177.518.242.745,00

Arus Masuk kas dari Penerimaan Fihak Ketiga merupakan penerimaan potongan pajak pusat yang dipungut oleh Bendahara Umum Daerah selama Tahun 2023 sebesar Rp361.948.322.932,25 dan mengalami kenaikan sebesar Rp184.430.080.187,27 atau 103,89% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp177.518.242.745,00.

Rincian Penerimaan Fihak Ketiga selama Tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.5.7. Komponen Arus Masuk Kas dari Penerimaan Antar Rekening Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Pemungutan
1	Penerimaan IWP 8%	24.919.970.245,00
2	Penerimaan IWP 1 %	7.013.979.699,00
3	Penerimaan IWP 3,25%	707.036.639,00
4	Iuran BPJS	27.533.411.783,00
5	Zakat	7.492.749.285,00
6	Penyetoran Atas Pengembalian	1.471.265.912,45
7	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	735.069.027,00
8	Jaminan Kematian (JKM)	2.205.065.953,00
9	PPN	90.578.980.329,66
10	Phr	134.920.687.233,00
11	PPH Pasal 21	46.120.338.868,00
12	PPH Pasal 22	2.587.985.662,14
13	PPH Pasal 23	6.850.191.843,00
14	PPH pasal 4	8.514.633.482,00
15	Hutang Kelebihan	296.956.971,00
<b>Total</b>		<b>361.948.322.932,25</b>

Sumber : Kertas Kerja Konsolidasi Pajak TA.2023

#### 5.5.4.1.2. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Antar Rekening

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
10.115.351.927,50	9.000.050.000,00

Arus Masuk kas dari Penerimaan Antar Rekening sebesar Rp10.115.351.927,50 dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp9.000.050.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp1.115.301.927,50 atau 12,39%. Arus Masuk kas dari Penerimaan Antar Rekening sebesar Rp10.115.351.927,50 adalah penerimaan Kas dari Kas BLUD Perparkiran sebesar Rp10.000.000.000,00 dan Jasa Bongkar Tiang Reklame yang belum jatuh tempo dititipkan di Kas Lainnya Pemko sebesar Rp.115.351.927.50 yang ada di Bapenda.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

### 5.5.4.2. Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Transitoris

Adapun rincian arus keluar kas dari aktivitas transitoris adalah sebagai berikut:

#### 5.5.4.2.1. Arus Keluar Kas untuk Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
362.358.542.245,45	177.402.052.000,00

Arus keluar kas untuk Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga merupakan pengeluaran pembayaran pungutan PPN, PPh, Askek dan pungutan lainnya oleh Bendahara Umum Daerah yang harus disetorkan kepada pihak ketiga yang berhak. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, nilai arus kas keluar Fihak Ketiga sebesar Rp362.358.542.245,45 dan mengalami kenaikan sebesar Rp184.956.490.245,45 atau 99,76% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp177.402.052.000,00.

#### 5.5.4.2.2. Arus Keluar Kas untuk Pengeluaran Antar Rekening

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
10.000.000.000,00	9.000.159.000,00

Arus keluar kas untuk Pengeluaran Antar Rekening merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2023 atau UYHD yang harus disetorkan ke Kas Umum Daerah sebesar Rp10.000.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp999.841.000,00 dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp9.000.159.000,00. Arus keluar kas untuk Pengeluaran Antar Rekening sebesar Rp10.000.000.000,00 merupakan Saldo kas BLUD Perparkiran yang disetorkan ke Kas Umum Daerah diakhir tahun 2023.

### 5.5.5. Kenaikan/Penurunan Kas

*(dalam rupiah)*

Tahun 2023	Tahun 2022
(5.948.309.148,70)	(16.153.530.555,70)

Pada Tahun 2023 terdapat kenaikan kas sebesar Rp10.205.221.407,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5.5.8. Kenaikan/Penurunan Kas Tahun 2023

*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	2023
1.	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi	317.959.888.460,88
2.	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi	(323.613.330.223,88)
4.	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Aktifitas Transiforis	(294.867.385,70)
<b>Jumlah</b>		<b>(5.948.309.148,70)</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

### 5.5.6. Saldo Akhir Kas

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
9.357.550.537,21	15.305.859.685,91

Saldo Akhir Kas Tahun 2023 sebesar Rp9.357.550.537,21 dan mengalami penurunan sebesar Rp5.948.309.148,70 atau 38,86% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp15.305.859.685,91 terdapat. Saldo akhir kas Tahun 2023 dan 2022 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.5.9. Rincian Saldo Akhir Kas

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2023	2022
1.	Saldo Akhir Kas di BUD	3.266.103.751,40	8.542.039.915,40
2	Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD Puskesmas, BLUD RS Madani, BLUD Parkir dan BLUD Transmetro	3.877.969.319,51	4.616.514.965,51
3	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	620.794.242,00	1.044.471.384,00
4	Saldo Akhir Kas Lainnya	322.748.108,30	617.615.494,00
5	Saldo Akhir Kas BOK	1.208.997.346,00	0,00
6	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	29.174.754,00	379.382.391,00
7	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	31.763.016,00	105.835.536,00
<b>Jumlah</b>		<b>9.357.550.537,21</b>	<b>15.305.859.685,91</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

### 5.6. EKUITAS

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
8.141.368.059.489,68	7.961.906.980.791,96

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kota Pekanbaru pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Pekanbaru. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp8.141.368.059.489,68 dan Tahun 2022 sebesar Rp7.961.906.980.791,96 mengalami kenaikan sebesar Rp179.461.078.697,72 atau 2,25%.

Tabel 5.6.1 Perbandingan Ekuitas Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	KENAIKAN/	PERSENTASE
			PENURUNAN	%
- Ekuitas	8.141.368.059.489,68	7.961.906.980.791,96	179.461.078.697,72	2,25

Sumber : Laporan Perubahan Ekuitas Kota Pekanbaru TA.2023

#### 5.6.1 PENJELASAN MASING - MASING POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri dari atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, perubahan atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun berjalan serta dampak kumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar. Laporan Operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pada tahun 2023 terdapat saldo awal ekuitas sebesar Rp7.961.906.980.791,96 yang merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2022;
- Surplus/defisit-LO tahun 2023 Kota Pekanbaru sebesar Rp201.646.558.259,94 merupakan surplus kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca;
- Pada LPE terdapat selisih sebesar Rp22.185.479.562,22 Hal ini sebagai dampak kumulatif koreksi yang disebabkan adanya perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar yang terjadi pada tahun sebelumnya dan dapat dijelaskan sebagai berikut:



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.6.2. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

(dalam rupiah)

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR	2023	2022
Koreksi Pencatatan Aset Lancar	-14.072.952.551,00	16.545.830.603,50
Koreksi Pencatatan Penyisihan Aset Lancar	-1.993.640.502,52	115.992.770.553,50
Koreksi Pencatatan Investasi		0,00
Koreksi Pencatatan Penyisihan Investasi		0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap	-4.341.406.666,70	52.814.972.876,42
Koreksi Nilai Aset Lainnya	-1.793.300.764,00	199.673.611.055,04
Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	2,00	29.646.816.710,00
Koreksi Pencatatan Amortisasi Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Pencatatan Kewajiban	15.820.920,00	24.286.061.584,00
Koreksi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LO		22.554.004,96
<b>JUMLAH</b>	<b>-22.185.479.562,22</b>	<b>438.982.617.387,42</b>

Sumber :Laporan Perubahan Ekuitas Kota Pekanbaru TA.2023

### 1) Koreksi Pencatatan Aset lancar

Koreksi pencatatan aset lancar bersumber dari pengurangan ekuitas sebesar Rp14.072.952.562,00 merupakan pengurang ekuitas karena koreksi pencatatan nilai piutang pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp14.072.952.632,00 serta terdapat penambah ekuitas yang bersumber dari koreksi nilai piutang retribusi daerah sebesar Rp81,00 pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 5.6.3. Koreksi Nilai Piutang

(dalam rupiah)

Koreksi Nilai Piutang	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Total Koreksi	Keterangan
Koreksi Nilai Piutang Pajak Daerah			-14.072.952.632,00	
Badan Pendapatan Daerah	3.720.769.309,00	0,00	3.720.769.309,00	Koreksi Piutang PBB
Badan Pendapatan Daerah	0,00	17.793.721.941,00	-17.793.721.941,00	Koreksi Piutang PBB Tahun Sebelumnya
Koreksi Nilai Piutang Retribusi Daerah			81,00	
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	81,00	0,00	81,00	Koreksi piutang denda retribusi
<b>JUMLAH</b>	<b>3.720.769.390,00</b>	<b>17.793.721.941,00</b>	<b>-14.072.952.551,00</b>	

Sumber :Laporan Perubahan Ekuitas Kota Pekanbaru TA.2023

### 2) Koreksi Pencatatan Penyisihan Aset Lancar

Koreksi pencatatan penyisihan aset lancar sebesar Rp1.993.640.502,52 bersumber dari koreksi penyisihan piutang pendapatan yang tercatat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp214.930.584,00 sebagai pengurang



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

ekuitas atas koreksi piutang PT Pelindo dan pada Badan Pendapatan Daerah Sebesar Rp2.208.571.086,52 sebagai penambah ekuitas atas koreksi piutang PBB.

**3) Koreksi Pencatatan Aset Tetap**

Koreksi pencatatan aset tetap sebesar Rp4.341.406.666,70 bersumber dari koreksi atas pencatatan aset tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan dengan rincian sebagai berikut;

- a. Koreksi nilai aset tetap tanah sebesar Rp21.902.335.000,00 yang tercatat pada OPD sebagai berikut;

**Tabel 5.6.4. Koreksi Nilai Aset Tetap Tanah terhadap Ekuitas**

*(dalam rupiah)*

No	OPD	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Total Koreksi	Keterangan	SK
1	Dinas Pendidikan	32.409.840.000,00	0,00	32.409.840.000,00	Koreksi saldo awal	-
2	Dinas Perhubungan	11.297.875.000,00	0,00	11.297.875.000,00	Koreksi saldo awal	-
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	21.805.380.000,00	-21.805.380.000,00	Penghausan Aset	No. 841/2021
<b>JUMLAH</b>		<b>43.707.715.000,00</b>	<b>21.805.380.000,00</b>	<b>21.902.335.000,00</b>		

Sumber : Laporan Perubahan Ekuitas Kota Pekanbaru TA. 2023

- b. Koreksi nilai aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp2.459.507.565,00 merupakan koreksi hasil inventarisasi terhadap aset peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut;

**Tabel 5.6.5. Koreksi Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin terhadap Ekuitas**

*(dalam rupiah)*

Koreksi Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Total Koreksi
Koreksi Nilai Alat Besar	0,00	1.228.268,00	(1.228.268,00)
Koreksi Nilai Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	6.250.000,00	(6.250.000,00)
Koreksi Nilai Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	3.311.278.647,00	(3.311.278.647,00)
Koreksi Nilai Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	287.012.154,00	(287.012.154,00)
Koreksi Nilai Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.497.250.000,00	18.070.960,00	1.479.179.040,00
Koreksi Nilai Komputer	19.277.083,00	235.515.431,00	(216.238.348,00)
Koreksi Nilai Alat Keselamatan Kerja	0,00	53.516.173,00	(53.516.173,00)
Koreksi Nilai Rambu-rambu	0,00	63.163.015,00	(63.163.015,00)
<b>JUMLAH</b>	<b>1.516.527.083,00</b>	<b>3.976.034.648,00</b>	<b>(2.459.507.565,00)</b>

Sumber : Laporan Perubahan Ekuitas Kota Pekanbaru TA. 2023

Koreksi kurang ekuitas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp1.228.268,00 adalah Koreksi atas penghapusan aset dan koreksi nilai alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp6.250.000,00 tercatat



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Koreksi atas penghapusan aset sedangkan koreksi nilai alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp3.311.278.647,00 tercatat pada 5 OPD dengan rincian sebagai berikut;

**Tabel 5.6.6 Koreksi Nilai Alat Kantor dan Rumah Tangga**

(dalam rupiah)

Koreksi Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Total Koreksi	Keterangan
Koreksi Nilai Alat Kantor dan Rumah Tangga				
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	0,00	2.523.400,00	-2.523.400,00	Penghapusan karena kebakaran
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	2.488.212.033,00	-2.488.212.033,00	Penghapusan Peralatan dan Mesin SK no 651
Dinas Perpustakaan dan Arsip	0,00	667.333,00	-667.333,00	Penghapusan SK Walikota Pekanbaru No. 551 Tahun 2023
Sekretariat Daerah	0,00	819.364.540,00	-819.364.540,00	Penghapusan Aset SK no.651 TA 2023 (force majeure)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	511.341,00	-511.341,00	Penghapusan barang rusak berat yang tidak digunakan
<b>JUMLAH</b>	<b>0,00</b>	<b>3.311.278.647,00</b>	<b>-3.311.278.647,00</b>	

Sumber : Laporan Perubahan Ekuitas Kota Pekanbaru TA.2023

Koreksi nilai alat studio, komunikasi, dan pemancar sebesar Rp287.012.154,00 merupakan koreksi kurang ekuitas yang tercatat pada OPD sebagai berikut;

**Tabel 5.6.7 Koreksi Nilai Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**

(dalam rupiah)

Koreksi Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Total Koreksi	Keterangan
Koreksi Nilai Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar				
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	0,00	4.183.672,00	-4.183.672,00	Penghapusan BMD karena kebakaran
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	144.418.718,00	-144.418.718,00	Penghapusan Peralatan dan Mesin SK no 651
Sekretariat Daerah	0,00	138.409.764,00	-138.409.764,00	Penghapusan Aset SK no.651 TA 2023 (force majeure)
<b>JUMLAH</b>	<b>0,00</b>	<b>287.012.154,00</b>	<b>-287.012.154,00</b>	

Sumber : Laporan Perubahan Ekuitas Kota Pekanbaru TA.2023



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Koreksi nilai alat kedokteran dan kesehatan sebesar sebesar Rp1.479.179.040,00 merupakan koreksi ekuitas yang tercatat pada 3 OPD dengan rincian sebagai berikut;

**Tabel 5.6.8 Koreksi Nilai Alat Kantor dan Rumah Tangga**

(dalam rupiah)

Koreksi Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Total Koreksi	Keterangan
Koreksi Nilai Alat Kedokteran dan Kesehatan				
Dinas Kesehatan	1.497.250.000,00	0,00	1.497.250.000,00	Hibah Alat kedokteran dari Kemenkes
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	7.802.439,00	-7.802.439,00	Penghapusan Peralatan dan Mesin SK No 651
Sekretariat Daerah	0,00	10.268.521,00	-10.268.521,00	Penghapusan Aset SK no.651 TA 2023 (force majeure)
<b>JUMLAH</b>	<b>1.497.250.000,00</b>	<b>18.070.960,00</b>	<b>1.479.179.040,00</b>	

Sumber : Laporan Perubahan Ekuitas Kota Pekanbaru TA.2023

Koreksi Nilai Komputer sebesar Rp216.238.348,00 merupakan koreksi penambah ekuitas sebesar Rp19.277.083,00 dan pengurang ekuitas sebesar Rp235.515.431,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.6.9 Koreksi Nilai Komputer**

(dalam rupiah)

Koreksi Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Total Koreksi	Keterangan
Koreksi Nilai Komputer				
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.277.083,00	0,00	19.277.083,00	40/BA-200.KU.04.03/III/2023 Hibah DJTR ATR/BPN
Dinas Komunikasi Statistik dan Persandian	0,00	25.275.309,00	-25.275.309,00	Penghapusan BMD karena kebakaran
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	114.295.794,00	-114.295.794,00	Penghapusan Peralatan dan Mesin SK no 651
Dinas Perpustakaan dan Arsip	0,00	437.750,00	-437.750,00	SK Walikota Pekanbaru No. 551 Tahun 2023 P.hapusan
Sekretarian Daerah	0,00	95.506.578,00	-95.506.578,00	Penghapusan Aset SK no.651 TA 2023 (force majeure)
<b>JUMLAH</b>	<b>19.277.083,00</b>	<b>235.515.431,00</b>	<b>-216.238.348,00</b>	

Sumber : Laporan Perubahan Ekuitas Kota Pekanbaru TA.2023

Koreksi Nilai Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp53.516.173,00 merupakan koreksi pengurang ekuitas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disebabkan karena Penghapusan Peralatan dan Mesin dengan SK Nomor 651 dan Koreksi Nilai Rambu-rambu sebesar Rp63.163.015,00 merupakan koreksi pengurang ekuitas yang dicatat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disebabkan kebakaran sesuai dengan penerbitan SK Nomor 621.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

- c. Koreksi nilai aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp.25.052.674.073,90 merupakan koreksi penambah ekuitas sebesar Rp6.414.999.897,23 dan koreksi pengurang ekuitas sebesar Rp31.467.673.971,13 dengan rincian sebagai berikut;

**Tabel 5.6.10. Koreksi Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan terhadap Ekuitas**

(dalam rupiah)

Koreksi Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Total Koreksi	Keterangan
Koreksi Nilai Bangunan Gedung				
Dinas Kesehatan	487.002.227,23	0,00	487.002.227,23	
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	186.087.766,00	-186.087.766,00	Reklas Aset Tetap Lift dan AC
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	31.281.586.205,00	-31.281.586.205,00	Penghapusan Gedung dan Bangunan SK no 651
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,13	-0,13	Koreksi Saldo Awal
Kecamatan Bukit Raya	289.875.579,00	0,00	289.875.579,00	Penghapusan
Kecamatan Bina Widya	5.638.122.091,00	0,00	5.638.122.091,00	BA Inventarisasi No 878 Tgl 28 Des 2023 (Akm Susut
<b>JUMLAH</b>	<b>6.414.999.897,23</b>	<b>31.467.673.971,13</b>	<b>-25.052.674.073,90</b>	

Sumber : Laporan Perubahan Ekuitas Kota Pekanbaru TA.2023

- d. Koreksi nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp2.027.607.189,72 dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.6.11. Koreksi Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan terhadap Ekuitas**

(dalam rupiah)

Koreksi Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Total Koreksi	Keterangan
Koreksi Nilai Jalan dan Jembatan				
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,28	(0,28)	Koreksi Saldo Awal
Koreksi Nilai Instalasi				
Sekretariat Daerah	0,00	168.578.831,00	(168.578.831,00)	Penghapusan Aset SK no.651 TA 2023 (force majeure)
Koreksi Nilai Jaringan				
Dinas Perhubungan	2.374.102.765,00	0,00	2.374.102.765,00	SK Walikota Pekanbaru No 214 Tahun 2023 ttg PJU-TS
Sekretariat Daerah	0,00	177.916.744,00	(177.916.744,00)	Penghapusan Aset SK no.651 TA 2023 (force majeure)
<b>JUMLAH</b>	<b>2.374.102.765,00</b>	<b>346.495.575,28</b>	<b>2.027.607.189,72</b>	

Sumber : Laporan Perubahan Ekuitas Kota Pekanbaru TA.2023



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

- e. Koreksi nilai aset tetap lainnya sebesar Rp808.216.608,00 dapat dirinci sebagai berikut;

**Tabel 5.6.12. Koreksi Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan terhadap Ekuitas**

(dalam rupiah)

Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Total Koreksi	Keterangan
Koreksi Nilai Bahan Perpustakaan				
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	180.309.674,00	-180.309.674,00	Penghapusan Aset Tetap Lainnya SK no. 651
Sekretariat Daerah		145.420.000,00	-145.420.000,00	Penghapusan Aset SK no.651 TA 2023 (force majeure)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	9.541.000,00	-9.541.000,00	Penghapusan barang rusak berat yang tidak digunakan
Koreksi Nilai Tanaman				
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	287.320.934,00	-287.320.934,00	Penghapusan Aset Tetap Lainnya SK no. 651
Sekretariat Daerah		185.625.000,00	-185.625.000,00	Penghapusan Aset SK no.651 TA 2023 (force majeure)
<b>JUMLAH</b>	<b>0,00</b>	<b>808.216.608,00</b>	<b>-808.216.608,00</b>	

Sumber : Laporan Perubahan Ekuitas Kota Pekanbaru TA.2023

- f. Koreksi nilai aset tetap konstruksi dalam pengerjaan tercatat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp49.049.390,48 berupa kenaikan ekuitas karena kesalahan pencatatan mutasi aset antar unit dinas kesehatan

**4) Koreksi Pencatatan Aset Lainnya**

Koreksi pencatatan aset lainnya tercatat sebesar Rp1.793.300.764,00 sebagai pengurang ekuitas dengan rincian sebagai berikut;

**Tabel 5.6.13. Koreksi Nilai Aset Lainnya**

(dalam rupiah)

Koreksi Pencatatan Aset Lainnya	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Total Koreksi
Koreksi Nilai Aset Lainnya Tagihan Jangka Panjang	0,00	23.250.230,00	-23.250.230,00
Koreksi Nilai Aset Lainnya Aset Tidak Berwujud	0,00	67.659.166,00	-67.659.166,00
Koreksi Nilai Aset Lainnya Aset Lain-lain	1.004,00	1.702.392.372,00	-1.702.391.368,00
<b>JUMLAH</b>	<b>1.004,00</b>	<b>1.793.301.768,00</b>	<b>-1.793.300.764,00</b>

Sumber : Laporan Perubahan Ekuitas Kota Pekanbaru TA.2023

Koreksi pencatatan nilai aset lainnya tagihan jangka panjang bersumber dari koreksi atas nilai tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp23.250.230,00 yang tercatat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sedangkan koreksi pencatatan atas aset tak berwujud tercatat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp67.659.166,00 serta untuk koreksi atas aset



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

rusak tercatat sebesar Rp1.702.391.368,00 pada beberapa OPD dengan rincian sebagai berikut;

**Tabel 5.6.14. Koreksi Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan terhadap Ekuitas**  
*(dalam rupiah)*

Koreksi Pencatatan Aset Lainnya	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Total Koreksi	Keterangan
Koreksi Nilai Aset Lainnya Aset Lain-lain				
Dinas Pendidikan	10,00	0,00	10,00	Koreksi saldo awal
Dinas Kesehatan	33,00	0,00	33,00	Koreksi saldo awal
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1,00	0,00	1,00	Koreksi saldo awal
Dinas Pemadam Kebakaran	5,00	0,00	5,00	Koreksi saldo awal
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	81,00	0,00	81,00	Koreksi saldo awal
Dinas Perhubungan	0,00	12,00	-12,00	Koreksi saldo awal
Dinas Pemuda dan Olah Raga	0,00	2,00	-2,00	Koreksi saldo awal
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	1,00	-1,00	Koreksi saldo awal
Sekretarian daerah	0,00	1.691.909.187,00	-1.691.909.187,00	Penghapusan
Sekretariat DPRD	0,00	3,00	-3,00	Koreksi saldo awal
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	4.478.167,00	-4.478.167,00	Penghapusan
Badan Pendapatan Daerah	844,00	0,00	844,00	Koreksi saldo awal
Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	30,00	0,00	30,00	Koreksi saldo awal
Kecamatan Bina Widya	0,00	6.005.000,00	-6.005.000,00	Penghapusan
<b>JUMLAH</b>	<b>1.004,00</b>	<b>1.702.392.372,00</b>	<b>-1.702.391.368,00</b>	

Sumber : Laporan Perubahan Ekuitas Kota Pekanbaru TA.2023

**5) Koreksi Pencatatan Penyusutan Aset Tetap**

Penambahan ekuitas sebesar Rp.2,00 merupakan penambahan ekuitas karena koreksi pencatatan penyusutan aset tetap peralatan dan mesin yang tercatat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai koreksi saldo awal.

**6) Koreksi Pencatatan Kewajiban**

Koreksi pencatatan kewajiban terjadi sebagai akibat koreksi saldo awal kewajiban jangka pendek Tahun 2023 sebesar Rp15.820.920,00 dengan rincian sebagai berikut;

**Tabel 5.6.15. Rincian Koreksi Pencatatan Kewajiban Jangka Pendek terhadap Ekuitas**  
*(dalam rupiah)*

No	OPD	Nilai Koreksi Tambah	Nilai Koreksi Kurang	Total Koreksi
1	Dinas Kesehatan	348.480,00	0,00	348.480,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,00	0,00	3,00
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	16.259.405,00	0,00	16.259.405,00
4	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	89.582,00	0,00	89.582,00
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	502.750,00	-502.750,00
6	Sekretariat DPRD	0,00	10.000,00	-10.000,00
7	Kecamatan Payung Sekaki	0,00	363.800,00	-363.800,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>16.697.470,00</b>	<b>876.550,00</b>	<b>15.820.920,00</b>

Sumber : Laporan Perubahan Ekuitas Kota Pekanbaru TA.2023



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

### BAB VI

#### PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

##### 6.1. KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS BANDING WALIKOTA PEKANBARU TERHADAP GUGATAN KOLEMAN DKK

Sehubungan dengan penetapan eksekusi Nomor 18/PDT/EKS-PTS/2009/PN.PBR antara KOLEMAN dahulu Kho Bun Huat dkk. sebagai Para Pemohon Eksekusi antara Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri & Otonomi Daerah Cq. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Cq. Walikota Pekanbaru Kepala Daerah Kota Pekanbaru dkk, sebagai para Termohon Eksekusi.

- I. Bahwa mengingat penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:18/Pdt/EK-PTS/2009/PN.PBR, yang isinya sebagai berikut:
  - Mengabulkan permohonan Pemohon Eksekusi;
  - Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru, untuk memanggil Termohon Eksekusi I, Termohon Eksekusi II, Termohon Eksekusi III, Termohon Eksekusi IV dan Termohon Eksekusi V, agar menghadap Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2009 Pukul 09.00 WIB pagi, guna diberi teguran (*Aanmaning*) agar dalam tempo tenggang waktu 8 (delapan) hari memenuhi Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 109/PDT/2002/PTR, tanggal 8 Januari 2003, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
- II. Pada sidang *Aanmaning* tanggal 22 Juli 2009 tersebut, telah disampaikan secara lisan bahwa Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru menghormati Putusan Pengadilan dalam perkara *a quo*, namun saat ini Pemerintah Kota Pekanbaru hanya dapat memenuhi sebagian Putusan Pengadilan dimaksud.
- III. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami sampaikan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru, menghormati keputusan pengadilan terhadap perkara *a quo*;
  - b. Bahwa untuk saat ini Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru hanya dapat memenuhi Penetapan Pengadilan untuk ganti rugi bangunan dengan total nominal Rp460.800.000,00 (*empat ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah*);
  - c. Bahwa untuk penggantian lainnya, berupa penggantian tanah, hak untuk berdagang/tapak berusaha, dan penghasilan/keuntungan yang diharapkan, untuk saat ini tidak dapat direalisasikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru; dan
  - d. Bahwa penggantian seperti yang dimaksud pada huruf c di atas, harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pihak legislatif serta Instansi terkait lainnya, sesuai dengan mekanisme yang ada dan mengikuti prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

- IV. Bahwa menunjuk Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 42/PDT/G/2001/PN.PBR tanggal 14 Maret 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor:109/PDT/2002/PTR, tanggal 18 Januari 2003 Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:2544.K/PDT/2003 jo tanggal 21 April 2005 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191.PK/PDT/2008 tanggal 28 November 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*):
1. Perkara *a quo* merupakan perkara perdata yang amar putusannya berupa tanggung jawab untuk memenuhi putusan berupa:
    - a. Ganti rugi kepada Penggugat sesuai dengan putusan pengadilan senilai Rp14.861.150.000,00 (berdasarkan perhitungan nominal ganti rugi kepada Penggugat senilai Rp14.853.400.000,00); dan
    - b. Nilai ganti rugi tersebut berupa:
      - Tanah sebanyak 26 persil senilai Rp3.490.100.000,00;
      - Bangunan sebanyak 18 buah senilai Rp460.800.000,00;
      - Hak untuk Berdagang senilai Rp7.800.000.000,00;
      - Penghasilan yang diharapkan senilai Rp3.102.500.000,00
  2. Terhadap isi putusan tersebut harus dipenuhi secara tanggung renteng (*hoofdelijke aansprekelijke*) oleh Para Tergugat:
    - a. Walikota Pekanbaru (Tergugat I) senilai  $\frac{1}{4} \times \text{Rp}14.853.400.000,00 = \text{Rp}3.713.350.000,00$ ;
    - b. Dinas Tata Kota (Dinas Tata Ruang dan Bangunan) selaku Tergugat II senilai  $\frac{1}{4} \times \text{Rp}14.853.400.000,00 = \text{Rp}3.713.350.000,00$ ;
    - c. PT Makmur Papan Permata selaku Tergugat III senilai  $\frac{1}{4} \times \text{Rp}14.853.400.000,00 = \text{Rp}3.713.350.000,00$ ; dan
    - d. CV Tieka Jaya selaku Tergugat IV senilai  $\frac{1}{4} \times \text{Rp}14.853.400.000,00 = \text{Rp}3.713.350.000,00$ .
  3. Bahwa terhadap putusan perdata, Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) dapat melakukan musyawarah untuk memenuhi putusan pengadilan yang dapat saja berbeda dengan isi putusan pengadilan. Terhadap hal tersebut, Tergugat telah melakukan beberapa kali komunikasi dan musyawarah dengan kuasa Penggugat dan Tergugat telah menyiapkan 3 opsi untuk dimusyawarahkan. Namun, terhadap opsi tersebut kuasa Penggugat belum dapat mengambil keputusan karena harus dibicarakan dengan klien (Penggugat); dan
  4. Bahwa dalam perjalanannya kuasa Penggugat terjadi beberapa kali perubahan yang menyebabkan terhadap opsi tersebut belum dapat terjawab.



## **PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

---

#### **6.2. STATUS TANAH DAN BANGUNAN BERUPA KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan Pasar Cik Puan Jl. Tuanku Tambusai Kecamatan Sukajadi Pekanbaru**

1. Penguasaan, Pengaturan dan Penyelenggaraan Usaha Terminal Bus dan Oplet serta Tempat-Tempat Parkir Umum oleh Pemerintah Kotamadya Dati II Pekanbaru adalah sejak Tahun 1970 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 153/ VII/ 1970 tanggal 7 Juli 1970;
2. Surat Keputusan Gubernur No. Kpts. 155/ XII/ 1973 tanggal 22 Desember 1973 tentang Penyerahan Kembali Penguasaan, Pengaturan dan Penyelenggaraan Usaha Terminal dan Tempat-Tempat Parkir Umum dalam Daerah Kotamadya Pekanbaru, sekaligus mencabut Surat Keputusan Nomor 153/VII/1970 tanggal 7 Juli 1970;
3. Berdasarkan Buku Inventarisasi Barang (Tanah) Pemerintah Kotamadya Dati II Pekanbaru tanggal 23 September 1992 tercatat bahwa:
  - a) Tanah Terminal Bus Jalan Nangka Sukajadi, asal Ganti Rugi kepada masyarakat Tahun 1968.
  - b) Tanah Pasar dan Kios Pasar Cik Puan Jalan Nangka Sukajadi, luas 7.965 m<sup>2</sup> asal ganti rugi kepada masyarakat. Dan sampai saat ini, aset tanah Cik Puan masih tercatat pada KIB A (Tanah) Pemerintah Kota Pekanbaru pada SKPD Dinas Pasar seluas 7.965 m<sup>2</sup> dengan nilai perolehan Rp23.895.000.000,00
4. Dalam Notulen Rapat yang dihadiri oleh Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah pada Tanggal 10 Oktober 2003 di Ruang Sekretaris Daerah Propinsi Riau dengan tanggapan dan penjelasan Sekretaris Daerah Propinsi Riau mengenai status tanah Terminal Mayang Terurai dan Pasar Pagi Cik Puan dengan Luas 35 Ha, menurut sejarah dibeli oleh Pemerintah Propinsi Riau. Pada Notulen Rapat tersebut diusulkan sebagai berikut:
  - a) Sebaiknya Tanah Terminal Mayang Terurai Luas 15.875 m<sup>2</sup> sertifikatnya diurus oleh Pemerintah Provinsi Riau;
  - b) Sedangkan Tanah Pasar Pagi Seluas 7.965 m<sup>2</sup> diurus oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
5. Berdasarkan Surat Pernyataan Pemerintah Kota Pekanbaru yang ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan tanggal 16 Mei 2005 menyatakan dengan sesungguhnya Pemerintah Kota Pekanbaru menguasai/memiliki sebidang tanah terletak di Jalan Tuanku Tambusasi/Nangka Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Luas 7.965 m<sup>2</sup> dipergunakan untuk Pasar Cik Puan. Pernyataan tersebut diketahui oleh Lurah dan Camat sebagai Penjabat Pelegalitas dan selanjutnya disampaikan ke BPN Kota Pekanbaru;
6. Pada Tahun 2007, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Surat Walikota Pekanbaru Tanggal 21 September 2007 menyampaikan kepada Gubernur untuk Rencana Pembangunan Pasar di Jalan Nangka di areal Seluas 22.941 m<sup>2</sup> yang terdiri dari Ex. Pasar Cik Puan Seluas 7.965 m<sup>2</sup> dan Lokasi Terminal Mayang Terurai seluas 14.976 m<sup>2</sup>;
7. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor Kpts.1923/XI/2008 Tanggal 11 November 2008 tentang Pengesahan Hak Pengelolaan/Pemakaian Tanah Milik



## **PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

---

- Pemerintah Propinsi Riau untuk Pembangunan Pasar Terminal Cik Puan dan Terminal Angkutan Kota kepada Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru, dan pada diktum KEDUA Surat Keputusan tersebut menyebutkan luas tanah 22.941 m<sup>2</sup> tercatat dalam daftar kekayaan Milik Pemerintah Propinsi Riau;
8. Surat Walikota kepada Gubernur Riau Nomor 109/PP/XI/2008 tanggal 17 November 2008 perihal Rencana Pembangunan Pasar Tradisional Cik Puan, meminta kepastian hukum dan perlu adanya kajian terhadap lahan dimaksud pada angka 6;
  9. Pada Tahun 2008 Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru melalui Surat Nomor 98/PP/X/2008 tanggal 7 Oktober 2008 mengajukan Permohonan Pengukuran Tanah Pasar Cik Puan dan Terminal Mayang Terurai Ke Kantor BPN Kota Pekanbaru;
  10. Berdasarkan Surat Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor 500/680/IV/2009 tanggal 20 April 2009 perihal tanah Ex. Terminal Mayang Terurai dan Pasar Cik Puan menyatakan tanah dimaksud adalah Milik Pemerintah Provinsi Riau, disarankan agar Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi Riau melakukan musyawarah tentang Kepemilikan;
  11. Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Propinsi Riau Nomor 501/PP/2010 tanggal 23 Agustus 2010 perihal Penghentian Sementara Aktivitas Pembangunan di atas lahan tersebut, maka pembangunan di atas tanah ex Pasar Cik Puan pun dihentikan;
  12. Dengan adanya monitoring dan evaluasi dari Tim KORSUPGAH KPK dari tahun 2019 terhadap Manajemen Aset, terbit Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 031/BPKAD/-PBMD/698.2 dan Nomor 032/BPKAD-Peng.Aset/511/2019 pada tanggal 14 Agustus 2019 guna menyikapi Penyelesaian Permasalahan Aset Daerah Lintas Pemerintah Daerah dan salah satunya adalah aset tanah Cik Puan. Atas Berita Acara dimaksud, telah ditindaklanjuti dengan Permohonan Surat Keputusan Hibah oleh Walikota Pekanbaru kepada Gubernur Riau Nomor 032/BPKAD-ASET/2891/2019 Tanggal 20 November 2019.
  13. Sejalan proses koordinasi serta penyelesaian administrasi sesuai regulasi antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan bantuan mediasi oleh tim KPK RI, akhirnya pada tanggal 26 April resmi ditandatangani Berita Acara Hibah Barang Milik Daerah antara kedua belah pihak dengan Nomor 96/BA/2021 dan Nomor 032/BPKAD-ASET/19/2021 dimana Pemerintah Provinsi Riau menghibahkan beberapa persil tanah dan termasuk salah satu diantaranya adalah tanah pasar Cik Puan beserta eks Terminal Mayang Terurai seluas 22,941 m<sup>2</sup>.
  14. Hingga saat ini, bangunan pasar modern di tanah Pasar Cik Puan masih tercatat sebagai Konstruksi Dalam Pembangunan (KDP) pada Dinas Cipta Karya yang sekarang menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru sejak Tahun 2009 dengan nilai pekerjaan Rp14.573.750.520,00. Untuk kedepannya, sedang dipersiapkan audit kelayakan struktur bangunan dan persiapan langkah-langkah pemanfaatan aset.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

15. Pada tanggal 19 Februari 2023, kembali terjadi musibah kebakaran pada los kios yang dibangun diatas tanah Pasar Cik Puan. Bangunan dimaksud tidak tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Pekanbaru disebabkan bersumber dari swadaya masyarakat. Dari total los kios yang kurang lebih berjumlah 500 unit, 400 unit diantaranya hangus terbakar. Saat ini Pemerintah Kota Pekanbaru sedang mempersiapkan pembangunan TPS (Tempat Penampungan Sementara) bagi para pedagang yang terdampak bencana kebakaran, yang bersumber dari Belanja Tidak terduga (BTT) APBD Pemerintah Kota Pekanbaru TA. 2023.

#### 6.3. INFORMASI PENYERTAAN MODAL

Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya. Peraturan Daerah tersebut pada pokoknya bertujuan untuk penyertaan modal berupa aset tanah seluas lebih kurang 2.659.687 m<sup>2</sup> senilai Rp124.366.017.460,00. Oleh karena Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2019 belum secara eksplisit menyebutkan pihak mana yang akan disertakan modal berupa aset tanah Kawasan Industri Tenayan (KIT) senilai Rp124.366.017.460,00 tersebut, maka pada tanggal 21 Februari 2020 diterbitkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya. Atas dasar Perda dimaksud, dilaksanakan Berita Acara Serah Terima Penyerahan Barang Milik Daerah atas Penyertaan Modal Kawasan Industri Tenayan (KIT) Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Pekanbaru kepada PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru Nomor : 032/BPKAD-PENG.ASET/760/2020 dan Nomor : 56/ BA/SPP/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020. Sehubungan BAST dimaksud, telah dilakukan penghapusan aset tetap atas tanah Kawasan Industri Tenayan (KIT) dengan Nilai Perolehan Rp6.273.000.000,00 dengan SK Walikota Nomor 614 Tahun 2020 tanggal 12 November 2020.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2015 dan Perda Nomor 5 Tahun 2022 atas Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya yaitu kepada PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru telah merealisasikan penambahan Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Siak dengan SP2D Nomor: 10862/SP2D/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2023 sebesar Rp10.000.000.000,00

Sampai dengan akhir tahun 2023, total penyertaan modal Pemerintah Kota Pekanbaru kepada BUMD sebesar sebagai berikut:

- a. PD. Pembangunan (PT. SPP) Kota Pekanbaru sebesar Rp147.616.517.460,00 (seratus empat puluh tujuh miliar enam ratus enam belas juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh rupiah) setelah ditambah aset tanah Kawasan Industri Tenayan (KIT) senilai Rp124.366.017.460,00;



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

- b. PDAM Tirta Siak Pekanbaru sebesar Rp168.581.276.100,00 (seratus enam puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah);
- c. PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- d. PT. Bank Riau Kepri sebesar Rp15.647.400.000,00 (lima belas miliar enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- e. PT. Riau Airlines sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah); dan
- f. PT. Bumi Siak Pusako sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

#### 6.4. GUGATAN PERDATA OLEH PT. MULTI INTI GUNA

Pada Tahun 2015, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru melakukan kerjasama pengangkutan sampah dengan PT. Multi Inti Guna (MIG) yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 25/KONTR-DKP/PERSAMPAHAN/XII/2015 tanggal 3 Nopember 2015. Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan tersebut telah dilakukan dengan addendum Nomor 25.a/ADD.I/KONTR-DKP/PERSAMPAHAN/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015.

Dalam addendum kontrak tersebut dinyatakan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

- 1. Melaksanakan pengelolaan pengangkutan sampah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- 2. Sampah yang diangkut adalah:
  - a. Sampah rumah tangga;
  - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga;
- 3. Penanganan sampah di sepanjang jalan protokol, dan jalan-jalan yang ada di 8 (delapan) kecamatan yang akan dikelola oleh penyedia, selanjutnya sampah diangkut dan dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Muara Fajar;
- 4. Pengumpulan sampah dari pemukiman masyarakat (*door to door*) menuju TPS;
- 5. Pengumpulan sampah dari TPS (Tempat Pembuangan Sementara) baik yang dibangun oleh masyarakat dan swasta lainnya ke TPA Muara Fajar;
- 6. Melaksanakan penanganan pengangkutan sampah pada **prioritas primer** yaitu (a) Perdagangan Regional; (b) Pemerintahan; (c) Pelabuhan Penumpang dan Barang; (d) Terminal AKAP; (e) Pelabuhan Udara; (f) Industri; (g) Pergudangan; (h) Pendidikan Tinggi; (i) Rumah Sakit; dan (j) *Sport Center* dan penanganan pada **prioritas sekunder** adalah (a) Perdagangan Kota; (b) Niaga/Komersial; (c) Pusat Kecamatan dan Wilayah Pengembangan; (d) Terminal Kota; dan (e) Permukiman ke TPA Muara Fajar;



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

7. Penyapuan dan pembersihan sisa sampah yang berada di sekitar lokasi TPS, setelah sampah diangkat ke dalam mobil angkutan;
8. Penyedia didampingi pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru untuk berkoordinasi dengan pihak Kecamatan, Kelurahan, RT/RW tentang pola pengangkutan sampah di lingkungan perumahan/pemukiman secara terpadu, teratur dan terus menerus serta bekerja sama dengan organisasi masyarakat (LPM/Pribadi/dll);
9. Pengadaan armada pengangkutan sampah sesuai yang dibutuhkan, peralatan dan suku cadang serta bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan;
10. Penyediaan tenaga kerja sesuai dengan jumlah dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan dengan mengutamakan/memberdayakan Tenaga Harian Lepas (THL) yang telah bekerja sebelumnya di bawah naungan Kecamatan dan Dinas terkait.
11. Penyediaan alat-alat pendukung untuk melaksanakan pekerjaan;
12. Target tonase sampah yang diangkat adalah sebanyak 610 ton per hari.

Dari evaluasi pelaksanaan kontrak oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan sering kali ditemukan PT. MIG tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan evaluasi tersebut, Dinas Kebersihan dan Pertamanan telah memberikan Surat Peringatan kepada PT. MIG sebanyak 35 kali. Selain itu, Dinas Kebersihan dan Pertamanan juga telah mengeluarkan surat teguran sebanyak 3 kali.

Selanjutnya, dengan pertimbangan PT. MIG tidak mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian meski telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerja, maka melalui Surat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 232/DKP/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 perihal Pemutusan Kontrak Kerjasama Pengangkutan Sampah, terhitung tanggal 15 Juni 2016 (tanggal dikeluarkannya surat) PA/PPK menyatakan **pemutusan kontrak sepihak dengan PT. Multi Inti Guna selaku Penyedia.**

Atas pemutusan kontrak tersebut, PT. MIG telah mendaftarkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor 252/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 25 Oktober 2016.

Pada tanggal 29 Mei 2017 Majelis Hakim membacakan putusannya di mana amar putusannya adalah sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

#### DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*);
3. Menyatakan Pemutusan Surat Perjanjian Jasa Angkutan Persampahan Nomor 25/KONTR-DKP/PERSAMPAHAN/XI/2015 tanggal 03 November 2015 jo. Addendum Pertama Nomor 25.a/ADD.I/KONTR-DKP/PERSAMPAHAN/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 antara Tergugat I dengan Penggugat sebagaimana dimaksud didalam surat Tergugat II Nomor 232/DKP/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 perihal Pemutusan Kontrak Kerjasama Pengangkutan Sampah, adalah tidak sah dan dibatalkan;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memperbaharui dan/atau melakukan addendum terkait klausula pencapaian target volume sampah secara bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat I dan memperpanjang masa berlaku Surat Perjanjian Jasa Angkutan Persampahan Nomor 25/KONTR-DKP/PERSAMPAHAN/XI/2015 tanggal 03 November 2015 jo. Addendum Pertama Nomor 25.a/ADD.I/KONTR-DKP/PERSAMPAHAN/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 antara Tergugat I dengan Penggugat, sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama instansi terkait, untuk melakukan opname hasil kerja yang telah dicapai oleh Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar hasil pekerjaan yang telah dicapai oleh Penggugat sesuai hasil opname tersebut secara seketika dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat secara seketika dan sekaligus akibat kerugian materil yang diderita oleh Penggugat, sejumlah uang Rp 12.771.343.138,00 (dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh delapan rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 563.980,00 (lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan putusan Hakim tersebut Walikota Pekanbaru tidak menerima hasil putusan tersebut, dan memerintahkan untuk melakukan upaya hukum banding. Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya mengajukan banding pada tanggal 08 Juni dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 252/Pdt-G/2016/PN/Pbr, dan memasukkan Memori Banding pada tanggal 12 Juli 2017.

Pada tanggal 07 Desember 2017 Pengadilan Negeri Pekanbaru menyampaikan Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 192/PDT/2017/PT.PBR jo Nomor 252/Pdt-G/2016/PN/Pbr yang isi putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan dari Pembanding I, II semula Tergugat I, II;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 252/Pdt-G/2016/PN/Pbr tanggal 29 Mei 2017 yang dimohonkan Banding tersebut;



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

3. Membebaskan biaya perkara Pembanding I, II semula Tergugat I, II dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Terkait dengan putusan Banding tersebut Walikota Pekanbaru kembali memerintahkan untuk melakukan upaya hukum Kasasi. Oleh karena itu Tergugat I, II melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Kasasi pada tanggal 20 Desember 2017 dengan Akta Penyataan Permohonan Kasasi Nomor 252/Pdt-G/2016/PN.Pbr *juncto* Nomor 192/PDT/2017/PT.PBR. kemudian kuasa Tergugat I, II telah menyerahkan Memori Kasasi pada tanggal 03 Januari 2018.

Atas kasasi tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan keputusan Nomor 1365 K/Pdt/2018, yang isi putasanya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

### DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechsmatige daad*);
3. Menyatakan Pemutusan Surat Perjanjian Jasa Angkutan Persampahan Nomor 25/KONTR-DKP/PERSAMPAHAN/XI/2015 tanggal 03 November 2015 *juncto* Addendum Pertama Nomor 25.a/ADD.I/KONTR-DKP/PERSAMPAHAN/ XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 antara Tergugat I dengan Penggugat sebagaimana dimaksud di dalam surat Tergugat II Nomor 232/DKP/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 perihal Pemutusan Kontrak Kerjasama Pengangkutan Sampah, adalah tidak sah dan dibatalkan;
4. Menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat secara seketika dan sekaligus akibat kerugian materil yang diderita oleh Penggugat, sejumlah uang Rp12.771.343.138,00 (dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh delapan rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp563.980,00 (lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; dan
7. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

### TINDAK LANJUT HASIL GUGATAN

Berdasarkan akibat kerugian materil yang di derita oleh Penggugat, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Tahun Anggaran 2022 telah melakukan pembayaran atas kerugian tersebut dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 6.1. Utang Belanja Karena Gugatan oleh PT Multi Inti Guna (MIG)**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Kerugian Materil	12.771.343.138,00	12.771.343.138,00
2	Rincian Pembayaran (SP2D)		
	No. 00776/SP2D/II/2022 tanggal 25/02/2022	2.500.000.000,00	10.000.000.000,00
	No. 05338/SP2D/VI/2022 tanggal 31/05/2022	2.500.000.000,00	
	No.10842/SP2D/IX/2022 tanggal 02/09/2022	2.500.000.000,00	
	No. 00274/SP2D/III/2023 tanggal 07/02/2023	2.500.000.000,00	
3	Sisa Pembayaran		<b>2.771.343.138,00</b>

### 6.5. DAMPAK PASCA *CORONA VIRUSE DISEASE 2019 (COVID-19)* PADA PENDAPATAN YANG BERSUMBER DARI KERJASAMA BGS PEREMAJAAN BEBERAPA PASAR

Sehubungan adanya ancaman global akibat menyebarnya *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di dunia pada tahun 2019, dan di Indonesia pada Maret 2020, berdampak membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Dalam hal ini yang turut merasakan dampaknya adalah beberapa kerjasama Pemerintah Kota Pekanbaru dengan mitra dalam hal BGS Peremajaan beberapa pasar. Berikut ini beberapa perjanjian kerjasama BGS yang turut terdampak sehingga mengalami kendala dalam hal pembayaran royalti/kontribusi tetap, antara lain sebagai berikut :

#### 1. PT. Makmur Papan Permata sebagai Mitra Kerjasama Peremajaan Pasar Sukaramai/Sukaramai Trade Center

Pada perjanjian kerjasama kemitraan pengelolaan Pasar Sukaramai dengan mitra yakni PT. Makmur Papan Permata (PT.MPP), berdasarkan perjanjian nomor 270-WK/1996 dan 018/MPP/XI/1996 tanggal 30 November 1996 dan Adendum Perjanjian Kerjasama pasca musibah kebakaran Pasar Sukaramai pada tanggal 8 Desember 2015 dengan nomor 100/PKS/X/2016/15 dan 06/MPP/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016. Selanjutnya kembali diadendum pada tanggal 8 Januari 2018 dengan perjanjian nomor 100/KERJ/I/07/2018 dan nomor 01/MPP/I/2018 yang menyepakati mengenai pemanfaatan sebagian tanah jalan Imam Bonjol yang beralih fungsi menjadi pintu masuk, akses jalan lingkungan dalam Kawasan serta lahan parkir.

Sehubungan dengan perjanjian kerjasama beserta adendum diatas, Pemerintah Kota Pekanbaru berhak atas royalti dan pembagian keuntungan antara lain sebagai berikut :



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

- a) PT. MPP berkewajiban membayar royalti/kontribusi ke Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru sebesar Rp100.000.000,00 per tahun atau 25% dari hasil laba bersih pengelolaan bangunan (telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pekanbaru bahwa yang disetorkan adalah sebesar Rp100.000.000,00 untuk menghindari kerancuan);
- b) Atas addendum pertama pada tahun 2016, PT. MPP berkewajiban membayar royalti/kontribusi tambahan s.d 16 Oktober 2046 dengan total sebesar Rp10.689.950.858,56;
- c) Pemerintah Kota Pekanbaru berhak menerima bagian laba bersih dari pengelolaan taman parkir sebesar 30% setelah dipotong pajak sesuai dengan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Pada 21 Desember 2020 dan 12 Maret 2021, PT. MPP mengajukan permohonan penundaan jadwal pembayaran royalti/kontribusi tahunan tahun 2020 yang disebabkan oleh dampak dari wabah *COVID-19* yang membuat penjualan atas toko tidak maksimal. Atas surat tersebut, pada tanggal 22 Maret 2021 Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan jawaban dengan meminta PT. MPP mengirimkan Laporan Keuangan *Audited* tahun 2020 dan dokumen pendukung lainnya sebagai dasar Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menetapkan kebijakan terkait penundaan jadwal pembayaran royalti dan/atau penghapusan denda keterlambatan. PT. MPP telah menyampaikan hasil Laporan Keuangan *Audited* dari tahun 2016 s.d 2020, dan berdasarkan laporan dimaksud menyajikan bahwa PT.MPP mengalami kerugian meskipun angka rasio lancar perusahaan masih lebih dari 1.

Pada saat rapat koordinasi perangkat kerja terkait bersama PT. MPP terakhir pada tanggal 16 Februari 2022, PT. MPP masih mengalami kendala dalam pembayaran royalti/kontribusi tetap akibat pemulihan pasca bencana kebakaran dan ditambah dengan adanya bencana global pandemi *COVID-19*, sehingga piutang jatuh tempo tercatat s.d. tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a) Kontribusi tetap atas perjanjian awal 2020 dan 2021 senilai **Rp200.000.000,00;**
- b) Kontribusi tetap tambahan atas addendum perjanjian tahun 2019-2020 senilai **Rp594.930.000,00;**
- c) Denda keterlambatan atas kontribusi tetap akibat perjanjian awal dan addendum perjanjian (temuan LHP BPK atas LKPD Pemko Pekanbaru TA. 2020) senilai Rp125.000.000,00 dan Rp70.825.000,00 atau total sebesar **Rp195.825.000,00.**

Tindak lanjut dari hasil pertemuan tersebut, PT. MPP telah menyurati Pemerintah Kota Pekanbaru dengan nomor 001.23/MPP-CAB/PKU/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 Perihal : Permohonan Tata Cara Pembayaran Kewajiban Royalti/Kontribusi, Denda dan PBB yang antara lain berisi bahwa :

- a) PT. MPP telah pernah mengangsur denda keterlambatan pembayaran kontribusi tahun 2016 sebesar Rp45.000.000,00 , sehingga total denda keterlambatan yang diakui PT. MPP hanya sebesar **Rp150.825.000,00**
- b) PT. MPP selanjutnya bermohon terkait pembayaran kewajiban royalti/kontribusi tetap sekaligus pembayaran denda hasil temuan LHP BPK



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

RI serta PBB, akan dibayarkan secara proporsional setiap bulannya dimulai dari 16 Mei 2022 dan berakhir pada 16 April 2025 (36 bulan).

Terkait hal dimaksud, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Tim Percepatan Tindak Lanjut Temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2020 terkait Kontribusi dan Sanksi Administratif Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada PT. PMJ dan PT. MPP berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 1032 Tahun 2021, saat ini sedang menyiapkan administrasi penetapan persetujuan pemberian keringanan dalam hal pola pembayaran kontribusi tetap dan denda administratif kepada PT. PMJ dan PT. MPP selama masa pandemi *COVID-19*. Hal ini dimuat dalam SK Walikota Pekanbaru Nomor 374 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Keterlambatan Pembayaran Royalti/Kontribusi Tahun 2020-2021 dan Pola Pembayaran Angsuran Atas Royalti/Kontribusi Tahun 2020-2021 sebagai Dampak Penyebaran Wabah *Corona Virus Disease* 2019 kepada PT. Makmur Papan Permata.

Menindaklanjuti penetapan dimaksud, PT MPP sampai kurun waktu Tahun 2023 telah melakukan beberapa hal sebagai berikut :

- a) Menyelesaikan denda keterlambatan atas kontribusi tetap akibat perjanjian awal dan addendum perjanjian (temuan LHP BPK atas LKPD Pemko Pekanbaru TA. 2020) senilai Rp80.000.000,00 dan Rp70.825.000,00 atau total sebesar **Rp150.825.000,00**;
- b) Menyelesaikan pembayaran kontribusi tetap atas perjanjian awal untuk 2020 s.d 2021 senilai **Rp200.000.000,00**;
- c) Mengangsur keterlambatan kontribusi tetap tambahan atas addendum perjanjian untuk tahun 2019-2020 yang jatuh tempo pada 16 Oktober 2020 dan 16 Oktober 2021 senilai **Rp594.930.000,00** yang rutin diangsur per bulan pada tahun berjalan oleh PT. MPP dan ditargetkan selesai pada April 2024.

### 2. PT. Peputra maha Jaya sebagai Mitra Kerjasama Peremajaan Pasar Senapelan

Mengacu kepada perjanjian antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan pihak PT. Peputra Maha Jaya (PT. PMJ) nomor 131 Tahun 2002 dan nomor 497/OMJ/VII/2002 tanggal 3 Agustus 2002 yang menyepakati beberapa hal yang menjadi hak Pemerintah Kota Pekanbaru , antara lain sebagai berikut :

- a) Pihak Pengelola Pasar Senapelan wajib memberikan kompensasi atas tanah dan bangunan senilai Rp2.500.000.000,00;
- b) Pihak Pemerintah Kota Pekanbaru berhak menerima royalti atas penggunaan tanah sebesar **37% (tiga puluh tujuh persen) dari total penerimaan biaya pelayanan jasa, setelah dipotong biaya pemeliharaan (*maintenance fee*)** terhitung mulai pasar beroperasi sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjasama, sesuai laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik **atau minimal sebesar Rp110.000.000,00**;
- c) Pihak Pemerintah Kota Pekanbaru berhak menerima bagian laba bersih sebesar 30% dari laba/keuntungan bersih pengelolaan taman parkir setelah dipotong pajak sesuai dengan laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

Selanjutnya pada tanggal 23 September 2020 dilakukan adendum perjanjian kerjasama peremajaan Pasar Senapelan antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan pihak PT. PMJ di depan notaris Rina Hamzah, SH, MM, M.Kn dengan nomor 21 disebabkan adanya pengalihan fungsi sebagian bangunan kios pasar menjadi hotel. Adendum akibat pengalihan fungsi ini menyebabkan Pemerintah Kota Pekanbaru berhak menerima **penambahan kontribusi tetap** yang naik progresif setiap tahunnya semenjak tahun 2016 terhitung saat hotel mulai beroperasi.

Pada 20 Juli 2020, 14 Oktober 2020, 30 November 2020 dan 23 Desember 2020, PT. PMJ mengajukan permohonan pembebasan royalti tahun 2020 yang disebabkan wabah *COVID-19* yang berdampak atas penurunan jumlah pengunjung. Atas surat dimaksud telah diberikan jawaban pada tanggal 22 Maret 2021 bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru tidak dapat memberikan penghapusan/pembebasan royalti dan meminta PT. PMJ mengirimkan laporan keuangan audited tahun 2020 dan dokumen pendukung lainnya sebagai dasar Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menetapkan kebijakan terkait penundaan jadwal pembayaran *royalti* dan/atau penghapusan denda keterlambatan.

Hingga rapat koordinasi satker terkait bersama PT. PMJ terakhir pada tanggal 21 Desember 2021, PT. PMJ masih mengalami kendala dalam pembayaran kontribusi tetap pasar dan hotel akibat adanya bencana global pandemik *COVID-19*, sehingga piutang jatuh tempo tercatat s.d. tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a) Kontribusi tetap atas pasar 2020 dan 2021 senilai **Rp220.000.000,00**
- b) Kontribusi tetap atas penambahan fungsi hotel 2016-2018, 2020-2021 senilai **Rp194.396.300,00**
- c) Bagi hasil laba parkir senilai **Rp161.506.410,00** (temuan LHP BPK atas LKPD Pemko Pekanbaru TA. 2020)
- d) Disamping itu terdapat LHP BPK atas LKPD Pemko Pekanbaru TA. 2020 tentang kekurangan pembayaran royalti/kontribusi tetap oleh PT. PMJ sebesar **Rp4.019.492.615,00** disebabkan penafsiran dari kalimat perjanjian bahwa “Pihak Pemerintah Kota Pekanbaru berhak menerima royalti atas penggunaan tanah sebesar **37% (tiga puluh tujuh persen)** dari total penerimaan biaya pelayanan jasa, setelah dipotong biaya pemeliharaan (*maintenance fee*) terhitung mulai pasar beroperasi sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjasama, sesuai laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau minimal sebesar **Rp110.000.000,00**”.

Atas temuan ini, pihak Pemerintah Kota Pekanbaru telah melayangkan beberapa kali surat teguran kepada pihak PT. PMJ antara lain dan mendapatkan balasan surat terakhir dengan nomor 206/M-087/PMJ-LGL/XI/2021 tanggal 26 November 2021, yang intinya bersedia melakukan klarifikasi dan telah diselenggarakan pertemuan pada tanggal 21 Desember 2021. Dari hasil rapat, terkait point temuan a) dan b) diatas, PT. PMJ berharap adanya keringanan pola pembayaran dan bersedia menyerahkan laporan keuangan *audited* dan dokumen pendukung lainnya sebagai bukti tertulis. **Namun hingga saat ini, dokumen tersebut belum disampaikan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru.** Terkait temuan point c) dan d), PT. PMJ telah mengajukan keberatan melalui surat resmi nomor 025/M-013/PMJ-LGL/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 perihal “Keberatan atas pembayaran royalti dan



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

kontribusi pemanfaatan BOT/BGS Pasar Senapelan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” beserta lampiran kajian hukum oleh Tim Ahli.

Dalam tahun 2022, PT. PMJ telah mengirimkan Laporan Keuangan Audited untuk Tahun 2019 dan 2020, namun belum untuk Tahun 2021 serta belum disertai dokumen pendukung lainnya dalam rangka pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru terkait penundaan jadwal pembayaran *royalti* dan/atau penghapusan denda keterlambatan. Dalam tahun berjalan (tahun 2023), PT. PMJ telah mulai mengangsur tunggakan dengan rincian antara lain :

- a) Kontribusi tetap atas pasar 2020 dan 2021 senilai **Rp220.000.000,00**;
- b) Kontribusi tetap atas penambahan fungsi hotel 2020 dan 2021 senilai **Rp38.866.000,00** ditambah **Rp40.809.300**.

Disamping itu, selama tahun 2022 dan 2023, tunggakan atas kontribusi tetap pasar dan hotel telah bertambah sebanyak **Rp220.000.000,00** dan **Rp40.809.300** ditambah **Rp42.849.765** (belum termasuk perhitungan denda keterlambatan). Pemerintah Kota Pekanbaru melalui BPKAD Kota Pekanbaru telah menyurati pihak PT. PMJ terkait pelaporan audited PT. PMJ, Tindak Lanjut LHP BPK serta penyelesaian kewajiban lainnya melalui surat nomor 14.04.00/BPKAD-ASET/II/97 tanggal 20 Februari 2023.

### 3. PT. Agung Rafa Bonai sebagai Mitra Kerjasama BGS Pasar Induk

Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Pekanbaru menandatangani perjanjian kerjasama pembangunan dan pengelolaan Pasar Induk Kota Pekanbaru dengan PT. ARB melalui perjanjian kerjasama nomor 100/PKS/X/2016/20 dan nomor 07/ARB-KSO/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016. Selanjutnya perjanjian tersebut diadendum dengan perjanjian nomor 100/KERJASAMA/38/X/2018 dan nomor 08/ARB-KSO/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang berisi penambahan jangka waktu pembangunan Pasar Induk, dari semula 24 (dua puluh empat) bulan semenjak perjanjian ditandatangani, mundur menjadi tanggal 19 Oktober 2019.

Dalam perjanjian kerjasama tersebut diatas, Pemerintah Kota Pekanbaru berhak memperoleh kontribusi tahunan dengan total Rp 17.552.226.275,00, memperoleh paling sedikit 10% dari keseluruhan hasil BGS untuk digunakan langsung dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah serta menerima 25% bagian laba bersih dari laba parkir, iklan dan bongkar muat.

Hingga rapat koordinasi terakhir pada tanggal 11 Maret 2022, PT. ARB baru menyelesaikan **60% dari keseluruhan target pembangunan BGS**, serta baru membayarkan 2 (dua) tahun kontribusi tahunan yakni untuk pembayaran tahun 2016 dan 2017, sehingga total piutang jatuh tempo tercatat s.d. tahun 2021 adalah sebesar **Rp779.455.901,00** (kontribusi tahun 2018, 2019 dan 2020). Nilai ini diluar hasil temuan BPK RI terkait denda keterlambatan sebesar **Rp56.198.348,04** (untuk keterlambatan pembayaran tahun 2017 dan 2018). Hasil konfirmasi Pihak PT. ARB kepada BPK RI mengenai sebab keterlambatan pembangunan dan pembayaran kontribusi tetap ini antara lain adalah :

- a) Adanya keterlambatan keluarnya Izin Pembangunan Pasar Induk pada tanggal 31 Juli 2017 dan baru diterima PT. ARB pada tanggal 26 Oktober 2017,



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

sehingga pembangunan tidak dimulai sesuai dengan perjanjian awal. Atas kondisi tersebut, telah dilakukan adendum masa pembangunan selama setahun hingga Oktober 2019.

- b) Adanya kendala dari pendanaan dikarenakan awalnya ada 3 perusahaan untuk pendanaan (KSO), namun dalam perjalanan hanya satu perusahaan saja yakni PT. ARB yang mendanai pembangunan pasar.
- c) Dari hasil wawancara dengan Direktur PT. ARB diketahui bahwa progress fisik dari Februari 2020 s.d. saat ini, belum mengalami peningkatan yakni masih pada angka 60%. Hal ini disebabkan adanya wabah pandemik COVID-19 dan keterbatasan keuangan perusahaan.
- d) Masalah lain yang menjadi permasalahan adalah adanya miskomunikasi antara Pemerintah Kota Pekanbaru pada saat itu melalui Dinas Pasar Kota Pekanbaru yang bersepakat dengan PT. ARB mengenai proses balik nama alas hak kepemilikan Pasar Induk menjadi sertifikat HPL akan diurus dan ditanggung biayanya oleh pihak PT. ARB. Sehingga alas hak kepemilikan Pasar Induk tersebut langsung diserahkan kepada PT. ARB pada tahun 2016. Namun akibat Dinas Pasar melebur ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan karena terbitnya Peraturan Daerah mengenai SOTK Pemerintah Kota Pekanbaru terbaru ditahun 2017, proses sertifikasi ini ternyata tidak berlanjut. Hingga akhirnya, pada bulan Juli tahun 2020 dokumen alas hak kepemilikan tersebut diserahkan kembali kepada Pemerintah Kota Pekanbaru melalui BPKAD Kota Pekanbaru. Selanjutnya atas dokumen alas hak dimaksud telah diserahkan oleh BPKAD kepada Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru pada tanggal 3 Juli 2020 untuk pengurusan sertifikat HPL. Kondisi hingga saat ini, Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru dalam proses penerbitan SK HPL di Kementerian ATR RI. Kendala ini menjadi salah satu justifikasi bagi PT. ARB sehingga tidak dapat menerbitkan sertifikat HGB diatas tanah HPL yang dapat menjadi alternatif solusi pendanaan tambahan dalam hal pembiayaan dari perbankan.

Menurut penyampaian dari pihak PT. ARB, telah disampaikan sebanyak 2 (dua) kali permohonan adendum dan penangguhan royalti kepada Pemerintah Kota Pekanbaru. Surat pertama dengan nomor 20/ARB-IDK-PKU/XI/2020 pada tahun 2021 ditujukan kepada Walikota Pekanbaru, dan surat terakhir dengan nomor 07/ARB-IDK-PKU/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 perihal Permohonan Adendum Ke-3. Dalam pengajuan PT. ARB, memuat beberapa poin mengenai hal-hal yang akan diadendum, antara lain:

- a) Adendum pelaksanaan jangka waktu BGS Pasar Induk diubah dari semula terhitung mulai perjanjian ditandatangani berubah menjadi terhitung dari terbitnya HGB;
- b) Pemko Pekanbaru berkomitmen untuk tidak menerbitkan izin terhadap pasar-pasar sejenis dalam radius 5 kilometer;
- c) Pemko Pekanbaru bersedia memberikan pembebasan atas kontribusi tetap PT. ARB yang tertunggak dan dimulai pembayaran terhitung sejak Pasar Induk mulai beroperasi;
- d) Pihak PT. ARB boleh mengalihkan fungsi sebagian luasan lahan dalam rangka optimalisasi pendapatan.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

- e) Pemko Pekanbaru berkewajiban untuk memindahkan pedagang kedalam areal Pasar Induk sebagaimana komitmen Perjanjian Awal.

Disisi lain, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menyampaikan Surat Teguran Pertama dan Kedua kepada pihak PT. ARB sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. Terkait surat permohonan yang disampaikan oleh PT. ARB, telah dijawab resmi oleh OPD terkait disertai permintaan dokumen pendukung, penunjukan konsultan pengawas serta Laporan Keuangan *Audited* oleh PT. ARB selama kurun waktu tertagih guna merumuskan kebijakan lebih lanjut. Namun hingga saat ini, belum mendapat respon dari PT. ARB. Sebagai informasi tambahan, pada tanggal 30 Agustus 2022, telah terbit Sertifikat HPL atas aset tanah Pasar Induk dengan Nomor 00016 oleh Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia. *Update* untuk kondisi total piutang jatuh tempo tercatat s.d. tahun 2023 adalah sebesar **Rp1.381.351.627** (untuk kontribusi tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022) diluar perhitungan denda tahun berjalan.

### 6.6. PENJELASAN TENTANG PENGELOLAAN TANAH DENGAN SERTIFIKAT HAK PENGELOLAAN LAHAN (HPL) MILIK PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

Kronologis Pengelolaan tanah HPL Pemerintah Kota Pekanbaru , antara lain sebagai berikut :

- I. Pada LHP BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2014, terdapat tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang belum tercatat pada Neraca Kota Pekanbaru minimal sebesar Rp. 197.232.146.000,-. Adapun lokasi HPL dimaksud yaitu :

Tabel 6.2 Lokasi Tanah HPL Pemerintah Kota Pekanbaru

NO	ALAMAT TANAH	LUASAN YANG BELUM TERCATAT (m <sup>2</sup> )	KOREKSI LUAS (m <sup>2</sup> ) menjadi	PENGUNAAN	ALAS HAK	NILAI YANG BELUM TERCATAT (Rp)	KOREKSI NILAI (Rp)	KET
1.	Jl. Juanda, Jl.Karet	4.640	4.640	Pertokoan Jalan Karet	HPL	8.639.680.000	8.639.680.000	berdasarkan Audit BPK Tahun 2015 (dinilai berdasarkan NJOP 2014)
2.	Jl. Ahmad Yani	19.119*	9.526	Pasar Senapelan/ Pasar Kodim	HPL	53.131.701.000*	26.472.754.000	Selesai luasan HPL yang belum tercatat berdasarkan Audit BPK Tahun 2015 (dinilai berdasarkan NJOP 2014)
3.	Jl. Sudirman	26.587**	24.992	Pasar Sukaramai	HPL	135.460.765.000**	127.334.240.000	Selesai luasan HPL yang belum tercatat berdasarkan Audit BPK Tahun 2015 (dinilai berdasarkan NJOP 2014)
4.	Jl.Jend. Sudirman/Jl.KH. Wahid Hasyim Sumahilang	485	485	Pertokoan	HPL	***	2.471.075.000	Dinilai mengacu pada NJOP Jl. Sudirman seperti pasar sukaramai
JUMLAH		50.831	39.643			197.232.146.000	164.917.749.000	



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

- \* Luasan pada Pasar Kodim/Senapelan setelah dilakukan penelusuran, telah termasuk luas SD Negeri 01, 010, 019 dan 156 Senapelan yang tercatat pada KIB dan Neraca **Dinas Pendidikan** seluas **9.593 m<sup>2</sup>**. Hal ini mengacu kepada denah sertifikat HPL dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru dan dimuat didalamnya luasan SDN 01, 010, 019 dan 156 sehingga luas dan nilai Pasar Kodim/Senapelan dikoreksi sebesar luasan dimaksud dan yang menjadi kurang catat adalah seluas **9.526 m<sup>2</sup>** dengan nilai **Rp.26.472.754.000,-** (NJOP per meter persegi pada tahun 2014 sebesar Rp. 2.779.000,-). Adapun Denah Terlampir.
- \* Luasan pada Pasar Sukaramai setelah dilakukan penelusuran, telah termasuk Pasar Agussalim yang tercatat pada KIB dan Neraca **Dinas Pasar** seluas **1.595 m<sup>2</sup>**. Hal ini mengacu kepada denah sertifikat HPL dari BPN Kota Pekanbaru dan Pasar Agussalim terdaftar sebagai luasan Bangunan M sehingga luas dan nilai Pasar Sukaramai dikoreksi sebesar luasan dimaksud sehingga yang menjadi kurang catat adalah seluas **24.992 m<sup>2</sup>** dengan nilai **Rp.127.334.240.000,-** (NJOP per meter persegi pada tahun 2014 sebesar Rp. 5.095.000,-). Adapun Denah Terlampir.
- \* Luasan yang belum tercatat pada Jl. Jend. Sudirman/Jl.KH. Wahid Hasyim Sumahilang sebesar 485 m<sup>2</sup> belum dilakukan penilaian saat audit BPK Tahun 2014, oleh karena itu dilakukan penilaian dengan menggunakan NJOP seperti Pasar Sukaramai Jalan Sudirman sebesar Rp. 5.095.000,-/m<sup>2</sup>, sehingga didapatkan nilai sebesar **Rp. 2.471.075.000,-**.
- \* Sehingga Total nilai yang harus dicatatkan berubah dari Rp. **197.232.146.000,-** menjadi **Rp. 164.917.749.000,-**.

Berdasarkan rekomendasi BPK RI, pemerintah Kota Pekanbaru harus mencatat tanah HPL dimaksud kedalam Neraca. Terhadap hal ini, pada Tahun 2015 BPKAD selaku pembantu pengelola BMD menyikapi untuk mencatat aset tanah HPL tersebut kedalam Neraca BPKAD Kota Pekanbaru pada akun Unit Pengguna Barang Pengelola BMD di SKPD Pengguna BPKAD (dalam aplikasi SIMDA BMD).

- II. Pada Tahun 2015 Pemerintah Kota Pekanbaru juga telah membentuk Tim Inventarisasi Tanah HPL Milik Pemerintah Kota Pekanbaru yang dikoordinir oleh Bagian Hukum bersama SKPD terkait. Kegiatan ini diakomodir pada APBD Perubahan 2015 dan telah menginventarisir ke bangunan-bangunan yang berdiri diatas tanah HPL Pemerintah Kota Pekanbaru. Dari sisa luasan yang belum dicatat sebesar 39.643 m<sup>2</sup>, tim telah menelusuri aset tanah dimaksud seluas 16.113,5 m<sup>2</sup> berdasarkan 254 dokumen perjanjian pihak ketiga dengan Pemerintah Kota Pekanbaru. Luasan ini merupakan hasil inventarisasi pada lokasi HPL di Pasar Sukaramai (Jalan Imam Bonjol, Jend. Sudirman, Hasyim Ashari, Gambir, HOS.Cokroaminoto, WS Mongonsidi, Kopi, Cengkeh, Agussalim, Alamuddinsyah), Jalan Karet/Juanda serta Jalan Teratai dan A.Yani (berdasarkan hasil laporan Kegiatan Inventarisasi dan Penataan Hak Pengelolaan (HPL) Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2015). Kegiatan ini juga telah melakukan penagihan terhadap tunggakan retribusi HPL sebesar Rp.555.178.771,- di Tahun 2015.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

III. Pada Tahun 2016, Pemerintah Kota Pekanbaru kembali membentuk Tim untuk melakukan inventarisasi guna dapat memetakan seluruh luasan Tanah HPL Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. Setelah dilakukan inventarisasi selama  $\pm 3$  (tiga) bulan (Bulan Oktober sampai dengan Desember 2016), dihasilkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Telah dapat dipetakan luasan seluruh lokasi Tanah HPL Milik Pemerintah Kota Pekanbaru secara rinci, baik yang dimanfaatkan secara BGS, dimanfaatkan oleh perorangan dengan penerbitan HGB diatas HPL serta Penggunaan tanah HPL untuk menunjang Tupoksi Pemerintah Kota Pekanbaru sendiri. Data inventarisasi yang dapat menggambarkan luasan tanah HPL Milik Pemerintah Kota Pekanbaru ini berupa :
  - a. Data Primer yang diperoleh dari hasil turun lapangan ke tiap lokasi, pengukuran langsung oleh tim serta data dari hasil wawancara dengan Perorangan Pemilik HGB diatas HPL.
  - b. Data sekunder yang berasal dari Perjanjian dengan Perorangan Pemilik HGB diatas HPL, Sertifikat HPL Milik Pemerintah Kota Pekanbaru, Peta Lokasi HPL dari BPN Kota Pekanbaru, Perjanjian BGS Pemko Pekanbaru dengan Mitra, serta Sertifikat HGB diatas HPL Milik Perorangan dan Mitra BGS.

Rekapitulasi luasan tanah HPL Milik Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan hasil inventarisasi pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

**Tabel.6.3 Rekapitulasi luasan tanah HPL Milik Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan hasil inventarisasi pada Tahun 2016**

No	No. Sertifikat	Lokasi	Luas	Luas BGS	Luas Non BGS				
				Data	Inven	Selisih	Data	HGB Inven	Selisih
1	SK.2/HPL/DA/1972	Jl. Sudirman Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota	65.807	36.446	35.864	582	29.361	30.486	1.125
2	SK.48/HPL/DA/1981	Jl. A Yani Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan	37.919	18.500	18.500	-	19.419	20.553	1.134
3	26/HPL/BPN/2000	Jl. Hang Tuah Kel. Sukamulia Kec. Sail	5.540	5.540	5.540	-	-	-	-
4	288/HPL/BPN/85	Pasar Bawah Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan	4.210	4.210	4.210	-	-	-	-
5	50/HPL/BPN/91	Jl. Sudirman Kel. Sumahilang Kec. Pekanbaru Kota	485	-	-	-	485	485	-
6	SK.4/HPL/DA/1974	Jl. Karet Kel. Sago Kec. Senapelan	4.640	-	-	-	4.640	4.163	(477)
		Jumlah	118.601	64.696	64.114	582	53.905	55.687	1.782

Adapun selisih hasil dimaksud dapat dijelaskan adalah luasan jalan antar blok pada Pasar Sukaramai yang tidak termasuk dalam hasil pengukuran Tim Inventarisasi HPL Tahun 2016. Dokumen pendukung yang dapat menjelaskan adalah Sertifikat HGB Induk Pasar Sukaramai seluas a.n. PT. Makmur Papan Permata Nomor 490 tahun 2001 seluas 35.864 m<sup>2</sup>.

2. Secara rinci, Hasil Inventarisasi telah dituangkan per lokasi dan per pemegang HGB / Perjanjian yang saat ini memanfaatkan tanah HPL Milik Pemerintah Kota Pekanbaru serta diberi label inventarisasi masing-masing untuk identifikasi sehingga mudah dalam mengenali pada peta serta foto/dokumentasi bangunan



## **PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)**

---

diatas tanah HPL, sebagaimana tertuang didalam Laporan Hasil Inventarisasi Tanah HPL Milik Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2016. Namun disamping itu, inventarisasi Tanah HPL masih menemukan beberapa hambatan yang perlu menjadi perhatian untuk dapat disempurnakan pada periode kedepannya. Beberapa hal yang menjadi hambatan antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Tidak seluruh pemegang HGB memberikan data yang diminta secara keseluruhan;
- b. Ketika tim turun ke lapangan rata-rata yang ditemui oleh tim adalah penyewa terhadap bangunan diatas tanah HPL, dan pemegang HGB pun tidak meninggalkan dokumen yang diminta pada penyewa;
- c. Tidak semua pemegang HGB yang datang ke kantor BPKAD memenuhi surat panggilan untuk melakukan wawancara ketika pemegang hak yang tidak dapat ditemui dan tim pun tidak mendapatkan dokumen yang diminta saat turun lapangan;
- d. Terdapat beberapa orang pemegang HGB atau penghuni bangunan yang kurang responsif terhadap kehadiran tim untuk melakukan pendataan;
- e. Kesulitan dalam hal mencari kesesuaian antara dokumen perjanjian HPL yang ada dengan sertifikat HGB diatas HPL yang terbit karena adanya pengalihan kepemilikan tanpa sepengetahuan Pemerintah Kota Pekanbaru serta detail/rincian dalam perjanjian tidak lagi sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.
- f. Dan hal-hal lain yang memungkinkan adanya kesalahfahaman terhadap pengakuan pemegang hak terhadap bangunan yang mereka miliki.

IV. Pada Tahun 2017, guna menindaklanjuti hasil laporan Tim Inventarisasi Tanah HPL Milik Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2016, telah dilakukan beberapa hal antara lain sebagai berikut :

- a. Hasil inventarisasi Tanah HPL Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2016 telah ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru dengan SK Walikota Pekanbaru Nomor 778 Tahun 2017 Tanggal 25 Oktober 2017 tentang Hasil Inventarisasi Tanah Hak Pengelolaan Lahan Milik Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2016.
- b. BPKAD Kota Pekanbaru telah menyusun sebuah kajian internal yang disampaikan melalui Telaahan Staf Nomor 032/BPKAD-Peng.Aset/644 Tanggal 30 November 2017 Perihal Penetapan Pengembangan dan Penataan Lokasi HGB diatas tanah HPL milik Pemerintah Kota Pekanbaru yang memuat pertimbangan tentang langkah-langkah atau alternatif pilihan yang dapat diambil oleh Walikota Pekanbaru sebagai Pemegang Kuasa atas BMD sekaligus pengambil kebijakan atas pengelolaan BMD. Telaahan Staf dimaksud dikirim kepada Walikota Pekanbaru melalui Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, dan Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru selaku Pengelola



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

Barang mendisposisi kembali kajian dimaksud dengan meminta agar dilakukan kajian yang lebih komprehensif oleh tim khusus/pihak independen yang lebih kompeten sebelum dilaporkan kepada Walikota.

- c. Terkait point 4.b diatas, BPKAD Kota Pekanbaru telah melaksanakan Kajian Pengelolaan BMD oleh Pihak Independen dengan judul kajian Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2018 dengan objek aset Tanah HPL milik Pemerintah Kota Pekanbaru. Maksud dari adanya kajian dimaksud adalah untuk “mewujudkan perencanaan dan pengelolaan aset yang lebih produktif, efektif, dan efisien serta dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk meningkatkan PAD Kota Pekanbaru”.
- V. Guna menindaklanjuti rekomendasi BPK tentang penyusunan dasar hukum pemanfaatan tanah HPL yang ditetapkan oleh Walikota, BPKAD pada TA. 2019 juga telah melaksanakan kajian terhadap hal dimaksud, hingga menghasilkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Kota Pekanbaru. Namun seiring dengan adanya beberapa perubahan kebijakan oleh Kepala Daerah pada waktu itu dalam hal indeks tarif sewa serta jangka waktu sewa, maka dilakukan penyesuaian terkait hal dimaksud dengan terbitnya Perwako Nomor 35 Tahun 2022 tentang Revisi atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Kota Pekanbaru. Guna mendukung regulasi terbaru dimaksud, maka BPKAD Kota Pekanbaru telah mempersiapkan surat edaran sekaligus pemberitahuan yang ditandatangani oleh Bapak Pj Walikota Pekanbaru guna memberitahukan adanya perubahan regulasi terkait pemanfaatan Tanah HPL Pemerintah Kota Pekanbaru kedepannya.
- VI. Dengan tujuan mensosialisasikan Perwako Nomor 35 Tahun 2022 dimaksud, maka pada Tanggal 9 Mei 2023 dilakukan rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru selaku Pengelola Barang yang dihadiri oleh Satker terkait termasuk Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru beserta jajaran. Dalam rapat pendahuluan dimaksud disepakati beberapa hal sebagai berikut :
- a. Percepatan Sertifikasi HPL Pemerintah Kota Pekanbaru yang tidak ditemukan asli alas hak kepemilikannya;
  - b. Melakukan survey ke lokasi aset tanah HPL Pemko Pekanbaru guna *update* data sekaligus menagih tunggakan retribusi tanah HPL sekaligus menindaklanjuti LHP BPK RI;
  - c. Menyurati Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru untuk permohonan pemblokiran atas perpanjangan, pemasangan hak tanggungan serta peralihan hak terhadap HGB diatas HPL Pemerintah Kota Pekanbaru;
  - d. Melaksanakan rekonsiliasi data dengan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru terkait data HGB diatas HPL Pemerintah Kota Pekanbaru;



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

- e. Mengkaji kembali terkait implementasi Perwako Nomor 35 Tahun 2022 dan melakukan penyesuaian ataupun perbaikan terhadap regulasi terkait;
  - f. Kedepannya mempersiapkan secara matang mengenai rencana sosialisasi kepada para Pemegang HGB diatas HPL Pemko Pekanbaru, serta mempertimbangkan keterlibatan aparat hukum guna penertiban pemanfaatan tanah HPL.
- VII. Pada Tahun 2023, Pemerintah Kota Pekanbaru telah membentuk tim terpadu dan melaksanakan Inventarisasi Data HGB diatas HPL guna *update* data dan menagih tunggakan retribusi tanah HPL guna menindaklanjuti LHP BPK RI sekaligus melaksanakan tanya jawab dengan para pemegang HPL mengenai kemungkinan penerapan Perwako Nomor 35 Tahun 2022. Akibat adanya penyesuaian tarif dari pola retribusi menjadi sewa, para pemegang HGB akan membayar kenaikan sebanyak hampir 1000 (seribu) persen dari tarif semula. Hal ini mengakibatkan adanya penolakan dari para pemegang HGB yang ditemui saat pelaksanaan survey lapangan. Oleh karena itu, pimpinan mereview kebijakan kembali dan menginstruksikan untuk melakukan penyempurnaan atas Perwako Nomor 35 Tahun 2022. Guna menyikapi hal dimaksud, BPKAD bersama Bagian Hukum Setda Kota Pekanbaru telah melakukan penyempurnaan regulasi / kebijakan tersebut. Draft Perwako tentang Pemanfaatan Tanah HPL Pemerintah Kota Pekanbaru telah dikaji bersama dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri pada tanggal 17 Januari 2024 di Jakarta dengan hasil rapat antara lain :
- a. Pemerintah Kota Pekanbaru agar berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan permasalahan terkait HPL atas pemanfaatan BMD di Kota Pekanbaru yang sudah teridentifikasi dan terinventarisir.
  - b. Disarankan agar dalam menyusun regulasi mengenai HPL atas Pemanfaatan BMD perlu menunggu Peraturan Menteri ATR/BPN sebagai amanah dari Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang menyatakan rumusan tarif dan uang wajib tahunan yang dikenakan oleh Pemegang Hak Pengelolaan ditetapkan oleh Menteri, Menteri adalah Menteri ATR/BPN.
  - c. Dalam peningkatan penerimaan Daerah Pemko Pekanbaru dapat menggunakan mekanisme Sewa BMD berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Terkait hasil rapat diatas, masih perlu didiskusikan lebih lanjut didalam internal Pemerintah Kota Pekanbaru dengan melibatkan seluruh Instansi terkait guna menyepakati kebijakan yang akan diambil kedepannya.



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

### BAB VII

#### PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, bahwa Gubernur/Walikota/Bupati bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah. Kemudian, khusus untuk pengelolaan keuangan daerah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan selanjutnya secara teknis Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah berupaya untuk mewujudkan amanah sebagaimana aturan perundang-undangan tersebut.

Untuk laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, Pemerintah Kota Pekanbaru menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan mengonsolidasikan laporan keuangan seluruh Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam satu set laporan keuangan, yang terdiri dari 1) Laporan Realisasi Anggaran, 2) Neraca, 3) Laporan Arus Kas, 4) Laporan Operasional, 5) Laporan Perubahan Ekuitas, 6) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan 7) Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam penyajian laporan keuangan tersebut Pemerintah Kota Pekanbaru berusaha memberikan informasi yang andal, transparan dan akuntabel.

Untuk memenuhi amanat peraturan tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 (*Unaudited*) yang disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penyusunan laporan keuangan melalui proses konversi, mengingat adanya perbedaan struktur APBD menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Konversi tidak terbatas pada format pelaporan, namun juga diupayakan agar definisi setiap pos laporan keuangan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan diterapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Pekanbaru bertekad untuk selalu meningkatkan kualitas dari sistem aplikasi pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pengelolaan persediaan dan pengelolaan pendapatan. Di samping itu, Pemerintah Kota Pekanbaru harus mensinergikan regulasi peraturan perundang-undangan, dan yang paling penting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

Prioritas pertama yang harus terus dibenahi Pemerintah Kota Pekanbaru adalah sumber daya manusia yang melaksanakan tugas fungsi pemerintahan terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah. Di samping membenahan sumber daya manusia, tidak kalah pentingnya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah dan penyempurnaan aturan-aturan yang disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih memadai dan berkualitas.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa berbagai aspek perlu dilakukan penyempurnaan dan perbaikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah. Pengelolaan piutang di OPD perlu lebih ditingkatkan dan dilakukan validasi terhadap data-data piutang pada OPD yang memiliki piutang. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi perhatian utama dengan melakukan pendataan, validasi data dan meningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.

Koordinasi secara berkesinambungan harus terus ditingkatkan, terutama koordinasi antara pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset demi mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas, transparan dan akuntabel guna mendukung dan mewujudkan Pekanbaru kota *bertuah*.

  
P.J. WALIKOTA PEKANBARU,  
  
MUFLIHUN